

Upaya Meringankan Beban dan Mensejahterakan Rakyat



Layanan Pendidikan Yang Murah dan Terjangkau

Anggaran pendidikan untuk meningkatkan kualitas SDM dan memberikan kesempatan yang sama kepada semua anak bangsa untuk mendapatkan layanan pendidikan dengan biaya yang terjangkau.

- Melanjutkan program BOS untuk meringankan beban biaya pendidikan untuk menuntaskan wajib belajar 9 tahun bagi sekitar 45,0 juta siswa SD/MI/Salafiyah Ula dan SMP/MTs/Salafiyah Wustha;
- Memulai pelaksanaan Pendidikan Menengah Universal, antara lain melalui penyediaan BOS pendidikan menengah bagi sekitar 8,9 juta siswa SMA/SMK/MA, pembangunan 224 SMA/SMK/MA dengan anggaran sekitar 6.900 RKB untuk SMA/SMK/MA; dan pemberian beasiswa untuk mahasiswa dengan anggaran sekitar 9,4 juta



Besar Janji daripada Bukti

Kebijakan dan Praktik Pendidikan Indonesia
di Era Transisi Demokrasi



DOMPET
DHUafa
MAKMAL PENDIDIKAN

Upaya Meringankan Beban dan Mensejahterakan Rakyat



Layanan Pendidikan Yang Murah dan Terjangkau

Anggaran pendidikan untuk meningkatkan kualitas SDM dan memberikan kesempatan yang sama kepada semua anak-anak di Indonesia. Anggaran pendidikan untuk layanan pendidikan dengan kualitas yang tinggi. Anggaran pendidikan untuk meningkatkan kualitas SDM dan memberikan kesempatan yang sama kepada semua anak-anak di Indonesia.

- Melanjutkan program BOS untuk meringankan beban biaya pendidikan untuk menuntaskan wajib belajar 9 tahun bagi sekitar 45,0 juta siswa SD/MI/Salafiyah Ula dan SMP/MTs/Salafiyah Wustha;
- Memulai pelaksanaan Pendidikan Menengah Universal, antara lain melalui penyediaan BOS pendidikan menengah bagi sekitar 8,9 juta siswa SMA/SMK/MA, pembangunan 224 gedung sekolah senilai sekitar 6.900 RKB untuk SMA/SMK/MA; dan pemberian beasiswa untuk sekitar 9,4 juta mahasiswa.



Besar Janji daripada Bukti

Purwo Udiutomo, dkk.

**Besar Janji daripada Bukti; Kebijakan dan Praktik Pendidikan
Indonesia di Era Transisi Demokrasi**

©DD, 2013

ISBN: 978-602-7807-18-1

Penulis: Purwo Udiutomo, dkk.

Penyunting: Yusuf Maulana

Pemeriksa Aksara: Ibnu Sobari

Penata Letak: Aryamuslim

Perwajahan Sampul: Romadhon Hanafi

Foto-foto dalam buku ini dokumentasi program Makmal Pendidikan dan jejaring Dompot Dhuafa lainnya, kecuali yang disebutkan khusus dengan pencantuman sumber asal.

Hak Cipta dilindungi undang-undang

All Rights reserve

Cetakan I, September 2013

Diterbitkan oleh

Dompot Dhuafa Makmal Pendidikan

Jl. Raya Parung Km. 42 Ds. Jampang Kec. Kemang

Kab. Bogor, Jawa Barat 16310

Telp. (0251) 8610817, 8610818, 8612044

Faks. (0251) 8615016

Website: www.makmalpendidikan.net

Twitter: @makmalDD



Sambutan Presiden Direktur Dompot Dhuafa

Alhamdulillah, senang rasanya bisa menghadirkan buku yang mencoba memotret sekaligus mendiskusikan kembali berbagai kebijakan dan praktik pendidikan di Indonesia. Buku ini lahir dari kecintaan akan perkembangan pendidikan di Indonesia dan keinginan untuk terus memperbaiki kualitas pendidikan bangsa. Setajam apa pun paparan dan analisis yang melekat di dalamnya, semuanya bermuara kepada upaya untuk melakukan perbaikan terhadap sistem pendidikan di Indonesia.

Pendidikan adalah mata rantai terpenting dalam proses alih sejarah bangsa menuju masa depan. Keseluruhan sistem pendidikan akan sangat menentukan keberhasilan pendidikan bisa diraih. Di dalamnya terkandung bagaimana visi dan tujuan pendidikan ditetapkan, bagaimana kebijakan yang dibuat untuk mendukung pencapaian, dan bagaimana implementasinya di lapangan. Sesuatu yang begitu indah dalam narasi visi dan tujuan, sering kali tidak didukung oleh kebijakan yang seharusnya, dan tidak terwujud dalam praktik implementasinya.

Mengulas kembali semua unsur penting pelaksanaan pendidikan, dengan menyajikan data dan fakta yang sebenarnya akan sangat membantu untuk memeriksa kelemahan yang terjadi. Untuk selanjutnya temuan kelemahan itu akan dicarikan solusi dan alternatif gagasan penyelesaiannya. Tentu saja, semua alternatif penyelesaian itu pada akhirnya juga harus diimplementasikan kembali secara nyata dengan panduan pelaksanaan yang jelas disertai pengawalan serta pengendalian yang tepat.



Buku ini kami dedikasikan untuk membantu perbaikan pendidikan di Indonesia. Di dalamnya sarat akan informasi, gagasan, dan tawaran solusi untuk pendidikan di Indonesia. Buku ini hadir berkat dukungan banyak pihak yang sangat perhatian dalam membantu perbaikan dan kemajuan dunia pendidikan di Indonesia. Terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada semua pihak yang telah mendukung hadirnya buku ini.

Kami berharap buku ini bisa menjadi salah satu buku yang menawarkan wacana baru sekaligus solusi untuk perbaikan pendidikan di Indonesia. Buku ini juga kami harapkan menjadi sumbangan literatur bagi dunia pendidikan di Indonesia. Semoga buku ini membawa banyak manfaat bagi bangsa Indonesia.

Jakarta, September 2013

Ahmad Juwaini



Prakata

Direktur Makmal Pendidikan Dompot Dhuafa

Kemajuan suatu bangsa ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia. Pendidikan memiliki peranan penting untuk mencetak sumber daya manusia yang berkualitas. Sejak bangsa ini memerdekakan diri, sudah disadari bahwa pendidikan harus menjadi pilar terpenting untuk mewujudkan bangsa yang maju dan sejahtera. Hal ini tertuang dalam mandat pembukaan UUD 1945 yang berbunyi “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.” Pasal 31 ayat 1 UUD 1945 menguatkan mandat pembukaan melalui isinya “setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.”

Namun sayangnya, mendekati tujuh dekade merdeka pendidikan di Indonesia masih terus dihadapkan berbagai problematika yang tak kunjung usai. Problematika tersebut antara lain ketidakmerataan, baik akses dan infrastruktur maupun kualitas pendidikan. Ada guyonan yang cukup menggelitik tentang hal ini bahwa kebijakan berganti-ganti tapi masalahnya masih selalu sama.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) sebenarnya tidak menutup mata akan permasalahan yang ada. Melalui visi dan misinya Kemdikbud berupaya untuk menyelesaikan problematika dan tantangan pendidikan nasional. Visi dan misi itu kemudian tertuang dalam banyak program.



Program-program ini tidak ubahnya janji pemerintah untuk menunaikan amanat konstitusi. Janji-janji pemerintah itu tidak semudah diucapkan ketika di lapangan. Bukti-bukti kerap memperlihatkan keadaan sebaliknya. Ada ketidaksinkronan antara strategi capaian visi Kemdikbud dan fakta di lapangan sebagaimana tertuang dalam penelitian Makmal Pendidikan Dompot Dhuafa di sekolah-sekolah pendampingan di 22 provinsi. Namun, apakah keadaan ini tidak bisa berubah sama sekali?

Buku *Besar Janji daripada Bukti* ini lahir sebagai bentuk keresahan karena ketidaksinkronan tersebut, sekaligus juga sebagai bentuk optimisme bahwa permasalahan pendidikan yang dihadapi oleh bangsa ini masih bisa diselesaikan. Oleh sebab itu, buku ini tidak hanya mengungkapkan data dan fakta, namun juga memberikan langkah-langkah perbaikan yang bisa dilakukan bersama-sama dan bersinergi.

Harapan kami, semoga buku ini dapat memberikan inspirasi dan referensi bagi penggiat pendidikan, praktisi pendidikan, pemangku kebijakan, dan masyarakat umum untuk melihat lebih luas wajah pendidikan Indonesia yang membutuhkan kerja sama dan sinergi dari berbagai pihak. Bangunlah jiwanya, bangunlah bangsa kita, bangkit pendidikan Indonesia!

Bogor, September 2013

Rina Fatimah



Daftar Isi

Sambutan Presiden Direktur Dompot Dhuafa	iii
Prakata Direktur Makmal Pendidikan Dompot Dhuafa	v
Daftar Isi.....	viii
Daftar Tabel	xi
Pendahuluan: Menagih Janji Menjadi Bukti.....	1
Bagian Pertama: Menelisik Wajah Pendidikan Indonesia	
Bab 1: Dua Muka Kebijakan Pendidikan Indonesia	8
Kebijakan Peduli Pendidikan	11
Ironi Pemerataan Pendidikan.....	15
Beranda yang Tidak Terawat	19
Indonesia Timur juga Indonesia	22
Wajah Ketidakadilan.....	25
Kebijakan yang Mengusik Keadilan.....	28
Kebijakan yang Berkeadilan.....	32
Bab 2: Lubang Menganga Alokasi Anggaran Pendidikan	39
Alokasi APBN.....	40
Peruntukan Anggaran Pendidikan	44
Pungutan Kian Liar	46
Bantuan Operasional Sekolah.....	48
Alokasi Dana BOS.....	48
BOS di Lingkungan Kementerian Agama.....	51
Keterlambatan Penyaluran BOS.....	54



Penyelewengan BOS.....	55
Bantuan Operasional Sekolah Menengah	57
Bantuan Siswa Miskin	59
Bantuan Operasional Perguruan Tinggi.....	62
Melawan Korupsi Anggaran Pendidikan	63
Bab 3: Pendidikan yang Dirundung Putus Sekolah	67
Kualitas Pendidikan vs Putus Sekolah.....	69
Putus Sekolah yang Membuat Resah	71
Buta Aksara Membawa Duka.....	74
Putus Sekolah dan Kemiskinan	76
Kompleksitas Penyebab Putus Sekolah.....	80
Mengatasi Masalah dengan Masalah?.....	85
Mengabaikan Papua?.....	91
Menuju Pendidikan Berkualitas.....	94
Bab 4: Menegakkan Kembali Sekolah yang (Hampir) Roboh	101
Problematika Mutu Pendidikan.....	104
Bangunan nan Renta.....	106
Perjalanan Sekolah Rusak.....	107
Kerusakan Berkesinambungan	108
Membangun Bangsa Beradab	111
Capaian Target.....	113
Memperbaiki Total	118
Totalitas Memperbaiki	120
Sekolah Baru Harapan Baru.....	122
Bagian Kedua: Merevitalisasi Fondasi Pendidikan	
Bab 5: Reformasi Sekolah Dasar	126
Reformasi Sekolah Dasar	129
Konsep Sekolah Dasar Masa Depan.....	134
Pemetaan Sekolah Dasar	137
Efektivitas Manajemen Sekolah Dasar.....	139
Perencanaan Strategis.....	142
Mereformasi Visi Sekolah Dasar	145
Bab 6: Mengubah Paradigma Kepemimpinan Sekolah Dasar	148



Kehilangan Orientasi	149
Kepemimpinan untuk Sekolah Dasar.....	153
Kompetensi Kepemimpinan Sekolah Dasar	158
Pemetaan Efektivitas Kepemimpinan SD.....	162
Merevitalisasi Kepemimpinan Sekolah Dasar.....	164
Bab 7: Kurikulum Khas, dan Budaya Sekolah Dasar.....	169
Mengusahakan Sekolah yang 'Khas'	171
Kurikulum yang Khas, Mungkinkah?.....	176
Tata Kelola Kurikulum Kita.....	178
Mengembangkan Budaya Sekolah.....	180
Disiplin dan Penegakan Nilai-Nilai di Sekolah	182
Bersih Hati, Bersih Sekolah	183
Visi Sekolah Indonesia 2020.....	185
Bab 8: Agar Sekolah Dasar Tak Lagi Salah Ajar	188
Wajah Pembelajaran di Sekolah Dasar.....	190
Sekolah Dasar, Sekolah Literasi	194
Kompetensi Pendidik Sekolah Dasar.....	196
Kurikulum dan Kematangan Sekolah Indonesia.....	198
Pemetaan Kualitas Pembelajaran SD	200
Kualitas Pembelajaran.....	202
Alternatif Akselerasi untuk Sekolah Dasar	205
Penutup.....	211
Kuadran Nestapa dalam Pendidikan Kita	212
Sumber Acuan.....	220
Apendiks.....	231
Makmal Pendidikan Criteria for School Performances	234
Kesimpulan dan Rekomendasi Diskusi Produktif "Menghapus Kesenjangan Pendidikan"	236
Profil Makmal Pendidikan Dompot Dhuafa	238
Profil Penulis Buku.....	241





X | Besar Janji daripada Bukti

Daftar Tabel

Tabel 1: Angka Partisipasi Sekolah 2003-2012	14
Tabel 2: Anggaran Pendidikan 2010-2013	41
Tabel 3: Distribusi Tambahan Dana dari aturan 20% Berdasarkan Program Tahun 2009	42
Tabel 4: Jumlah Alokasi BOS Tahun 2011-2013.....	49
Tabel 5: Kuota Penerima Bantuan Siswa Miskin.....	60
Tabel 6: Angka Partisipasi Sekolah SD, SMP, SMA, dan PT di Indonesia Tahun 2012	73
Tabel 7: Angka Buta Aksara di Indonesia 2003-2012.....	74
Tabel 8: Persentase Peningkatan Anggaran Pendidikan, APS, dan Angka Melek Huruf.....	86
Tabel 9: Peringkat APS, Buta Huruf, Persentase Penduduk Miskin Provinsi di Indonesia 2012.....	88
Tabel 10: Angka Partisipasi Sekolah Provinsi Papua 2003-2012	92
Tabel 11: Kerusakan Ruang Kelas dalam Pelbagai Jenjang.....	108
Tabel 12: Target Jumlah Kelas dan Anggaran Rehabilitasi Sekolah	111
Tabel 13: Sebaran Asal dan Status Akreditasi Sekolah yang Disurvei.....	137
Tabel 14: Persentase Sebaran Sekolah Berdasarkan Akreditasi	138
Tabel 15: Rekapitulasi Penilaian Efektivitas Manajemen Sekolah.....	140
Tabel 16: Efektivitas Manajemen Sekolah.....	141
Tabel 17: Tingkat Pencapaian Perencanaan Strategis	142
Tabel 18: Tingkat Pencapaian Efektivitas Kepemimpinan.....	163
Tabel 19: Tingkat Pengembangan Budaya Sekolah	181



Tabel 20: Kriteria dan indikator konsep pembelajaran aktif	194
Tabel 21: Indikator Strategi Pembelajaran Efektif.....	201
Tabel 22: Efektivitas Kualitas Pembelajaran.....	202
Tabel 23: Pengembangan Literasi	203
Tabel 24: Pencapaian Strategi Pembelajaran	204
Tabel 25: Kurikulum Terpadu	205



Pendahuluan

Menagih Janji Menjadi Bukti

Indonesia negara yang terbentang luas dengan berbagai keberagaman, yang tentunya menjadi tantangan untuk mewujudkan kualitas pendidikan merata dan berkeadilan. Indonesia juga negara kaya, kaya sumber daya alam, berlimpah sumber daya manusia, Pendapatan Domestik Bruto (PDB) pun masuk dalam *Top 20* di dunia. Anggaran pendidikan terbilang besar, konstitusi pun menjanjikan bahwa pendidikan merupakan hak bagi seluruh warga negara.

Indonesia bahkan negara besar, yang tidak pernah kekurangan orang pintar. Banyak orang cerdas dari berbagai penjuru tanah air yang memiliki gagasan besar. Alhasil, tidak sedikit rencana besar yang menunggu untuk direalisasikan, tidak terkecuali janji untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang terpuruk.

Sayangnya, dunia pendidikan di Indonesia besar dalam berwacana, tanpa kerja nyata. Cita-cita bangsa untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sering menjadi slogan semata. Dunia pendidikan di Indonesia kaya dengan janji. Nyatanya, masih banyak anak miskin yang tidak dapat bersekolah, masih banyak warga negara yang sulit untuk mengakses layanan pendidikan. Indonesia satu hanya menjadi romantika perjuangan di masa lalu. Ketimpangan masih jelas terjadi, kesenjangan masih tampak mewarnai. Antara perkotaan dan pedesaan, antara negeri dan swasta, antara pusat dan daerah, antara teori dan praktik, antara perencanaan dan pelaksanaan, antara janji dan bukti.



Buku ini mencoba memotret kondisi aktual dunia pendidikan Indonesia, baik skala makro maupun mikro, termasuk perubahan dan gagasan perbaikan yang sudah ada. Dunia pendidikan Indonesia yang ternyata kaya akan wacana dan gagasan brilian, semoga saja segera beranjak ke tataran aksi nyata dan pembuktian. Ringkas kata, berupaya memaparkan kebijakan dan praktik pendidikan di Indonesia di era transisi demokrasi yang sayangnya masih diselimuti berbagai impian yang belum terwujud.

Buku ini terdiri dari dua bagian yang menggambarkan sisi makro dan mikro, serta kebijakan dan praktik pendidikan di Indonesia; setiap bagian terdiri dari empat bab. Bagian pertama akan memotret wajah pendidikan Indonesia dengan berbagai kelebihan dan kekurangannya. Peningkatan kepedulian terhadap pendidikan dari berbagai pihak ternyata belum cukup untuk menghapus kesenjangan dalam dunia pendidikan. Berbagai kebijakan dan program pro-pendidikan yang sudah dilakukan belum cukup untuk mengatasi permasalahan pendidikan yang memang kompleks.

Pendekatan yang dilakukan dalam bagian pertama ini adalah studi literatur, data yang diperoleh dari pemberitaan dan opini media ditambah berbagai data dari lembaga terpercaya akan coba dikumpulkan, dipaparkan, dan dianalisis menjadi sebuah kajian kritis yang disertai pula dengan rekomendasi solusi atas permasalahan yang dikemukakan.

Bab 1 akan memaparkan mengenai kebijakan pendidikan nasional yang di satu sisi menunjukkan tren positif, namun di sisi lain tampak tidak serius dalam menuntaskan berbagai problematika yang menjerat dunia pendidikan Indonesia. Reformasi pendidikan perlu dilakukan untuk menghapus kesenjangan dan mewujudkan pendidikan berkualitas yang berkeadilan.

Bab 2 akan mengungkapkan beberapa ‘lubang’ dalam pengelolaan anggaran pendidikan di Indonesia. Menelaah alokasi, program bantuan langsung hingga korupsi yang masih mewarnai dunia pendidikan Indonesia.

Permasalahan putus sekolah dan buta huruf yang masih menyelimuti dunia pendidikan nasional akan dikupas tuntas di Bab 3. Kesenjangan



kualitas pendidikan di Indonesia akan semakin tergambar jelas. Sementara Bab 4 akan menampilkan wajah bangunan dan infrastruktur pendidikan di Indonesia. Berbagai potret bangunan sekolah yang tidak layak kian menegaskan betapa banyak pekerjaan perbaikan pendidikan yang tidak pernah tuntas jika diselesaikan setengah hati.

Bagian kedua dalam buku ini akan memotret wajah sekolah dasar di Indonesia sebagai unit satuan pendidikan yang menjadi fondasi bagi pengembangan pendidikan Indonesia. Kondisi dan dinamika di sekolah dasar memang sifatnya mikro, namun dapat menggambarkan 'kegaduhan' di tingkat skala makro. Evaluasi terhadap *strategic management* pendidikan, kepemimpinan, dan budaya sekolah hingga implementasi kurikulum pendidikan sedikit banyak merepresentasikan permasalahan dunia pendidikan Indonesia. Di sanalah antara kebijakan pendidikan dengan praktik di lapangan memiliki keterkaitan, perbaikan dan perubahan di level pusat ataupun di tingkat satuan pendidikan akan saling berhubungan.

Pendekatan yang dilakukan dalam bagian kedua ini adalah penelitian lapangan dengan metode deskriptif kualitatif. Data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara, serta data sekunder dari studi literatur akan dipaparkan secara kualitatif. Sampel penelitian diambil dari 22 sekolah dasar di 21 Kota/ Kabupaten di 14 provinsi. Pengolahan dan analisis data menggunakan statistik deskriptif. Rekomendasi solusi terhadap permasalahan terintegrasi dalam pembahasan.

Bab 5 akan memaparkan mengenai evaluasi terhadap efektivitas manajemen sekolah dasar. Perlu pembenahan dalam perencanaan strategis sekolah sebagai fondasi penting untuk reformasi sekolah. Visi misi tidak seharusnya hanya menjadi formalitas persyaratan administratif sekolah, sekolah harus memiliki cita dan impian serta tahapan dan program yang jelas untuk mencapainya.

Bab 6 akan mengungkapkan faktor penting dalam perbaikan pendidikan, baik skala mikro maupun makro, yaitu terkait kepemimpinan. Tidak dapat disangkal bahwa dalam level apa pun pemimpin memegang peran vital dalam menentukan wajah organisasi yang dipimpinnya.

Evaluasi terhadap kurikulum kekhasan dan budaya sekolah akan dibahas dalam Bab 7. Kearifan lokal memang harus diperhatikan sehingga



bukan sekadar tidak menjadi penghambat kemajuan, bahkan dapat menjadi *competitive advantage* (keunggulan kompetitif) bagi sekolah.

Bab 8 akan lebih fokus mengevaluasi kualitas pembelajaran, mulai dari kompetensi literasi, strategi pembelajaran, hingga implementasi kurikulum. Kesenjangan kualitas yang terlihat menunjukkan betapa dibutuhkannya perbaikan pendidikan Indonesia dimulai dari perbaikan pembelajaran di setiap kelas.

Kedua bagian buku ini sejatinya bukan dua bagian yang terpisahkan. Kesenjangan antara ide kebijakan pendidikan nasional dan implementasi di tingkat satuan pendidikan jelas menunjukkan adanya permasalahan, mulai dari hal yang sifatnya strategis dan filosofis hingga masalah yang sifatnya teknis bahkan kasuistik. Distorsi dalam sosialisasi dan penurunan kebijakan dan program pendidikan nasional juga menjadi catatan tersendiri. Praktik memang tidak selamanya sama dengan teori. Pelaksanaan memang tidak semudah merencanakan dan menginstruksikan.

Hadirnya buku ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi untuk mengurai kompleksitas permasalahan pendidikan di tanah air kita. Pemahaman yang utuh atas realita yang terjadi di lapangan akan menguatkan relevansi kebijakan pendidikan yang akan diambil. Kebijakan pendidikan pun tidak lagi di menara gading. Saluran sosialisasi kebijakan dan program pendidikan juga perlu dibuka lebih luas dan diperbanyak sehingga kepemilikan bersama terhadap kepentingan kemajuan pendidikan nasional dapat terbangun.

Buku ini memang akan menggambarkan betapa besarnya peran pemerintah dalam menyelesaikan berbagai permasalahan pendidikan di Indonesia. Peran yang hanya dapat diemban oleh pemegang kebijakan pendidikan nasional. Namun, peran-peran kecil di lingkup satuan pendidikan tidak lagi dapat dianggap remeh. Perbaikan pengelolaan pendidikan dimulai dari perbaikan kualitas pembelajaran di kelas-kelas, diawali dari perbaikan guru dan kepala sekolah. Perbaikan di level sekolah pada area yang meluas akan memberi kontribusi positif yang signifikan untuk perbaikan pendidikan di Indonesia, sebagaimana ekonomi mikro yang menopang ekonomi nasional ketika terjadi krisis ekonomi makro.



Hadirnya buku ini diikhtiarkan untuk memberikan manfaat bagi para pemangku kepentingan, mulai dari pihak pemegang kebijakan, baik di pusat hingga satuan pendidikan, para pakar dan pemerhati pendidikan, lembaga swadaya masyarakat, dan perusahaan yang peduli pendidikan serta segenap elemen pendidikan. Permasalahan pendidikan teramat kompleks untuk diurai sendirian, perlu sinergi produktif dari seluruh *stakeholder* untuk memperbaiki wajah pendidikan Indonesia. Dengan demikian, buku ini berandil sebagai karya yang menginspirasi untuk berbuat; bukan lagi banyak mengumbar janji, melainkan melakukan perbaikan-perbaikan kecil yang akan terakumulasi sebagai bukti demi terwujudnya cita mulia pendidikan nasional. []





Bagian Pertama
**Menelisik Wajah Pendidikan
Indonesia**



Bab 1

Dua Muka Kebijakan Pendidikan Indonesia



Sumber: Dokumen Makmal Pendidikan

Kabupaten Kapuas Hulu adalah salah satu kabupaten di Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan Malaysia di tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Badau, Empana, dan Puring Kencana. Hanya ada satu SMA dari tiga kecamatan perbatasan ini yaitu di Badau. Kesenjangan dan gejolak sosial nyata terjadi, kesejahteraan guru di Indonesia dan Malaysia sangat timpang. Kesempatan sertifikasi hanya dijatah 20 persen dari jumlah guru sehingga tunjangan profesi tidak merata. Fasilitas sekolah dan buku sangat minim, bahkan ada sekolah yang harus meminta listrik dari Malaysia.¹

1 *Kompas*, 25 November 2011.



Sementara itu, sekitar 30 persen anak usia sekolah di Kecamatan Puring Kencana memilih bersekolah di Malaysia. Persentase ini tentu akan semakin besar di desa paling ujung Indonesia yang bahkan warganya menolak untuk didata. Di negeri jiran, jika ada tiga anak dalam satu keluarga, semuanya diberi beasiswa dan satu di antaranya mendapat laptop satu unit. Mereka tinggal di asrama dengan fasilitas serba gratis, termasuk makan siang bagi orangtua yang berkunjung. Lain halnya dengan sekolah perbatasan yang masuk wilayah Indonesia, fasilitas sekolah terbatas, guru pergi bisa sampai berbulan-bulan, bantuan alat dari pemerintah sudah rusak sebelum dipakai, buku paket belum dipakai sudah berganti kurikulum, dan teknologi informasi sangat jauh tertinggal.²

Potret dunia pendidikan di dalam negeri di atas menjelaskan bahwa pemenuhan salah satu aspek hak asasi manusia belumlah merata. Setiap anak bangsa di negeri ini berhak untuk memperoleh pendidikan. Hak asasi manusia untuk memperoleh pendidikan sudah tertuang dalam The Universal Declaration of Human Rights, “*Everyone has the right to education. Education shall be free, at least in the elementary and fundamental stage. Elementary education shall be compulsory. Technical and professional education shall be made generally available and high education shall be equally accessible to all on the basis of merit.*” Kemudian dalam UUD 1945 disebutkan bahwa “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan” (Pasal 31 ayat 1), dan “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia” (Pasal 28C ayat 1 Amandemen Kedua UUD 1945).

Tidak hanya itu, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) selain mengamanatkan 20 persen anggaran untuk pendidikan³ juga menegaskan dalam pasal 5 bahwa: (1) setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan bermutu; (2) warga negara yang memiliki kelainan fisik,

2 *The Jakarta Post*, 22 Februari 2012.

3 UU Sisdiknas Pasal 49 ayat (1) berbunyi, “Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).”



emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus; (3) warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus; (4) warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus; (5) setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat.

Dalam bagian penjelasan UU Sisdiknas juga termuat visi dan misi pendidikan nasional yang merupakan bagian dari strategi pembaruan sistem pendidikan di Indonesia. Pendidikan nasional mempunyai visi terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Dengan visi pendidikan tersebut, pendidikan nasional mempunyai misi sebagai berikut:

1. mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia;
2. membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar;
3. meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral;
4. meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar nasional dan global;
5. memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan RI.

Visi dan misi pendidikan nasional ini kemudian menjwai visi dan misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) Republik Indonesia. Visi Kemdikbud adalah terselenggaranya layanan prima pendidikan dan kebudayaan nasional untuk membentuk insan Indonesia yang cerdas dan berkarakter kuat. Untuk mencapai visi tersebut, misi



yang dijalankan Kemdikbud adalah meningkatkan ketersediaan layanan pendidikan dan kebudayaan; memperluas keterjangkauan layanan pendidikan dan kebudayaan; meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan kebudayaan; mewujudkan kesetaraan dalam memperoleh layanan pendidikan dan kebudayaan; menjamin kepastian/keterjaminan memperoleh layanan pendidikan; melestarikan dan memperkuat Bahasa dan Kebudayaan Indonesia.

Berkaca pada visi dan misi pendidikan nasional dan Kemdikbud, menjadi sebuah tanda tanya besar melihat masih adanya kejadian seperti di Kapuas Hulu. Tidak hanya di Kapuas Hulu, di banyak tempat yang bahkan dekat dengan Ibu Kota negeri ini pun masih dijumpai potret buram pelaksanaan pendidikan.

Kebijakan Peduli Pendidikan

Secara konstitusional, pendidikan bangsa Indonesia sudah terbilang ‘aman’. Tidak ada satu pun dasar hukum yang mengerdilkan pentingnya pendidikan dan hendak menghambat berkembangnya pendidikan di Indonesia. Lahirnya UU Sisdiknas memberi ruang yang luar biasa bagi pengembangan pendidikan di Indonesia. Bagaimana tidak, tuntutan konstitusi untuk mengalokasikan 20 persen APBN/APBD⁴ untuk pendidikan jelas memberi harapan akan hadirnya kualitas pendidikan Indonesia yang lebih baik. Berbagai program pendidikan pun digulirkan, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, untuk meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia.

Pendidikan juga menjadi salah satu dari sebelas prioritas nasional yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Alokasi anggaran pendidikan yang telah ditetapkan pemerintah pada Desember 2012 sebesar Rp 336,8 triliun untuk 2013 jelas bukan jumlah kecil.⁵ Dalam

4 Dalam amandemen UUD 1945 pasal 31 ayat (4) tercantum, “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.”

5 Dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2013 tentang APBN-P 2013 yang disahkan pada 18 Juni 2013 anggaran pendidikan mengalami kenaikan menjadi Rp 345,335 triliun. Anggaran yang meningkat terkait penyesuaian harga BBM dalam Program Percepatan dan Perluasan Perlindungan Sosial (P4S) adalah berupa Program Bantuan Siswa Miskin (BSM) dan Beasiswa Bidik-



RKP juga dijelaskan bahwa tujuan dan visi pembangunan pendidikan adalah menuntaskan program Wajib Belajar 9 Tahun bagi sekitar 45 juta siswa SD dan SMP, meningkatkan kualitas pendidikan, serta jaminan atas keberlangsungan program pendidikan bagi generasi selanjutnya. Oleh karena itu, dalam rincian APBN 2013 pemerintah telah mengalokasikan anggaran tersebut di antaranya ke dalam sasaran pembangunan berikut ini:

- Melanjutkan pelaksanaan sertifikasi guru bagi lebih dari 325 guru di sekolah/madrasah. Pelaksanaan sertifikasi akan didahului dengan Uji Kompetensi Guru yang belum bersertifikasi, untuk memastikan bahwa mereka adalah guru dengan kompetensi profesional dan pedagogik yang memadai. Disediakan juga Dana Tunjangan Profesi Guru PNS Daerah sebesar Rp 43,1 triliun dengan tujuan untuk peningkatan kualitas pendidikan.
- Melanjutkan pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi 54,6 juta siswa, masing-masing 45 juta siswa setingkat SD/MI/Salafiyah Ula dan SMP/MTs/Salafiyah Wustha, serta untuk 9,6 juta siswa SMA/SMK/MA. Dana yang dialokasikan sekitar Rp 23,4 triliun.
- Memulai pelaksanaan Pendidikan Menengah Universal (PMU) yang diharapkan dapat meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK)⁶ jenjang menengah, memperkecil disparitas antardaerah, dan memperkuat pelayanan pendidikan vokasi. Dana yang dialokasikan sebesar Rp 11,4 triliun.
- Melanjutkan penyediaan Bantuan Siswa Miskin (BSM) bagi sekitar 14,3 juta siswa/mahasiswa, dan memberikan beasiswa prestasi bagi sekitar 220 ribu siswa/mahasiswa. Dana yang dialokasikan sekitar Rp 4 triliun.
- Membangun 216 Unit Sekolah Baru (USB), dan lebih dari 4.500 Ruang Kelas Baru (RKB) SMA/SMK/SMLB, serta memulai rehabilitasi sekitar 23.000 ruang kelas SMA/SMK yang rusak berat, dan sebanyak 30.350

misi sebesar Rp 7,5 triliun.

6 Merujuk pada definisi Badan Pusat Statistik dan Millennium Development Goals (MDGs), Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah perbandingan antara jumlah murid pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase.



ruang kelas SD/SMP yang rusak sedang. Dana yang dialokasikan sekitar Rp 1,17 triliun.

- Mengalokasikan dana sebesar Rp 162 miliar untuk membangun teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran berbasis elektronik (*e-learning*) di 23 ribu sekolah di seluruh provinsi di Indonesia.

Program pro pendidikan buah kebijakan pemerintah memang lebih banyak berupa bantuan langsung yang bersifat *hit and run* dan tidak menjamin adanya kontinuitas. Sebagai contoh, bantuan operasional pendidikan baik ke sekolah maupun ke siswa, program Ruang Kelas Baru (RKB), dan berbagai beasiswa mulai dari jutaan siswa SD hingga puluhan ribu mahasiswa perguruan tinggi. Di sisi lain, sebagian program sudah berorientasi jangka panjang, misalnya pembangunan teknologi informasi.

Banyak program pendidikan yang digulirkan pemerintah masih mengedepankan besaran kuantitas sebagai ukuran keberhasilan, misalnya banyaknya siswa dan mahasiswa yang memperoleh beasiswa, banyaknya sekolah yang mendapat bantuan operasional, atau banyaknya guru yang memperoleh tunjangan profesi. Terlepas dari evaluasi akan kualitas, semua program pendidikan tersebut tetaplah membantu dan memberi sumbangsih bagi kemajuan pendidikan masyarakat.

Untuk tenaga kependidikan, kesejahteraan guru juga mendapat angin segar dengan adanya tunjangan sertifikasi sehingga mengesankan bukan zamannya lagi ada “Guru Oemar Bakri”, pendidik yang gajinya jauh dari mencukupi. Sebagian besar anggaran pendidikan memang dialokasikan untuk gaji dan tunjangan SDM.⁷ Berbagai pelatihan tenaga kependidikan digelar, profesi guru pun kian diminati. Pendidikan karakter dan pembelajaran tematik diperkenalkan. Perubahan kurikulum pun dilakukan dengan membawa semangat perbaikan pendidikan.

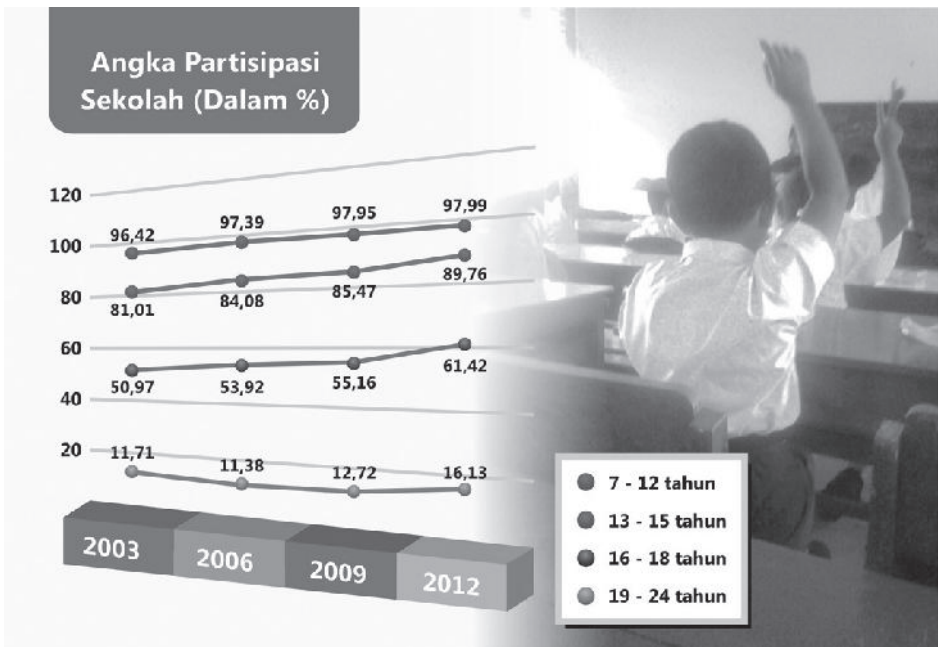
Beberapa tahun terakhir, geliat kepedulian untuk memperbaiki pendidikan juga merambah ke masyarakat yang lebih luas. Berbagai yayasan, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan lembaga filantropi lainnya kian

7 Data diperoleh dari laporan Tinjauan Belanja Publik Sektor Pendidikan (*Education Public Expenditure Review*) yang dilansir *World Bank*. Anggaran pendidikan akan dibahas pada Bab 2.



menaruh perhatian pada pemberdayaan pendidikan yang sifatnya lebih strategis karena pendidikan merupakan investasi masa depan. Berbagai organisasi dan gerakan di bidang pendidikan bermunculan. Tanggung jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) juga mulai menggeser fokus mereka dari pemberian yang sifatnya bantuan langsung (*charity*) terkait kesejahteraan masyarakat menjadi pemberdayaan yang sifatnya lebih *sustainable* dalam bentuk investasi sumber daya manusia.

Hasil program pendidikan juga dapat dilihat dari meningkatnya angka melek huruf di Indonesia. Saat Republik Indonesia berdiri, angka buta huruf masih di kisaran 95 persen. Lima belas tahun kemudian, pada 1960, angka tersebut ‘tinggal’ menyisakan sekitar 40 persen orang dewasa yang buta huruf. Setelah 66 tahun merdeka, angka buta huruf tersebut dapat ditekan hingga di bawah 8 persen. Persentase buta huruf penduduk Indonesia pada 2012 dengan usia di atas 15 tahun ‘hanya’ 6,90 persen.⁸ Mengingat sebagian besar penduduk buta huruf adalah mereka yang berusia di atas 45 tahun, dapat dikatakan bahwa capaian pemberantasan buta huruf ini diprediksi akan terus membaik setiap tahunnya.



Sumber: diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS 2003-2012.

8 Data diambil dari laporan Badan Pusat Statistik 2013. Angka buta huruf akan dibahas pada Bab 3.

Selain angka melek huruf, angka partisipasi pendidikan di Indonesia dari tahun ke tahun juga mengalami tren peningkatan seperti terlihat pada grafik di atas. Peningkatan angka partisipasi ini secara umum terjadi di semua kelompok umur dan di semua jenjang pendidikan.⁹ Walaupun angka partisipasi pendidikan menengah atas dan pendidikan tinggi masih terbilang rendah, namun data tersebut juga menunjukkan tren positif peningkatan dari jenjang pendidikan ini.

Ironi Pemerataan Pendidikan



Foto: <http://www.thesun.co.uk/>

“Is this the most dangerous school run in the world?” Demikian judul berita di salah satu surat kabar Inggris terkemuka dengan menampilkan foto perjuangan siswa meniti jembatan rusak di Padang Pariaman, Sumatera Barat, untuk dapat bersekolah.¹⁰ Bukan kali pertama beratnya perjalanan para pelajar Indonesia untuk bersekolah menjadi keprihatinan media mancanegara. Pada awal 2012, surat kabar *Daily Mail* bahkan menyamakan aksi beberapa pelajar SD dan SMP di kampung Sanghiang Tanjung, Lebak, Banten yang menyeberangi jembatan rusak Sungai Ciberang dengan salah satu adegan di film *Indiana Jones*.

9 Data diolah dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS 2003-2012. Angka Partisipasi Pendidikan akan dibahas pada Bab 3.

10 *The Sun*, 22 April 2013.



Kita mungkin mengelus dada sekaligus malu melihat keseharian di dalam negeri dijadikan objek pembicaraan di luar sana. Akan tetapi, itu merupakan konsekuensi atas tidak meratanya akses, infrastruktur, dan kualitas pendidikan kita. Semua persoalan ini memang menjadi pekerjaan pendidikan yang tak kunjung usai. Kemdikbud melaporkan bahwa setiap menit ada empat anak yang putus sekolah.¹¹ Sebanyak 13,19 persen bangunan sekolah juga dalam kondisi perlu diperbaiki.¹² Ketika sekolah-sekolah di kota besar penuh dengan kendaraan mewah untuk mengantar dan menjemput siswa, sebagian siswa di Indonesia masih harus berjuang untuk dapat bersekolah. Meniti jembatan rusak, menghadapi arus deras sungai, ataupun berjalan berkilo-kilo meter sudah menjadi keseharian sebagian pelajar di tanah air. Kegigihan anak bangsa dalam menuntut ilmu ini seharusnya diapresiasi dengan menyediakan infrastruktur yang mendukung. Tidak cukup dengan ungkapan keprihatinan, apalagi menutup-nutupi permasalahan.

Selain akses dan infrastruktur pendidikan, kualitas pendidikan Indonesia juga butuh pembenahan serius. Data BPS memang menunjukkan bahwa Indikator Pendidikan dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia mengalami tren positif dari tahun ke tahun, namun faktanya angka Human Development Index (HDI)¹³ Indonesia cenderung stagnan dan masih jauh dari membanggakan. Posisi Indonesia sampai dengan Maret 2013 berada di peringkat 121 dari 186 negara. Menurut Education for All Global Monitoring Report 2012 yang dikeluarkan oleh UNESCO (berisi hasil pemantauan pendidikan dunia dari 127 negara), Education Development Index (EDI)¹⁴ Indonesia berada pada posisi ke-65. Dalam kancah global, perbaikan pendidikan dengan merangkak tentunya tidak cukup untuk bersaing dengan peningkatan performa pendidikan negara lain yang berlari.

11 Laporan Kemdikbud 2013. Angka Putus Sekolah akan dibahas pada Bab 3.

12 Data Kemdikbud 2010. Sekolah rusak akan dibahas pada Bab 4.

13 Laporan pencapaian HDI diterbitkan oleh UNDP dengan indikator kesehatan dan usia hidup, tingkat pengetahuan dan pendidikan masyarakat serta rasio bersekolah, dan standar hidup ekonomi masyarakat.

14 Education Development Index memuat empat indikator, yaitu: universal primary education, adult literacy rate, quality of Education, dan gender-related EFA (Education for All).



Akhir Februari 2013, dalam program “101 East” yang berjudul “Educating Indonesia”, salah satu stasiun televisi berita internasional meliput mengenai buruknya pendidikan di Indonesia, bahkan mengungkapkan bahwa pendidikan Indonesia seperti zaman batu di era globalisasi!¹⁵ Liputan tersebut menindaklanjuti survei Pearson¹⁶, sebuah lembaga survei pemeringkat pendidikan di dunia, yang pada November 2012 menempatkan Indonesia di peringkat terbawah bersama Meksiko dan Brasil. Hasil kajian Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) 2012 juga menempatkan kemampuan siswa kelas 8 di Indonesia urutan ke-38 dari 42 negara untuk bidang matematika, dan urutan ke-40 dari 42 negara untuk bidang sains. Dalih pemerintah dengan menggunakan fakta bahwa setiap tahunnya banyak siswa Indonesia yang memperoleh medali dalam olimpiade internasional justru semakin menunjukkan tidak meratanya prestasi siswa di Indonesia, betapapun secara potensi kecerdasan mereka sebenarnya tidak kalah dari siswa negara lain.

Tidak hanya kualitas peserta didik, liputan “101 East” juga menyoroti kualitas pendidik dengan menyebutkan, “Only 51% of Indonesian teacher have the right qualifications to teach.” Hasil Uji Kompetensi Awal (UKA) dan Uji Kompetensi Guru (UKG) 2012 ternyata mengungkapkan data yang lebih memprihatinkan. Berdasarkan data hasil UKA guru sebelum mendapatkan sertifikat profesional, diperoleh gambaran bahwa nilai rata-rata nasional adalah 42,25 (skala 100), dengan sebaran terbanyak sekitar 80-90 ribu guru pada interval nilai 35-40. Hanya 8 dari 33 provinsi yang nilainya berada di atas rata-rata nasional. Sementara itu, data hasil UKG secara *online* yang dilakukan setelah guru memperoleh sertifikat profesional menunjukkan nilai rata-rata nasional sebesar 45,82 (skala 100), dengan sebaran terbanyak sekitar 60-70 ribu guru pada interval nilai 42-43. Dalam UKG, hanya 7 dari 33 provinsi yang nilainya di atas rata-rata nasional.

15 <http://www.aljazeera.com/programmes/101east/2013/02/201321965257154992.html>

16 Survei Pearson 2012 menggunakan data pendidikan yang telah dirilis oleh lembaga lain, seperti data PISA 2009, TIMSS 2007, PIRLS 2006, serta data tingkat literasi dan kelulusan tahun 2010. Peringkat juga disusun berdasarkan negara-negara yang berhasil memberikan status tinggi pada guru dan memiliki budaya pendidikan. Evaluasi terhadap kualitas pembelajaran akan dibahas pada Bab 5.



Hasil UKA dan UKG juga menunjukkan bahwa nilai rata-rata nasional terendah selalu dimiliki oleh guru SD, yakni 36,9 (UKA) dan 42,05 (UKG), padahal saat ini guru SD berjumlah sekitar 1,6 juta atau sekitar 55 persen dari total jumlah guru di Indonesia.¹⁷ Hasil UKA dan UKG ini juga menunjukkan bahwa program sertifikasi guru tidak signifikan meningkatkan kompetensi guru. Uniknya, hasil uji kompetensi ini ternyata tidak sejalan dengan hasil kelulusan UN yang hampir mencapai 100 persen, dan juga tidak sesuai dengan peringkat provinsi kelulusan UN. Sebaran provinsi yang memperoleh nilai UKA dan UKG di atas rata-rata nasional hanya terbentang dari Sumatera Barat hingga Bali. Hal ini jelas menunjukkan kesenjangan kualitas pendidikan di Indonesia.

Masalah kesenjangan ini bukannya tidak disadari pemerintah. Dalam beberapa tahun terakhir, perekonomian Indonesia tumbuh pada kisaran angka 6 persen setiap tahunnya. Sayangnya, pertumbuhan ini tidak berdampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dapat dijelaskan karena pertumbuhan ekonomi Indonesia diiringi meningkatnya Rasio Gini¹⁸ yang menggambarkan kesenjangan antarkelompok masyarakat. Pada 2009, Rasio Gini Indonesia 0,37 dan naik ke angka 0,38 pada 2011. Pada 2012, Rasio Gini Indonesia meningkat lagi menjadi 0,41. Padahal, secara akademis, Rasio Gini di atas 0,4 berpotensi mengganggu stabilitas sosial akibat kesenjangan. Data BPS juga menyebutkan bahwa pada 2011, pendapatan dari 20 persen penduduk berpendapatan tertinggi di Indonesia setara dengan 48,42 persen dari total pendapatan rumah tangga di Indonesia. Sebaliknya, pendapatan dari 40 persen penduduk berpendapatan terendah di Indonesia hanya setara dengan 16,85 persen total pendapatan rumah tangga di Indonesia.¹⁹

Rasio Gini ini kemudian dikembangkan untuk melihat kesenjangan pendidikan dan kualitas SDM. Misalnya pada Februari 2012 diketahui

17 Data diolah dari laporan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (BPSDMP dan PMP) Kemdikbud 2012. Evaluasi terhadap manajemen sekolah dan kualitas guru SD akan dibahas pada Bab 6.

18 Rasio Gini adalah proporsi antara persentase kumulatif pendapatan dan persentase yang menerima pendapatan. Rasio Gini yang mendekati nol menunjukkan pendapatan masyarakat sangat merata. Adapun jika Rasio Gini mendekati satu, pendapatan sangat bervariasi dan terjadi perbedaan yang sangat besar antara yang kaya dan yang miskin.

19 *The Jakarta Post*, 5 Juni 2012.



bahwa 55,51 persen tenaga kerja Indonesia maksimal hanya tamat SD, sedangkan yang tamatan SMA hanya 17,2 persen. Data BPS mengenai indikator pendidikan, baik Angka Partisipasi Sekolah (APS) maupun angka buta huruf, juga memperlihatkan bahwa kesenjangan pendidikan itu jelas terjadi. Hasil UN, UKG, akreditasi institusi pendidikan, bahkan peta sebaran siswa berprestasi juga akan menunjukkan perbedaan kualitas pendidikan yang cukup mencolok. Ketimpangan ini nyata terlihat antara data pendidikan di provinsi DKI Jakarta dengan Papua, atau antara potret pendidikan di Pulau Jawa dengan di Nusa Tenggara, atau antara kualitas pendidikan di daerah pusat kota dengan kawasan 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal). Padahal, jelas tertera bahwa misi pertama pendidikan nasional adalah mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia.

Beranda yang Tidak Terawat

Potret utuh pendidikan Indonesia tidak dapat diperoleh dari gambaran pendidikan di kota-kota besar, namun harus juga menilik ke daerah 3T. Kualitas dan kuantitas guru misalnya, walaupun jumlah guru secara nasional kelebihan sekitar 500 ribu orang, namun banyak sekolah di kawasan 3T yang malah kekurangan guru. Wajar saja, 68 persen sekolah yang kelebihan guru ada di perkotaan, sementara 66 persen sekolah terpencil justru kekurangan guru sebagaimana yang dilaporkan World Bank. Kurangnya kualitas guru ini setidaknya tergambar dari pengalaman program Pendampingan Sekolah Beranda oleh Makmal Pendidikan di Kepulauan Natuna yang menunjukkan bahwa hanya 3 dari 50 guru SD yang mampu menjawab pertanyaan “Berapa hasil $1 - (1/3 + 1/4)$?”. Bila gurunya saja tidak mampu menjawab dengan benar, tidak heran bila muridnya juga demikian.

Ketimpangan serupa juga jelas terlihat di beberapa kota di Papua yang berbatasan dengan Papua Nugini. Keterbatasan jumlah guru membuat kualitas pembelajaran di Papua terbilang rendah. Beberapa guru mata pelajaran, termasuk yang diujikan, tidak ada sehingga guru mata pelajaran lain pun merangkap. Anggota TNI pos pengamanan perbatasan yang tidak dibekali pendidikan guru akhirnya juga kerap membantu. Satu guru mengajar dua hingga enam kelas bukan hal yang asing di beberapa wilayah Papua. Sarana dan prasarana minim, akses ke sekolah sulit, kultur



masyarakat pun kurang mendukung pendidikan anak. Sejumlah siswa di Papua harus menempuh perjalanan 2-3 jam berangkat dan pulang sekolah naik turun bukit. Tidak sedikit siswa yang meninggalkan sekolah 1-2 bulan karena harus membantu orangtua bekerja atau ada upacara adat.²⁰

Program Pendampingan Sekolah Beranda di Bengkayang, Kalimantan Barat, yang berbatasan dengan Malaysia juga mengungkapkan ketimpangan pendidikan. Akses untuk ke sekolah tidak dapat ditempuh dengan mobil, melainkan harus menggunakan sepeda motor dan sampan tanpa pengaman. Jalur darat tak dapat ditempuh jika hujan karena becek dan licin, tergelincir dari jalur motor berarti terjebak di kubangan lumpur. Hujan deras berarti libur sekolah. Ban motor bocor, rantai putus, dan berbagai kerusakan motor lainnya, berarti bersiap mendorong motor berkilo-kilo meter. Sementara di jalur sungai, mesin sampan sering mati jika menabrak potongan kayu atau sampah di sungai yang terapung. Kedua jalur dilalui tanpa lampu penerang jalan, tanpa sinyal *handphone*. Guru dan siswa sudah terbiasa berjalan hingga lima kilometer melewati hutan dan bebatuan untuk mencapai sekolah. Bahkan ada kepala sekolah yang berjalan kaki selama sembilan jam untuk mengikuti pelatihan yang diadakan oleh Makmal Pendidikan! Siswa juga terbiasa tidak beralas kaki atau menggunakan sandal jepit di sekolah karena kondisi jalan yang sering tergenang air.

Ketimpangan akses ini juga terjadi di Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Sejumlah siswa setiap hari harus menempuh jarak hingga belasan kilometer, menyeberangi jembatan gantung, menembus hutan belantara dan perbukitan dari rumah ke sekolahnya dengan berjalan kaki. Sebagian besar guru di sana adalah guru honorer, bahkan ada kepala sekolah yang sudah mengabdikan belasan tahun masih berstatus guru honorer.²¹

Potret ketimpangan pendidikan juga dapat dilihat di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Hingga 2009, tercatat 8.502 anak di Kepulauan Mentawai tidak tersentuh pendidikan dasar. Mereka tersebar di sepuluh wilayah kecamatan di Pulau Siberut, Pulau Sipora, Pulau Pagai Utara, dan Pulau Pagai Selatan. Tidak mudah mendirikan sekolah-sekolah

²⁰ *Kompas*, 2 Desember 2011.

²¹ *Kompas*, 10 Desember 2012.

di pedalaman karena banyak permukiman yang hanya dihuni sekitar 50 orang.²²

Potret buram pendidikan di wilayah perbatasan memang bukan hal baru. Beranda terdepan Indonesia yang seharusnya tampak indah untuk menyambut tamu yang datang itu seolah menjadi gudang (ter) belakang yang kumuh. Bagaimana tidak, Nusa Tenggara Timur (NTT) yang berbatasan dengan Timor Leste dan Australia misalnya, mencetak *quintrick* sebagai provinsi dengan angka kelulusan UN terendah di Indonesia selama tahun 2008-2012.²³ Angka melek huruf di NTT baru sekitar 88,74 persen²⁴, padahal pemerintah mengungkapkan bahwa sekitar 93 persen masyarakat Indonesia sudah melek huruf. Fakta di NTT ini rupanya disaingi Sanggau, Kalimantan Barat, yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Di Sanggau, 30 persen masyarakatnya tidak bisa berbahasa Indonesia dan buta huruf, dengan 5-10 persen anak usia pendidikan dasar putus sekolah.

Dari 34 kota/kabupaten di 12 provinsi yang berbatasan dengan 10 negara tetangga,²⁵ masih banyak fakta yang sudah ataupun belum terungkap dari beranda negara kita ini. Ya, beranda terdepan yang mestinya enak dipandang itu malah tertinggal, terdepan dalam ketertinggalan. Mulai dari keterbatasan sarana dan fasilitas, akses pendidikan dan kesehatan yang begitu sulit hingga minimnya kesejahteraan.

Pemerintah bukan tanpa perhatian melihat kesenjangan ini. Beberapa program pendidikan digulirkan, mulai dari Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan Sarjana Mendidik di wilayah 3T, kerja sama dengan TNI, hingga pembangunan perguruan tinggi di wilayah beranda Indonesia. Namun, kue pembangunan yang telanjur tidak tersebar merata membuat berbagai program pendidikan di wilayah ini butuh kesungguhan dan kerja keras dalam merealisasikannya. Butuh penyesuaian dan penahapan serta sinergi program dengan segenap elemen terkait. Jika tidak, program Wajib

22 *Kompas*, 23 Mei 2011.

23 Tahun 2013 NTT tidak lagi menjadi provinsi dengan angka kelulusan UN terendah. Untuk tingkat SMA, NTT menempati urutan ke-5 dari bawah, sedangkan untuk tingkat SMP berada pada urutan ke-2 dari bawah.

24 Data diambil dari <http://ntt.bps.go.id/>

25 Data ini belum memasukkan Provinsi ke-34, yakni Kalimantan Utara, yang juga berbatasan langsung dengan Malaysia.



Belajar 9 Tahun hanya omong kosong di Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara yang berbatasan langsung dengan Filipina karena beberapa pulau hanya mempunyai SD, tidak mungkin anak-anak melanjutkan ke SMP. Pelajaran komputer juga hanya akan berhenti sebatas angan di Desa Suruh Tembawang, Kabupaten Entikong, Kalimantan Barat (berbatasan dengan Malaysia), dan Distrik Sota (Merauke, Papua yang berbatasan dengan Papua Nugini) karena para siswa belum pernah melihat komputer dan listrik pun sering padam.

Indonesia Timur juga Indonesia

“Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu. Menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia.”

Di awal masa revolusi melawan penjajahan, R. Soeraryo menciptakan lagu yang berjudul “Dari Barat Sampai ke Timur” untuk mengobarkan semangat nasionalisme. Judul dan lirik lagu yang mirip lagu kebangsaan Prancis tersebut diganti 18 tahun kemudian menjadi “Dari Sabang Sampai Merauke” dalam perjuangan membebaskan Irian Barat. Dalam perjalanannya, identitas kebangsaan memang menjadi tantangan dalam pembangunan di Aceh maupun Papua. Konflik di Aceh mereda pasca-tsunami di akhir 2004. Aceh juga mendapat berbagai keistimewaan di antaranya dengan menerapkan syariat Islam dan memiliki beberapa partai politik lokal.

Sementara itu, kawasan timur Indonesia terus bergejolak, apalagi setelah lepasnya provinsi Timor Timur menjadi negara Timor Leste. UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua juga tidak menjadi solusi karena kekerasan dan ketidakadilan masih terus menyelimuti Bumi Cendrawasih. Wilayah timur Indonesia sebenarnya memiliki banyak sekali potensi, mulai dari sektor kelautan, pertanian, peternakan, hasil hutan, hasil tambang, hingga potensi wisata alam. Sayangnya, berbagai potensi kekayaan alam ini justru lebih banyak dinikmati penduduk Ibu Kota bahkan negara asing. Kesenjangan pun kian terasa. Alhasil, enam provinsi di Indonesia dengan persentase kemiskinan tertinggi berturut-turut adalah Papua, Papua Barat, Maluku, Nusa Tenggara Timur (NTT), Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), dan Nusa Tenggara Barat (NTB). Praktis



hanya Provinsi Aceh (posisi ke-5) yang termasuk dalam kawasan barat Indonesia, sisanya masuk kawasan timur Indonesia.²⁶

Bukan kebetulan Papua menjadi provinsi dengan angka buta huruf tertinggi, diikuti oleh NTB. Ketika persentase penduduk usia 15-44 tahun yang buta huruf di Indonesia pada 2012 hanya sekitar 2,01 persen, di Papua persentasenya mencapai 33,33 persen, lebih rendah 31,32 persen atau 16 kali lipat rata-rata nasional. Bukan kebetulan juga jika tiga provinsi di Indonesia dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terendah berturut-turut adalah Papua (65,36), NTB (66,23) dan NTT (67,75). Cukup jauh dari rata-rata Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia pada 2011 sebesar 72,77. Ketimpangan kualitas pendidikan ini jelas bukan kebetulan karena sudah terjadi selama bertahun-tahun.

Ketika banyak sekolah di Ibu Kota yang kelebihan jumlah guru, guru-guru di beberapa wilayah Papua justru jarang hadir karena berbagai alasan. Mulai dari kendala jarak dan transportasi, penugasan dan urusan administrasi, hingga sibuk mencari penghasilan tambahan. Guru barulah hadir menjelang ujian, alhasil hanya sekitar 30 persen kurikulum yang tersampaikan ke siswa. Mekanisme *reward* (berupa tunjangan tambahan) dan *punishment* (berupa sanksi) tidak mempan. Kesulitan guru ditambah dengan faktor budaya dan kepedulian orangtua yang kurang mendukung. Belum lagi dialek beberapa suku yang saling bertukar dalam membunyikan konsonan, seperti “p” diucapkan menjadi “b”, “j” dilafalkan “y”, dan “s” berubah menjadi “t”.²⁷

Demikian pula halnya dengan NTT, ketika jumlah guru di Indonesia kelebihan sekitar 500 ribu guru, guru di NTT masih kurang belasan ribu guru. Guru-guru yang ada di NTT pun sebanyak 74,63 persen belum berkualifikasi pendidikan D4/S1, dan 85,63 persen guru di sana belum bersertifikasi. Pada saat anggaran pendidikan ditetapkan sebesar 20 persen dari APBN/APBD, anggaran pendidikan di NTT pada 2009 hanya Rp 50 miliar dari APBD sebesar Rp 875 miliar (5,7 persen). Anggaran pendidikan di NTT pada 2010 naik sedikit menjadi Rp 80,7 miliar dari APBD sekitar Rp 1,2 triliun (6,7 persen).²⁸

26 Data diambil dari laporan BPS periode September 2012.

27 *Kompas*, 15 Juni 2011.

28 *Kompas*, 25 Mei 2012.



Minimnya anggaran untuk pendidikan di NTT tidak terlepas dari prioritas permasalahan yang ada di sana, terutama dari aspek kesehatan dan ekonomi yang masih memprihatinkan. Menurut Prof. Dr. Mia Noach, Dosen Universitas Negeri Nusa Cendana Kupang, persoalan pendidikan di NTT sejak 1990-an tidaklah berubah, yaitu seputar kualitas guru yang masih rendah, kekurangan tenaga guru, alokasi anggaran pendidikan di bawah 10 persen dari total APBD, rendahnya kesejahteraan guru, keterbatasan sarana dan prasarana belajar, dihapuskannya sekolah guru, dan dukungan dari pihak orangtua yang lemah. Hasilnya dapat dilihat dari rendahnya IPM di NTT. Ketika rata-rata lama bersekolah secara nasional 7,6 tahun, rata-rata lama bersekolah di NTT cuma 6,6 tahun.²⁹

Potret buram pendidikan di NTT dikuatkan dengan pengalaman program Pendampingan Sekolah Beranda Makmal Pendidikan di Rote. Sudah menjadi permakluman apabila guru datang siang, pulang dan pergi ke ibu kota kabupaten untuk urusan di luar kegiatan belajar-mengajar dengan meninggalkan siswa-siswa mereka.

Potret kesenjangan pendidikan juga jelas terlihat di pulau-pulau terpencil di kawasan timur Indonesia. Pulau Letti di Kabupaten Maluku Barat Daya misalnya, di sana masih banyak sekolah rusak yang belum tersentuh perbaikan. Guru mata pelajaran yang diujikan masih kurang, dan pendidikan terakhir para gurunya pun masih Sekolah Pendidikan Guru (SPG) atau diploma 2. Dari 205 guru, yang sudah ikut sertifikasi belum sampai 20 orang.³⁰ Hasil UKA dan UKG di Provinsi Maluku dan Maluku Utara juga termasuk yang paling rendah dibandingkan provinsi lainnya di Indonesia. Pengalaman program Pendampingan Sekolah Beranda Makmal Pendidikan mengungkapkan bahwa guru di wilayah kepulauan Maluku hampir tidak pernah memperoleh akses pengembangan diri, bahkan untuk akses informasi pun minim. Pengawas sekolah terkendala untuk dapat datang ke sekolah setiap bulan karena sarana transportasi antarpulau tidaklah mudah, sementara sekolah yang harus didatangi cukup banyak.

Wajah pendidikan kawasan timur Indonesia mungkin memang tidak merepresentasikan wajah pendidikan Indonesia. Namun, fakta-fakta yang ada itu tidak bisa dibantah bahwa kesenjangan dalam dunia pendidikan

²⁹ *Kompas*, 17 Juni 2011.

³⁰ *Kompas*, 20 Juni 2012.



kita benar-benar menganga. Perbaikan pendidikan dan pembangunan sebenarnya terus berjalan, namun terlihat lambat karena terlalu jauh tertinggal dengan wilayah barat Indonesia, apalagi dengan Ibu Kota. Dana Alokasi Khusus (DAK) dan berbagai program yang digulirkan pemerintah terbukti belum mampu menyelamatkan pendidikan di kawasan timur Indonesia. Perhatian pemerintah masih setengah hati dan banyak terhenti di tataran rencana tanpa totalitas implementasi.

Pengalaman program Pendampingan Sekolah Beranda Makmal Pendidikan menemukan fakta bahwa jangankan pemerintah pusat, pihak dinas pendidikan daerah pun hampir tidak pernah mengunjungi sekolah di kawasan 3T, kecuali ada acara seremonial dari pusat. Kawasan timur Indonesia merupakan wilayah perbatasan paling timur dan selatan di Indonesia. Fakta bahwa berbagai permasalahan pendidikan (juga masalah ekonomi dan kesehatan) yang sudah berlangsung puluhan tahun tidak juga tertangani, jelas menunjukkan ketidakadilan dalam pembangunan pendidikan di Indonesia. Kawasan timur Indonesia juga bagian dari NKRI sehingga tidak seharusnya ketimpangan kualitas SDM tampak begitu nyata.

Wajah Ketidakadilan



Foto: <http://antarabogor.com/>



“Semua kebijakan dapat diukur dengan keadilan,” ungkap Aristoteles. Pemerintah boleh saja mengklaim kebijakan dan program pendidikan yang digulirkan sudah sukses, namun ukuran sejati dapat dilihat dari sejauh mana prinsip-prinsip keadilan dalam kebijakan dan program sudah dipenuhi. Foto jepretan jurnalis Antara Bogor di atas menggambarkan betapa prinsip keadilan belum sepenuhnya diterapkan. Sudah enam tahun lamanya, siswa SDN Tajur 7 Citeureup, Bogor (Jawa Barat), belajar dalam kondisi tidak nyaman. Satu kelas dijadikan dua ruangan dengan hanya disekat papan tulis. Agar tidak ricuh, guru mengajar bergantian, jika satu guru menerangkan, guru yang lain memberikan tugas kepada siswanya agar diam. Namun, dalam pelaksanaannya, guru dan siswa kerap mencuri dengar pelajaran kelas di sebelahnya, yang tentunya membuat pembelajaran kurang efektif. Satu lokal digunakan jadi beberapa kelas dengan sekat seadanya ini juga masih dapat ditemui di daerah-daerah lain, termasuk kota penyangga Ibu Kota seperti Depok dan Bekasi.

Keterbatasan ruang kelas bahkan mengharuskan siswa belajar di luar kelas, seperti yang dirasakan siswa kelas 2 dan 4 SDN Jangkurang I di Kecamatan Leles, Kabupaten Garut (Jawa Barat).³¹ Sementara kondisi yang sama memaksa siswa SDN 008 Sei Beduk, Kota Batam (Kepulauan Riau) menumpang belajar di rumah susun.³² Selain keterbatasan ruang, ada juga yang terkendala dengan tidak adanya sarana belajar di kelas. Menyikapi tidak adanya meja kursi, siswa SDN Rengasdengklok Selatan 2, Kabupaten Karawang (Jawa Barat), dan SD Negeri 64/VII Sukasari, Kabupaten Sarolangun, Jambi, memilih untuk belajar di lantai. Kondisi yang sama mengharuskan siswa SMP 13 Kecamatan XIV Kota, Kabupaten Mukomuko, Bengkulu, membawa sendiri kursi dari rumah.

Kondisi kelas dan pembelajaran yang kurang layak yang diungkapkan di atas hanya sebagian kecil yang tampak. Ibarat fenomena gunung es, jumlah yang belum terekspos jauh lebih banyak. Jika kondisi tersebut masih banyak ditemui di daerah sekitar Ibu Kota, dapat dibayangkan betapa menyedihkannya kondisi kelas dan pembelajaran di daerah pelosok Indonesia. Beberapa kasus di atas juga tentunya tidak serta-merta

31 *Pikiran Rakyat*, 5 November 2012.

32 *Kompas*, 8 November 2012.



menggambarkan kondisi keseluruhan sekolah di Indonesia. Masih banyak sekolah lain yang bangunannya bagus dan luas, bahkan dilengkapi AC di setiap ruang kelas. Namun, di situlah salah satu letak ketidakadilannya: pembangunan infrastruktur yang memengaruhi kualitas pembelajaran tidak terdistribusi merata.

Ketidakadilan juga berlaku dalam bentuk berbeda. Ada banyak kasus siswa-siswa miskin yang belum bayar uang sekolah dilarang mengikuti pelajaran di sekolah atau dilarang mengikuti ujian. Kasus di Tasikmalaya, siswa yang dilarang mengikuti pelajaran ini jumlahnya puluhan dan lebih menyedihkan lagi, nama-nama mereka disebutkan ketika upacara bendera sehingga salah seorang siswa jatuh pingsan karena sedih dan malu. Lain lagi dengan sebuah kasus di Manado, karena tidak membayar uang komite, siswa dipaksa mengikuti ujian sekolah di luar kelas.³³ Kasus semacam ini mengiris nurani kita yang masih peduli dengan kemajuan anak-anak bangsa. Dengan mengikuti pelajaran dan ujian, bukankah para siswa miskin masih berani berharap akan masa depan yang lebih baik? Padahal, dengan larangan mengikuti pelajaran dan ujian, tidak otomatis uang sekolah mampu dilunasi.

Ironisnya, dalam pidato kenegaraan di Gedung DPR/MPR sehari sebelum peringatan HUT RI ke-66, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memastikan bahwa sudah tidak ada lagi warga berpenghasilan rendah yang kesulitan mendapat pelayanan kesehatan dan pendidikan. Enam hari setelah menyampaikan pidato, dalam kunjungannya ke SD Babakan Madang 01, Sentul, Kabupaten Bogor, Presiden SBY tampak terkejut melihat potret nyata sekolah di Indonesia, dan meminta supaya anggaran pendidikan diprioritaskan untuk memperbaiki bangunan sekolah yang rusak. “Kantor guru kecil sempit dan desak-desakan. Atapnya tidak karuan kalau hujan bocor bangunannya juga sudah tidak layak. Saya lihat perpustakaan juga tidak layak,” ujar Presiden di hadapan pejabat dan para guru.³⁴

Sungguh miris jika SD Babakan Madang 01 yang berdekatan dengan Ibu Kota saja dianggap tidak layak, lalu bagaimana dengan SD lain di pelosok Indonesia? Padahal, berdasarkan data Kemdikbud 2011, masih

33 *Tempo*, 12 Maret 2013.

34 *Republika*, 2 Agustus 2011.



terdapat 74.806 sekolah (41,31 persen) di bawah Standar Mutu Pelayanan (SPM). Jumlah riil di lapangan bisa jadi lebih banyak lagi.

Kebijakan yang Mengusik Keadilan

Dalam *Bumi Manusia*, Pramoedya Ananta Toer menulis begini: “Seorang terpelajar harus juga berlaku adil sudah sejak dalam pikiran, apalagi dalam perbuatan.” Pram benar, kualitas pendidikan erat kaitannya dengan kualitas SDM dan kemajuan suatu bangsa, sekarang dan pada masa mendatang. Menyoal kualitas pendidikan Indonesia berarti memerhatikan seluruh komponen pendidikan dari desa paling barat hingga desa paling timur Indonesia, dari pulau paling utara sampai pulau paling selatan Indonesia. Di sinilah akan jelas terlihat gap kualitas siswa, guru, sekolah, dan pendidikan di setiap penjuru Indonesia.

Kebijakan pendidikan yang diambil pemerintah seharusnya tegas memerhatikan kondisi ini. Prioritas pembangunan pendidikan semestinya diarahkan untuk mengurangi kesenjangan kualitas pendidikan ini. Sayangnya, berbagai kebijakan yang diambil pemerintah kerap kali justru semakin mengusik rasa keadilan dalam memperoleh hak pendidikan. Sebut saja kebijakan mengenai Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (RSBI), Ujian Nasional, perubahan kurikulum, kelas internasional, jalur mandiri kampus, kesenjangan antara PTN dan PTS, kesenjangan antara sekolah dengan madrasah, dan sebagainya.

Kebijakan mengenai RSBI misalnya, alih-alih meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia, yang terjadi justru pengastan pendidikan: sekolah berlabel ‘standar internasional’ hanya dapat dinikmati oleh golongan menengah ke atas. Kuota 20 persen untuk siswa dari masyarakat tidak mampu, seperti halnya yang lebih dulu terjadi di PTN favorit, akhirnya hanya angka di atas kertas. Jangankan bersaing untuk memperoleh pendidikan berkualitas, siswa dari masyarakat marginal bahkan sudah gagal bersaing untuk bermimpi. Keadilan jelas terusik, pendidikan seolah kembali ke zaman kolonial ketika hak untuk memperoleh pendidikan hanya diberikan untuk para penguasa dan kaum feodal. Pada 2011, Dedi Suwendi ‘Mi’ing’ Gumelar, salah seorang anggota Komisi X DPR RI sudah menyampaikan, “SBI harus dikoreksi. SBI hanya menjadi market label. Substansinya tidak memiliki mutu berkelas internasional.”



Dihapuskannya RSBI oleh Mahkamah Konstitusi awal Januari 2013 adalah berita kemenangan untuk pendidikan non-diskriminatif. Kendati demikian, nilai-nilai liberalisasi dan komersialisasi sudah kadung tertanam. Akibatnya, paradigma pendidikan sebagai ladang bisnis belum sepenuhnya tercabut seiring dengan dicabutnya plang RSBI.

RSBI dihapuskan persoalan ketidakadilan belumlah berakhir. Jika kebijakan Ujian Nasional coba dikaji lebih dalam, keadilan kembali terusik. Bagaimana bisa standar kelulusan disamakan antara sekolah dengan fasilitas lengkap dengan sekolah yang kekurangan sarana dan prasarana, antara sekolah dengan guru lulusan S1 PTN favorit yang mengajar sesuai dengan kompetensi yang diampunya dengan guru lulusan SMA yang harus mengajar beberapa kelas sekaligus. Jelas berbeda pembelajaran berhitung dan bahasa di kota-kota besar dengan di daerah pedalaman yang jangankan siswa menguasai bahasa Inggris, gurunya pun masih kesulitan untuk berbahasa Indonesia. Keadilan semakin terusik melihat siswa yang jujur justru tidak lulus, sementara siswa yang bodoh mendapatkan nilai nyaris sempurna.

Belum lagi melihat guru, pihak sekolah, bahkan dinas pendidikan menghalalkan segala cara agar siswa mereka dapat lulus, esensi pendidikan pun tergadaikan. Oleh karena itu, tidak berlebihan bila beberapa pakar dan praktisi pendidikan, di antaranya Munif Chatib, gencar menyuarakan mengenai reposisi atau refungsi UN sebatas tes diagnosis atau pemetaan kualitas pendidikan saja. Jika Ujian Nasional dilakukan dengan jujur dan difungsikan untuk memetakan kualitas pendidikan, mungkin masih akan mendatangkan kebermanfaatan. Akan tetapi, ketika Ujian Nasional digunakan sebagai syarat kelulusan di tengah ketimpangan kualitas pendidikan Indonesia, sungguh hanya akan menimbulkan banyak kemudaran.

Persoalan ketidakadilan juga ada pada kurikulum. Pergantian kurikulum yang tergesa-gesa tanpa kajian mendalam mengusik keadilan. Di beranda Indonesia, kurikulum lama baru saja hendak diterapkan, kurikulum sudah kembali berganti. Penambahan jam pelajaran juga tidak mungkin dilakukan bagi sekolah yang selama ini menyelenggarakan pendidikan dua atau bahkan tiga *shift* karena keterbatasan lokal kelas. Pembelajaran tematik terintegrasi jangankan terimplementasikan, isti-



lahnya pun terdengar asing, bahkan mungkin sulit diucapkan oleh guru-guru di pedalaman. Teknologi informasi terintegrasi hampir dapat dipastikan akan banyak masalah dalam penerapannya di lapangan, terutama untuk daerah yang terisolasi secara geografis. Bukan hanya sinyal dan komputer yang tidak ada, listrik pun belum tentu tersedia. Tengok saja implementasi UKG *online* yang banyak terkendala teknis di lapangan.

Perubahan anggaran kurikulum 2013 dari Rp 611 miliar (21 Desember 2012) menjadi Rp 1,458 triliun (19 Januari 2013) kemudian membengkak lagi menjadi Rp 2,491 triliun (19 Februari 2013), seperti yang dipertanyakan Panitia Kerja Kurikulum Komisi X DPR, jelas memperlihatkan ketidakmatangan perencanaan kurikulum 2013, *trial and error*.³⁵ Pergantian kurikulum telah gagal melihat kebutuhan dan permasalahan aktual yang terjadi di lapangan. Yang lebih mengemuka justru sisi proyek mercusuar yang rapuh sehingga tidak heran bila hasilnya tidak akan memberikan dampak berarti bagi perbaikan pendidikan di Indonesia.

Kebijakan kelas internasional di berbagai sekolah dan perguruan tinggi juga jelas menunjukkan diskriminasi pendidikan. Demikian pula dengan ujian mandiri, baik di sekolah maupun di perguruan tinggi, yang lebih kental nuansa seleksi kemampuan finansial daripada seleksi kemampuan akademis. Ketika orientasi pendidikan beralih ke bisnis dan mengejar keuntungan, ketidakadilan dalam memperoleh hak pendidikan takkan dapat dihindari. Kesenjangan antara sekolah dan perguruan tinggi negeri dengan swasta juga masih memunculkan warna yang amat kentara. Ketidakadilan yang dirasakan guru honorer jika dibandingkan dengan guru PNS sudah menjadi rahasia umum, padahal bisa jadi lama pengabdian dan kompetensi guru non-PNS lebih baik. Kesenjangan kualitas sekolah umum dengan madrasah juga nyata terlihat.

Beragam persoalan ketidakadilan di atas mendorong kita untuk merenung. Di satu sisi, berbagai kebijakan pemerintah di bidang pendidikan memang membantu peningkatan kualitas pendidikan. Namun, di sisi lain, kegagalan dalam menyelenggarakan kebijakan yang benar-benar

35 Dalam sidang 27 Mei 2013 akhirnya Komisi X DPR RI menyetujui anggaran kurikulum 2013 sebesar Rp 829,47 miliar atau hanya sepertiga dari yang diajukan.



dibutuhkan masyarakat membuat pemerintah tidak pernah tuntas dalam mengatasi permasalahan pendidikan. Pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) misalnya, yang seharusnya jelas-jelas sejalan dengan upaya peningkatan kualitas sekolah, dalam implementasinya justru menjadi ladang korupsi dana pendidikan. Audit yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan juga menghasilkan banyak temuan penyelewengan dana BOS, bahkan menyebutkan bahwa 6 dari 10 sekolah menyelewengkan dana BOS.³⁶

Bagi yang tidak korupsi, keberadaan BOS justru merepotkan pihak sekolah dalam urusan tetek bengek administrasinya. Membuat pusing dalam mengelola peruntukannya. Misalnya, alokasi dana BOS untuk gaji guru honorer sangat terbatas, sementara sebagian besar guru di daerah masih berstatus honorer. Di sisi lain, dana BOS semakin membatasi sekolah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembiayaan sekolah.

Pemberian beasiswa juga tidak jauh berbeda, membuka kran kebocoran anggaran dan banyak memuat ketidakadilan. Kolusi dan nepotisme bermain dalam pemberian beasiswa jelas menunjukkan ketidakadilan. Penyaluran beasiswa kepada yang tidak berhak hanya demi memenuhi kuota beasiswa juga jelas bertentangan dengan prinsip keadilan. Pembangunan PTN dan perubahan status PTS menjadi PTN di berbagai wilayah juga tidak serta-merta menyelesaikan permasalahan pemerataan pendidikan. Jika kualitas pendidik tidak diperbaiki, hanya akan menambah beban operasional penyelenggaraan pendidikan. Jika perekonomian dan infrastruktur daerah tidak dibangun, lulusan PTN daerah pun akan kembali menyesaki kota-kota besar.

Peserta didik juga sangat merasakan ketidakadilan dalam kebijakan pendidikan pemerintah, mulai dari yang sifatnya fisik (seperti pemerataan fasilitas dan sarana prasarana ataupun pembiayaan sekolah yang jelas terukur dalam bentuk materi) hingga yang sifatnya non-fisik (misalnya penyaluran minat dan bakat). Keberagaman kemampuan dan preferensi bukannya difasilitasi, malah dipaksa menjadi bentuk produk pendidikan tertentu. Dilema dan ketidakadilan lebih dirasakan oleh siswa inklusi yang

36 Diolah dari data hasil audit BPK yang dilansir Indonesia Corruption Watch (ICW). Bantuan Operasional Pendidikan akan dibahas pada Bab 2.



berkebutuhan khusus apalagi pendidikan di Indonesia masih segregatif. Bergabung dengan sekolah umum mengalami diskriminasi, mengikuti pendidikan khusus juga semakin terkucilkan.

Kebijakan pendidikan ternyata tidak cukup hanya sejalan dengan rancangan peningkatan kualitas pendidikan, namun juga dibutuhkan kebijakan pendidikan memihak rakyat yang berkeadilan. Adil memang berarti proporsional, tidak harus sama rata, namun keadilan jelas berseberangan dengan kesenjangan. Selama ini pemerintah memang sudah mengeluarkan berbagai kebijakan dan program yang mendukung peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia, namun prinsip keadilan masih dirasakan sangat kurang, mulai dari pemerataan pendidikan secara geografis, pemenuhan hak pendidikan tanpa melihat status, hingga penetapan prioritas pendidikan. Ketimpangan ini takkan terjadi jika kebijakan pembangunan, baik infrastruktur, ekonomi, pendidikan ataupun kesehatan sudah tersebar secara adil dan merata.

Secara konstitusional, prinsip-prinsip keadilan ini sebenarnya sudah termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 yang menegaskan, “... untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...” Ya, tujuan negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa seharusnya berdasarkan keadilan sosial.

Kebijakan yang Berkeadilan

Peringatan Hari Pendidikan Nasional 2013 mengangkat tema “Meningkatkan Akses dan Kualitas Berkeadilan”. Akses dan kualitas berkeadilan memang menjadi momok bagi penyelenggaraan pendidikan nasional. Anggaran pendidikan dan dukungan berbagai pihak terkait yang semakin besar, ternyata tidak serta-merta menyelesaikan permasalahan pendidikan di Indonesia. Serapan anggaran Kemdikbud yang hanya 87,3 persen sepanjang 2012 menunjukkan bahwa terjadi disparitas antara perencanaan dengan realisasi program, itu pun setelah terjadi lonjakan signifikan serapan anggaran di akhir tahun.



Inkonsistensi anggaran pendidikan, misalnya untuk pos kurikulum dan Ujian Nasional, menyebabkan Departemen Keuangan memblokir sebagian besar anggaran pendidikan. Realisasi program kerja pendidikan akhirnya banyak tertunda, apalagi dengan adanya berbagai indikasi korupsi di lingkungan Kemdikbud. Masyarakat yang menunggu lompatan kebijakan yang mendukung peningkatan akses dan kualitas berkeadilan akhirnya harus menunggu pemerintah yang masih sibuk dengan dirinya sendiri. Penyelenggaraan UN yang amburadul semakin mempertegas adanya kesalahan kebijakan pemerintah yang cukup mendasar dalam mengelola pendidikan di Indonesia.

Untuk menuntaskan permasalahan pendidikan jangka panjang, kebijakan pendidikan yang parsial bukanlah jawabannya. Pembangunan fisik dan pemberian bantuan pendidikan yang tidak disertai dengan pemeliharannya akan menyisakan pekerjaan setiap tahunnya. Nuansa proyek justru lebih kental terlihat. Berbagai kebijakan pendidikan yang sifatnya *trial and error* akan menemui banyak kendala dalam implementasi di lapangan. Kondisi ini diperparah dengan berbagai kepentingan politik yang mengintervensi sehingga tidak heran bila kebijakan pendidikan terus berganti seiring pergantian pejabat. Padahal, program pendidikan adalah kerja jangka panjang, kerja untuk masa depan, sehingga kontinuitas kebijakan dan program pendidikan harus benar-benar diperhatikan.

Untuk menjawab tantangan tersebut, perbaikan pengelolaan pendidikan nasional tidak bisa tidak, harus dilakukan. Revolusi kebijakan pendidikan tampaknya bukan pilihan tepat karena banyak biaya yang harus dikeluarkan; bukan hanya materi, tetapi juga biaya sosial. Reformasi pendidikan secara fundamental, total, dan gradual menjadi pilihan logis menuju pendidikan berkeadilan tanpa diskriminasi dan kesenjangan sosial.

Reformasi kebijakan pendidikan yang fundamental mensyaratkan perhatian lebih pada kondisi aktual di tengah masyarakat dan memberikan prioritas untuk pendidikan masyarakat yang kurang mampu dan kurang pintar, untuk kelompok masyarakat yang selama ini terpinggirkan. Reformasi kebijakan pendidikan pada aspek yang fundamental akan mendatangkan efek domino perbaikan pendidikan yang luar biasa,



akselerasi penyelesaian berbagai masalah pendidikan akan meningkat dengan cepat.

Selama ini kebijakan pendidikan memang dibuai dengan kemajuan semu pendidikan, tidak berdasar fakta di lapangan. Budaya 'Asal Bapak Senang' sepertinya memfilter berbagai permasalahan pendidikan Indonesia sehingga yang diterima para pemegang kebijakan hanya yang bagus-bagus. Padahal, tahapan awal dan mendasar dalam menyelesaikan suatu permasalahan adalah ketepatan dalam melakukan identifikasi dan rumusan permasalahan. Landasan untuk berpikir dan bersikap takkan kokoh jika pemerintah jauh dari masyarakatnya.

Salah satu bentuk lain reformasi pendidikan yang fundamental adalah ketika kebijakan dan program pendidikan nasional yang digulirkan pemerintah didasarkan pada data riil di lapangan, bukan hanya dari data laporan di atas kertas. Pemerintah pusat dan daerah perlu lebih banyak *blusukan* untuk melihat wajah nyata pendidikan Indonesia sehingga kebijakan yang diambil dan program yang dipilih memang tepat.

Reformasi kebijakan pendidikan juga perlu dilakukan secara total, menyeluruh, dan tidak setengah-setengah. Potret permasalahan pendidikan harus dilihat secara utuh, seluruh entitas dalam sistem pendidikan harus tersentuh, demikian pula upaya pemecahan permasalahannya. Perbaikan aspek fisik dan non-fisik harus dilakukan secara simultan. Perbaikan sekolah rusak yang tidak total hanya akan jadi proyek yang menghabiskan banyak anggaran. Pembangunan sekolah tanpa mempersiapkan sumber daya manusia pengelolanya juga hanya akan menambah beban operasional tanpa ada dampak terhadap perbaikan kualitas. Perbaikan insan pendidikan, institusi pendidikan, metode dan kurikulum, sistem pendidikan, hingga lingkungan dan budaya pendidikan juga perlu dilakukan secara simultan. Tak ada gunanya perbaikan kurikulum tanpa perbaikan kualitas guru. Perbaikan yang tidak dilakukan secara total selalu menyisakan permasalahan lama dan memunculkan masalah baru sehingga permasalahan tidak kunjung dapat diselesaikan.

Reformasi kebijakan pendidikan secara total juga mensyaratkan sinergi antara pendidikan dengan aspek-aspek kehidupan yang lain. Pembangunan pendidikan di daerah 3T yang total akan turut memerhatikan pembangunan ekonomi, infrastruktur dan sosial di tengah masyarakat.



Pendidikan adalah bagian tak terpisahkan dalam kehidupan bermasyarakat sehingga permasalahannya harus dapat dilihat secara utuh dan solusinya pun akan terkait dengan aspek kehidupan bermasyarakat yang lain. Total juga bermakna tuntas, tidak setengah-setengah. Kebijakan dan program pendidikan yang dilakukan setengah-setengah, apalagi kurang dari itu, hanya akan mengekalkan permasalahan.

Salah satu turunan dari UU Sisdiknas adalah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang terdiri dari: 1) Standar Kompetensi kelulusan; 2) Standar Isi; 3) Standar Proses; 4) Standar Pendidik dan Tenaga Pendidik; 5) Standar Sarana Prasarana Pendidikan; 6) Standar Pengelolaan; 7) Standar Pembiayaan Pendidikan; 8) Standar Penilaian Pendidikan.

Dalam konteks pendidikan formal, delapan standar tersebut sebenarnya sudah mencakup keseluruhan entitas yang perlu dibenahi. Sayangnya, selama ini pendidikan kita diidentikkan dengan pendidikan formal, sedangkan pendidikan informal dan nonformal kurang mendapatkan perhatian, padahal sekolah memiliki banyak keterbatasan. Selain itu, reformasi kebijakan dan program pendidikan belum total dilakukan. Tidak tuntas, parsial, tidak melihatnya secara utuh, setengah-setengah, dan masih berorientasi pada aspek-aspek tertentu yang mudah terlihat. Padahal, totalitas tidak harus diperlihatkan, totalitas akan tampak pada proses dan hasil.

Reformasi kebijakan pendidikan juga perlu dilakukan secara gradual, diperhatikan penahapannya. Menghasilkan perubahan menuju kebaikan tidaklah semudah membalikkan telapak tangan, apalagi jika ada resistensi dari *status quo*. Perubahan kebijakan yang tiba-tiba akan menimbulkan banyak penolakan, apalagi selama ini kebijakan dan program pendidikan banyak terkendala dalam hal sosialisasi. Penolakan umumnya terjadi karena kekhawatiran dan ketidakpastian yang selalu mengiringi perubahan. Untuk itulah, tahapan yang dimaksud juga seharusnya melibatkan masyarakat selaku sasaran kebijakan dan program.

Dalam beberapa kebijakan dan program, penahapan ini sebenarnya sudah dilakukan, atau paling tidak sudah direncanakan. Permasalahan terbesar adalah dalam implementasi di lapangan, yakni tatkala penahapan ini tidak dilakukan atau dilakukan dengan tidak sebagaimana mestinya.



Penahapan pun tidak dirasakan karena semuanya serba instan dan dadakan walaupun beberapa di antaranya sudah lama direncanakan. Ada kalanya penahapan yang dilakukan hanya formalitas, aktivitas dan evaluasinya tidak diketahui dengan pasti. Ada juga kebijakan dan program pendidikan yang sudah dilakukan secara bertahap namun tidak jelas alur dan arah penahapannya.

Tantangan terbesar dalam pelaksanaan tahapan kebijaksanaan dan program pendidikan ini sering kali terletak pada kondisi perpolitikan dan perekonomian, bukan dari kondisi masyarakat. Kebijakan dan program pendidikan di Indonesia selama ini memang masih erat kaitannya dengan perpolitikan dan perekonomian nasional. Reformasi kebijakan pendidikan secara fundamental dan total pun kerap terkendala karena dua hal ini. Kebijakan dan program pendidikan menjadi bahan jualan politik sehingga setiap ganti pejabat ganti kebijakan dan program, baik di pusat maupun di daerah. Padahal, reformasi pendidikan tidak dapat dilakukan secara instan, butuh waktu dan kontinuitas untuk mewujudkannya.

Untuk menjamin kontinuitas tahapan kebijakan dan program pendidikan menuju pendidikan yang berkeadilan, perlu disusun *grand design* pendidikan nasional yang disepakati bersama oleh segenap entitas pendidikan nasional. Visi pendidikan yang diusung, strategi yang dipilih, hingga program pendidikan yang digulirkan perlu dijalankan dengan komitmen bersama. Dinamika politik dan ekonomi seharusnya hanya menjadi pertimbangan dalam melakukan penyesuaian, bukan penentu kebijakan pendidikan yang mengusung visi besar. Pendidikan sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat tentunya terkait dengan politik dan ekonomi nasional. Namun, kebijakan pendidikan semestinya independen terhadap berbagai kepentingan pribadi dan golongan karena mengusung kepentingan masyarakat yang lebih besar untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Permasalahan pendidikan memang kompleks dan penyelesaiannya harus melibatkan seluruh pihak terkait. Dengan demikian, kita tidak boleh mengandalkan pemerintah saja. Semua elemen harus bersinergi dan bekerja untuk mewujudkan pendidikan yang diidam-idamkan. Bagaimanapun juga untuk setiap perubahan yang bersifat makro, peran pemerintah melalui kebijakan sangatlah signifikan. Semuanya dimulai



dari pembenahan internal pemerintah secara fundamental, total, dan gradual. Hal ini dimulai dari pergeseran paradigma bahwa pemerintah adalah pelayan masyarakat, bukan pejabat yang harus dilayani. Berikutnya disiplin dan kejujuran aparat untuk mewujudkan kedisiplinan dan kejujuran SDM pendidikan. Terakhir, keteladanan dan itikad baik untuk memajukan pendidikan bangsa.

Reformasi kebijakan pendidikan secara fundamental, total, dan gradual menuju pendidikan berkualitas yang mencerdaskan dan berkeadilan tentu tidak mudah. Ada pihak-pihak pendukung *status quo* yang mungkin akan terganggu kenyamanannya. Ada masyarakat yang sudah skeptis dan apatis. Ada juga yang rendah diri dan *under estimate*. Namun, melihat tren kebijakan pendidikan, peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat, serta perkembangan tuntutan dan kemajuan zaman, perbaikan pendidikan nasional melalui reformasi kebijakan pendidikan sangat mungkin dilakukan. Semoga cita-cita pendidikan nasional dapat diwujudkan dan kita menjadi salah satu elemen penting untuk mewujudkan cita-cita tersebut dengan berkontribusi sebatas kemampuan optimal yang dapat kita berikan.

Mari berbuat! []



“Beragam persoalan ketidakadilan dalam dunia pendidikan mendorong kita untuk merenung. Di satu sisi, berbagai kebijakan pemerintah memang membantu peningkatan kualitas pendidikan. Namun, di sisi lain, kegagalan dalam menyelenggarakan kebijakan yang benar-benar dibutuhkan masyarakat membuat pemerintah tidak pernah tuntas dalam mengatasi permasalahan pendidikan.”



Bab 2

Lubang Menganga Alokasi Anggaran Pendidikan



Sumber: Dokumen Makmal Pendidikan

Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat, ada 40 kasus korupsi di bidang pendidikan sepanjang 2012, dengan nilai kerugian negara sebesar Rp 138,9 miliar. Dari 40 kasus ini, setengahnya terjadi di tingkat dinas pendidikan daerah. Peneliti ICW, Siti Juliantari Rachman, mengatakan bahwa modus yang kerap terjadi dalam korupsi bidang pendidikan ini ada lima, yakni berupa laporan kegiatan/proyek/dinas fiktif, *mark up* anggaran, pungutan liar, penggelapan dana, dan penyelewengan anggaran. Namun, total kerugian terbesar disebabkan oleh modus *mark up* anggaran.³⁷

³⁷ *Kompas*, 4 Januari 2013.



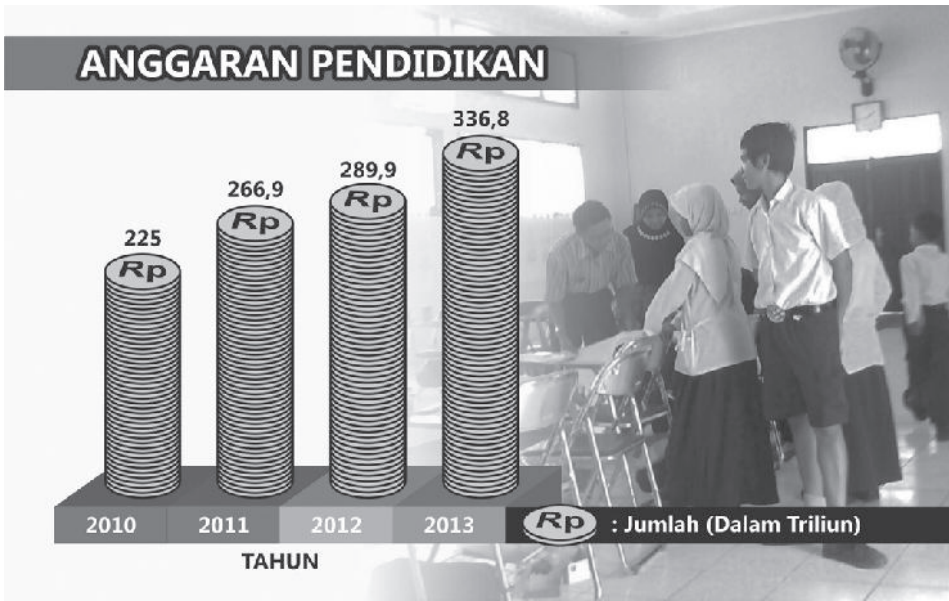
Selain penyelewengan yang kerap kali terjadi, daya serap pemerintah terhadap anggaran pendidikan pun dinilai masih rendah dan kurang efektif. Padahal, andaikan porsi anggaran pendidikan yang cukup besar tersebut digunakan dengan efisien dan tepat sasaran, kualitas pendidikan di Indonesia bisa lebih baik dari tahun ke tahun. Sayangnya, karena pemanfaatan anggaran pendidikan yang belum efektif, kualitas pendidikan di negara kita ini masih tertinggal jauh dibandingkan negara-negara maju.

Alokasi APBN

Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Untuk memenuhi hak tersebut, pemerintah pusat maupun daerah wajib memberikan layanan pendidikan yang merata bagi masyarakat tanpa adanya diskriminasi. Bahkan pada 2008 konstitusi mewajibkan pemerintah untuk mengalokasikan dana sekurang-kurangnya 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pendidikan.

Porsi anggaran 20 persen tersebut membawa angin segar bagi dunia pendidikan yang selama ini kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah. Adanya amanah konstitusi tersebut menjadi medan pembuktian keseriusan pemerintah dalam memperbaiki dunia pendidikan kita. Alokasi dana tersebut diharapkan dapat dipergunakan untuk menuntaskan program Wajib Belajar 9 Tahun, meningkatkan mutu dan daya saing pendidikan, serta pemeratakan akses pendidikan. Aturan 20 persen anggaran dari APBN juga berpengaruh terhadap peningkatan porsi anggaran pendidikan setiap tahunnya.



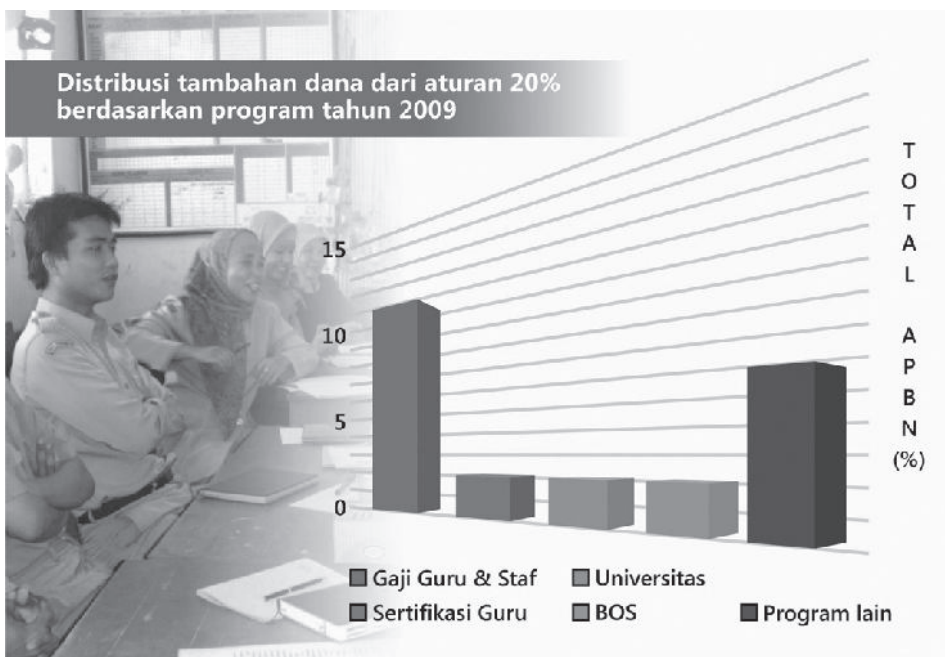


Sumber: diolah dari laman Departemen Keuangan RI.

Hasil penelitian World Bank menunjukkan bahwa aturan 20 persen alokasi untuk anggaran pendidikan tersebut berdampak pada meningkatnya sumber daya belanja pendidikan. Peningkatan terbesar terjadi pada 2009 ketika anggaran pendidikan meningkat 17 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Imbas dari meningkatnya anggaran pembelanjaan tersebut adalah akses dan kesetaraan di bidang pendidikan dasar.

Dalam lima tahun terakhir ini, akses dan kesetaraan dalam sektor pendidikan tergolong maju. Anak-anak keluarga miskin masuk sekolah pada usia yang lebih dini dan bersekolah lebih lama. Sayangnya, kemajuan ini hanya sampai pada tingkat dasar. Akses ke pendidikan menengah atas dan pendidikan tinggi tetap rendah, khususnya bagi masyarakat kurang mampu.





Sumber: Survei Manajemen Berbasis Sekolah, World Bank-RAND (2010)

Di sisi lain, dimasukkannya gaji pendidik dalam komponen porsi anggaran 20 persen dari APBN bukan tanpa masalah. Memasukkan gaji pendidik dalam alokasi anggaran memengaruhi anggaran untuk pelayanan dan peningkatan kualitas belajar-mengajar, seperti perbaikan dan perawatan gedung sekolah serta penyediaan buku pelajaran. Komponen biaya rutin (seperti gaji dan tunjangan guru) akan meningkat setiap tahunnya seiring dengan meningkatnya jumlah guru di Indonesia. Mau tidak mau kebutuhan ini menjadi prioritas dalam penganggaran pendidikan meskipun mengorbankan program peningkatan kualitas dan perluasan akses pendidikan bagi masyarakat luas, yang hanya menggunakan dana sisa setelah anggaran dialokasikan terlebih dulu untuk menggaji guru.

Menghadapi kondisi tersebut, amat mendesak adanya program kerja yang jelas dari pemerintah agar alokasi penggunaan anggaran pendidikan tepat sasaran dan sesuai dengan prioritas pemerintah. Dengan demikian, anggaran pendidikan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk seluruh aspek pendidikan; tidak hanya untuk kesejahteraan guru saja, namun juga untuk kesejahteraan seluruh masyarakat di negara ini. Selain itu,

pemerintah juga harus transparan karena dengan anggaran sebesar itu sangat mungkin terjadinya penyelewengan.

Dalam APBN 2013, anggaran pendidikan dialokasikan sebesar Rp 336,8 triliun.³⁸ Berikut rincian alokasi anggaran pendidikan di RAPBN-P 2013 dibandingkan APBN 2013 yang diajukan ke DPR:³⁹

- A. Anggaran pendidikan melalui pemerintah pusat
- Kementerian Pendidikan dan kebudayaan: Rp 73,1 triliun
 - Kementerian Agama: Rp 37,3 triliun
 - Kementerian negara/lembaga lainnya: Rp 7,4 triliun
 - Penyesuaian Pendidikan (beasiswa miskin dan beasiswa Bidik-misi): Rp 7,5 triliun (naik Rp 7,5 triliun)
- B. Anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah
- Bantuan alokasi pendidikan yang diperkirakan dalam Dana Bagi Hasil (DBH): Rp 900 miliar
 - Dana alokasi khusus (DAK) bidang pendidikan: Rp 11,1 triliun
 - Bantuan alokasi pendidikan yang diperkirakan dalam Dana Alokasi Khusus (DAU): Rp 128,1 triliun
 - Dana tambahan penghasilan guru pegawai negeri sekolah dasar (PNSD): Rp 2,4 triliun
 - Tunjangan profesi guru: Rp 43,1 triliun
 - Bantuan alokasi pendidikan yang diperkirakan dalam dana otonomi khusus: Rp 3,7 triliun
 - Dana insentif daerah: Rp 1,4 triliun.
 - Bantuan operasional sekolah: Rp 23,4 triliun.

Dengan besaran anggaran pendidikan tersebut, sudah seharusnya dipergunakan sebaik-baiknya dengan realisasi dari program-program pemerintah yang direncanakan. Pencapaian target-target yang berkaitan dengan infrastruktur dan peningkatan mutu pendidikan harus menjadi perhatian utama pemerintah agar kualitas pendidikan di Indonesia semakin baik.

38 Pada 18 Juni 2013 APBN Perubahan (APBN-P) 2013 ditetapkan sebesar Rp 345,335 triliun.

39 <http://finance.detik.com/read/2013/05/23/105918/2253748/4/anggaran-pendidikan-naik-jadi-rp-344-triliun-tahun-ini-ke-mana-larinya>



Peruntukan Anggaran Pendidikan

Setiap tahun porsi anggaran pendidikan di Indonesia selalu bertambah. Pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp 336,8 triliun untuk 2013. Anggaran ini meningkat dari setahun sebelumnya yang berjumlah Rp 289,95 triliun. Namun, pada kenyataannya, peningkatan anggaran pendidikan setiap tahunnya tidak berdampak signifikan terhadap kualitas pendidikan di Indonesia.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mohammad Nuh, mengatakan bahwa alokasi anggaran pendidikan 20 persen dari APBN, 60-70 persen di antaranya ditransfer ke daerah, baik berupa dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), tunjangan profesi guru, bantuan operasional sekolah (BOS), dana insentif daerah, maupun dana Otonomi Khusus Aceh dan Papua. Dalam APBN 2012, dari anggaran pendidikan Rp 289,95 triliun, hanya Rp 64,35 triliun yang ke Kemdikbud. Dana terbesar untuk daerah, sekitar Rp 187 triliun, serta Rp 30,5 triliun untuk 17 kementerian.⁴⁰

Berdasarkan hasil penelitian World Bank, hampir dua per tiga anggaran pendidikan di Indonesia digunakan untuk gaji guru dan sertifikasi guru. Jumlah guru yang semakin meningkat membuat belanja gaji guru semakin meningkat pula. Pengangkatan guru honorer menjadi pegawai negeri sipil (PNS) serta tunjangan sertifikasi guru juga turut berperan besar dalam peningkatan belanja gaji guru. Ironisnya, tidak ada korelasi antara penambahan guru dengan hasil belajar di tingkat pendidikan dasar. Begitu pula halnya dengan program sertifikasi guru yang menyerap 9 persen dari anggaran pendidikan yang tidak berdampak signifikan terhadap hasil belajar siswa.

Pada awalnya program sertifikasi guru bertujuan untuk memperbaiki kompetensi guru. Namun sayangnya, program tersebut kurang menunjukkan hasil karena prosedur sertifikasi yang sederhana dan tidak mengukur keahlian guru berdasarkan bidangnya. Persyaratan guru dalam memenuhi sertifikasi hanya dengan menunjukkan bukti pelatihan dan pengalaman yang pernah dijalani, tanpa perlu mengikuti pelatihan atau ujian lanjutan. Dengan demikian, program sertifikasi guru terhadap

⁴⁰ Kompas, 25 Mei 2013.



hasil belajar siswa tidak sebanding dengan besarnya biaya program yang dikeluarkan.

Fakta yang lain, program sertifikasi yang awalnya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan guru ternyata tidak jarang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif guru. Niat meningkatkan kesejahteraan yang berujung pada pemborosan oleh si penerima merupakan kabar menyedihkan. Alih-alih mensyukuri dengan menggunakan secara bijak pendapatan dari program sertifikasi, guru-guru yang mendadak konsumtif itu mengabaikan nasib yang dialami kolega mereka di tempat lain. Betapa tidak, di banyak daerah masih banyak guru yang sudah berpuluh-puluh tahun mengajar namun tingkat kesejahteraannya masih jauh dari kata layak.⁴¹

Selain untuk gaji guru, anggaran pendidikan juga lebih banyak digunakan untuk keperluan birokrasi dibandingkan untuk program pendidikan. Menurut Direktur Institute for Development of Economics and Finance, Enny Sri Hartati, masyarakat hanya menikmati sekitar 30 persen dari total alokasi anggaran pendidikan, seperti penambahan dan perbaikan kelas, bantuan operasional sekolah (BOS), serta pengadaan sarana dan prasarana pendidikan. Program pendidikan pun tidak jelas targetnya, yang terpenting adalah anggaran pendidikan terserap sebanyak-banyaknya secepat mungkin, misalnya dengan melakukan perjalanan dinas. Akibatnya, yang terjadi adalah inefisiensi anggaran pendidikan.

Untuk mengatasi inefisiensi anggaran pendidikan tentunya diperlukan target yang jelas dalam program pendidikan mengingat pendidikan merupakan investasi jangka panjang bagi perbaikan kualitas sumber daya manusia bangsa ini. Langkah berikutnya, perlu perbaikan sistem keuangan agar anggaran pendidikan bisa lebih efektif dan efisien. Jangan sampai kenaikan anggaran pendidikan setiap tahunnya menjadi sia-sia dan tidak dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat Indonesia.

41 Penelitian Makmal Pendidikan tentang kaitan antara kualitas sekolah dasar dan program sertifikasi bisa dilihat pada bab 8.



Pungutan Kian Liar

Anggaran pendidikan yang terus meningkat setiap tahun ternyata berbanding lurus dengan pungutan di sekolah dan perguruan tinggi yang semakin meningkat. Ada saja celah bagi sekolah untuk melakukan pungutan, seperti pada saat penerimaan siswa dan mahasiswa baru. Jenis pungutan yang biasa ditemui di sekolah-sekolah berdalih uang pendaftaran, uang komite, uang OSIS, uang kalender, uang buku pelajaran, uang seragam, uang masa orientasi sekolah, uang PMI, uang komputer, dan lain-lain.

Pemerintah sebenarnya telah mengeluarkan peraturan yang melarang pungutan terhadap siswa, seperti Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan Pada Satuan Pendidikan Dasar yang menggantikan Permendikbud Nomor 60 Tahun 2011 tentang Larangan Pungutan Biaya Pendidikan pada SD dan SMP. Permendikbud Nomor 44 Tahun 2012 pasal 9 ayat 1 menyatakan bahwa satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan pemerintah dan/atau pemerintah daerah dilarang memungut biaya pendidikan. Sementara pada pasal 9 ayat 2 menyatakan bahwa satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan masyarakat yang dapat bantuan pemerintah dan/atau pemerintah daerah pada tahun ajaran berjalan, dapat memungut biaya pendidikan yang digunakan hanya untuk memenuhi kekurangan biaya investasi dan biaya operasi. Pasal 9 ayat 3 menyatakan bahwa satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang tidak sedang mendapat bantuan pemerintah dan/atau pemerintah daerah pada tahun ajaran berjalan, dapat memungut biaya satuan pendidikan.

Dengan kenaikan anggaran pendidikan setiap tahunnya dan adanya Permendikbud yang melarang praktik pungutan, seharusnya sudah tidak ada lagi pungutan di sekolah maupun perguruan tinggi. Namun, pada kenyataannya, praktik pungutan di sekolah maupun perguruan tinggi sangat sulit untuk dihilangkan. Tidak sedikit orangtua siswa yang mengeluhkan pungutan liar di sekolah anak mereka. Bahkan beberapa pungutan liar dilakukan secara terang-terangan oleh pihak sekolah seperti pada saat pendaftaran siswa baru atau saat kepindahan siswa baru ke sekolah mereka. Contoh kasus pungutan terhadap siswa terjadi di salah



satu SMKN di Batam pada 2012 yang mencapai Rp 15 juta per siswa, yang dilakukan pada saat pendaftaran. Pihak sekolah berdalih, biaya tersebut dikenakan kepada siswa sesuai dengan kemampuan orangtua. Contoh aneh lain pungutan terhadap siswa ditemukan di Malang, yakni mengatasnamakan sumbangan pergantian kepala sekolah, uang map ijazah, uang jasa untuk mendaftarkan siswa ke sekolah lanjutan, dan uang menulis ijazah.

Komite sekolah juga sering kali dijadikan sebagai celah untuk melakukan pungutan di sekolah dari orangtua. Padahal, dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tanggal 2 April 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah dinyatakan bahwa salah satu fungsi komite sekolah adalah menggali dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di setiap satuan pendidikan.⁴² Hal tersebutlah yang dijadikan dasar untuk melegalkan pungutan yang dilakukan oleh komite sekolah. Komite sekolah yang sudah dipengaruhi oleh pihak sekolah ini pun berdalih bahwa pungutan itu sudah melalui musyawarah para orangtua siswa. Di lain pihak, orangtua siswa pun tidak berani menolak keinginan pihak sekolah melalui komite sekolah karena khawatir anak mereka tidak bisa diterima di sekolah tersebut.

Berbagai kasus pungutan liar tersebut tentu saja berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan satuan pendidikan. Pungutan liar juga dapat menyebabkan semakin suburnya budaya korupsi di lingkungan pendidikan yang berdampak pada semakin sulitnya akses pendidikan khususnya bagi masyarakat kurang mampu untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas.

Keadaan di atas semestinya tidak boleh dibiarkan terus-menerus terjadi. Agar tidak semakin menjamur dan menjadi kebiasaan, perlu ada tindakan tegas dari pemerintah terkait praktik-praktik pungutan di sekolah.

Pemerintah sendiri tidak menafikan adanya praktik-praktik pungutan di sekolah. Namun, pemerintah juga mengaku kesulitan melakukan pengawasan pungutan liar di berbagai sekolah karena terbatasnya jumlah

42 *Kompas*, 28 Juni 2012.



pengawas jika dibandingkan jumlah sekolah yang harus diawasi. Untuk itu, Mendikbud berharap masyarakat berperan aktif dalam memantau dan melaporkan berbagai jenis praktik pungutan di sekolah karena hasil laporannya tersebut akan berguna bagi Kemdikbud dalam memetakan dan menyelesaikan masalah.

Bantuan Operasional Sekolah

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan program pemerintah untuk membantu biaya operasional sekolah. BOS diberikan kepada seluruh SD/MI dan SMP/MTs baik negeri maupun swasta, di seluruh Indonesia. Meskipun selama ini dana BOS hanya menutupi 70 persen dari keseluruhan kebutuhan siswa, program yang sudah dimulai sejak Juli 2005 ini telah berperan besar dalam mempercepat pencapaian program Wajib Belajar 9 Tahun. Dana BOS sendiri secara umum bertujuan untuk meringankan beban masyarakat dalam pembiayaan pendidikan serta untuk menghapus berbagai pungutan terhadap siswa dari sekolah.

Dengan adanya BOS ini diharapkan dapat meningkatkan dan memperluas akses pendidikan di jenjang pendidikan dasar terutama bagi anak dari kalangan masyarakat kurang mampu, serta dapat meningkatkan mutu pendidikan dasar di Indonesia. Bagaimanapun juga pendidikan dasar merupakan fondasi awal bagi pengembangan kualitas dan mutu sumber daya manusia di Indonesia. Untuk itulah, BOS diharapkan pada masa mendatang menjadi pilar utama dalam mewujudkan pendidikan dasar gratis di Indonesia.

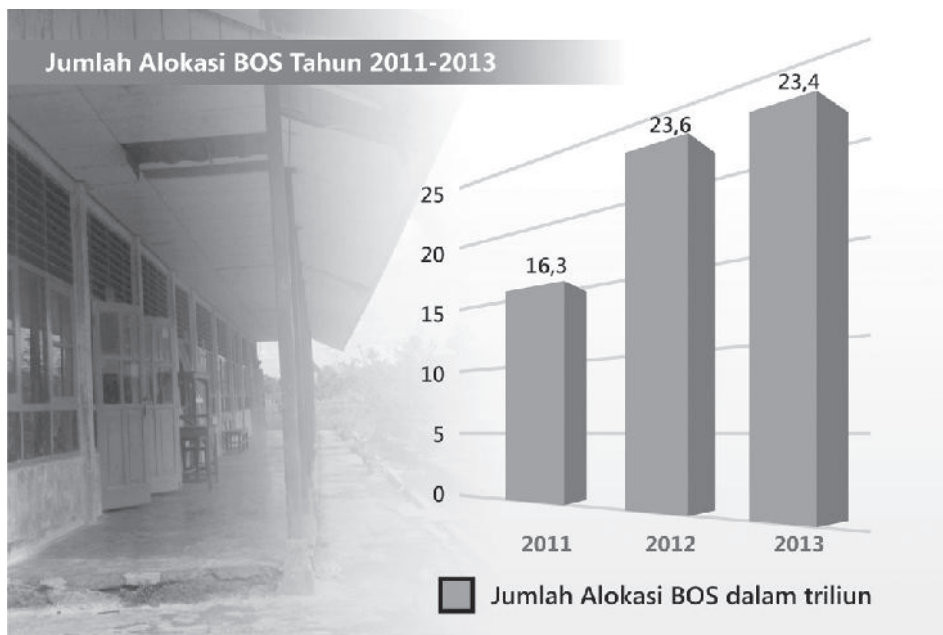
Selain dana BOS, pemerintah juga memberikan bantuan lain bagi sekolah-sekolah di Indonesia, misalnya dana bantuan operasional sekolah daerah (BOSDA). Dana BOSDA merupakan program bantuan operasional sekolah yang diberikan oleh pemerintah provinsi kepada SD dan SMP yang digunakan untuk memenuhi kekurangan dana melengkapi dana BOS dari pemerintah pusat.

Alokasi Dana BOS

Dana BOS mendapatkan porsi yang cukup besar dalam anggaran pendidikan. Pemerintah sepertinya tidak main-main dalam meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan dasar di negara ini. Jumlah alokasi dana



BOS pun mengalami peningkatan sejak 2011. Alokasi dana BOS sendiri di setiap sekolah didasarkan pada jumlah siswa.



Sumber: data diolah dari laman Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Alokasi dana BOS mulai 2012 untuk siswa tingkat SD sebesar Rp 580 ribu per siswa per tahun dan untuk siswa tingkat SMP sebesar Rp 710 ribu per siswa per tahun. Jumlah tersebut meningkat dari setahun sebelumnya, pada saat siswa tingkat SD menerima Rp 397 ribu per siswa per tahun dan siswa tingkat SMP menerima Rp 570 ribu per siswa per tahun. Penerima BOS sendiri meliputi satuan pendidikan dasar yang terdiri atas SD/MI, SDLB, SMP/MTs, SMPLB, SMPT, dan SD-SMP satu atap (SATAP), serta tempat kegiatan belajar mandiri (TKBM) baik negeri maupun swasta di seluruh Indonesia.

Penggunaan dana BOS terbesar pada 2012 terdapat pada komponen kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler siswa, kegiatan ulangan dan ujian, serta pembayaran honor insentif guru (seperti untuk pembuatan soal ujian). Pada 2013 ini tidak ada perubahan yang terjadi untuk penggunaan dana BOS, yakni lebih banyak habis di tiga komponen itu.



Penggunaan dana BOS untuk sekolah yang orangtua siswa sudah mampu bisa digunakan untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah tersebut. Adapun untuk sekolah dengan orangtua siswa kurang mampu, dapat digunakan untuk meringankan biaya sekolah. Pemberian bantuan BOS dari pemerintah ini diharapkan dapat mengurangi pungutan-pungutan yang ada di sekolah.

Sekolah-sekolah swasta yang sudah mapan biasanya menolak untuk menerima dana BOS karena sekolah mereka merasa cukup mampu menutupi biaya-biaya operasional sekolah.⁴³ Sekolah swasta memang tidak diwajibkan untuk menerima dana BOS, namun sekolah tetap harus memberikan akses bagi siswa yang kurang mampu secara ekonomi untuk mengakses pendidikan tanpa diperbolehkan menarik pungutan dari siswa kurang mampu tersebut. Pungutan yang ditarik dari siswa pun harus berdasarkan kesepakatan dari dewan guru dan komite sekolah. Di sinilah perlunya pengawasan dari pemerintah daerah dan dinas pendidikan daerah setempat dalam mengawasi pungutan-pungutan di sekolah swasta yang ada di daerahnya agar sekolah tidak semena-mena dalam menarik pungutan dari siswa.

Bantuan dana BOS bagi sekolah swasta seyogianya diberikan pada sekolah-sekolah swasta yang memang belum kuat secara ekonomi dan layak dibantu oleh pemerintah. Faktanya memang tidak sedikit sekolah swasta yang belum kuat secara ekonomi yang belum mendapatkan dana BOS sehingga mereka kesulitan dalam memenuhi biaya operasional sekolahnya.

Pemerintah tentunya perlu lebih bijak dalam menentukan sasaran penerima dana BOS. Jangan sampai terjadi ketimpangan status sekolah penerima dana BOS. Pemberian bantuan dana BOS bagi sekolah swasta yang sudah mapan secara ekonomi dapat dialihkan bagi sekolah-sekolah swasta yang belum mapan secara ekonomi, agar pemerataan akses pendidikan di Indonesia dapat tercapai.

43 Selain karena alasan sudah mampu secara keuangan, pengelola sekolah swasta mapan juga tidak ingin direpotkan dengan birokrasi dan administrasi yang menyita konsentrasi apabila sekolahnya bersedia menerima BOS.



BOS di Lingkungan Kementerian Agama

Seperti halnya sekolah-sekolah di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), sekolah-sekolah di bawah Kementerian Agama (Kemenag) juga mendapatkan dana BOS dari pemerintah. Sasaran BOS di lingkungan Kemenag adalah Madrasah Ibtidaiyah (MI) baik negeri maupun swasta, Madrasah Tsanawiyah (MTs) baik negeri maupun swasta, Pondok Pesantren Salafiyah (PPS) tingkat Ula, dan Pondok Pesantren Salafiyah tingkat Wustha penyelenggara Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Wajar Dikdas) di seluruh Indonesia yang memiliki izin operasional.

Besaran BOS yang diterima oleh siswa Madrasah/PPS sama dengan yang diterima oleh siswa sekolah di bawah Kemdikbud, yaitu Rp 580.000/siswa/tahun untuk Madrasah Ibtidaiyah/PPS Ula dan Rp 710.000/siswa/tahun untuk Madrasah Tsanawiyah/PPS Wustha. Mekanisme penyaluran dana BOS Madrasah pada 2013 juga sama dengan mekanisme penyaluran di sekolah di bawah Kemdikbud, yakni dana dari pemerintah pusat ditransfer ke pemerintah provinsi untuk selanjutnya disalurkan ke masing-masing sekolah penerima BOS dengan periode triwulan (per tiga bulan).

Meskipun madrasah mendapatkan porsi yang sama dalam anggaran BOS, kesan bahwa madrasah dianaktirikan oleh pemerintah masih ada. Padahal, dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), madrasah memiliki status yang sama dengan sekolah umum lainnya. Sampai saat ini diskriminasi pembiayaan di sekolah umum dan madrasah masih terjadi. Untuk sekolah umum, mereka menerima BOS dari Kemdikbud dan BOS Daerah (BOSDA). Adapun madrasah hanya mendapatkan BOS yang disalurkan oleh Kemenag. Dalam penyaluran BOS pun terjadi ketidakadilan. Untuk BOS sekolah umum sudah bisa dicairkan per Januari, dan bila anggaran dari pemerintah pusat belum bisa dicairkan, segera ditalangi dulu oleh APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah). Lain halnya dengan BOS untuk madrasah, harus langsung disalurkan oleh Kemenag sehingga biasanya baru turun sekitar Maret.⁴⁴

Selesai? Ternyata belum. Rupanya banyak pemerintah daerah yang hanya menggratiskan sekolah-sekolah umum saja, tetapi tidak untuk

44 *Republika*, 6 Januari 2013.



madrasah dengan alasan bahwa madrasah berada di bawah Departemen Agama. Berbagai fasilitas dan pembangunan sarana dan prasarana pun kurang dirasakan oleh madrasah. Sungguh ironis memang mengingat di beberapa daerah tertentu tidak sedikit orangtua yang memilih untuk menyekolahkan anak mereka di madrasah.

Setali dengan institusinya, guru-guru di madrasah pun ternyata nasibnya tidak seberuntung guru-guru di sekolah umum, terutama dalam sertifikasi guru. Pemerintah cenderung lebih memprioritaskan guru-guru pada sekolah umum dalam kuota sertifikasi dibandingkan guru-guru di madrasah. Padahal, guru-guru di sekolah umum sudah berprestasi layak dibandingkan guru-guru di madrasah yang sudah bertahun-tahun mengabdikan dan sama-sama berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

Di tengah diskriminasi yang ada itu, guru-guru di madrasah sepentasnya perlu membuktikan kemampuan mengajar mereka. Tidak mudah memang lantaran rendahnya gaji serta jarang mereka diikutsertakan dalam pelatihan dapat menjadi penghambat dalam meningkatkan kompetensi mereka. Apa boleh buat, dengan keterbatasan yang ada mereka tetap perlu membuktikan kepada masyarakat bahwa kualitas siswa-siswa lulusan madrasah juga mumpuni. Dari sini diharapkan pemerintah mau membuka pikiran dan nuraninya untuk melihat keadaan yang sebenarnya di lapangan.

Dari sekitar 67.000 madrasah, baik madrasah ibtidaiyah, madrasah tsanawiyah, maupun madrasah aliyah (setingkat SD, SMP, dan SMA), sekitar 91 persen di antaranya didirikan dan dikelola swasta.⁴⁵ Sebagai perbandingan, jumlah lembaga pendidikan di bawah Kemdikbud saat ini sebanyak 130.563 SD negeri dan 12.689 SD swasta, 17.714 SMP negeri dan 12.152 SMP swasta, serta 5.034 SMA negeri dan 6.002 SMA swasta.⁴⁶ Mungkin karena pihak swasta adalah pemilik dan pengelolanya, madrasah dianaktirikan oleh, terutama, pemerintah daerah.

Kendati banyak pemerintah daerah kerap menganaktirikan madrasah, ini tidak berarti berlaku pada semua pemerintah daerah. Setiap

45 Sebagian besar madrasah juga memiliki hubungan yang erat dengan pesantren sehingga pengelolaan madrasah menjadi kurang jelas.

46 *Kompas*, 4 Oktober 2012.



daerah memang memiliki pola pembinaan yang berbeda terhadap madrasah sehingga ini memengaruhi tingkat perhatian kepada madrasah. Yang terjadi di Nanggroe Aceh Darussalam menarik untuk ditulis di sini. Di Aceh, madrasah lebih unggul dibandingkan sekolah negeri karena daerah tersebut menganut hukum Islam. Masyarakat di Aceh pun lebih banyak yang memilih untuk menyekolahkan anak mereka di madrasah dibandingkan di sekolah umum karena reputasi madrasah di Aceh yang lebih baik dibandingkan sekolah umum. Berbeda dengan di Aceh, madrasah-madrasah yang ada di daerah-daerah lain kebanyakan dimiliki oleh keluarga yang mewakafkannya. Tidak jarang para ahli waris pewakaf memanfaatkan bantuan pemerintah untuk madrasah untuk menghidupi keluarga mereka. Untuk alasan ini mungkin pemerintah daerah tidak ingin bantuannya salah sasaran.

Untuk menjawab tantangan di atas, yang perlu dilakukan saat ini adalah perbaikan pengelolaan madrasah dari semua sisi, mulai dari pengurus, siswa, sampai guru. Jika madrasah dikelola dengan baik, tentunya anggapan bahwa lulusan madrasah kurang berkualitas akan serta-merta sirna dari masyarakat. Dengan demikian, pada akhirnya lulusan madrasah pun layak bersaing dengan siswa-siswa lulusan sekolah umum.

Selain dalam hal pengelolaan, madrasah juga perlu lebih menonjolkan keunggulan mereka dibandingkan sekolah umum, yakni tambahan materi agama yang lebih banyak dibandingkan sekolah umum. Tidak heran bila di daerah tertentu masyarakat setempat lebih tertarik untuk menyekolahkan anak mereka di madrasah.

Peningkatan mutu madrasah masih terkendala oleh masih banyaknya madrasah yang belum terakreditasi. Dari 67.000 madrasah, yang sebagian besar menangani anak-anak dari keluarga tak mampu secara ekonomi, baru 68 persen yang terakreditasi. Sementara guru madrasah baru sekitar 57 persen yang mengikuti sertifikasi.⁴⁷

Keberadaan madrasah atau bahkan pesantren berandil dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Belum lagi kalau jejak panjang di masa pra-kemerdekaan Indonesia, yang menempatkan madrasah dan pesantren sebagai basis perlawanan terhadap penjajahan dan sarana pendidikan

47 *Kompas*, 4 Oktober 2012.



pribumi, amat disayangkan bila aset besar bangsa ini diabaikan. Dengan demikian, sudah sepantasnya pemerintah berlaku adil pada semua sekolah yang ada di Indonesia, baik sekolah-sekolah umum maupun madrasah/PPS. Berlebihan bila pemerintah menuntut prestasi tinggi dari para siswa madrasah, sementara pemerintah juga masih menganaktifkan madrasah. Sudah selayaknya semua sekolah di Indonesia diperlakukan sama oleh pemerintah demi kemajuan bangsa ini.

Keterlambatan Penyaluran BOS

Dana BOS memang terbukti membantu sekolah dan siswa dalam meringankan beban pendidikan. Sayangnya, niat baik pemerintah dalam menyukseskan Wajib Belajar 9 Tahun ini tidak sepenuhnya berjalan lancar di lapangan. Banyak laporan mengenai keterlambatan penyaluran dana BOS yang berdampak pada pelayanan pendidikan di sekolah. Akibatnya, sebagian sekolah terpaksa meminjam dana dari pihak ketiga untuk menutupi kekurangan biaya operasional sekolah mereka.

Berbagai spekulasi bermunculan terkait keterlambatan penyaluran dana BOS ini, salah satunya terkait dengan masalah skema penyaluran dana BOS yang kerap kali berganti-ganti. Sejak program ini diluncurkan pada tahun 2005 hingga 2010, skema penyaluran dana BOS yang dilakukan adalah dana dari Kementerian Keuangan langsung disalurkan ke sekolah-sekolah. Pada 2011, skema penyaluran dana BOS pun diganti menjadi dana dari Kementerian Keuangan disalurkan ke kas-kas daerah lalu diteruskan ke sekolah-sekolah. Namun, pada kenyataannya, skema penyaluran dana BOS 2011 itu malah menimbulkan persoalan keterlambatan pencairan ke sekolah-sekolah. Tidak mau berulang kejadian serupa, setahun berikutnya skema penyaluran dana BOS diubah kembali menjadi dana dari Kementerian Keuangan disalurkan ke kas-kas provinsi kemudian masuk ke rekening sekolah. Diharapkan dengan skema ini, penyaluran dana BOS tidak akan terlambat lagi.

Skema penyaluran dana BOS yang digunakan saat ini memang lebih mudah dibandingkan skema sebelumnya yang harus melalui pemerintah daerah. Selesai persoalan? Ternyata tidak. Skema baru yang lebih mudah itu justru rawan menimbulkan kekeliruan. Dalam surat perjanjian yang dibuat pihak sekolah penerima BOS dinyatakan bahwa



pihak sekolah sanggup membuat surat pertanggungjawaban (SPJ) pada akhir tahun anggaran atau triwulan keempat. Dinas pendidikan seakan tidak diberikan peluang untuk mengendalikan dan mengetahui sejauh mana realisasi dan penggunaan dana BOS oleh pihak sekolah. Selain itu, mekanisme ini tidak memerlukan adanya evaluasi dan pemantauan dana BOS sehingga dinas pendidikan hanya menerima pelaporan dari pihak sekolah. Berbeda dari tahun sebelumnya, pencairan dana BOS dikawal oleh dinas pendidikan secara teliti dan hati-hati. Apabila pihak sekolah ingin mencairkan dana BOS, salah satu syarat mencairkan dana pihak sekolah harus melampirkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS), dan pertanggungjawaban dana triwulan sebelumnya. Setelah semua syarat terpenuhi, dinas pendidikan baru memberikan rekomendasi kepada pihak sekolah untuk mencairkan dana BOS.⁴⁸

Baik skema penyaluran BOS terdahulu maupun yang digunakan saat ini memang memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Skema terdahulu memang berpotensi menimbulkan keterlambatan dalam pencairan, namun sangat sedikit peluang terjadinya kekeliruan. Adapun skema penyaluran yang digunakan saat ini memang lebih mudah, namun peluang terjadinya kekeliruan lebih besar. Jadi, skema apa pun yang digunakan dalam penyaluran dana BOS, tetap memerlukan pengawasan yang ketat baik dari pemerintah maupun dari masyarakat.

Penyelewengan BOS

Sudah banyak dana yang dikeluarkan pemerintah untuk anggaran pendidikan. Dana yang dikeluarkan itu ternyata banyak yang tidak tepat sasaran dan diselewengkan, tidak terkecuali dalam penggunaan dana BOS.

Berdasarkan hasil penelitian Yayasan Satu Karsa Karya di Gunung Kidul (DI Yogyakarta) dan Solo (Jawa Tengah), bentuk penyimpangan penggunaan BOS antara lain berupa sekolah belum menyusun dan mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS) saat BOS cair. Sekolah juga tidak mencantumkan seluruh penerimaan BOS dalam Rancangan APBS. Kepala sekolah juga tidak transparan dalam mengelola dana sekolah, dan terjadi manipulasi surat pertanggungjawaban BOS.⁴⁹

48 *Republika*, 18 Oktober 2012.

49 *Kompas*, 10 Oktober 2012



Lain lagi dengan kasus di Karawang (Jawa Barat), para kepala sekolah SD dan SMP dimintai “bantuan lebaran” oleh dinas terkait di sana. Bantuan tersebut akhirnya diambil dari dana BOS, dengan teknis setiap siswa dipotong Rp 1.000 dari dana bantuan pemerintah tersebut. Seorang kepala sekolah salah satu SD di Kecamatan Klari memberikan kesaksian. “Bagi SD gemuk, *japrem*-nya⁵⁰ antara Rp 2 juta sampai Rp 3 juta. Sedangkan SD yang kurus, antara Rp 500 ribu sampai Rp 1 juta. Adapun, *japrem* bagi SMP di atas Rp 5 juta. Hal itu, tergantung dari jumlah siswa penerima BOS.”

Setiap kepala sekolah tidak bisa berbuat apa-apa dengan kebijakan tidak tertulis tersebut. Betapa tidak, bila tidak dituruti akan ada embel-embel yang harus diterima kepala sekolah, seperti mutasi secara mendadak atau pihak Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) tidak akan membantu untuk pencairan BOS berikutnya.⁵¹

Ketidakterbukaan pihak sekolah dalam pengelolaan dana BOS menimbulkan permasalahan. Penggunaan dana BOS yang tidak transparan dari pihak sekolah kepada orangtua siswa dapat membuka peluang korupsi dengan adanya berbagai pungutan di sekolah. Informasi mengenai penggunaan dana BOS seperti nama-nama siswa penerima dana BOS, jumlah dana BOS yang didapatkan, serta Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) seharusnya dipublikasikan kepada orangtua siswa. Selama ini, penyusunan APBS, terutama pengelolaan dana bersumber dari BOS, kurang melibatkan partisipasi orangtua siswa sehingga kebocoran dana pun tidak dapat dihindari. Transparansi dalam penggunaan dana BOS merupakan sebuah keharusan karena bantuan ini menggunakan anggaran negara yang notabene berasal dari uang rakyat.

Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) pada 2012 telah memutuskan bahwa dokumen Surat Pertanggungjawaban Dana BOS merupakan dokumen terbuka. Konsekuensinya, publik bisa mengakses dokumen tersebut apabila ada kebutuhan informasi atau kejanggalan dalam pengelolaan dana BOS sehingga sekolah berkewajiban membuka dokumen tersebut. Putusan ini bisa menjadi dasar hukum bagi orangtua

50 Japrem: akronim dari “jatah preman”, sebuah istilah yang merujuk pada pungutan liar oleh aparat.

51 *Republika*, 7 Agustus 2012.



siswa untuk menelisik kejanggalan dalam pengelolaan seluruh dana publik di sekolah.⁵²

Kebanyakan yang saat ini terjadi adalah dana BOS digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya. Praktik semacam ini biasanya terjadi pada sekolah-sekolah swasta kecil ataupun yayasan yang kekurangan pasokan dana. Dana tersebut digunakan untuk pembangunan sekolah ataupun perbaikan ruang kelas yang rusak. Mereka melakukan itu karena tidak semua sekolah mendapatkan kuota untuk perbaikan sekolahnya yang rusak. Belum lagi proses pengajuan yang sangat panjang sehingga sekolah-sekolah tersebut terpaksa menggunakan dana BOS untuk perbaikan gedung sekolah.

Untuk mencegah penyelewengan dana BOS diperlukan mekanisme pengawasan yang melibatkan masyarakat secara aktif. Di sekolah-sekolah tertentu, dengan komite sekolah terdiri atas orangtua siswa, pengawasan penggunaan dana BOS bisa efektif berjalan.

Selain pengawasan aktif dari masyarakat, pemerintah juga perlu meninjau ulang terkait Permendiknas Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Selama ini kewenangan komite sekolah hanya sebatas penanda tangan laporan keuangan sekolah sebagai syarat pencairan dana BOS setiap triwulan. Untuk itulah, peran komite sekolah perlu lebih ditingkatkan. Komite sekolah perlu diberi kewenangan dalam menetapkan kebijakan strategis sekolah, terutama dalam perencanaan, penganggaran, dan pengelolaan dana sekolah.

Bantuan Operasional Sekolah Menengah

Mulai 2013 pemerintah akan mencairkan dana BOS untuk jenjang SMA dan sederajat dengan nama Bantuan Operasional Sekolah Menengah (BOSM). Program ini seiring dengan dirintisnya program Wajib Belajar 12 Tahun. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah (Ditjen Dikmen) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) menganggarkan BOS untuk SMA/SMK (dan yang sederajat) senilai Rp 8,4 triliun untuk tahun ajaran 2013/2014. BOSM akan mengurangi beban orangtua siswa karena dapat mengurangi biaya SPP atau biaya investasi di sekolah.

52 <http://www.menkokesra.go.id/content/dana-bos-rawan-penyelewengan>



BOSM sebenarnya sudah mulai disalurkan pada pertengahan 2012, namun *unit cost*-nya masih sangat kecil, yaitu Rp 120 ribu per siswa per tahun. Rintisan ini sengaja dalam besaran bantuan dalam jumlah yang minim, dengan tujuan untuk melatih dan menguji coba sistem penyalurannya. Setelah dinilai berhasil, mulai 2013 jumlahnya naik dengan signifikan, yaitu Rp 1 juta per anak per tahun. Bantuan itu akan diberikan kepada 9,8 juta siswa di jenjang tersebut, termasuk para siswa di sekolah yang berada di bawah naungan Kementerian Agama.⁵³

Untuk pencairan dana BOSM ini mirip dengan dana BOS SD dan SMP, yakni dari pemerintah pusat ke pemerintah provinsi untuk selanjutnya disalurkan ke sekolah atau satuan pendidikan yang menerima dana BOSM. Sama halnya dengan dana BOS, bantuan BOSM hanya dapat menutupi sekitar 70 persen dari kebutuhan operasional siswa.

BOSM merupakan penunjang dalam pelaksanaan program Wajib Belajar 12 Tahun atau Pendidikan Menengah Universal (PMU) yang mulai dilaksanakan pada 2013. Program PMU bertujuan untuk memberikan kesempatan yang lebih luas bagi penduduk usia 16-18 tahun untuk dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang menengah-atas yang ditanggung bersama oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Rencananya, bantuan ini akan cair pada tahun ajaran baru 2013/2014 atau sekitar Juli 2013.

PMU ini memiliki tiga sasaran utama. Sasaran pertama adalah untuk menaikkan Angka Partisipasi Kasar (APK)⁵⁴ pendidikan menengah secara signifikan karena saat ini setidaknya terdapat 235 kabupaten/kota yang APK-nya di bawah rata-rata nasional. Kedua, PMU ditujukan untuk memperkecil disparitas antar-kabupaten/kota. Ada 71 kabupaten/kota yang saat ini rata-rata APK-nya di bawah 50 persen. Dengan PMU ini, diharapkan akan mendongkrak APK di kabupaten/kota tersebut agar mempersempit disparitas APK-nya dengan kabupaten/kota lainnya. Ketiga, PMU akan memperbaiki komposisi SMA dan SMK. Diharapkan dengan PMU ada keseimbangan antara pendidikan vokasi dan akademis

53 *Kompas*, 24 Agustus 2012.

54 Merujuk pada definisi Badan Pusat Statistik dan Millennium Development Goals (MDGs), Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah perbandingan antara jumlah murid pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase.



reguler. Untuk mendukung tujuan tersebut, pemerintah akan melakukan perbaikan infrastruktur, mulai dari rehabilitasi SMA/SMK yang rusak berat, hingga pendirian unit sekolah baru.⁵⁵

Menjelang pelaksanaan PMU, Kemdikbud akan mewajibkan setiap daerah untuk membuat standar biaya pendidikan. Dengan standar itu akan dapat diketahui berapa biaya yang harus ditanggung masyarakat, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat. Standar ini juga untuk menghindari kebijakan sepihak daerah yang menetapkan standar biaya pendidikan seadanya sehingga menurunkan mutu pendidikan.⁵⁶

Bantuan Siswa Miskin

Program Bantuan Siswa Miskin (BSM) adalah bantuan langsung yang diberikan kepada siswa SD, SMP, SMA/SMK dari keluarga kurang mampu agar dapat terus melanjutkan pendidikan di sekolah. Bantuan ini bertujuan untuk mengurangi jumlah siswa putus sekolah akibat permasalahan biaya pendidikan, membantu siswa miskin untuk mendapatkan pendidikan yang layak, serta mendukung program Wajib Belajar Sembilan Tahun. Sumber dana program BSM ini bersumber dari APBN.

BSM terdiri dari dua macam, yaitu BSM yang diatur oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan BSM yang diatur oleh Kementerian Agama. BSM yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terdiri dari Bantuan Siswa Miskin (BSM) dan Beasiswa Bakat dan Prestasi, sementara BSM yang dikelola oleh Kementerian Agama disebut sebagai Bantuan Beasiswa Siswa Miskin (disatukan pengelolaannya antara bantuan dengan beasiswa).⁵⁷

Kemdikbud mengambil kebijakan untuk menambah jumlah penerima dan nominal Bantuan Siswa Miskin (BSM), yang dialokasikan dari Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2013. Hal itu juga merupakan wujud kompensasi atas rencana kenaikan harga BBM. Dalam RAPBN-P 2013, Kemdikbud mengusulkan

55 <http://www.kemdiknas.go.id/kemdikbud/berita/590>

56 <http://nasional.sindonews.com/read/2012/11/07/15/686456/daerah-wajib-buat-standar-biaya-pendidikan>

57 <http://tnp2k.go.id/tanya-jawab/klaster-i/program-bantuan-siswa-miskin-bsm/>



anggaran sebesar Rp 7,4 triliun. Jumlah tersebut akan dialokasikan untuk memperluas cakupan program BSM, dari 5,9 juta siswa menjadi 12,6 juta siswa. Tidak hanya itu, *unit cost* juga bertambah. Untuk SD dari Rp 360.000 per siswa per tahun menjadi Rp 450.000 per siswa per tahun, SMP dari Rp 560.000 menjadi Rp 750.000, sedangkan untuk SMA/SMK tetap Rp 1 juta per siswa per tahun.⁵⁸

Tahun	Kuota Penerima BSM	Alokasi APBN
2010	5.943.563	3.397.072.860
2011	5.418.192	2.822.820.520
2012	7.567.716	3.805.156.400

Sumber: Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K)

Pada jenjang pendidikan tinggi, pemerintah menggulirkan program beasiswa bagi anak kurang mampu dengan nama bantuan belajar mahasiswa miskin ber-IPK 2,5, dan beasiswa Bidikmisi. Bidikmisi merupakan program pemerintah melalui Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi (Ditjen Dikti) Kemdikbud dalam memberikan bantuan biaya pendidikan kepada mahasiswa kurang mampu secara ekonomi yang memiliki potensi akademis memadai untuk dapat menempuh pendidikan sampai ke jenjang pendidikan tinggi.

Bantuan yang diberikan dalam program Bidikmisi terdiri atas bantuan biaya hidup yang diserahkan kepada mahasiswa sekurang-kurangnya sebesar Rp 600 ribu per bulan yang ditentukan berdasarkan Indeks Harga Kemahalan daerah lokasi PTN, dan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan yang dikelola PTN sebanyak-banyaknya Rp 2,4 juta per semester per mahasiswa.

Sebelum 2012, beasiswa Bidikmisi identik dengan kampus negeri mengingat hanya mahasiswa PTN saja yang berhak menerimanya. Mulai tahun ajaran 2012, mahasiswa perguruan tinggi swasta juga berkesempatan meraihnya. Program beasiswa kepada 2000 mahasiswa di PTS itu diberikan kepada mahasiswa miskin berprestasi dari PTS dengan

58 <http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/05/31/226366/16/Penerima-Bantuan-Siswa-Miskin-Ditambah>



program studi (prodi) terakreditasi A.⁵⁹ Pada tahun ajaran 2013, kuota untuk mahasiswa PTS dinaikkan menjadi 3000.⁶⁰

Pemerintah juga meluncurkan beberapa program lain sebagai wujud keberpihakan terhadap siswa miskin, di antaranya Bantuan Khusus Murid Miskin (BKMM), dan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM), masing-masing untuk jenjang pendidikan menengah.

Program BKMM yang diluncurkan pemerintah sejak 2010 bertujuan untuk membantu siswa miskin dalam memenuhi kebutuhan biaya pendidikan selama di SMA serta membantu menurunkan angka putus sekolah. Bantuan ini diberikan langsung secara tunai kepada siswa miskin melalui kantor pos setempat. Dana BKMM dapat dimanfaatkan siswa untuk iuran sekolah, pembelian perlengkapan, atau untuk biaya transportasi ke sekolah.

Adapun program BOMM diberikan oleh pemerintah guna membantu pembiayaan operasional sekolah dalam meningkatkan mutu dan kualitas pembelajaran di jenjang pendidikan menengah melalui penyediaan bahan praktik dan bahan ajar atau alat bantu pembelajaran. Besaran dana yang diberikan tergantung kepada jumlah siswa yang ada di sekolah masing-masing.

Dengan adanya berbagai bantuan dan program dari pemerintah di atas, sebenarnya tidak ada lagi alasan bagi siswa dari keluarga miskin untuk tidak melanjutkan pendidikan mereka. Bagaimanapun juga pendidikan akan menjadi penerang jalan hidup mereka di masa mendatang. Di lain pihak, banyaknya bantuan dan program pendidikan dari pemerintah juga berarti menghadirkan tantangan, yakni mengawal dana tersebut agar sampai ke tangan yang berhak menerimanya. Pasalnya, praktik korupsi di negeri ini sudah sedemikian akut, dan tanpa terkecuali bersiap menggerogoti dana pendidikan bagi anak-anak miskin berpotensi itu.

59 <http://edukasi.kompas.com/read/2012/03/14/09515941/> Niat baik pemerintah untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa PTS patut diapresiasi. Sayangnya, syarat meraih Bidikmisi bagi mahasiswa PTS tidak memerhatikan keadaan kampus-kampus swasta di tanah air, terutama yang berada di luar Jawa. Tidak heran bila Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia meminta syarat penerima Bidikmisi diturunkan dari program studi akreditasi A menjadi akreditasi B.

60 <http://edukasi.kompas.com/read/2013/04/11/15142958/Penerima.Bidik.Misi.2013.Ditargetkan.50.000.Mahasiswa>



Bantuan Operasional Perguruan Tinggi

Selain bantuan untuk siswa miskin, pemerintah juga memberikan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) kepada perguruan tinggi negeri untuk membiayai keberlangsungan biaya operasionalnya. Dengan BOPTN, sebagian besar biaya operasional perguruan tinggi tidak lagi menjadi beban mahasiswa sehingga akses pendidikan tinggi akan lebih terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Dengan mekanisme BOPTN, mahasiswa PTN tidak perlu lagi membayar uang pangkal; mahasiswa cukup membayar uang SPP saja, tanpa biaya lainnya. Selain itu, BOPTN juga akan menumbuhkembangkan penelitian di perguruan tinggi. BOPTN akan menganggarkan 30 persen untuk penelitian.⁶¹

Saat ini, mahasiswa juga terbantu dengan adanya ketetapan pemerintah mengenai Biaya Kuliah Tunggal (BKT) dan Uang Kuliah Tunggal (UKT) untuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di lingkungan Kemdikbud. Ketetapan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 55 Tahun 2013 bertanggal 23 Mei 2013.

Dalam Permendikbud itu disebutkan bahwa Biaya Kuliah Tunggal (BKT) digunakan sebagai dasar penetapan biaya yang dibebankan kepada mahasiswa masyarakat dan Pemerintah. Adapun Uang Kuliah Tunggal (UKT) merupakan sebagian biaya kuliah tunggal yang ditanggung setiap mahasiswa berdasarkan kemampuan ekonominya. Dalam Permendikbud tersebut juga ditegaskan bahwa PTN tidak boleh memungut uang pangkal dan uang pungutan lain selain uang kuliah tunggal dari mahasiswa baru program sarjana (S1) dan program diploma mulai tahun akademik 2013-2014. PTN dapat memungut di luar ketentuan uang kuliah tunggal dari mahasiswa baru program sarjana (S1) dan program diploma non-reguler paling banyak 20 persen dari jumlah mahasiswa baru tahun akademik 2013-2014.⁶²

61 <http://www.dikti.go.id/?p=8037&lang=id>

62 <http://www.setkab.go.id/berita-8857-pemerintah-tetapkan-uang-kuliah-tunggal-untuk-perguruan-tinggi-negeri.html>



Melawan Korupsi Anggaran Pendidikan

Porsi anggaran pendidikan kita semakin membaik, yakni 20 persen dari APBN. Apakah alokasi ini secara otomatis membawa perubahan yang signifikan bagi pendidikan di Indonesia? Niat baik pemerintah memajukan pendidikan sering kali tidak diiringi penegakan hukum dari aparat terkait. Supremasi hukum yang lemah inilah yang kemudian mengakibatkan sistem atau perundang-undangan yang terkait dengan pendidikan tidak berjalan dengan baik. Teramat banyak penyelewengan anggaran yang terjadi.

Selain masalah penyelewengan, efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran pendidikan juga menjadi sorotan. Memang tidak mudah mengelola jumlah anggaran yang besar, apalagi bila terus ditemukan beberapa penyelewengan dengan berbagai modus dalam proses pengelolaannya. Untuk itulah, setiap kenaikan anggaran yang sedemikian besar tersebut harus dibarengi dengan sistem anggaran yang berpihak pada kepentingan publik. Dalam hal ini diperlukan transparansi dari pemerintah mengenai alokasi dan distribusi anggaran pendidikan, dan di lain pihak ada pengawasan bersama dari masyarakat agar anggaran tersebut dapat digunakan tepat sasaran.

Transparansi tidak hanya perlu dilakukan oleh pemerintah (pusat ataupun daerah), namun juga perlu dilakukan oleh setiap institusi pendidikan yang terlibat dalam pengelolaan anggaran pendidikan. Transparansi dibutuhkan untuk mengikis budaya korupsi di dunia pendidikan. Bagaimana tidak, jika budaya korupsi terus dibiarkan, anggaran pendidikan yang semakin besar itu tentu akan tiada artinya.

Korupsi dana pendidikan hampir terjadi di semua jenjang pendidikan. Pada jenjang pendidikan dasar, kita bisa ambil contoh kasus dugaan korupsi pemotongan dana pendidikan gratis tingkat SD dan SMP se-Kota Makassar (Sulawesi Selatan) sebesar Rp 3 miliar. Ironisnya, kasus ini terkesan sengaja ditutup-tutupi oleh pihak kejaksaan tinggi setempat.⁶³

Kasus korupsi dana pendidikan juga bisa berupa penyimpangan pelaksanaan kegiatan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan,

63 <http://cakrawalaberita.com/metro-makassar/kasus-korupsi-dana-pendidikan-gratis-lamban>



sebagaimana terjadi di Purbalingga (Jawa Tengah). Kejaksaan Negeri Purbalingga menetapkan empat pejabat Dinas Pendidikan Purbalingga sebagai tersangka. Dalam kasus ini, nilai kerugian negara diperkirakan mencapai Rp 1,5 miliar atau lima persen dari total nilai proyek sebesar Rp 31,7 miliar. Proyek tersebut didanai dari uang Dana Alokasi Khusus tahun 2012.⁶⁴

Selain di jenjang pendidikan dasar, kasus korupsi juga terjadi di jenjang pendidikan tinggi. Pada 2012 publik dikejutkan oleh sejumlah kasus dugaan korupsi di beberapa universitas negeri terkemuka. Kasus yang paling menyita perhatian adalah kasus dugaan korupsi yang menyeret politisi Angelina Sondakh, dengan melibatkan nama-nama petinggi kampus selaku penerima dana.

Dengan terkuaknya kasus-kasus korupsi di bidang pendidikan ini, pemerintah sudah seharusnya mengambil langkah-langkah taktis agar anggaran pendidikan bisa lebih tepat sasaran dan dapat dirasakan oleh semua kalangan masyarakat. Salah satu cara untuk meminimalkan penyelewengan anggaran pendidikan adalah dengan adanya publikasi data dari sekolah-sekolah penerima.

Sejak 2012, sebanyak 50 kabupaten/kota se-Indonesia menjadi proyek rintisan pelaksanaan *Tool for Reporting and Information Management for Schools* (TRIMS). Peranti lunak yang dikembangkan oleh World Bank ini diakui mampu meningkatkan kapasitas sistem manajemen informasi pendidikan di tiap sekolah karena kesederhanaannya. Hanya dengan program *Windows Excel*, tiap sekolah mampu menyinkronkan basis data (*data base*) dengan mudah hingga pelaporan dari tingkat sekolah, kabupaten/kota, provinsi, sampai pusat bisa dilakukan dengan cepat.

Dengan aplikasi ini diharapkan akan terjadi keterbukaan publikasi data.⁶⁵ Intinya, perlu ada keterbukaan dari pemerintah maupun para pemangku anggaran, serta pengawasan ketat dari masyarakat dan pihak-pihak lain yang terkait untuk mengawasi pencairan, penyaluran, serta

64 <http://www.tempo.co/read/news/2013/05/30/058484629/Empat-Tersangka-Korupsi-Pendidikan-Purbalingga>

65 <http://nasional.sindonews.com/read/2013/03/08/15/725437/format-trims-diharapkan-buat-sekolah-lebih-transparan>



penggunaan anggaran pendidikan sehingga pendidikan dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat tanpa adanya diskriminasi.

Efisiensi dalam alokasi anggaran juga tetap diperhatikan agar pendidikan gratis dapat tercapai. Perbaikan sistem pendidikan di Indonesia dari segala aspek terutama dalam efisiensi anggaran memang butuh waktu yang lama alias tidak instan. Walaupun demikian, komitmen yang kuat dari pemerintah dalam memperbaiki pendidikan di Indonesia serta dukungan dan partisipasi dari masyarakat akan sangat membantu dalam perbaikan kualitas pendidikan di Indonesia. Ya, komitmen semua pihak inilah yang perlu dilakukan sekarang juga. []



“Anggaran pendidikan yang terus meningkat setiap tahun ternyata berbanding lurus dengan pungutan di sekolah dan perguruan tinggi yang semakin meningkat. Ada saja celah bagi sekolah untuk melakukan pungutan, seperti pada saat penerimaan siswa dan mahasiswa baru.”



Bab 3

Pendidikan yang Dirundung Putus Sekolah



Sumber: Dokumen Makmal Pendidikan

Putus sekolah masih menjadi fenomena yang mencoreng wajah pendidikan di Indonesia. Menurut laporan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, setiap menitnya ada empat anak Indonesia yang putus sekolah. Ernia (13 tahun), seperti diberitakan dalam laman resmi UNICEF Indonesia⁶⁶, menjadi satu dari sekian juta anak yang mengalami kisah putus sekolah. Ernia yang tinggal di Desa Batetangnga, Polaweli Mandar, Sulawesi Barat, hidup sebatang kara setelah ayahnya meninggal dunia. Ibu dan empat orang kakaknya terpaksa merantau ke Kalimantan. Namun jangankan kiriman uang, kabarpun tidak pernah datang. Ernia terpaksa

66 United Nations Children's Fund, badan khusus di bawah PBB yang berfokus pada penanganan dan pemberian bantuan untuk masalah anak-anak.



putus sekolah untuk mengurus keempat orang adiknya. Berbagai pekerjaan dijalannya, mulai dari tukang cuci piring hingga tukang batu. Penghasilan 10 - 30 ribu rupiah sepekan jelas tidak mencukupi, merekapun hidup dalam keprihatinan.⁶⁷

Kisah pilu tidak hanya dialami Ernia, harian *Kompas* memberitakan kisah Tasripin (12 tahun), yang juga harus putus sekolah dan menanggung beban keluarganya. Tasripin tinggal di Dusun Pesawahan, Desa Gunung Lurah, Kecamatan Cilongok, Banyumas, Jawa Tengah. Ia terpaksa bekerja sebagai buruh tani dengan upah beras atau uang Rp 10.000 dan meninggalkan bangku sekolahnya sejak kelas 3 SD demi menghidupi ketiga adiknya: Dandi (7 tahun), Riyanti (6 tahun), dan Daryo (4 tahun). Mereka hidup sebatang kara setelah ibunya meninggal pada 2011 akibat tertimbun tanah longsor saat mencari pasir sementara ayah mereka pergi merantau ke Kalimantan. Dandi dan Riyanti juga berhenti sekolah karena malu sering diejek oleh teman-temannya. Hanya Daryo yang masih mengikuti PAUD di desanya. Harga sebuah pendidikan menjadi sangat mahal bagi mereka.⁶⁸



Foto: *Repro Kompas*

67 http://www.unicef.org/indonesia/id/reallives_18705.html

68 Diolah dari *Kompas*, 17 April 2013.



Ernia dan Tasripin hanya potret kecil fenomena anak putus sekolah akibat kemiskinan yang membelenggu keluarga mereka. Potret ini memberi warna tersendiri dalam dunia pendidikan Indonesia di tengah upaya pemerintah meningkatkan mutu pendidikan. Kisah Ernia dan Tasripin juga menjadi paradoks dari hiruk-pikuk maraknya sekolah-sekolah mahal untuk siswa yang berasal dari keluarga kaya. Ernia dan Taspirin memang akhirnya dapat kembali bersekolah setelah kisah mereka tersebar luas ke masyarakat, namun bagaimana nasib jutaan anak putus sekolah yang luput dari sorotan media? Lantas sampai kapan putus sekolah dan kemiskinan menjadi kisah masa kecil bagi jutaan anak Indonesia?

Kualitas Pendidikan vs Putus Sekolah

“Non scholae, sed vitae discimus”, belajar bukan untuk sekolah melainkan untuk hidup. Pepatah Latin tersebut menegaskan bahwa sekolah adalah sarana, bukan tujuan. Dalam berbagai teks konstitusi juga tercantum hak untuk memperoleh pendidikan, bukan hak untuk bersekolah. Lingkup pendidikan memang lebih luas dari sekolah sehingga ada istilah ‘pendidikan luar sekolah’. Belajar juga tidak harus dilakukan di ruang kelas, bahkan pendidikan yang baik adalah yang dapat menggabungkan pembelajaran di sekolah dengan belajar dari pengalaman hidup.

Tingginya pendidikan seseorang tidak serta-merta berbanding lurus dengan kesuksesan orang tersebut. Bahkan sampai ada ungkapan yang menyatakan, “Jika ingin kaya, jangan bersekolah!” Tentu saja argumen ini lemah karena dari 400 orang yang masuk dalam daftar manusia terkaya tahun 2012 versi majalah *Forbes*, kurang dari 16 persen yang tidak menyelesaikan kuliah.⁶⁹ Dengan kata lain, lebih dari 84 persen orang terkaya berhasil menamatkan kuliahnya. Bill Gates (pendiri Microsoft), Larry Ellison (pendiri Oracle), Michael Dell (pendiri Dell), Steve Jobs (pendiri Apple), Mark Zuckerberg (pendiri Facebook), dan beberapa orang kaya lain yang tidak menyelesaikan kuliah sempat merasakan pendidikan tinggi, bukan putus sekolah di bangku pendidikan dasar. Mereka yang mengenyam pendidikan memang belum tentu lebih cerdas, lebih bijak,

69 <http://finance.detik.com/read/2012/07/13/100744/1964377/479/tips-sukses-dari-7-pengusaha-putus-sekolah?991104topnews>



dan lebih kaya dibandingkan mereka yang putus sekolah. Namun, sekolah membuka peluang lebih besar untuk memperoleh pengetahuan, pengalaman, jaringan, dan status. Potensi untuk lebih cerdas, lebih bijak, dan lebih kaya pun terbuka lebih lebar. Putus sekolah saja bisa sukses, apalagi jika tidak putus sekolah.

Pentingnya bersekolah ini kemudian dijadikan salah satu tolok ukur kualitas sumber daya manusia dan pendidikan di suatu negara. Dalam pengukuran Human Development Index (HDI)⁷⁰, ada tiga aspek besar yang dinilai yaitu kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Indikator kesehatan dan usia hidup adalah angka harapan hidup per kelahiran. Indikator ekonomi adalah standar hidup, tingkat pendapatan domestik bruto per kapita yang dibelanjakan dalam satuan dolar Amerika (USD). Adapun indikator pendidikan terdiri dari *adult literacy rate* (angka melek huruf usia dewasa) dan *enrollment ratio* (rasio bersekolah pada pendidikan dasar dan lanjutan). Jadi, semakin banyak yang buta huruf dan putus sekolah, akan semakin kecil nilai HDI-nya.

UNESCO⁷¹ melalui gerakan Education for All (EFA)⁷² melakukan pengukuran Education Development Index (EDI) yang rutin dilaporkan dalam Global Monitoring Report. Indeks pembangunan pendidikan tersebut menggunakan empat indikator, yaitu *universal primary education* (yang dilihat dari persentase anak usia sekolah dasar yang masuk ke sekolah menengah), *adult literacy rate* (yang diukur dari angka melek huruf pada usia 15 tahun ke atas), *quality of education* (yang diperoleh dari angka bertahan siswa hingga kelas 5 SD), dan *gender-related EFA* (yang menunjukkan angka partisipasi pendidikan menurut kesetaraan gender, baik *gender parity* maupun *gender quality*). Lagi-lagi angka putus sekolah dan buta huruf akan menentukan capaian kualitas pendidikan suatu negara.

70 Laporan pencapaian HDI diterbitkan oleh United Nations Development Programme (UNDP) atau Badan Program Pembangunan PBB, yaitu organisasi multilateral PBB yang paling besar memberi bantuan teknis dan pembangunan di dunia.

71 United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO) adalah Badan Kelengkapan PBB yang bertugas membantu pengembangan ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan pendidikan

72 Gerakan Pendidikan untuk Semua (Education for All) adalah komitmen global untuk menyediakan pendidikan dasar yang bermutu untuk semua anak-anak, remaja, dan orang dewasa.



Untuk menjawab tantangan-tantangan utama pembangunan di seluruh dunia, negara-negara maju dan negara-negara berkembang mengeluarkan komitmen bersama dalam bentuk Millennium Development Goals (MDGs).⁷³ Tujuan kedua dari delapan MDGs adalah mewujudkan pendidikan untuk semua. Targetnya adalah memastikan pada 2015 semua anak-anak di mana pun, laki-laki maupun perempuan, dapat menyelesaikan pendidikan dasar. Ada enam indikator⁷⁴ pencapaian target ini, yaitu Angka Partisipasi Murni⁷⁵ Sekolah Dasar (APM-SD), Angka Partisipasi Murni Sekolah Menengah Pertama (APM-SMP), proporsi siswa yang berhasil mencapai tingkat 5, proporsi siswa yang berhasil menamatkan sekolah dasar, proporsi siswa tingkat 1 yang berhasil menyelesaikan pendidikan dasar sembilan tahun, dan angka melek huruf usia 15-24 tahun. Indikator kualitas pendidikan tidak jauh dari angka partisipasi pendidikan dan angka melek huruf sehingga angka putus sekolah dan buta huruf harus ditekan untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas.

Putus Sekolah yang Membuat Resah

Angka Putus Sekolah adalah perbandingan antara jumlah siswa yang putus sekolah terhadap jumlah siswa seluruhnya pada jenjang yang sama, dinyatakan dalam persentase. Angka Putus Sekolah digunakan untuk memantau kemajuan siswa dalam menyelesaikan pendidikannya di suatu jenjang pendidikan. Nilai Angka Putus Sekolah yang rendah menunjukkan tingkat keberhasilan sistem pendidikan dalam mempertahankan siswa untuk tetap berada di dalam sekolah. Nilai ideal Angka Putus Sekolah adalah 0 (nol) persen. Namun sayangnya, tidak ada target nasional untuk Angka Putus Sekolah.

73 MDGs dideklarasikan dalam Konferensi Tingkat Tinggi Milenium oleh 189 negara anggota Persekutuan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York pada September 2000. Dasar hukum dikeluarkannya deklarasi MDGs adalah Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 55/2 Tanggal 18 September 2000, (A/Ris/55/2 United Nations Millennium Development Goals). Lihat: <http://mdgs-dev.bps.go.id/>

74 Dalam penerapannya, Indonesia menambahkan enam indikator lain, yaitu Angka Partisipasi Murni Pendidikan Prasekolah (APM-Prasekolah), Angka Partisipasi Murni Anak Tuna (APM-tuna), Angka Lulusan (AL), Angka Putus Sekolah (APS), Angka Melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama (AM-SMP), dan Angka Melanjutkan ke Sekolah Menengah (AM-SM).

75 Angka Partisipasi Murni (APM) adalah proporsi anak sekolah pada satu kelompok usia tertentu yang bersekolah pada jenjang yang sesuai dengan kelompok usianya.



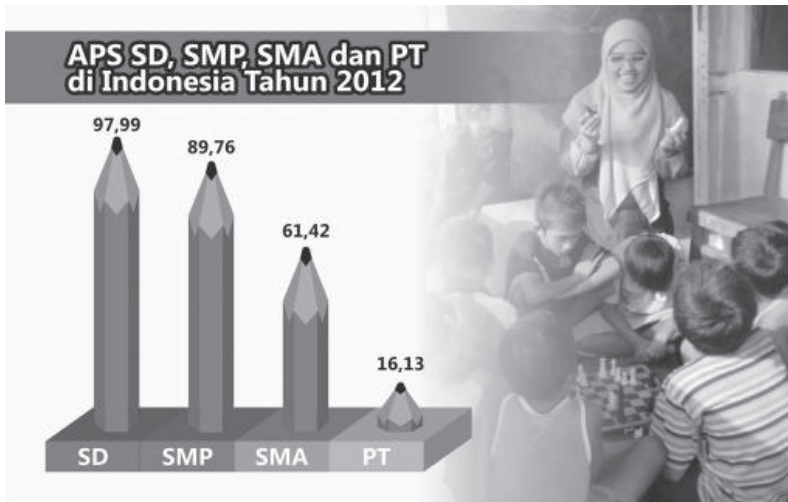
Dalam pengukuran HDI yang dikeluarkan UNDP pada Maret 2013, Indonesia ada di urutan 121 dari 185 negara dan termasuk kategori *medium human development*. Indikator kesehatan dan ekonomi mengalami peningkatan, namun indikator pendidikan stagnan bahkan cenderung menurun. Rata-rata lama sekolah di Indonesia hanya 5,8 tahun, lebih rendah dari rata-rata kawasan yang sebesar 7,2 tahun.⁷⁶ Angka ini masih jauh dari angka wajib belajar 9 tahun—apalagi 12 tahun—sekaligus menggambarkan banyaknya anak yang putus sekolah selepas bangku SD. Sementara itu, EDI Indonesia pada 2012 berada di peringkat 65 dari 127 negara.

Berdasarkan data BPS, pada 2011, rata-rata nasional angka putus sekolah untuk kelompok umur 7-12 tahun (jenjang SD) adalah 0,67 persen (182.773 anak), dengan jumlah tertinggi di Jawa Barat (32.423 anak). Persentase nasional anak putus sekolah kelompok umur 13-15 tahun (jenjang SMP) adalah 2,21 persen (209.976 anak) dengan angka tertinggi putus sekolah di Jawa Barat (47.198 anak), sementara angka putus sekolah terendah ada di Kepulauan Riau (171 anak). Sedangkan untuk kelompok umur 16-18 tahun (jenjang SMA/ SMK), persentase siswa putus sekolah mencapai 3,41 persen (223,676) dengan angka tertinggi di Jawa Timur (35.546 anak) dan terendah di Kepulauan Riau (287 anak).

Potret putus sekolah di Indonesia dapat juga dilihat dari Angka Partisipasi Sekolah (APS) yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik. APS untuk jenjang pendidikan SD di Indonesia sudah mencapai hasil yang hampir sempurna yaitu 97,99 persen atau hanya sekitar 2,01 persen anak yang putus sekolah atau belum dapat menikmati pendidikan di bangku sekolah dasar. APS untuk jenjang pendidikan SMP mencapai 89,76 persen atau masih ada sekitar 10,24 persen anak yang belum dapat mengenyam pendidikan sampai jenjang SMP.

76 Pemerintah Indonesia mengklaim bahwa rata-rata lama sekolah di Indonesia sudah 7,6 tahun (<http://edukasi.kompas.com/read/2012/08/04/18080555/Rata-rata.Lama.Bersekolah.di.Indonesia.7.6.Tahun>)





Sumber: diolah dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS 2003-2012.

APS menurun tajam sejalan dengan semakin tingginya jenjang pendidikan. Partisipasi sekolah di jenjang SMA sungguh membuat hati miris karena hanya diikuti 61,42 persen anak Indonesia; dengan kata lain, ada 38,58 persen anak yang tidak dapat menikmati pendidikan menengah-atas. Kemirisan bertambah jika kita melihat kondisi pendidikan Indonesia di perguruan tinggi yang hanya dirasakan oleh 16,13 persen penduduk Indonesia. Dari data APS tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa mayoritas anak Indonesia bersekolah hanya sampai tingkat SD dan SMP.

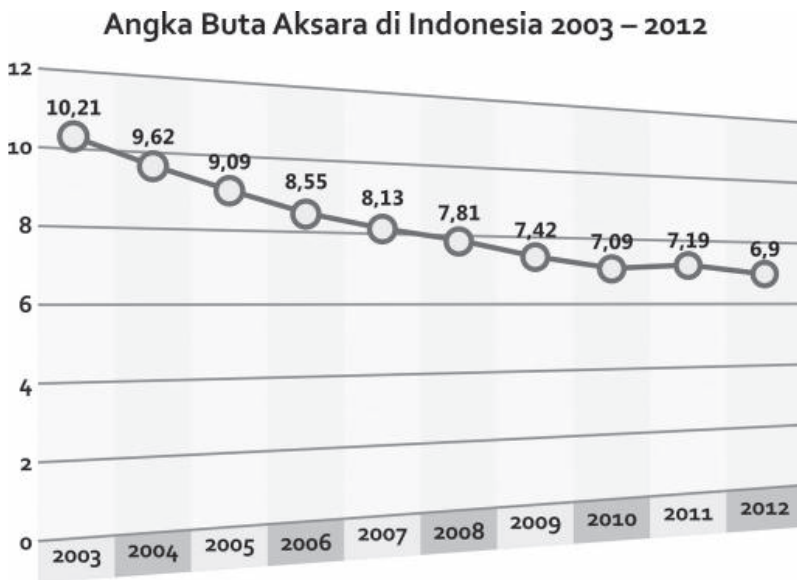
Laporan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia hanya menyebutkan bahwa setiap menit ada empat anak yang putus sekolah di Indonesia atau sekitar 2,1 juta anak setiap tahunnya. Dalam laporan lain disebutkan bahwa lebih dari 1,5 juta anak Indonesia putus sekolah setiap tahunnya. Rektor Universitas Paramadina, Anies Baswedan mengungkapkan bahwa setiap tahun tidak kurang dari 5,6 juta anak Indonesia masuk ke sekolah dasar. Namun, setiap tahun anak yang lulus dari SMA hanya 2,3 juta. Artinya, ada sekitar 3,3 juta anak Indonesia yang tidak berhasil tamat SMA setiap tahunnya. Sementara data yang dihimpun Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) menunjukkan angka 11,7 juta anak putus sekolah di Indonesia, bahkan data Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyebutkan bahwa 13 juta anak Indonesia terancam putus sekolah.



Memang belum ada angka yang benar-benar valid mengenai jumlah anak putus sekolah di Indonesia. Namun, berbagai data di atas setidaknya cukup menunjukkan bahwa putus sekolah masih menjadi momok dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia.

Buta Aksara Membawa Duka

Indikator keberhasilan pendidikan di suatu negara, selain bisa dianalisis dari Angka Partisipasi Pendidikan, juga bisa ditinjau dari jumlah penduduk buta aksara. Buta aksara adalah ketidakmampuan seseorang dalam membaca dan menulis. Tidak bisa membaca dan menulis identik dengan kebodohan, ketertinggalan, dan kegelapan pengetahuan dan jendela informasi. Tingginya jumlah buta aksara di Indonesia merupakan masalah pendidikan yang tak kalah memprihatinkannya di samping putus sekolah. Buta aksara yang menimpa seseorang atau masyarakat akan berdampak luas terhadap sendi kehidupan lainnya seperti kesehatan, pendidikan, dan perekonomian.



Sumber: diolah dari data Susenas BPS 2003-2012. Data menunjukkan persentase buta huruf usia 15 tahun ke atas.



Seperti halnya Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Buta Huruf di Indonesia juga menunjukkan tren menurun. Namun, penurunan yang terjadi semakin tidak signifikan. Artinya, jika tidak ada perubahan pola penanggulangan buta aksara, butuh waktu sangat lama untuk mencapai nilai minimum. Apalagi jika mengingat bahwa jumlah penduduk di Indonesia setiap tahunnya bertambah, bisa jadi secara persentase angka buta huruf mengalami penurunan, namun secara kuantitas jumlah penduduk yang buta huruf tidak ada perubahan.

Jumlah penduduk Indonesia yang buta huruf masih sekitar 13,5 juta orang; angka yang tidak sedikit. Dua provinsi dengan persentase angka buta huruf terbesar di Indonesia adalah Papua (34,49 persen) dan Nusa Tenggara Barat (16,67 persen), posisi yang tidak berubah sejak satu dasawarsa lalu. Angka buta huruf di Papua bahkan cenderung mengalami tren peningkatan. Adapun dari sisi jumlah, dua provinsi dengan jumlah penduduk buta huruf terbanyak di Indonesia masih dipegang oleh Jawa Timur (1.582.293 jiwa) dan Jawa Tengah (986.179 jiwa).

Buta aksara memang tidak mematikan, tapi mewabah menjadi penyakit sosial. Berdasarkan data yang dipublikasikan media, sedikitnya 60 persen dari jumlah penduduk buta aksara di Indonesia adalah perempuan. Tingginya buta aksara yang melanda kaum perempuan merupakan salah satu efek diskriminasi pendidikan. Padahal, seorang ibu yang buta aksara akan memberi dampak negatif terhadap anak-anak yang diasuhnya, baik kesehatan maupun pendidikannya. Hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan dan informasi si ibu tentang pengasuhan anak. Tingginya buta aksara juga berpengaruh terhadap jumlah kematian ibu dan bayi yang dilahirkan. Seorang ibu yang buta aksara tidak mampu membuka jendela informasi dunia sehingga terpuruk dalam kebodohan dan ketidakberdayaan. Jurang kemiskinan menganga semakin lebar bagi penderita buta aksara, dalam hal ini kaum perempuan. Mereka juga bisa menjadi korban eksploitasi, mudah dimanfaatkan dan diperdaya, bahkan menjadi korban kekerasan rumah tangga. Dengan demikian, buta aksara mempertajam lingkaran kemiskinan, penyakit kebodohan, dan perampasan hak seorang manusia.

Memang tidak mudah mengurus masalah buta aksara yang melanda penduduk Indonesia, baik karena adanya diskriminasi gender



ataupun karena kemiskinan. Apalagi mengatasi buta aksara di wilayah terpencil dan berjarak cukup jauh dari pusat pemerintahan Indonesia. Semua kondisi ini tidak boleh dijadikan alasan oleh pemerintah untuk berhenti dalam upaya menurunkan buta aksara manusia Indonesia. Arti kemerdekaan bangsa selama hampir tujuh dekade seharusnya sudah bisa memerdekakan warganya dari kebutaan aksara. Bukankah dengan terbebas dari buta aksara seorang manusia Indonesia dapat membuka cakrawala ilmu pengetahuan dan alam berpikirnya sehingga SDM ini akan membawa negaranya menuju kebangkitan dari keterpurukan?

Putus Sekolah dan Kemiskinan

Putus sekolah merupakan salah satu permasalahan Bangsa Indonesia yang sudah 'berkarat'. Hak setiap warga negara untuk mengenyam pendidikan belum terpenuhi, tujuan mulia mencerdaskan kehidupan bangsa pun masih jauh dari harapan. Komnas Perlindungan Anak pada 2012 saja mencatat ada sekitar satu juta anak usia pendidikan dasar putus sekolah. Dari jumlah tersebut, sebanyak 425 ribu merupakan lulusan SD/MI yang tidak melanjutkan ke SMP. Sementara 211 ribu di antaranya merupakan siswa SMP yang putus sekolah. Sisanya anak-anak yang putus sekolah tanpa menyelesaikan pendidikannya di SD/MI.⁷⁷

Problematika putus sekolah begitu menyakitkan karena melenyapkan seketika harapan indah tentang masa depan. Kemiskinan merupakan faktor terbesar penyebab putus sekolah. Kemiskinan dan kebodohan memang merupakan rantai setan yang sulit diputus. Orang miskin tidak dapat mengakses pendidikan sehingga tetap bodoh; orang bodoh terkendala untuk memperoleh penghasilan yang layak sehingga tetap miskin. Upaya pengentasan kemiskinan dan kebodohan harus dilakukan secara simultan dengan perhatian lebih pada aspek pendidikan. Perbaikan ekonomi tanpa perbaikan pola pikir dan mentalitas masyarakat tak akan bertahan lama.

Kemiskinan merampas hak anak-anak usia sekolah sehingga mengakibatkan tingginya angka putus sekolah dan buta aksara di Indonesia. Masih banyak anak usia sekolah di Indonesia yang berjuang di jalanan, meninggalkan bangku sekolahnya demi sesuap nasi dan membantu per-

77 <http://www.hariansumutpos.com/2012/12/48679/ribuan-anak-indonesia-putus-sekolah>



ekonomian keluarganya. Data menyebutkan ada sekitar 2,3 juta anak usia 7-14 tahun yang terpaksa menjadi pedagang asongan, pengamen, pengemis, kuli panggul, pembantu rumah tangga, atau bahkan menjadi pencopet dan pedagang narkoba. Bahkan data menyebutkan bahwa 85 persen anak putus sekolah usia pendidikan dasar melanjutkan hidup dengan menjadi pekerja.

Anak-anak yang terlahir sebagai korban dari kemiskinan itu bisa menjadi apa pun demi bertahan hidup di tengah-tengah godaan kemewahan yang semakin hari kian nyata. Mereka tidak dapat menikmati hak anak untuk memperoleh pendidikan, keselamatan, perlindungan, bermain, apalagi rekreasi. Ironisnya lagi, kondisi ini menyebabkan kerusakan jangka panjang bagi perkembangan anak, masyarakat, bahkan negara karena kemiskinan akan terus berlanjut hingga mereka dewasa.

Sebagaimana angka kemiskinan, angka putus sekolah juga tidak didominasi anak yang tinggal di daerah terpencil, terasing, dan terperosok. Di kota-kota besar juga bertebaran anak jalanan yang putus sekolah, fakir miskin, dan anak terlantar yang seharusnya dipelihara oleh negara. Ada dua provinsi yang berbatasan langsung dengan Ibu Kota, yaitu Jawa Barat dan Banten, ternyata keduanya memiliki jumlah anak putus sekolah yang tergolong besar.

Berdasarkan data BPS tahun 2011, Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah angka putus sekolah tertinggi, yaitu 553.115 anak. Angka riilnya diyakini di atas satu juta karena data lain menyebutkan sekitar 920.000 lulusan SD saja tidak bisa melanjutkan pendidikan ke SMP. Faktor utama tingginya angka putus sekolah karena alasan ekonomi dan sulitnya akses ke sekolah.

Meski angka buta huruf di Jawa Barat tergolong kecil, yaitu sebesar 3,95 persen, jumlah penduduk miskinnya lebih dari 4,2 juta dan merupakan terbesar ketiga di Indonesia. Satelit DKI Jakarta yang terletak di provinsi Jawa Barat, seperti Kota Bekasi dan Kota Depok, juga memiliki angka putus sekolah yang tergolong tinggi. Ada 1762 anak putus sekolah di Kota Bekasi, yang terdiri dari 438 siswa SMA, 934 siswa SMP, dan 390 siswa SD.⁷⁸ Para siswa yang putus sekolah tersebut lantaran turut membantu

78 *Republika*, 4 April 2013.



orangtua mereka mencari nafkah atau berasal dari keluarga *broken home* sehingga mereka lebih memilih untuk turun ke jalan. Sementara itu, BPS Kota Depok mengungkapkan pada tahun 2012 ada lebih dari 8000 pelajar di Kota Depok yang putus sekolah.

Provinsi Banten yang juga berbatasan langsung dengan Ibu Kota ada di peringkat empat provinsi dengan angka putus sekolah terbanyak. Dari hampir 2 juta anak usia sekolah, sebanyak 135.800 anak tidak melanjutkan sekolah mereka dan lebih dari 19.800 anak tidak bersekolah. Selain kemiskinan, faktor infrastruktur dan akses pendidikan yang minim turut menyebabkan tingginya angka putus sekolah. Tidak hanya itu, dari 604.812 anak usia 16-18 tahun di provinsi yang baru dibentuk tahun 2011 ini, sebanyak 312.409 anak (51,65 persen) tidak sekolah dan dari jumlah tersebut hanya sekitar 155 ribu yang sedang bekerja. Sementara itu di Kabupaten Tangerang yang merupakan satelit Ibu Kota, sebanyak 14 ribu siswa tingkat SMA, SMK, dan MA yang berasal dari keluarga tidak mampu terancam putus sekolah.

Putus sekolah yang melanda provinsi dan kabupaten/kota yang berbatasan langsung dengan Ibu Kota ternyata sebagian besar dikarenakan ketiadaan biaya dan kondisi perekonomian keluarga. Sebagian dari anak-anak ini terpaksa bekerja untuk membantu orangtua dalam mencukupi kebutuhan hidup sehingga memilih untuk meninggalkan bangku sekolah. Bagi kalangan keluarga menengah ke atas, biaya sekolah tidaklah mahal, apalagi dengan adanya dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Namun, bagi keluarga miskin, pendidikan tetaplah mahal karena bantuan dana BOS tidak menutupi seluruh biaya pendidikan.⁷⁹ Mereka tidak mungkin mampu mengeluarkan biaya sekolah karena untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari saja mereka sudah kesulitan.

Bila putus sekolah masih terjadi di kota-kota besar, apalagi dengan wilayah-wilayah terpencil dan jauh dari akses informasi. Warga di wilayah terpencil dan pelosok sudah akrab dengan ancaman putus sekolah. Perlu perjuangan ekstra bagi siswa-siswa yang bersekolah di wilayah terpencil, terisolasi, dan terpelosok, dengan melintasi jalan berbatu, perbukitan, hutan, sawah, tanah berlumpur, bahkan medan yang dapat mengancam keselamatan jiwa mereka.

79 Bahasan khusus tentang BOS dan kebocorannya, lihat Bab 2.



Di Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, terdata 2.570 siswa SD terancam putus sekolah karena kemiskinan pada 2011. Para siswa ini tidak mampu membeli perlengkapan sekolah, seperti baju seragam, sepatu, dan perlengkapan lainnya. Walaupun wilayah ini kaya potensi batubara dan minyak bumi, ternyata tidak ada jaminan seluruh rakyat di sana dapat bersekolah. Dana BOS juga tidak menuntaskan masalah bagi siswa yang berasal dari keluarga miskin di sana.

BPS Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, mencatat ada 2.045 anak putus sekolah tingkat Sekolah Dasar yang terdiri dari 1.284 perempuan dan 1.121 laki-laki. Sementara untuk jenjang SMP (usia 13-15 tahun), angka putus sekolah juga membengkak mencapai 6.366 anak. Faktor penyebab putus sekolah terutama dikarenakan anak-anak lebih memilih mencari nafkah, malas bersekolah, dan tidak memiliki biaya pendidikan.

Di Nusa Tenggara Timur, sebanyak 19.781 anak usia sekolah yang tidak sekolah, lebih dari 62.305 lainnya tidak mampu melanjutkan sekolah. Sebanyak 930.000 lebih anak usia sekolah saat ini tidak sepenuhnya menikmati pendidikan di sekolah yang jumlahnya diperkirakan sekitar lebih dari 5.502. Angka kemiskinan di provinsi ini merupakan yang terbesar kedua secara nasional. Menurut data BPS, dalam laporan bulanan statistik September 2012, jumlah penduduk miskin NTT mencapai lebih dari satu juta jiwa, padahal total jumlah penduduknya kurang dari 5 juta jiwa.

Angka putus sekolah dan buta huruf memang berbanding lurus dengan kemiskinan. Pulau Jawa yang menyumbang angka putus sekolah dan buta huruf tertinggi di Indonesia, juga menyumbang jumlah penduduk miskin terbanyak di Indonesia. Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur secara berurut adalah provinsi dengan jumlah anak putus sekolah terbesar. Sementara provinsi dengan jumlah penduduk miskin dan buta huruf terbesar secara berurut adalah Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat. Provinsi Papua yang memiliki persentase penduduk miskin terbesar (30,66 persen), juga merupakan provinsi dengan persentase penduduk buta huruf terbesar (34,49 persen) sekaligus provinsi dengan angka partisipasi pendidikan terkecil di Indonesia. Sekali lagi, secara umum angka putus sekolah dan buta huruf berbanding lurus dengan angka kemiskinan.



Pada 2011 saja diperkirakan ada 4,7 juta siswa SD dan SMP yang tergolong miskin, terancam putus sekolah atau *drop out* (DO) karena alasan ekonomi. Mereka terdiri dari 2,7 juta siswa SD dan 2 juta siswa SMP. Sedangkan untuk tingkat SMP hanya 23 persen yang mampu meneruskan ke tingkat SMA.⁸⁰ Harian *Kompas* memberitakan bahwa setiap tahun tercatat sekitar 1,2 juta siswa lulusan SMP tidak melanjutkan ke SMA. Faktor utamanya adalah ketidakmampuan finansial, dan akses pendidikan menengah di daerah yang masih belum terbuka selebar di kota-kota besar.⁸¹

Upaya mengentaskan putus sekolah dan buta huruf memang tidak bisa terlepas dari upaya mengentaskan kemiskinan. Sifatnya adalah sinergi, bukan ketergantungan. Tidak perlu menunggu kemiskinan selesai diberantas untuk mulai mengentaskan putus sekolah dan buta huruf. Upaya mengentaskan kemiskinan bukan merupakan prasyarat mengentaskan putus sekolah dan buta huruf. Kemiskinan tidak akan tuntas ditanggulangi jika tidak berjalan simultan dengan upaya perbaikan pendidikan.

Kompleksitas Penyebab Putus Sekolah

Faktor penyebab putus sekolah beragam, kemiskinan bukanlah satu-satunya alasan seorang anak meninggalkan bangku sekolah. Bahkan faktor ekonomi kerap kali bercampur dengan faktor lain sehingga menyebabkan permasalahan putus sekolah semakin sulit diurai. Perbedaan faktor penyebab akan menentukan penyelesaian terhadap permasalahan yang dihadapi. Lain faktor penyebab, lain solusinya. Pemahaman akan kompleksitas faktor penyebab putus sekolah secara holistik akan memudahkan penguraian permasalahan sekaligus solusi secara lebih lengkap.

Selain faktor ekonomi atau kemiskinan, putus sekolah dapat disebabkan oleh beragam faktor lain, di antaranya akses ke sekolah, bencana atau musibah, kondisi dan kebijakan sekolah, internal anak (fisik, intelektual, minat), latar belakang pendidikan dan kondisi orangtua,

80 <http://tribunnews.com/2012/01/17/47-juta-siswa-sd-smp-terancam-putus-sekolah> Data yang dipublikasikan berasal dari Koalisi Anggaran Indonesia.

81 *Kompas*, 16 September 2012.



budaya dan pandangan masyarakat mengenai pendidikan, lingkungan tempat tinggal, dan permasalahan sosial. Faktor-faktor penyebab putus sekolah ini tidak harus berdiri sendiri, dapat pula berkombinasi antara faktor yang satu dan faktor lainnya.

Faktor akses ke sekolah dapat ditemukan pada anak-anak Komunitas Adat Terasing (KAT) di Dusun Banau Desa Beting yang terletak di Muara Sungai Sodor, Kecamatan Rangsang Pesisir, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau. Sebanyak 75 persen anak-anak KAT tidak tamat SMP karena sarana pendidikan yang tersedia di Desa Beting hanya sekolah dasar dan Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA). Sedangkan untuk sekolah lanjutan (SMP), terpaksa harus ke Selatpanjang, ibu kota Kabupaten Kepulauan Meranti. Dari 15 anak KAT di Banau yang mendaftar di SD, hanya lima orang yang menamatkan pendidikan dasar, selebihnya terjebak membantu orangtua mencari nafkah. Kondisi fasilitas pendidikan yang minim menyebabkan banyak anak dari KAT di Banau enggan bersekolah. Kondisi ini diperburuk pula dengan minimnya motivasi dan pola pikir masyarakat yang masih tradisional.

Masih di Kabupaten Kepulauan Meranti, hanya 84 dari 200 anak usia sekolah dasar yang bersekolah di Dusun Keridi, Desa Batin Suwir, Kecamatan Tebing Tinggi Timur. Dari yang bersekolah, ada pula yang putus di tengah jalan. Sebagian besar siswa yang tamat SD tidak melanjutkan ke jenjang lebih tinggi. Sekolah lanjutan hanya ada di Desa Batin Suwir, itu pun SMP Terbuka. SMP Negeri terdekat berada di Selatpanjang yang hanya bisa dijangkau dengan jalur laut dengan moda transportasi terbatas. Keadaan diperparah dengan kurangnya kemauan belajar dan dorongan orangtua.

Sementara itu, berdasarkan data Dinas Pendidikan Sulawesi Barat, tercatat sekitar 3.055 anak dari keluarga Suku Bunggu putus sekolah sampai dengan akhir 2011. Putus sekolah anak-anak suku terasing yang mendiami daerah pegunungan di Mamuju Utara ini disinyalir karena dipengaruhi oleh faktor tradisi dan budaya kehidupan mereka. Pengalaman program pemberdayaan masyarakat Dompot Dhuafa di beberapa kabupaten di Jawa Barat juga mendapati banyaknya siswa SD yang tinggal di desa tidak melanjutkan ke SMP yang jaraknya jauh tanpa ada moda transportasi umum.



Faktor akses ke sekolah biasanya tidak berdiri sendiri, ada faktor lain seperti budaya, fasilitas sekolah, kemiskinan atau bahkan faktor internal anak yang menyertai. Jika permasalahannya hanya akses, banyak sekali anak sekolah di Indonesia yang rela berjalan kaki hingga belasan kilometer setiap harinya melintasi medan yang tidak mudah untuk bisa bersekolah. Salah satu faktor yang menyebabkan tertutupnya akses ke sekolah sehingga menyebabkan putus sekolah adalah bencana berkepanjangan. Misalnya yang terjadi di Dusun Sukamade, Desa Sarongan, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Ratusan anak tidak bisa sekolah karena daerah mereka terisolasi akibat banjir bandang yang terjadi di awal Januari 2013.

Kondisi serupa juga terjadi di Desa Beringin Jaya, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Bencana banjir yang berlangsung berbulan-bulan menyebabkan terputusnya akses jalan desa yang menghubungkan desa satu dengan lainnya juga akses jalan menuju sekolah. Akibatnya, ratusan siswa SD dan SMP di daerah ini menghadapi kesulitan ketika berangkat dan pulang sekolah. Alternatif satu-satunya adalah menggunakan rakit dengan biaya transportasi menyeberang Rp 2.000 per siswa. Tambahan biaya ini sangat merepotkan bagi siswa dari keluarga miskin sehingga banyak di antara mereka yang terancam berhenti sekolah.



Foto: *Repro Kompas*

Masih di Jawa Barat, lebih dari setengah dari 1000 anak sekolah di wilayah Rancaekek, Kabupaten Bandung, bolos sekolah menyusul rumah



dan jalan di wilayah tersebut terendam banjir. Mereka lebih memilih tinggal di rumah membersihkan lumpur dan air yang merendam empat tinggal mereka. Peristiwa sama juga terjadi di Wilayah Baleendah, Kabupaten Bandung. Akibat banjir yang mencapai satu meter, banyak anak sekolah baik SD, SMP, dan SMA yang tidak sekolah di wilayah tersebut. Sementara itu, lebih dari 700 siswa yang bersekolah di SD Negeri 22, 31, 62 serta 63 di Batu Merah Dalam, Kota Ambon, yang terletak di satu lokasi, terpaksa diliburkan. Pasalnya, sekolah tersebut dijadikan lokasi pengungsian bagi para korban banjir.

Bencana yang dapat menyebabkan seorang anak meninggalkan bangku sekolahnya tidak melulu bencana alam. Meninggalnya orangtua yang mengakibatkan berpindahnya beban anak menjadi tulang punggung keluarga juga dapat mengakibatkan putus sekolah. Demikian pula dengan berbagai musibah lain seperti kebakaran dapat menghambat seorang anak untuk melanjutkan sekolahnya.

Kondisi dan lingkungan sekolah juga ikut menyumbang rendahnya Angka Partisipasi Sekolah. Kurikulum yang tidak sesuai dan target pendidikan yang terlalu tinggi akan membuat anak kehilangan motivasi untuk bersekolah. Guru yang tidak berkualitas, tidak profesional dengan profesinya, serta tidak memiliki metode mengajar yang menyenangkan, semua ini dapat membuat anak kehilangan minat untuk meneruskan sekolahnya. Sistem pendidikan yang tidak sesuai dengan kebutuhan pragmatis masyarakat—bahwa sekolah diharapkan mampu menjamin kemudahan dalam mencari pekerjaan dan penghidupan yang layak—juga turut menentukan keputusan masyarakat dalam menyekolahkan anaknya. Ketika sekolah dianggap gagal menciptakan kemandirian dan kreativitas anak, sekolah tersebut akan sepi peminat.

Rendahannya partisipasi sekolah di suatu wilayah juga sangat dipengaruhi oleh terbatasnya ruang kelas dan gedung sekolah serta infrastruktur lainnya. Di Kabupaten Bogor misalnya, dari 102 ribu anak SD yang mengikuti Ujian Nasional, hanya 72 ribu yang bisa tertampung di SMP yang ada di Kabupaten Bogor. Sekitar 30 ribu anak terancam putus sekolah karena di Kabupaten Bogor yang memiliki 1.537 SD, hanya terdapat 82 SMP dan 33 SMA.⁸² Kebijakan sekolah dalam menerima atau

82 *Republika*, 1 Mei 2013.



mengeluarkan seorang siswa juga memengaruhi jumlah anak putus sekolah. Kebijakan penerimaan siswa baru yang diskriminatif akan membuka celah terjadinya kasus putus sekolah. Seorang siswa yang dikeluarkan dari sekolah dengan tidak hormat juga akan kesulitan untuk mengenyam bangku pendidikan.

Faktor lain penyebab rendahnya partisipasi anak sekolah juga dapat diakibatkan oleh faktor internal anak, misalnya keterbatasan fisik atau intelektual. Anak cacat fisik cenderung merasa rendah diri dan menghindari pergaulan, termasuk menjalani hari-hari di sekolah. Demikian pula dengan anak yang rendah tingkat kecerdasannya ataupun cacat mental, cenderung terhambat untuk bisa bersekolah. Di sekolah umum, anak berkebutuhan khusus ini diperlakukan berbeda, bahkan tidak jarang dijadikan sasaran perundungan (*bullying*). Sementara itu sekolah inklusi yang ada belum mampu menyelesaikan persoalan bahkan malah cenderung menegaskan bahwa mereka berbeda.

Faktor internal lain adalah rasa malas yang dapat memicu anak untuk berhenti sekolah karena anak sudah kehilangan minat atau keinginan untuk bersekolah. Kehadiran televisi, *PlayStation*, dan *games online* yang sangat menarik perhatian, sedikit banyak meracuni pemikiran ataupun perilaku anak. Anak menjadi kecanduan, malas belajar juga malas berpikir, akhirnya sekolah tidak lagi menjadi dunia yang menarik bagi anak. Pengalaman program Klaster Mandiri Dompot Dhuafa di Kabupaten Lampung Selatan mendapati seorang anak yang putus sekolah karena lebih senang main telepon genggam yang baru dibelikan orangtuanya. Selain itu, materi ajar yang tidak sesuai dengan minat anak juga dapat menyebabkan seorang anak tidak tertarik untuk melanjutkan sekolah.

Faktor orang tua juga memegang peranan penting dalam menentukan partisipasi anak untuk bersekolah. Orangtua yang terlalu sibuk bekerja, hubungan orangtua yang tidak harmonis, serta kurangnya perhatian dan dukungan orangtua terhadap pendidikan anak dapat menyebabkan anak kehilangan motivasi dalam belajar dan enggan bersekolah. Tingkat pendidikan dan kondisi orangtua juga kerap berpengaruh; semakin tinggi pendidikan orangtua, semakin besar kepeduliannya terhadap pendidikan anak. Orangtua yang mendadak bangkrut dan punya utang banyak, atau sakit-sakitan berpotensi meninggalkan anak yang putus sekolah.



Demikian pula orangtua yang terjerat kasus hukum, misalnya korupsi atau tindakan kriminal lainnya.

Faktor budaya dan pandangan masyarakat mengenai pendidikan juga memengaruhi tingkat putus sekolah. Masih banyak ungkapan di masyarakat yang melemahkan arti pentingnya pendidikan, misalnya “Buat apa sekolah tinggi-tinggi, *wong* presiden dan menteri *udah* ada” atau ungkapan ke anak perempuan, “Tidak usah sekolah tinggi-tinggi, nanti juga kerjanya di dapur!” Budaya dan persepsi masyarakat yang masih kurang peduli dengan pendidikan juga terlihat di banyak masyarakat wilayah perdesaan yang tidak mau menyekolahkan anaknya dengan alasan biaya, namun rela menjual sawah dan kebunnya untuk menyelenggarakan pesta khitanan atau pernikahan anaknya karena gengsi dengan para tetangga.

Lingkungan tempat tinggal memang sangat menentukan pilihan hidup seseorang atau keluarga. Banyak anak yang putus sekolah karena anak-anak di lingkungan sekitarnya lebih memilih pergi bekerja daripada ke sekolah. Anak yang dibesarkan di lingkungan yang marak angka putus sekolah lebih rentan untuk tidak bersekolah dibandingkan anak yang tinggal di lingkungan yang kondusif untuk pembelajaran. Berbagai permasalahan sosial seperti tawuran pelajar, penyalahgunaan narkotika, hamil di luar nikah, dan berbagai tindakan kriminal juga berperan meningkatkan angka putus sekolah.

Berbagai faktor penyebab putus sekolah di atas, baik yang berdiri sendiri maupun yang saling terkait, memerlukan penanganan yang tepat dan cepat agar tidak menambah buruk kondisi perkembangan anak-anak Indonesia sebagai generasi penerus bangsa. Beragamnya faktor penyebab semakin menegaskan bahwa solusi dari permasalahan putus sekolah tidak dapat diselesaikan hanya dengan mengandalkan kucuran dana yang besar.

Mengatasi Masalah dengan Masalah?

Kemiskinan secara umum disebabkan oleh tiga hal yaitu alamiah, kultural, dan struktural. Kemiskinan alamiah adalah kemiskinan karena kondisi alami seseorang, seperti cacat mental, cacat fisik, usia lanjut sehingga tidak memungkinkan baginya untuk bekerja. Kemiskinan kultural disebabkan oleh rendahnya kualitas sumber daya manusia karena



kultur masyarakat tertentu misalnya malas bekerja, tidak produktif, dan kebergantungan pada orang lain. Adapun kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang diakibatkan oleh kesalahan sistem negara dalam mengatur urusan masyarakat.

Permasalahan putus sekolah juga tidak jauh berbeda, ada yang terjadi karena kondisi alami, kultural ataupun struktural. Putus sekolah dalam skala mikro biasanya bersifat alami dan kultural, butuh intervensi perbaikan untuk dapat menanggulangnya. Permasalahannya, sebagaimana kemiskinan, putus sekolah banyak dipengaruhi oleh kebijakan makro yang sifatnya struktural. Ada obat yang keliru, ada salah urus.

Untuk mengentaskan putus sekolah dan buta huruf, salah satu cara yang ditempuh pemerintah adalah dengan meningkatkan anggaran pendidikan sebagaimana amanat konstitusi sebesar 20 persen dari APBN/APBD. Meningkatnya anggaran pendidikan memang berbanding lurus dengan tren angka partisipasi sekolah dan melek huruf yang juga meningkat. Namun, sudah efektifkah peningkatan anggaran yang terjadi dengan penurunan angka putus sekolah dan buta huruf?

Persentase Peningkatan Anggaran Pendidikan, APS dan Angka Melek Huruf

	2011	2012	% Peningkatan
Anggaran Pendidikan (triliun rupiah)	266,9	289,9	8,62%
Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12 th	97,58	97,99	0,42%
Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15 th	87,78	89,76	2,26%
Angka Partisipasi Sekolah (APS) 16-18 th	57,85	61,42	6,17%
Angka Partisipasi Sekolah (APS) 19-24 th	14,26	16,13	13,11%
Angka Melek Huruf 10 th + (%)	93,56	93,84	0,30%
Angka Melek Huruf 15 th + (%)	92,81	93,10	0,31%
Angka Melek Huruf 15-44 th + (%)	97,70	97,99	0,30%
Angka Melek Huruf 45 th + (%)	82,11	82,89	0,95%

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa peningkatan anggaran pendidikan sebesar 23 triliun rupiah (8,62 persen) dari tahun 2011 ke tahun 2012 hanya signifikan meningkatkan APS jenjang pendidikan tinggi (usia 19-24 tahun) sebesar 13,11 persen. Pada rentang waktu



tersebut, pemerintah gencar meluncurkan program Beasiswa Bidikmisi untuk puluhan ribu mahasiswa dari keluarga tidak mampu. Sayangnya, persentase peningkatan APS untuk jenjang lain dan angka melek huruf tidak signifikan.

Ketidakefektifan akan semakin terlihat jika dihitung *cost per unit*, yakni peningkatan anggaran pendidikan 23 triliun rupiah hanya mampu mengurangi ratusan ribu anak putus sekolah dan penduduk yang buta huruf. Artinya, puluhan juta rupiah digelontorkan untuk membebaskan seorang anak dari putus sekolah atau seorang penduduk dari buta huruf. Sangat tidak efisien.

Ketidakefektifan juga kian tampak jika peningkatan APS dan angka melek huruf yang terjadi dilihat dari aspek pemerataan. Akan ditemukan provinsi dengan tren penurunan APS dan angka melek huruf misalnya di Papua. Akan terlihat gap yang begitu besar antara provinsi-provinsi dengan APS dan angka melek huruf tertinggi dengan provinsi-provinsi dengan APS dan angka melek huruf terendah. Akan terlihat pula bahwa provinsi dengan APS dan angka melek huruf yang rendah adalah itu-itu saja. Bertahun-tahun permasalahan tidak kunjung selesai.



Peringkat APS, Buta Huruf, Persentase Penduduk Miskin Provinsi di Indonesia

Provinsi peringkat ke-	1	2	3	4	5	6
Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12 th terendah (%)	Papua	Papua Barat	Sulbar	NTT	Sulteng	Kalbar
Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15 th terendah (%)	Papua	Sulbar	Gorontalo	Babel	Sulteng	Kalbar
Angka Partisipasi Sekolah (APS) 16-18 th terendah (%)	Papua	Babel	Kalteng	Kalbar	Jabar	Sulbar
Angka Partisipasi Sekolah (APS) 19-24 th terendah (%)	Babel	Kepri	Lampung	Jateng	Jabar	Sumsel
Angka Buta Huruf 15 th + tertinggi (%)	Papua	NTB	Sulse	NTT	Sulbar	Jatim
Angka Buta Huruf 15-44 th tertinggi (%)	Papua	Sulbar	NTB	NTT	Sulse	Papua Barat
Angka Buta Huruf 45 th + tertinggi (%)	NTB	Papua	Sulse	Sulbar	Jatim	Sulteng
Persentase Penduduk Miskin terbanyak September 2012 (%)	Papua	Papua Barat	Maluku	NTT	Aceh	NTB



Dari tabel di atas terlihat bahwa wilayah Indonesia bagian timur masih mendominasi persentase penduduk miskin dan angka buta huruf tertinggi, diikuti beberapa provinsi di Sulawesi. Jawa Timur yang merupakan provinsi dengan jumlah penduduk buta huruf terbanyak juga masuk dalam daftar ini. Sementara untuk APS, Papua juga mendominasi. Untuk jenjang pendidikan dasar, Indonesia bagian timur masih butuh banyak perbaikan. Adapun untuk jenjang pendidikan tinggi, APS di Pulau Jawa dan Sumatera masih perlu ditingkatkan.

Pemerintah melalui BPS secara berkala mengeluarkan data di atas beserta indikator pendidikan lainnya. Namun sayangnya, data ini belum dioptimalkan sebagai informasi berharga oleh para pemangku kebijakan di daerah yang diharapkan aktif untuk meningkatkan pencapaian indikator pendidikan di tempatnya masing-masing. Padahal, data di atas dapat dimanfaatkan untuk menunjukkan prioritas perbaikan yang dapat dilakukan.

Dalam kegiatan Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2013, Kemdikbud mencanangkan gerakan antiputus sekolah. Peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2013 dijadikan momentum dimulainya gerakan bebas anak putus sekolah dengan mendirikan posko antiputus sekolah atau disebut Posko Anti Drop Out di berbagai wilayah di Indonesia. Walaupun masih lebih banyak menyelesaikan kasus putus sekolah akibat biaya, program ini perlu diapresiasi. Secara konsep, program ini seharusnya mampu meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah, tinggal dikuatkan dalam implementasi di lapangan. Tentu akan lebih baik lagi jika posko ini juga mampu mengedukasi masyarakat sehingga kasus putus sekolah karena faktor budaya dapat juga diatasi.

Salah satu upaya lain yang dilakukan Kemdikbud untuk mengentaskan putus sekolah adalah dengan membangun Ruang Kelas Baru (RKB) dan pendirian Unit Sekolah Baru (USB). Sayangnya, program RKB dan USB membutuhkan waktu yang tidak sebentar, sementara kebutuhan akan peningkatan daya tampung sekolah mendesak. Salah satu penyiasatan yang dilakukan adalah dengan membuka dua gelombang (*shift*) pembelajaran, pagi dan sore. Solusi yang tidak ideal karena dapat mengorbankan kualitas pembelajaran. Namun, solusi tambal sulam seperti ini memang terpaksa harus dilakukan. Permasalahan lain yang



muncul dari program RKB dan USB ini adalah adanya kebutuhan untuk penyediaan guru baru. Diperkirakan jika skenario program Wajib Belajar 12 Tahun berjalan penuh, pemerintah membutuhkan 12 ribu guru baru untuk jenjang pendidikan SMA atau yang sederajat.

Jika melihat jumlah sekolah di Indonesia, angka putus sekolah memang tidak bisa dihindari. Hingga akhir 2011, di Indonesia tercatat ada 146.804 unit SD dan 22.527 unit MI. Jumlah yang timpang sekali dengan banyaknya SMP dan MTs yang hanya berjumlah 30.290 unit dan 14.787 unit. Sementara itu, jumlah bangunan SMA hanya 11.306 unit, SMK sebanyak 9.164 unit dan MA sebanyak 6.426 unit. Ketimpangan jumlah unit sekolah jenjang pendidikan dasar dengan pendidikan menengah ini berbanding lurus dengan angka partisipasi sekolah tiap jenjang. Setiap tahunnya sudah pasti ada jutaan siswa SD/MI yang tidak dapat melanjutkan ke SMP/MTs karena keterbatasan bangunan sekolah. Tiap tahunnya jutaan siswa SMP/MTs pasti tidak dapat melanjutkan ke SMA/SMK/MA karena ketidakterersediaan gedung sekolah. Selama putus sekolah struktural ini tidak diselesaikan, tidak mungkin semua anak usia sekolah dapat mengenyam pendidikan.

Berbagai rancangan program yang telah dibuat pemerintah secara konsep sebenarnya sudah baik, tinggal keseriusan dalam mengimplementasikannya. Berbagai kebijakan pengentasan putus sekolah dan buta huruf yang berorientasi memberikan bantuan finansial memang akan membantu masyarakat, namun tidak akan menuntaskan permasalahan jika tidak disertai kebijakan yang mampu menjawab faktor penyebab lainnya. Berbagai program pemberantasan putus sekolah dan buta aksara telah berjalan, selanjutnya pemerintah perlu mengevaluasi secara tepat dan mendalam apakah upaya-upaya yang telah dilakukannya itu sudah tepat sasaran ataukah belum. Selain itu, perlu ada kontrol kebijakan dan implementasi program yang lebih kuat. Jangan sampai kebijakan dan programnya baik, laporan yang diterima juga (yang) baik(-baik saja), namun realisasi di lapangan ternyata masih jauh panggang dari api.



Mengabaikan Papua?

Tidak meratanya kue pembangunan dan kesenjangan perhatian antarwilayah di Indonesia adalah masalah kebijakan. Akibatnya, kemiskinan dan putus sekolah struktural pun terjadi. Potret kompleksitas permasalahan pendidikan dapat dijumpai di Papua, provinsi paling timur Indonesia. Hampir seluruh faktor penyebab putus sekolah dapat ditemui di Papua, saling tumpang tindih menyebabkan ketertinggalan.

Data dari BPS jelas menyebutkan, ketika seluruh provinsi di Indonesia bisa mencapai partisipasi sekolah tingkat SD lebih dari 95 persen, Papua hanya bisa mencapai 75,39 persen. Ketika seluruh provinsi di Indonesia bisa mencapai partisipasi sekolah tingkat SMP lebih dari 80 persen, Papua hanya bisa mencapai 69,14 persen. Bahkan ketika hampir seluruh provinsi berhasil menurunkan angka buta aksara selama satu dasawarsa terakhir, angka buta aksara usia 15-45 tahun di Papua malah mengalami peningkatan dari 22,33 persen pada 2003 menjadi 33,33 persen pada 2012 (naik 49,26 persen). Padahal, secara nasional angka buta aksara di rentang usia dan rentang waktu tersebut mengalami penurunan 48,2 persen sementara angka buta aksara Indonesia usia 15-45 tahun pada 2012 hanya 2,01 persen!

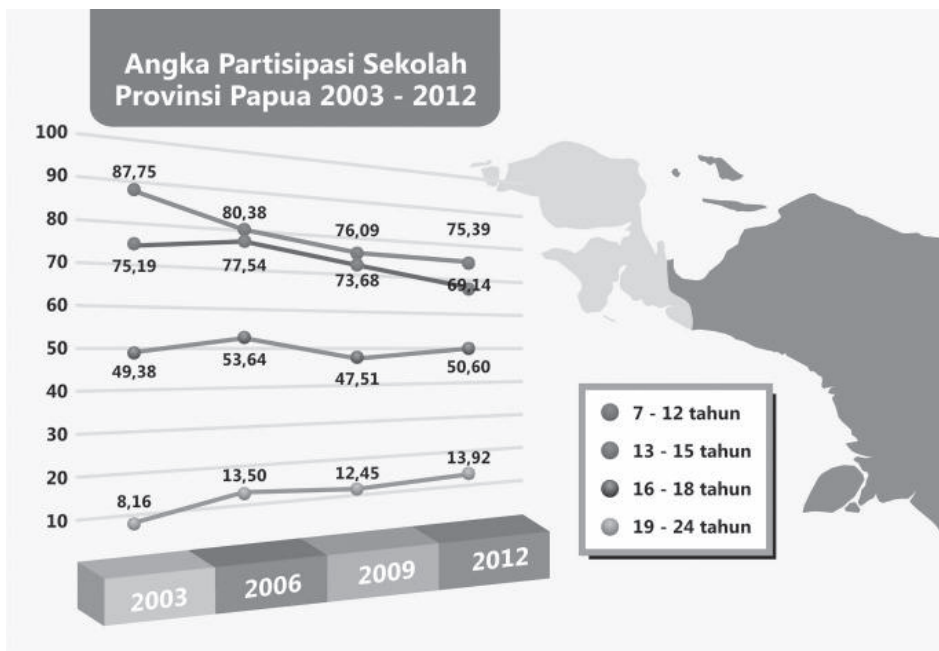
Sebagian besar wilayah Papua yang luasnya hampir 310 km² masih berupa hutan belantara dan belum tersentuh pembangunan. Jumlah sekolah di provinsi berpenduduk sekitar 2,85 juta jiwa ini hanya sebanyak 2.365 unit. Dari 445.000 anak usia sekolah di Papua, sebanyak 98.185 anak belum pernah sekolah, sedangkan 11.399 lainnya putus sekolah. Penelitian yang dilakukan PGRI bekerja sama dengan ILO⁸³ menyebutkan bahwa anak-anak usia 9-15 tahun di Papua terlibat berbagai jenis pekerjaan yang berdampak buruk terhadap kesehatan fisik, mental, dan seksual.

Di Distrik Tingginaugut, Kabupaten Puncak Jaya, banyak anak putus sekolah karena tidak didukung oleh tenaga pengajar dan fasilitas pendidikan yang memadai. Selain itu, sekitar 1000 anak usia sekolah di wilayah kaki Gunung Jayawijaya tersebut dipastikan tidak lagi bersekolah karena sering terjadi aksi kekerasan (penembakan) sejak tahun 2004. Selain itu, banyak anak usia sekolah di Papua yang menjadi pekerja

83 International Labour Organization; organisasi di bawah PBB yang menangani soal buruh.



anak sehingga lebih sering bolos sekolah dan kemudian putus sekolah. Ironisnya lagi, bukan hanya angka melek huruf di Papua yang mengalami tren penurunan, angka partisipasi sekolah juga mengalami tren serupa.



Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa APS untuk anak usia 7-12 tahun dan 13-15 tahun mengalami tren menurun, berturut-turut 12,08 persen dan 8,05 persen. APS untuk anak usia 16-18 tahun cenderung stagnan sementara APS untuk anak usia 19-24 tahun relatif mengalami peningkatan sebesar 70,59 persen. Peningkatan APS di jenjang pendidikan tinggi cukup signifikan, walaupun belum mengeluarkannya dari posisi 10 terbawah nasional. Beberapa tahun terakhir, beasiswa untuk calon mahasiswa dari Papua memang terbuka lebar. Namun, data ini juga menunjukkan bahwa program Wajib Belajar 9 Tahun belum berjalan efektif di Papua. Di tengah gencarnya gerakan Wajib Belajar 9 Tahun, partisipasi siswa jenjang SD dan SMP di Papua yang mengalami penurunan tentu menjadi keprihatinan tersendiri.

Papua, yang di era Orde Lama dan Orde Baru dikenal dengan nama Irian Jaya⁸⁴, merupakan salah satu provinsi terluas dan terbesar di

84 Pada 4 Oktober 1999, secara resmi berdiri provinsi baru bernama Irian Jaya Barat, sebagai hasil pemekaran Irian Jaya. Tahun 2007, nama Irian Jaya Barat diubah menjadi Papua Barat, dengan



Indonesia dilihat dari wilayah geografisnya. Papua juga terkenal dengan sumber daya alamnya yang melimpah ruah, di antaranya tembaga dan emas. Sumber daya alam ini baru sekian persen dari kandungan bumi Papua yang sangat bernilai. Melimpahnya sumber daya alam Papua ternyata berbanding lurus dengan segudang permasalahan pendidikannya. Dari mulai guru yang jarang datang, siswa juga ikut-ikutan tidak hadir karena ada upacara adat atau alasan lain. Akibatnya, sekolah pun sering libur, atau banyak siswa yang memilih tidak datang ke sekolah hingga berminggu-minggu. Berbagai alasan pun dikemukakan baik karena lokasi sekolah yang jauh dari kota, terbatasnya transportasi, juga masalah keamanan. Sekolah rusak dan fasilitas yang tidak memadai terlihat di mana-mana, peralatan belajar sangat terbatas, komputer menjadi barang mahal apalagi internet. Belum lagi masalah kurikulum nasional yang tidak sesuai dengan kehidupan masyarakat Papua sehingga menjadi beban tersendiri di tengah segala keterbatasan.

Banyaknya perusahaan tambang yang mengeruk kekayaan alam Papua seharusnya dapat membawa secercah harapan untuk perbaikan dan mengejar ketertinggalan dalam segala aspek pembangunan, terutama pendidikan. Ironisnya, rendahnya kemampuan masyarakat dalam menerima pembaharuan dan modernisasi, hidup penuh kesederhanaan, asupan gizi buruk, makanan pokok berupa ubi dan sagu, ditambah dengan sekelumit permasalahan pendidikan, semua ini bagai benang kusut yang terus membayangi tanah Papua. Konflik sosial juga terus terjadi, entah karena alasan politik, ekonomi, budaya, atau lokasi geografis, Papua seakan dianaktirikan.⁸⁵

Anak-anak Papua ibarat mutiara hitam, potensi besar mereka harus ditemukenali dan dikembangkan. Harus ada upaya serius dan kontinu untuk mengeluarkan mutiara dari cangkangnya. Upaya perbaikan ini juga harus sinergi dengan perbaikan di berbagai aspek, mulai dari politik, ekonomi, sosial, budaya, hingga infrastruktur. Pekerjaan perbaikan belumlah selesai hanya dengan mengangkat mutiara dari cangkang, kalau mutiara baru akan terpancar setelah diasah. Papua menyimpan banyak

ibu kota Manokwari.

85 Fakta masih diabaikannya Indonesia Timur dalam pendidikan bisa ditelaah dalam Bab 1 sub-bahasan “Indonesia Timur juga Indonesia”.



potensi, tidak sedikit mutiara hitam yang telah mengukir prestasi. Yang dibutuhkan adalah kesempatan dan perhatian yang sama, tidak ada lagi diskriminasi karena sesungguhnya anak-anak Papua pun punya hak untuk terus berkembang dan mewujudkan mimpinya. Bukankah anak-anak Papua juga anak-anak Indonesia?

Menuju Pendidikan Berkualitas

Perlu diakui bahwa pemerintah telah melakukan berbagai kebijakan dan program untuk mengentaskan putus sekolah dan buta aksara. Berbagai upaya telah dilakukan, mulai dari program BOS, program Wajib Belajar 9 Tahun, beasiswa siswa miskin, hingga penambahan daya tampung di tingkat SD hingga SMA dengan pembangunan gedung sekolah baru maupun penambahan ruang kelas baru. Beberapa pemerintah daerah bahkan memiliki program pendidikan gratis untuk SD dan SMP. Adapun untuk SMA/SMK, kendati tidak sampai gratis, beberapa pemerintah daerah telah memberikan subsidi pendidikan sebesar 40-50 persen dari kebutuhan total siswa.

Kebijakan dan program yang dirancang pemerintah pada dasarnya sudah cukup kondusif untuk melakukan perbaikan meskipun hasil dari implementasi di lapangan belum menunjukkan prestasi yang dapat dibanggakan. Anggaran pendidikan yang cukup besar tidaklah akan mencukupi jika tidak digunakan secara tepat sasaran. Kebijakan dan program yang diluncurkan selain harus dapat menghadapi permasalahan kemiskinan yang merupakan faktor terbesar penyebab putus sekolah dan buta huruf, juga harus dapat menjawab faktor penyebab lain yang tidak dapat dikesampingkan.

Program yang digulirkan pemerintah sudah banyak yang menysasar ke akar permasalahan putus sekolah, yaitu kemiskinan. Bantuan Siswa Miskin (BSM) dan berbagai program beasiswa yang mampu menutupi kebutuhan belasan juta anak Indonesia sudah tepat, tinggal implementasinya perlu banyak lagi perbaikan serius. Pencairan beasiswa masih sering telat, entah disengaja atau tidak, sehingga justru mempersulit penerima beasiswa. Pengalaman Dompot Dhuafa mengawal program beasiswa bagi mahasiswa, masih ada beberapa kampus yang diskriminatif dalam penyaluran beasiswa, hanya untuk golongan tertentu. Kuota penerima



beasiswa juga tidak terpenuhi karena mahasiswa dari masyarakat miskin hanya sedikit, akhirnya standar kemiskinan diturunkan untuk memenuhi kuota sehingga beasiswa tidak tepat sasaran. Persepsi masyarakat bahwa sekolah, apalagi pendidikan tinggi, itu mahal sudah terlanjur terbentuk, partisipasi masyarakat pun rendah. Dalam hal ini, program beasiswa perlu disosialisasikan lebih luas.

Bantuan operasional yang diberikan ke sekolah, misalnya BOS, BOSM, dan BOMM, termasuk Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN), secara tidak langsung juga seharusnya berdampak positif terhadap upaya peningkatan partisipasi pendidikan. Seperti halnya program beasiswa, program bantuan operasional ini juga masih sering terlambat pencairannya dan mempersulit unit pendidikan, namun permasalahannya lebih sistemik. Penyelewengan dana bantuan operasional ini banyak sekali modusnya, dari hulu sampai hilir. Sudah banyak kebocoran dana bantuan operasional yang mencuat ke permukaan, mencoreng wajah pendidikan. Jumlah kebocoran yang tidak sedikit ini jika digunakan untuk membantu pendidikan anak usia sekolah tentu akan mengurangi banyak anak putus sekolah. Implementasi penggunaan dan pelaporan dana operasional juga tidak mudah, bahkan beberapa di antaranya berbenturan dengan kondisi unit pendidikan, misalnya terkait penggajian guru honorer. Program yang justru berpotensi mempersulit sudah seharusnya dievaluasi dan diperbaiki.

Program sekolah gratis di beberapa wilayah juga secara nyata meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengenyam pendidikan. Namun, masih banyak sekolah yang melakukan pungutan liar karena dana dari pemerintah dinilai tidak mencukupi kebutuhan operasional. Selain pungutan liar, perlu juga diperhatikan kualitas sekolah. Jangan sampai sekolah gratis dimaknai sebagai sekolah apa adanya (baca: kurang berkualitas). Hak warga negara adalah memperoleh pendidikan yang terjangkau dan berkualitas. Lebih jauh lagi, program sekolah gratis ini masih terbentur dengan pola pikir masyarakat miskin yang pragmatis. Jika anak mereka sekolah, mereka masih harus mengeluarkan biaya untuk perlengkapan sekolah, transportasi, dan lain-lain. Sementara jika anak mereka tidak sekolah dan membantu bekerja, mereka justru memperoleh tambahan pendapatan. Jadi, menggratiskan sekolah tidak



serta-merta menyelesaikan masalah putus sekolah, apalagi jika edukasi ke masyarakat diabaikan.

Program Wajib Belajar 9 Tahun yang akan ditingkatkan menjadi Wajib Belajar 12 Tahun juga seharusnya sejalan dengan upaya pengentasan putus sekolah. Faktanya, masih banyak wilayah di Indonesia yang belum siap merealisasikannya, baik terkendala fasilitas, infrastruktur, ataupun SDM. Program Ruang Kelas Baru (RKB) dan Unit Sekolah Baru (USB) memang sudah tepat untuk menambah dan memperbaiki infrastruktur. Sayangnya, jumlah ruang kelas dan sekolah yang dibangun tidak sebanding dengan yang dibutuhkan, bahkan belum sebanding dengan ruang kelas dan jumlah sekolah yang rusak. Perbaikan seolah tidak terlihat, apalagi kualitas bangunan hasil kerja pemerintah banyak yang berkualitas rendah. Kegiatan pembangunan dan perbaikan tentu tidak ada habisnya, apalagi jika ditambah kerusakan infrastruktur sekolah akibat bencana yang kerap melanda berbagai wilayah di Indonesia.

Terkait putus sekolah akibat bencana, perlu disusun prosedur pelaksanaan sekolah darurat di daerah bencana. Seluruh civitas akademika unit pendidikan disiapkan untuk mengantisipasi, menghadapi dan menanggulangi bencana yang bisa datang kapan saja, sekaligus menginisiasi sekolah darurat sehingga pendidikan tidak harus terputus. Pengalaman Dompot Dhuafa membangun Sekolah Ceria di berbagai wilayah pascabencana menunjukkan bahwa fokus penanganan kebencanaan di Indonesia selama ini lebih ke penyaluran logistik dan perbaikan infrastruktur, sementara *trauma healing* dan pendidikan anak cenderung terlupakan.

Pembinaan terhadap guru dan kepala sekolah, serta penataan kurikulum juga menjadi bagian tidak terpisahkan dari upaya pengentasan putus sekolah. Tidak sedikit kasus putus sekolah yang tidak perlu terjadi jika guru dan kepala sekolah lebih bijak dan berkompentensi, serta kurikulum lebih sesuai dengan kebutuhan dan *local wisdom*. Ketika sekolah tidak bisa menjadi rumah kedua yang menarik dan menyenangkan bagi anak, potensi peningkatan angka putus sekolah pun meningkat.

Pendidikan formal hanya merupakan satu bagian dari pendidikan di Indonesia. Untuk memperbaiki wajah pendidikan Indonesia, perlu juga diperhatikan pendidikan nonformal dan informal. Pendidikan Anak



Usia Dini harus mulai diintegrasikan dalam sistem pendidikan Indonesia. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan program kejar paket harus dievaluasi dan dioptimalkan pemanfaatannya untuk wilayah dan masyarakat yang tidak terjangkau oleh pendidikan sekolah formal.

Bentuk-bentuk aktivitas pendidikan nonsekolah juga perlu lebih disemarakkan karena banyak hal yang tidak dapat diperoleh di sekolah. Pembelajaran tidak perlu terkungkung dalam ruang kelas karena banyak hal yang dapat dipelajari di luar kelas. Bentuk-bentuk kegiatan pendidikan yang meningkatkan interaksi sosial dan eksplorasi alam perlu dikembangkan, misalnya wisata edukasi. Untuk meningkatkan nilai tambah, pendidikan keterampilan juga perlu lebih diintensifkan karena masyarakat butuh kompetensi yang sifatnya lebih praktis dan aplikatif. Pendidikan pengasuhan (*parenting*) juga perlu diperkenalkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap arti pentingnya pendidikan. Sarana penunjang pendidikan lain, misalnya perpustakaan atau taman baca masyarakat, juga perlu lebih banyak disediakan. Dikotomi antara pendidikan sekolah dan pendidikan luar sekolah harus diminimalkan untuk mempercepat pengentasan putus sekolah dan buta huruf.

Permasalahan putus sekolah dan buta huruf hanya dapat diselesaikan jika terbangun sinergi antardepartemen di pemerintah pusat dan daerah, serta didukung oleh masyarakat, baik LSM, perorangan, perusahaan, ormas, maupun media. Ketika anak diajak untuk kembali ke sekolah, harus ada program yang dapat meningkatkan perekonomian keluarga dan berjalan sinergi. Jika tidak, anak akan terus dikorbankan, permasalahan putus sekolah tidak akan selesai. Perbaikan jalan atau pembangunan jembatan dan sarana fisik lainnya termasuk sarana transportasi yang tidak berada dalam wilayah kerja Kemdikbud sangat erat kaitannya dengan akses masyarakat ke sekolah. Koordinasi dan sinergi antardepartemen di pusat dan daerah menjadi penting, untuk bekerja sama membangun kehidupan masyarakat tentunya, bukan malah saling tuding dan melempar tanggung jawab.

Transparansi penggunaan anggaran program memang penting, namun tidak cukup sehingga harus tetap ada pengawasan dari segenap *stakeholder*. Pengawasan juga perlu dilakukan terhadap pembangunan dan



perbaikan infrastruktur untuk meminimalkan penyelewengan dan lebih memastikan kualitas. Pengawasan ini perlu dipandang sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab, bukan hendak membangun kecurigaan dan mencari kesalahan. Peran serta publik, baik LSM, perorangan, perusahaan, ormas, maupun media, sangat dibutuhkan untuk melakukan banyak perbaikan di bidang pendidikan, namun porsinya lebih besar di skala mikro. Adapun peran pemerintah akan sangat menentukan perbaikan dunia pendidikan yang bersifat menyeluruh.

Ada kalanya solusi terhadap suatu permasalahan perlu diambil dari gagasan di luar koridor yang umum. Untuk masalah ketimpangan jumlah SD dengan SMP dan SMA misalnya, program Wajib Belajar 12 Tahun perlu mungkin saja menjadi pintu perubahan mendasar dalam pengelolaan sekolah. Perlu dipertimbangkan menjadikan pendidikan dasar (SD-SMP) dalam satu unit pendidikan. Pendidikan dasar 9 tahun tidak terputus, tidak perlu ada pindah sekolah dari SD ke SMP, cukup kenaikan kelas dari kelas 6 ke kelas 7. Sementara itu gedung SMP dialihfungsikan menjadi SMA, pendidikan menengah tiga tahun yang lebih terarah. Perbedaan jumlah infrastruktur memang masih ada, namun tidak terlalu timpang. Tugas selanjutnya tinggal peningkatan kapasitas guru, terutama di jenjang SD dan SMP, dan pemerataan penyebarannya.

Permasalahan pemerataan dan prioritas pembangunan pendidikan menjadi pekerjaan lain yang harus benar-benar diperhatikan. Kesenjangan ekonomi dan ketimpangan kualitas pendidikan akan terus memunculkan masalah baru jika tidak diselesaikan secara tuntas. Solusi atas permasalahan putus sekolah dan buta aksara mungkin mengalami berbagai keterbatasan, karenanya perlu diambil kebijakan yang memerhatikan skala prioritas. Upaya peningkatan partisipasi sekolah dan keaksaraan masyarakat sudah semestinya ada di seluruh penjuru tanah air, proporsional berdasarkan prioritas. Ketika pembangunan pendidikan sudah lebih merata, secara kuantitas dan kualitas, penanganan terhadap berbagai permasalahan pendidikan yang masih terus muncul akan lebih mudah.

Putus sekolah dan buta huruf seharusnya tidak perlu terjadi jika negara peduli dan komitmen dengan pendidikan anak bangsanya. Negara yang peduli meyakini bahwa pendidikan adalah kunci untuk membangun



peradaban masa depan, dan hari esok ada dalam genggamannya yang hari ini memperjuangkan pendidikan. Pendidikan bukan milik golongan tertentu, pemerintah wajib menjamin adanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tanpa terkecuali. Anak Indonesia, generasi penerus, di tangan merekalah masa depan bangsa juga dunia.

Langkah perjuangan memang masih panjang, tidak cukup waktu hampir tujuh dekade merdeka untuk mengentaskan putus sekolah, kebodohan, dan kemiskinan yang melanda negeri ini. Sebenarnya kompleksitas problematika yang mendera bangsa ini adalah tantangan untuk menjadi bangsa besar. Ketika Indonesia hampir tenggelam karena putus sekolah, buta aksara, dan kemiskinan, gairah untuk perubahan dan perbaikan tidak boleh pudar. Negeri ini mungkin terlambat untuk belajar, negeri ini hampir pula tenggelam karena peliknya permasalahan, namun semua keadaan ini tidak boleh menjadikan kita menyerah. []



“Upaya mengentaskan putus sekolah dan buta huruf memang tidak bisa terlepas dari upaya mengentaskan kemiskinan. Sifatnya adalah sinergi, bukan ketergantungan. Tidak perlu menunggu kemiskinan selesai diberantas untuk mulai mengentaskan putus sekolah dan buta huruf. Upaya mengentaskan kemiskinan bukan merupakan prasyarat mengentaskan putus sekolah dan buta huruf.”



Bab 4

Menegakkan Kembali Sekolah yang (Hampir) Roboh



Sumber: Dokumen Makmal Pendidikan

Sekolah itu tak sekokoh dulu. Dinding sekolahnya tak lagi berwarna merah menyala dan cokelat pekat. Cat pada dindingnya sudah memudar dan tertutupi oleh debu yang menempel. Atap ruang kelasnya pun sudah melapuk dan banyak yang berlubang.

Ketika musim penghujan tiba, rasa takut pun menghampiri. Ketakutan apabila tiba-tiba atap ruang kelas mereka roboh karena tidak kuat menahan derasnya air hujan dan kencangnya angin berhembus. Kegiatan belajar-mengajar pun menjadi tidak fokus. Guru dan siswa memikirkan keselamatan jiwa. Namun, bagi para orangtua yang berada di sekitar sekolah, mereka tidak memiliki pilihan lain untuk tidak menyekolahkan anak-anaknya di sekolah tersebut. “Tidak ada pilihan daripada anak-anak kami tidak sekolah,” jawab salah satu orangtua.



Di lain tempat, kondisi bangunannya tak seburuk sekolah pertama tadi. Bagian atap sekolah masih sempurna menutupi ruang kelas sehingga anak-anak tidak perlu khawatir ketika musim kemarau dan penghujan tiba. Namun, kondisi lingkungan sekolah sangat memprihatinkan. Bagaimana anak-anak bisa belajar jika sekolah mereka tidak jauh berbeda dengan—maaf—kandang satwa. Dinding ruang kelasnya sudah banyak yang retak, plafon bagian belakang ruang kelas nyaris lepas dari dudukannya. Lantai ruang kelas hanya sepertiganya berlantaikan keramik. Cat dinding sekolah sudah tidak terlihat jelas warna aslinya, yang mendominasi adalah warna cokelat dari debu-debu yang bertebangan kemudian menempel di dinding tersebut.

Deskripsi bangunan sekolah di awal tulisan ini merupakan contoh nyata kondisi bangunan sekolah di SDN Leuwiranji 04, Kabupaten Bogor, dan SDN 02 Pematang Tiga, Bengkulu. Pada 2010, kedua sekolah tersebut diperbaiki melalui program Pendampingan Sekolah Makmal Pendidikan Dompot Dhuafa bekerja sama dengan PT Trakindo Utama.⁸⁶

Dalam kurun waktu tiga bulan, bangunan sekolah selesai diperbaiki. Wajah sumringah pun menyeruak dari para guru dan siswa di sana. Mereka tidak perlu khawatir lagi melakukan kegiatan belajar-mengajar di dalam kelas. Seluruh warga sekolah pun menyatakan komitmennya untuk turut aktif memelihara kebersihan sekolah.

“Kini sekolahku kembali indah!” Seru salah satu anak di sekolah tersebut. Bagi siswa, perbaikan gedung sekolah merupakan kado terindah di tahun ajaran baru 2010/2011. Setiap pagi sebelum jam belajar dimulai, anak-anak secara bergantian mengepel lantai ruang kelasnya. Menurut Pendamping Sekolah⁸⁷ di SDN 02 Pematang Tiga, anak-anak di sana mengepel ruang kelas setiap hari karena mereka senang sekolahnya sudah berlantaikan keramik. Selama mereka sekolah belum pernah memiliki kelas yang lantainya keramik.

86 Program Pendampingan Sekolah merupakan salah satu program Makmal Pendidikan Dompot Dhuafa yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan manajemen sekolah. Bersama PT Trakindo Utama, Makmal Pendidikan telah mendampingi 23 Sekolah yang tersebar di Pulau Sumatera hingga Papua. Semua sekolah yang didampingi mendapatkan fasilitas perbaikan gedung dan pendampingan berupa pelatihan guru dan beasiswa selama 2-3 tahun.

87 Seseorang yang ditugaskan oleh Makmal Pendidikan DD dalam kurun waktu tertentu untuk melaksanakan program pendampingan di sekolah dampingan.



Kondisi di SDN 02 Pematang Tiga membuktikan bahwa anak-anak senang dan bahagia bila memiliki bangunan sekolah yang bagus dan terawat. Semangat belajar mereka pun meningkat dan akan berdampak pada pencapaian prestasi belajar.



Sayangnya, kondisi pendidikan secara umum di Indonesia hari ini masih memprihatinkan. Tidak semua anak-anak Indonesia menikmati hari-harinya belajar di sekolah karena buruknya kondisi fisik ruang kelas. Pada Januari 2013 kita sudah disuguhkan berita yang menyedihkan dari dunia pendidikan. Ambruknya atap ruang kelas SD Negeri Banar 01 Kampung Babakan Tajur, Desa Harkat Jaya, Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, mengakibatkan 28 siswa luka ringan, 6 siswa luka berat, 1 guru cedera.

Haruskah kejadian seperti di SDN Banar 01 terus berulang di sekolah lain? Ancaman di balik rapuhnya bangunan sekolah kiranya perlu jadi bahan perhatian semua pihak. Betapa tidak, keberadaan sekolah dengan ruang kelas yang tidak layak hingga hari ini pun masih mudah ditemukan. Masih di Kabupaten Bogor, ada sebuah sekolah dasar dengan bangunan rentan sewaktu-waktu ambruk. Dalam kondisi seperti ini, bagaimana mungkin anak-anak bisa belajar dengan tenang dan nyaman apabila ruang kelas yang ditempatinya, pada bagian atap banyak mengalami



kerusakan dan kayu-kayunya mulai melapuk? Belajar dalam ruang kelas dengan kondisi bangunan yang rusak berat seperti ditampilkan dalam foto di atas tentunya penuh risiko. Apakah pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, hanya berdiam diri saja?

Padahal, Thamrin Kasman, Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kemdikbud, pernah mengutarakan bahwa infrastruktur yang bagus membawa siswa dan guru pada iklim atau suasana belajar-mengajar yang kondusif. Tak perlu muncul kekhawatiran ruang kelas tiba-tiba roboh. Siswa dapat belajar dengan tenang dan guru bisa meningkatkan kemampuannya dalam mendidik murid-muridnya. Iklim yang bagus tersebut tentu saja dapat menekan angka putus sekolah. Sebab, menurut penelitian, selain kendala ekonomi, faktor lain yang mendorong siswa putus sekolah adalah buruknya infrastruktur sekolah. Siswa tak tenang belajar. Sebaliknya, stres memikirkan keselamatan jiwanya dari ancaman gedung roboh.⁸⁸

Problematika Mutu Pendidikan

Visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah terselenggaranya layanan prima pendidikan dan kebudayaan nasional untuk membentuk insan Indonesia yang cerdas dan berkarakter kuat. Untuk mencapai visi tersebut, diperlukan upaya untuk melakukan peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan. Problematika pendidikan Indonesia hari ini masih ditantang untuk menyelesaikan permasalahan peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan.

Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, pendidikan nasional kita memiliki delapan Standar Nasional Pendidikan.⁸⁹ Standar Nasional Pendidikan merupakan kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini dipertegas melalui Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 50 ayat 2: “Pemerintah menentukan

88 Thamrin Kasman, 2012, *Rehabilitasi Sekolah, Rehabilitasi Masa Depan*, <http://kemdikbud.go.id/kemdikbud/artikel-rehabilitasi-sekolah> Diunduh pada 4 Juni 2013.

89 Delapan Standar Pendidikan Indonesia meliputi Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pembiayaan, Standar Pengelolaan, Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, Standar Proses, dan Standar Penilaian.



kebijakan nasional dan standar nasional pendidikan untuk menjamin mutu pendidikan nasional.”

Salah satu standar nasional pendidikan adalah standar sarana dan prasarana. Standar ini memuat kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, dan sumber belajar lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Namun, standar ini belum sepenuhnya tercapai di sekolah-sekolah Indonesia.

Pertama, sebanyak 13,19 persen bangunan sekolah dalam kondisi perlu diperbaiki. Kondisi ini dapat menghambat proses belajar-mengajar. Karena rusaknya bangunan ruang kelas, pembelajaran tidak bisa dilakukan di dalam kelas. Akhirnya, siswa belajar menggunakan ruang terbuka atau menggunakan ruang kelas yang tersisa yang kondisinya masih bagus. Penggunaan ruang kelas ini dilakukan secara bergantian atau berdesakan dalam satu ruang kelas dengan jumlah melebihi kapasitas ruang belajar. Kondisi belajar yang seperti ini akan mengganggu konsentrasi anak dalam belajar, guru pun kesulitan mengatur siswa, dan jam belajar pun berkurang dari yang seharusnya.

Kedua, minimnya ketersediaan fasilitas penunjang pembelajaran siswa di sekolah seperti perpustakaan dan ruang laboratorium. Lengkapnya fasilitas yang dimiliki sekolah turut serta meningkatkan keberhasilan belajar siswa. Namun, fasilitas-fasilitas ini hanya dimiliki oleh sekolah-sekolah berbayar mahal dan hanya dapat dirasakan oleh anak-anak kalangan menengah ke atas. Lalu, bagaimana dengan sekolah-sekolah negeri? Sebagian besar sekolah di Indonesia adalah milik pemerintah. Sayangnya, kondisinya secara umum jauh dari memuaskan, terutama yang berada di daerah pelosok.

Ketiga, masih banyak sekolah di Indonesia kekurangan ruang kelas sehingga diperlukan penambahan ruang kelas baru. Misalnya yang dialami SD Negeri 3 Sukasari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Sekolah tersebut membutuhkan tambahan empat ruangan kelas baru. Di antara keempat ruangan itu satu ruangan untuk perpustakaan. Selama ini kegiatan belajar-mengajar menumpang di Madrasah Diniyah



Al-Falah yang letaknya jauh dari sekolah. Akibatnya, para siswa terpaksa berjalan kaki sehingga waktu untuk kegiatan belajar-mengajar habis untuk perjalanan yang cukup jauh.⁹⁰ Padahal, ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai akan memberikan peluang lebih besar bagi terlaksananya sebuah proses pendidikan berkualitas yang kemudian berpotensi melahirkan generasi yang cerdas dan kreatif.⁹¹

Bangunan nan Renta

Di Indonesia, gedung sekolah merupakan fasilitas penting bagi anak-anak untuk menimba ilmu. Gedung sekolah merupakan kebutuhan mutlak bagi terlaksananya proses pendidikan. Oleh karena itu, gedung sekolah harus dibuat nyaman bagi siswa dan guru.⁹²

Kerusakan infrastruktur sekolah sudah tentu berdampak pada terhambatnya peningkatan mutu pendidikan. Pembelajaran tidak akan berjalan dengan baik apabila gedung-gedung sekolah sebagai tempat berlangsungnya proses belajar-mengajar banyak yang rusak dan tidak layak pakai.

Terdapat 493.173 ruang kelas di tingkat sekolah dasar dari 883.709 ruang kelas pada 2004 dalam kondisi rusak dengan tingkat kerusakan yang bervariasi mulai dari rusak ringan hingga rusak berat. Faktor-faktor yang menyebabkan banyaknya gedung sekolah rusak di antaranya umur bangunan, konstruksi bangunan, pengawasan dalam proses pembangunan, bencana alam, dan minimnya biaya pemeliharaan atau perbaikan gedung sekolah.

Dilihat dari usia bangunan, rata-rata bangunan sekolah di tingkat SD dibangun sekitar tahun 1970-1980-an. Melalui Instruksi Presiden (inpres) SD, pembangunan sekolah dasar dibangun secara massal di berbagai daerah di pelosok tanah air guna menunjang program pemberantasan buta huruf dan program Wajib Belajar 6 Tahun yang merupakan perluasan dan pemerataan pendidikan.

90 <http://www.harapanrakyat.com/banjarsari/sdn-3-sukasari-butuh-tambahan-4-rkb/>

91 *Isu-isu Pendidikan*, Nomor 6, Tahun ke 2, Juni 2005, hlm. 212.

92 *Isu-isu Pendidikan*, Nomor 6, Tahun ke 2, Juni 2005, hlm. 211.



Di luar soal usia bangunan yang sudah tua, dalam pelaksanaan Inpres SD memang ditemukan fakta bahwa pembangunan fisik gedung dilakukan asal jadi. Gedung sekolah dibangun dengan menggunakan bahan-bahan yang berkualitas rendah dan kecilnya alokasi dana pemeliharaan gedung sekolah sehingga kerusakan gedung sekolah di Indonesia hampir merata di seluruh tanah air.

Permasalahan kerusakan gedung sekolah selalu menjadi masalah klasik di bidang pendidikan yang terus-menerus terjadi hingga hari ini. Untuk itulah dibutuhkan kesungguhan dan kerja keras untuk menyelesaikan permasalahan gedung sekolah yang rusak. Mengutip perkataan Thamrin Kasman, program rehabilitasi tidak sekadar memperbaiki infrastruktur sekolah, namun juga “merehabilitasi” masa depan bangsa.⁹³

Perjalanan Sekolah Rusak

Kerusakan gedung sekolah, berdasarkan data Balitbang Depdiknas tahun 2003/2004, kondisi fisik SD paling memprihatinkan. Dari jumlah 145.867 SD di Indonesia pada tahun tersebut yang telah menampung 25.976.285 siswa, terdapat 883.709 ruang kelas dengan kondisi ruang kelas yang baik hanya 390.536 atau 44,19 persen. Sisanya mengalami kerusakan yang bervariasi, yakni kerusakan ringan dan kerusakan berat. Terdapat 290,566 atau 32,88 persen ruang kelas SD mengalami kerusakan ringan yang artinya tidak membahayakan kegiatan belajar-mengajar tetapi perlu perbaikan, dan ruang kelas tidak perlu dirobohkan. Ruang kelas SD yang mengalami kerusakan berat sekitar 202.607 atau 22,93 persen. Kerusakan berat artinya membahayakan kegiatan belajar-mengajar, perlu perbaikan total, dan ruang kelas perlu dirobohkan terlebih dahulu.⁹⁴

Selain kerusakan ruang kelas yang dialami tingkat SD, kerusakan ruang kelas juga terdapat di tingkat SMP dan SMA. Namun, jumlah kerusakannya jauh lebih sedikit jika dibandingkan SD. Lengkapnya lihat tabel di bawah ini.⁹⁵

93 Thamrin Kasman, 2012, *Rehabilitasi Sekolah, Rehabilitasi Masa Depan*, <http://kemdikbud.go.id/kemdikbud/artikel-rehabilitasi-sekolah>

94 *Isu-isu Pendidikan*, Nomor 6, Tahun ke 2, Juni 2005, hlm. 214.

95 *Isu-isu Pendidikan*, Nomor 6, Tahun ke 2, Juni 2005, hlm. 214.



Jenjang	Kerusakan Ringan	Kerusakan Berat	Total Ruang Kelas
SD	290,566	202,607	883,709
SMP	22,212	8,819	195,178
SMA	3,086	1,195	83,569
SMK	2,930	734	53,263

Ruang kelas yang rusak sudah tentu menimbulkan risiko terancamnya jiwa siswa yang sedang belajar di dalam kelas. Gedung roboh dan atap sekolah ambruk dapat terjadi kapan saja dan akhirnya menelan korban. Keadaan ini sungguh sangat memprihatinkan, apalagi kerusakan ruang kelas terbanyak di tingkat SD karena SD adalah fondasi pendidikan nasional. Ruang kelas yang rusak dapat menghambat proses belajar-mengajar sehingga tidak mungkin diperoleh kualitas sumber daya manusia yang bermutu dan berkualitas. Menyadari keadaan ini pemerintah pada 2008 menargetkan tuntasnya rehabilitasi ruang kelas yang rusak.

Kerusakan Berkesinambungan

Sadar pendidikan memiliki peran besar dalam pembangunan suatu bangsa, pemerintah memberikan porsi anggaran untuk sektor pendidikan lebih besar. Ini tercantum dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengamanatkan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertanggung jawab dalam menyediakan anggaran minimal 20 persen dari APBN dan APBD. Namun sayangnya, anggaran 20 persen yang disediakan sebagian besar dialokasikan untuk belanja pegawai. Alhasil, perbaikan gedung sekolah dinomorduakan. Padahal, perbaikan ruang kelas menjadi hal yang mendesak. Menjadi wajar bila banyak media massa hingga kini masih memberitakan ruang-ruang kelas di sekolah yang mengalami kerusakan di beberapa provinsi di tanah air.

Salah satunya kondisi SD 55 Binuang, Polewali Mandar (Sulawesi Barat) terancam ambruk akibat fasilitas sekolah telah lapuk dimakan usia. Sejumlah meja dan bangku reyot yang hanya ditopang dengan dua tiang



masih dimanfaatkan para siswa belajar karena tak ada bangku dan meja lain. Atap bocor dan dinding lapuk dimakan rayap sebenarnya membuat suasana belajar di sekolah ini menjadi tidak nyaman. Namun demikian, ratusan siswa di sekolah tampak tetap semangat belajar. Pihak sekolah sudah berulang kali mengajukan bantuan dana rehabilitasi dan pengadaan fasilitas penunjang sekolah untuk memperbaiki kondisi sekolahnya yang rusak, namun tidak kunjung mendapat respons pemerintah setempat.⁹⁶

Berbicara data kerusakan fasilitas sekolah, jika dibandingkan tahun 2004, kerusakan ruang kelas memang mengalami penurunan walaupun tidak signifikan. Capaian penurunannya hanya 25 persen. Berdasarkan data Kemdikbud, pada 2010 ruang kelas SD Negeri di Indonesia berjumlah sekitar 801.966. Hanya 476.209 ruang atau sekitar 59,4 persen yang kondisinya baik. Adapun sisanya 325.757 ruang kelas atau 40,6 persen lainnya dalam kondisi rusak, termasuk 101.000 kelas di antaranya rusak berat.

Kerusakan ruang kelas pada 2011 jika dibandingkan pada 2010 mengalami peningkatan menjadi 131.526 ruang kelas yang rusak berat. Jumlah ini terdiri atas jenjang SD 92.598 ruang kelas dan SMP 38.928 ruang kelas. Data Kementerian Agama menunjukkan dari 208.214 ruang kelas MI dan MTs, sebanyak 13.247 ruang kelas rusak berat dan 51.036 ruang kelas rusak ringan. Sebagian besar kerusakan parah terbanyak di sekolah-sekolah dasar yang berada di pulau Jawa, terutama di provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur dengan jumlah bangunan rusak berat mencapai 110.598 ruang kelas. Berikut data sebagian sekolah rusak parah di daerah-daerah sekitar pulau Jawa yang diberitakan oleh media:

96 <http://edukasi.kompas.com/read/2012/09/11/17493887/Bagi.Siswa.Atap.Bocor.dan.Bangku.Rubuh.Sudah.Biasa>



2011	Dari 900-an sekolah yang ada, 128 di antaranya masuk kategori rusak berat dan 70 rusak ringan. Gedung sekolah tersebut umumnya dibangun tahun 1980-an. ⁹⁷
	Sebanyak 364 sekolah di DKI Jakarta rawan ambruk. Jumlah ini terdiri atas 293 gedung SD dan 53 gedung SMP. ⁹⁸
	SDN Rusak Sedang = 361 ruang kelas = 22,85 persen; SDN Rusak Berat = 184 ruang kelas = 11,65 persen; Total Rusak = 34,49 persen (Dinas Pendidikan Kota Bogor). ⁹⁹
2012	Pemerintah Kabupaten Pandeglang melaporkan terdapat 868 unit SD, sekitar 590 unit (67,97 persen) mengalami kerusakan, belum lagi SMP/ sederajat dan SMA/ sederajat. ¹⁰⁰
	Sebanyak 638 ruang kelas SD di Kabupaten Madiun (Jawa Timur) rusak parah dan nyaris ambruk. Kerusakan itu terjadi karena gedung-gedung tersebut belum pernah diperbaiki sejak dibangun pada 1980. ¹⁰¹
	Sebesar 30 persen dari 297 gedung SD (atau 89 gedung sekolah) di Kota Tangerang Selatan (Banten) mengalami kerusakan. Namun, Pemkot Tangsel hanya dapat melakukan renovasi sebanyak 15 gedung sekolah (16,85 persen) pada 2012. ¹⁰²
	Sekitar 30 persen dari total sekolah di Kabupaten Cianjur (Jawa Barat) kondisinya rusak dan memprihatinkan, sebagian besar di antaranya adalah bangunan SD. Jumlah SD di Cianjur mencapai 1.241 bangunan. Sekitar 425 bangunan dalam keadaan kurang layak, sekitar 816 sekolah kondisinya sudah ada yang direhabilitasi, dan masih ada yang dalam proses.

Menyimak masih terbaikannya ketersediaan bangunan sekolah yang layak, menarik pandangan mantan Wakil Menteri Pendidikan Nasional, Fasli Djalal, bahwa negarawan besar dunia umumnya sangat berpandangan bahwa bangsa yang besar hanya bisa dicapai melalui

97 *Republika*, 7 Maret 2011.

98 *Republika*, 3 Mei 2011.

99 *Radar Bogor*, 25 Mei 2011.

100 *Republika*, 2 Januari 2012.

101 *Kompas*, 19 Januari 2012.

102 *Republika*, 27 Februari 2012.



pendidikan, sementara pendidikan di Indonesia masih terbentur dengan keterbatasan infrastruktur.¹⁰³ Untuk mengatasi persoalan ini, pemerintah pun merencanakan penyelesaian rehabilitasi sekolah yang ditargetkan selesai pada 2012 (semula dijanjikan selesai pada 2008) dengan mengalokasikan anggaran dari APBN. Berikut rencana target oleh pemerintah pusat:¹⁰⁴

<i>Target Tahun</i>	<i>Jumlah Kelas</i>	<i>Persen</i>	<i>Anggaran (Triliun)</i>
<i>2011</i>	<i>21.500</i>	<i>14,05</i>	<i>2,8</i>
<i>2012</i>	<i>131.526</i>	<i>85,95</i>	<i>17,6</i>
<i>Total</i>	<i>153.026</i>	<i>100</i>	<i>20,4</i>

Anggaran yang diperlukan untuk merehabilitasi satu SD yang rusak kira-kira Rp 120 juta dengan asumsi satu ruang kelas berukuran 8 meter x 9 meter. Mulai 2012, program rehabilitasi sekolah rusak dan pembangunan ruang kelas baru digenjut. Kemdikbud menargetkan tidak ada lagi ruang kelas yang rusak pada 2013.

Membangun Bangsa Beradab

Ada dua faktor yang akan menentukan tingkat keberhasilan belajar siswa, yakni faktor internal (keadaan atau kondisi siswa yang mencakup jasmani dan rohani), dan faktor eksternal (kondisi lingkungan di sekitar siswa yang mencakup lingkungan sosial dan lingkungan non-sosial). Kedua lingkungan ini dapat disebut lingkungan belajar.

Lingkungan belajar dapat diartikan sebagai laboratorium atau tempat bagi anak untuk bereksplorasi, bereksperimen, dan mengekspresikan diri untuk mendapatkan konsep dan informasi baru sebagai wujud dari hasil belajar. Baik lingkungan sosial ataupun non-sosial, keduanya dapat memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan siswa. Yang termasuk

103 *Isu-isu Pendidikan*, Nomor 6, Tahun ke 2, Juni 2005, hlm. 219.

104 *Republika*, 2 Januari 2012.



lingkungan sosial siswa adalah guru, teman-teman sekolah, dan staf administratif. Lingkungan sosial tidak perlu disediakan karena tersedia sendiri dan bagaimana manusia dapat beradaptasi satu dengan yang lainnya. Adapun lingkungan non-sosial meliputi gedung sekolah, fasilitas belajar, rumah tinggal, sarana belajar, dan kondisi cuaca. Lingkungan non-sosial, kecuali cuaca, perlu disediakan, salah satunya fasilitas belajar berupa perpustakaan sekolah.

Fasilitas penunjang pembelajaran berandil dalam menentukan keberhasilan belajar siswa. Salah satu fasilitas terpenting yang harus dimiliki oleh sekolah adalah perpustakaan sekolah. Berdasarkan amanah Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, setiap sekolah harus memiliki perpustakaan. Jika jumlah SD dan MI saat ini mencapai 169.031, jumlah perpustakaan yang ada juga sebanyak 169.031 perpustakaan. Namun, pada kenyataannya, amanah UU tersebut belum terlaksana.

Saat ini jumlah perpustakaan di sekolah dasar sekitar satu persen lebih sedikit dari jumlah sekolah negeri yang ada. Ketimpangan fasilitas sekolah menganga besar jika kita membandingkan antara sekolah swasta yang membayar mahal dan sekolah negeri dengan status tertentu yang memiliki fasilitas lengkap dan memadai. Kondisi semacam ini akhirnya memunculkan penilaian bahwa pendidikan yang berkualitas hanya bisa dinikmati oleh anak-anak yang berasal dari keluarga menengah ke atas.

Keberadaan perpustakaan terkadang juga belum begitu dianggap penting oleh pihak sekolah. Semisal pun ada perpustakaan di sekolah, fungsinya sebagai gudang penyimpanan alat-alat peraga dan peralatan olahraga. Buku-buku bacaan yang ada tidak diolah dan tidak dibaca, hanya ditumpuk saja. Hal semacam ini ditemui di lapangan oleh tim Pendampingan Perpustakaan Makmal Pendidikan Dompot Dhuafa saat memulai program di empat sekolah dasar.¹⁰⁵

Pemerintah sendiri bukannya tidak tahu sama sekali fungsi vital perpustakaan sebagai sarana menjadikan Indonesia sebagai bangsa besar. Saat meresmikan sebuah toko buku terkenal di tanah air pada 19 Desember 2008, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam sambutannya

105 Program Pendampingan Perpustakaan merupakan program yang diberikan kepada sekolah untuk menata perpustakaannya menjadi lebih berdaya guna dalam menunjang kegiatan belajar-mengajar.



mengemukakan bahwa bangsa yang maju pasti memiliki masyarakat yang maju pula. “Masyarakat maju,” ujar Presiden, “ditopang oleh masyarakat yang gemar membaca. *Reading society* menjadi prasyarat utama menuju *advance society*.”¹⁰⁶

Jika dibandingkan Vietnam, Indonesia masih jauh kalah dalam hal literasi. Jumlah penduduk Vietnam mencapai 80 juta, namun negara ini mampu memproduksi 15.000 judul buku per tahunnya. Indonesia dengan jumlah penduduk mencapai 225 juta hanya mampu memproduksi 8000 buku.¹⁰⁷

Oleh karena itu, diperlukan satu lingkungan belajar yang direkayasa agar anak-anak Indonesia memiliki kebiasaan membaca dan mencintai buku. Adanya pembiasaan membaca buku sejak dini menjadikan mereka lebih mudah mempelajari apa pun, termasuk pelajaran di sekolah, yang berefek pada meningkatnya prestasi akademis. Lingkungan yang direkayasa tersebut dapat berbentuk ‘ceruk ilmu’¹⁰⁸ di setiap sudut kelas.

Capaian Target

Peningkatan alokasi anggaran pendidikan dimaksudkan untuk mencapai dua sasaran utama, yakni peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan. Peningkatan mutu pendidikan dapat tercapai dengan tersedianya sarana yang baik, fasilitas laboratorium, perpustakaan, dan ketersediaan sejumlah buku bacaan yang memadai, serta adanya sejumlah tenaga pengajar yang berkualitas. Pemerataan pendidikan dapat tercapai dengan ketersediaan prasarana, yakni gedung sekolah dan ruang kelas yang mencukupi sehingga akses layanan pendidikan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia hingga ke pelosok.

Sampai hari ini, kualitas pendidikan Indonesia masih jauh tertinggal dibandingkan Malaysia dan Singapura. Anak-anak SD di Malaysia dan Singapura sudah akrab dengan komputer sebagai sumber pembelajaran, sedangkan anak-anak Indonesia masih diselimuti was-was dan ketakutan

106 Agus M Irkham, “Tiga Kepusingan Perpustakaan Daerah”, *Kompas*, 14 Februari 2009.

107 *Kompas*, 28 Januari 2009.

108 Ceruk Ilmu merupakan salah satu Program Pendampingan Sekolah Makmal Pendidikan Dompot Dhuafa yang bertujuan siswa melakukan kegiatan membaca buku dan menuliskan apa yang dipahaminya dari bacaan serta memberikan pendapatnya tentang isi bacaan.



belajar di dalam ruang kelas akibat ruangan kelas rusak parah, seperti dialami siswa SDN Pesanggrahan 2, Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang (Banten). Sejak 14 Januari 2013, kegiatan belajar-mengajar di sekolah ini berlangsung dalam kondisi darurat setelah ambruknya dua ruang kelas. Sebanyak 600 siswa dibagi dalam 14 rombongan belajar dan melakukan proses pembelajaran secara bergantian pagi dan sore.¹⁰⁹ Dalam waktu yang berdekatan, SD Negeri Banar 01 Sukajaya, Bogor, juga bernasib serupa, kejadian ruang kelas ambruk yang mengakibatkan seorang guru cedera, dan 34 siswa luka-luka termasuk 6 siswa yang mengalami luka berat.

Bangunan rusak parah banyak dilaporkan terjadi di berbagai daerah. Kabupaten Subang (Jawa Barat), Purbalingga (Jawa Tengah), Malang (Jawa Timur), dan Kota Pekanbaru (Riau) misalnya. Kabupaten Subang memiliki 876 sekolah dasar (SD), 200 di antaranya dalam kondisi rusak. Namun, hingga kini dinas pendidikan setempat belum menentukan anggaran untuk perbaikan sejumlah sekolah rusak tersebut.¹¹⁰ Di Purbalingga, sarana fisik untuk jenjang SD terdiri rusak berat sebanyak 64 buah, rusak sedang buah, rusak ringan 132 buah, sedangkan jenjang SMP terdiri rusak berat 39 buah, rusak sedang 56 buah, dan rusak ringan 44, serta jenjang SLTA terdiri rusak berat 13 buah dan rusak ringan 16 buah.¹¹¹

Di Kabupaten Malang ada 2.129 ruang kelas sekolah yang rusak di 33 kecamatan. Sebanyak 1.453 kelas rusak sedang dan 676 kelas rusak berat.¹¹² Di Kota Pekanbaru, ada 600 ruang belajar yang berada dalam kondisi rusak berat, sedang, dan ringan mulai dari tingkat SD, SMP, dan SMA.¹¹³

Data-data di atas diambil sebelum semester pertama 2013 berakhir. Padahal, pemerintah menjanjikan perbaikan ruang kelas yang rusak akan

109 <http://www.tempo.co/read/news/2013/01/14/214454289/Sekolah-Ambruk-600-Murid-SD-Gantian-Belajar>.

110 <http://www.radar-karawang.com/2013/01/200-sd-di-subang-dalam-kondisi-rusak.html>
<http://www.radar-karawang.com/2013/01/200-sd-di-subang-dalam-kondisi-rusak.html>

111 <http://www.republika.co.id/berita/pendidikan/eduaction/13/02/05/mhqv15-1778-bangunan-sekolah-di-purbalingga-rusak>

112 <http://www.tempo.co/read/news/2013/02/13/058461024/Lebih-Dua-Ribu-Kelas-Sekolah-di-Malang-Rusak>

113 <http://www.pkupos.com/news/view/3305/page:8>



dirampungkan akhir 2012. Janji tinggal janji, sementara siswa dan guru tidak kunjung tenang berada di ruangan kelas. Pertanyaan bernada pesimis pun setengah hati untuk diajukan: kapan pemerintah akan menuntaskan perbaikan ruang kelas? Faktanya hingga pertengahan 2013 perbaikan fisik sekolah belum juga dapat terealisasi seratus persen.

Sebenarnya sejak 2005 pemerintah daerah maupun pusat telah melakukan upaya-upaya untuk menyelesaikan permasalahan ini. Pemerintah mengeluarkan sejumlah kebijakan di antaranya kebijakan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, program revitalisasi, program rehabilitasi, *regrouping*¹¹⁴, dan program bantuan melalui dana alokasi khusus (DAK). Tujuan diadakannya bantuan melalui DAK ini adalah untuk merangsang partisipasi masyarakat dan pemerintah daerah untuk mengelola sekolah karena Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di sebagian besar kabupaten/kota di Indonesia rata-rata baru mengalokasikan anggaran pendidikan di bawah 10 persen. Hal ini sudah tentu tidak sesuai dengan amanat UU Nomor 20 Tahun 2003 pasal 49 yang sudah sangat jelas menuliskan bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20 persen dari APBN dan 20 persen dari APBD.

Kebijakan yang lain adalah dana *block grant*. Dana ini bersifat stimulan sebagai perangsang agar masyarakat dapat turut serta terlibat dalam rehabilitasi gedung sekolah. Dana *block grant* ini dikirimkan langsung ke rekening sekolah.

Implementasi kebijakan-kebijakan di atas dilaksanakan oleh dinas pendidikan kota/kabupaten, sekolah, dan komite sekolah serta dunia usaha dan anggota masyarakat. Kebijakan ini bertujuan untuk mendukung program pemerintah dalam pembangunan pendidikan yang meliputi pemerataan pendidikan, peningkatan mutu, dan peningkatan manajemen pendidikan.

114 *Regrouping* atau penggabungan sekolah merupakan salah satu kebijakan yang diambil oleh pemerintah karena banyaknya gedung sekolah yang rusak sehingga proses belajar mengajar menjadi terganggu. Pemecahan masalah ini digunakan dalam keadaan darurat atau untuk sementara. Gedung-gedung sekolah yang rusak yang dipaksakan dipakai untuk kegiatan belajar-mengajar akan sangat membahayakan siswa, guru atau siapa pun yang menggunakan gedung tersebut (*Isu-isu Pendidikan*, No. 5, Tahun ke 2, Maret 2005, hlm. 125).



Penuntasan perbaikan ruang kelas yang rusak adalah tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sejak otonomi daerah diberlakukan pada 2000, perbaikan ruang kelas menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Pemerintah daerah diharapkan dapat berupaya mencari bantuan dana dengan bekerja sama bersama pihak eksternal, atau mengalokasikan 20 persen dari APBD untuk sektor pendidikan. Adapun dana bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat melalui Kemdikbud, sifatnya sebagai stimulan untuk mendorong partisipasi masyarakat dan pemerintah daerah untuk mengelola sekolah.

Sebagai respons atas masukan masyarakat soal rehabilitasi sekolah, pada 26 September 2011 Kemdikbud meluncurkan Program Gerakan Nasional Penuntasan Rehabilitasi Sekolah. Melalui gerakan nasional ini, pemerintah pusat mengajak masyarakat umum dan perusahaan untuk turut memberikan bantuan pada program rehabilitasi sekolah. Beberapa kebijakan yang diambil oleh Kemdikbud selaku panglima dalam menjalankan program ini di antaranya:

1. Tahun 2011, penyaluran dana alokasi khusus (DAK) bidang pendidikan awalnya melalui mekanisme tender. Guna percepatan perbaikan gedung sekolah, Mendikbud Mohammad Nuh mengubah mekanisme penyaluran pada 2012, yakni menggunakan mekanisme hibah langsung ke sekolah. Dana akan langsung disalurkan ke rekening sekolah dan pelaksanaan penggunaan dana bersifat swakelola. Swakelola artinya proses pembangunan/rehabilitasi ruang kelas diserahkan semuanya kepada sekolah. Tujuannya adalah mendorong sekolah untuk mengelola dan memberdayakan potensi yang ada di sekolah dengan sebaik-baiknya. Misalnya, dari segi perencanaan, pihak sekolah menyusun rencana rehabilitasi bersama-sama dengan komite sekolah. Guru dan orangtua duduk bersama memikirkan berbagai kebutuhan, dari bahan bangunan hingga tukang bangunan.

Kebijakan swakelola juga memberi ruang bagi pemberdayaan masyarakat sekitar dan membuka lapangan kerja baru. Warga yang menganggur dapat diserap sebagai tukang bangunan. Siswa atau mahasiswa jurusan Teknik Sipil/Bangunan dapat dilibatkan. Selain itu, roda ekonomi masyarakat juga bisa berputar. Bahan bangunan dibeli dari toko material yang berdiri di sekitar sekolah. Selain itu, kebijakan swakelola



akan mendorong optimalisasi pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)

2. Kemdikbud mengeluarkan kebijakan agar penetapan DAK 2011 adalah 60 persen untuk rehabilitasi sekolah dan 40 persen untuk peningkatan mutu, yakni pembelian perlengkapan laboratorium atau perpustakaan. Mendikbud menyebutkan, alokasi DAK bidang pendidikan tahun anggaran 2012 sebesar Rp 10,04 triliun, dengan perincian jenjang SD/SDLB Rp 8,033 triliun (80 persen) dan SMP Rp 2,008 triliun (20 persen). Setiap kabupaten/kota yang menerima DAK tersebut, wajib menyediakan dana pendamping dari APBD minimal 10 persen dari alokasi dana yang diterima.¹¹⁵

3. Beberapa instansi juga terlibat dalam pendampingan dan pengawasan proses rehabilitasi sekolah ini, di antaranya Badan Pengawas Keuangan Pembangunan (BPKP), TNI, dan perguruan tinggi. Pendampingan dari BPKP terkait dalam penggunaan anggaran. Untuk TNI, perannya adalah sebagai tenaga kerja dan pengawas, sedangkan pendampingan dari perguruan tinggi berupa pemberian desain bangunan, tenaga, dan cara penggunaan anggaran.¹¹⁶

Upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah di atas ternyata belum juga mampu menuntaskan perbaikan fisik bangunan sekolah yang sudah dimulai sejak 2004/2005. Tahun 2011 target realisasi rehabilitasi sebanyak 21.500 ruang kelas untuk 3.592 sekolah rusak dapat diselesaikan sesuai dengan rencana. Namun, 3.592 sekolah rusak yang mendapatkan bantuan, baru 7,4 persen yang rehabilitasinya selesai 75 persen sampai dengan 100 persen. Sebanyak 19,2 persen bahkan baru direhabilitasi 0 persen sampai 25 persen. Sisanya, 73,4 persen proses rehabilitasinya baru berlangsung 25 persen sampai 75 persen.¹¹⁷

Perbaikan ruang kelas yang tidak kunjung selesai menandakan perbaikan ini berjalan sangat lamban. Muncul kesan bahwa pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah tidak serius menyelesaikan pekerjaan

115 <http://www.jpnn.com/read/2011/12/18/111586/DAK-2012-Boleh-Dihabiskan-untuk-Rehab-Sekolah-#>

116 *Republika*, 9 November 2011.

117 <http://www.republika.co.id/berita/pendidikan/berita-pendidikan/12/01/02/lx5jo3-pr-pemerintah-di-2012-perbaiki-131-ribu-ruang-kelas>



yang sudah sejak 2004 santer diberitakan oleh banyak media bahwa sebagian besar sekolah negeri banyak mengalami kerusakan.

Pemerintah sendiri tidak menutup mata atas kenyataan yang terjadi bahwa proses rehabilitasi sekolah berjalan lamban. Lambannya proses rehabilitasi sekolah dikarenakan beberapa kendala berikut ini:

1. Faktor demografi dan geografi sekolah yang berada di daerah pelosok serta medan sulit dijangkau.
2. Beberapa sekolah belum melakukan nota kesepahaman (MoU) dengan Kemdikbud.
3. Anggaran rehabilitasi terlambat dikucurkan sehingga diperlukan perpanjangan waktu untuk menyelesaikan rehabilitasi sekolah.
4. Proses rehabilitasi sekolah di tingkat SD cenderung lebih lamban dibandingkan proses rehabilitasi di tingkat SMP. Proses penyaluran dana untuk rehabilitasi sekolah tingkat SMP mencapai 94 persen dari total dana Rp 128,97 miliar, dengan proses perbaikan fisik sudah mencapai 60 persen. Adapun penyaluran dana rehabilitasi tingkat SD mencapai 65 persen dari dana total Rp 617,845 miliar, sedangkan proses perbaikannya baru mencapai 20 persen.¹¹⁸
5. Adanya persoalan teknis penyaluran dana dari kas negara ke sekolah. Beberapa sekolah belum menerima dana rehabilitasi karena nomor rekening salah atau sudah nonaktif sehingga dananya dikembalikan ke kas negara. Andai pun dikirim kembali akan membutuhkan waktu.

Memperbaiki Total

Belum saja menyelesaikan target perbaikan gedung sekolah, totalitas pemerintah dalam proses perbaikan fisik sekolah pun dipertanyakan. Mengapa? Indonesia adalah salah satu negara kaya bencana alam. Seringnya gempa bumi disebabkan karena wilayah kepulauan Indonesia terletak pada zona batas dari empat lempeng besar, yaitu lempeng Eurasia, lempeng India dan Australia, dan lempeng Pasifik. Selain deformasi pada batas lempeng, pergerakan tektonik dari empat lempeng bumi ini menyebabkan pembentukan banyak patahan-patahan aktif baik

¹¹⁸ *Republika*, 9 November 2011.



di wilayah daratan maupun di dasar lautan. Batas lempeng dan patahan-patahan aktif ini menjadi sumber dari gempa-gempa tektonik yang dapat menimbulkan bencana bagi manusia.

Gempa bumi mempunyai potensi bencana dari deformasi tanah di sepanjang jalur patahannya dan efek guncangan yang menyebar ke wilayah di sekelilingnya sampai radius ratusan kilometer jauhnya tergantung dari besarnya kekuatan gempa. Selain itu, getaran gempa juga dapat memicu terjadinya bencana susulan berupa longsor dan tanah amblas. Apabila sumber gempa buminya di bawah laut, pergerakannya dapat menyebabkan gelombang tsunami.

Dengan karakteristik tersebut dapat dipastikan bahwa gempa bumi dapat menghancurkan bangunan termasuk sekolah. Sampai saat ini gempa bumi belum dapat diprediksi kapan terjadinya, tetapi lokasinya sudah dapat diketahui berdasarkan sejarah kejadiannya. Peristiwa terakhir gempa bumi di Padang (Sumatera Barat) telah banyak menghancurkan sekolah, dan banyak anak didik yang menjadi korban dalam bencana tersebut.¹¹⁹

Apakah perbaikan gedung yang dilakukan saat ini sudah memperhitungkan ancaman bencana? Menurut Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Sutopo Purwo Nugroho, 75 persen sekolah di Indonesia berada pada risiko sedang hingga tinggi dari bencana.¹²⁰ Sudah usia bangunan tua, diguncang atau ditiup sedikit oleh alam tak diragukan lagi sudah pasti ambruk.

Penuntasan rehabilitasi sekolah-sekolah rusak yang dicanangkan pemerintah harus diiringi komitmen untuk mewujudkan terciptanya sekolah aman di Indonesia. Banyak bangunan sekolah-sekolah di Indonesia yang belum memerhatikan aspek keselamatan dan keamanan sehingga mudah rusak, terutama saat bencana alam datang. Berdasarkan data dari BNPB, terdapat 741 kejadian bencana di Indonesia yang menyebabkan kerusakan pada fasilitas pendidikan yang ada di daerah yang terkena bencana. Ada sekitar 1.201 fasilitas pendidikan yang rusak,

119 Modul Ajar Pengintegrasian Pengurangan Risiko Gempa untuk SD. Modul bisa diunduh pada laman BNPB <http://www.bnpb.go.id/news/read/258/rss>

120 <http://nationalgeographic.co.id/berita/2012/05/wujudkan-sekolah-aman-bencana>



mulai dari rusak ringan, sedang, hingga berat, yang mengakibatkan anak-anak kehilangan waktu belajar.¹²¹

Dibutuhkan gedung sekolah yang mengikuti kaidah-kaidah bangunan yang kuat dan kokoh terhadap ancaman terutama ancaman bencana alam. Bangunan yang kokoh atau kuat bukanlah bangunan yang menggunakan bahan material semata dan menggunakan bahan-bahan dalam ukuran/volume besar. Bangunan yang kokoh adalah bangunan dengan menggunakan bahan material sewajarnya (efisien) tetapi diperlakukan dengan cara yang benar sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Bangunan yang baik adalah bangunan yang tidak gampang roboh saat terjadi bencana (lebih kurang 2-5 menit) sehingga para penghuni di dalamnya memiliki kesempatan untuk melarikan diri atau berlindung dari ancaman bahaya. Bangunan sekolah yang kokoh adalah bangunan yang struktur utama penyangga bangunan saling terhubung dengan kuat. Terutama pada bagian atap harus terbuat dari bahan yang kuat, ringan, dan terikat. Oleh karena itu, konsepsi sekolah aman semacam ini perlu menjadi perhatian pemerintah.

Totalitas Memperbaiki

Pembiayaan rehabilitasi sekolah sebesar Rp 120 juta, dengan asumsi satu ruang kelas berukuran 8 meter x 9 meter, sebenarnya tidaklah cukup. Berdasarkan pengalaman Makmal Pendidikan di sekolah-sekolah yang mendapatkan bantuan perbaikan, diperlukan dana paling sedikit Rp 150 juta. Bagaimana hasil rehabilitasi dengan jumlah biaya versi pemerintah? Salah satu televisi nasional memberitakan sebuah kejadian kerusakan sekolah rehab di Ibukota. Dua hari sebelum peresmian pascarehabilitasi, bagian atap sekolah sudah ambruk. Bahkan ada sekolah yang sedang melakukan proses rehab dengan bagian atap sudah dipasang rangka baja, tiba-tiba saja roboh dan melukai beberapa pekerja yang sedang bekerja di dalam kelas.

Melihat kejadian salah satu sekolah di Ibu Kota tersebut, kualitas bangunan layak menjadi pertanyaan, selain juga proses pengawasan dari kemungkinan praktik korupsi. Buku manual rehabilitasi gedung

121 <http://edukasi.kompas.com/read/2011/10/12/16560177/Komitmen.Bangun.Sekolah.Aman.Masih.Rendah>



sekolah yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah menuliskan program rehabilitasi yang dicanangkan pemerintah sekarang ini adalah program pembangunan yang bertumpu pada masyarakat yang berarti pembangunan dilakukan sepenuhnya oleh masyarakat, dari masyarakat, dan untuk masyarakat. Oleh karena itulah, komite sekolah dibentuk. Komite sekolah yang terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat, guru, dan orangtua siswa bersama-sama dengan masyarakat berperan aktif dalam program rehabilitasi sekolah dari tahap persiapan, pelaksanaan, pengawasan, penyelesaian, dan pemeliharaan. Artinya, masyarakat dapat berpartisipasi dalam program rehabilitasi dan turut serta mengawasi selama kegiatan ini berlangsung.

Selain itu, pengelolaan dana rehabilitasi dengan sistem swakelola perlu dievaluasi. Kejadian ambruknya atap dua ruangan di SDN 1 Bojongmengger, Kecamatan Cijeungjing, Kabupaten Ciamis (Jawa Barat) bisa pula dijadikan pelajaran. Bangunan yang baru diselesaikan setahun sebelum kejadian itu dibuat dengan konstruksi kerangka baja ringan. Usut punya usut, pemilihan kualitas bahan bangunan menjadi penyebabnya. Padahal, dengan sistem swakelola, sekolah berhak untuk memilih rekanan yang akan memperbaiki atau membangun sekolah. Sudah tepat langkah yang ditempuh instansi terkait melalui Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis seusai kejadian, yakni mengevaluasi sekolah yang pengerjaan bangunannya dilakukan oleh rekanan.¹²²

Menurut Darmaningtyas, penyebab rendahnya kualitas bangunan adalah adanya kecurangan kontraktor dalam pembangunan, dan penyunatan bantuan rehabilitasi sekolah yang rusak yang ditransfer langsung ke rekening sekolah. Khusus penyebab kedua, sudah bukan rahasia lagi adanya praktik menyunat dana bantuan dari pusat ke daerah. Tidak mengherankan apabila Mendikbud Mohammad Nuh pun mengingatkan melalui media agar pejabat di daerah tidak menyunat dana bantuan rehabilitasi sekolah.

Musibah demi musibah yang menimpa sekolah seharusnya menjadi peringatan bagi kita semua bahwa kecurangan dalam pelaksanaan pembangunan ataupun rehabilitasi gedung akan mengancam keselamatan jiwa para siswa dan tenaga pendidik. Kalaupun tidak ada jatuh korban,

122 <http://www.pikiran-rakyat.com/node/225650>



tetap saja pelaksanaan belajar-mengajar terganggu akibat keterbatasan ruang kelas yang ada. Dalam hal ini lagi-lagi siswalah yang selalu menjadi korban.

Sekolah Baru Harapan Baru

Masalah pendidikan nasional sering kali berkuat seputar peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan. Melalui program rehabilitasi sekolah¹²³ yang telah diupayakan pemerintah sejak 2004 diharapkan mampu meningkatkan kualitas pendidikan dan target wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun dapat terlaksana dengan baik.

Sayangnya, upaya pemerintah belum membuahkan hasil optimal karena program rehabilitasi berjalan lamban. Target rehabilitasi sekolah seharusnya selesai pada 2012 namun hingga pertengahan 2013 masih banyak sekolah yang belum mendapatkan bantuan rehabilitasi. Hal ini pun dikuatkan oleh Mendikbud pada acara jumpa pers akhir tahun 2012, di Jakarta. Mendikbud menjelaskan bahwa pada 2013 tetap akan melanjutkan program rehabilitasi sekolah, dengan total dana yang dianggarkan mencapai Rp 1,17 triliun atau 1,6 persen dari total anggaran Kementerian sebesar Rp 73,09 triliun.¹²⁴

Sehubungan program rehabilitasi dilanjutkan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah dalam proses pelaksanaannya.

Pertama, pola pembiayaan swakelola yang masih digunakan memerlukan pengawasan dan pemantauan yang ketat oleh pemerintah pusat agar proses perbaikan ruang kelas sesuai dengan standar yang ditentukan, dan demi menghindari terjadinya praktik-praktik korupsi. Untuk keperluan ini, pemerintah perlu memperkuat kerja sama dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan atau sosial yang berada di daerah setempat untuk proses pendampingan dan pengawasan.

Kedua, pemerintah pusat bersama pemerintah daerah perlu melakukan pemetaan sekolah berdasarkan kondisi fisik bangunan dan kewilayahan. Jangan sampai perbaikan gedung yang dilakukan hari ini akan mengalami kerusakan pada tahun yang sama, terutama sekolah-sekolah

123 Bangunan yang secara fungsional masih dapat digunakan namun mengalami kerusakan.

124 <http://www.kemdiknas.go.id/kemdikbud/berita/961>



yang berada di daerah rawan bencana. Dengan adanya pemetaan sekolah berdasarkan fisik dan kewilayahan, pemerintah memiliki informasi terkait usia bangunan, waktu perbaikan, dan kondisi wilayah tersebut. Selain itu, pemetaan sekolah dilakukan guna menghindari pemberian bantuan dua kali rehabilitasi untuk sekolah yang sama.

Ketiga, mengoptimalkan partisipasi masyarakat baik perseorangan, kelompok, atau perusahaan untuk turut serta memberikan sumbangsih perbaikan pendidikan. Berdasarkan UU Nomor 20 tahun 2003, pasal 46 menyebutkan bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Artinya, masyarakat dapat berpartisipasi dalam program pendidikan. Bentuk partisipasi masyarakat berupa pengadaan dana, dan pemberian bantuan selain dana seperti hibah atau wakaf.

Keempat, diperlukan cara pemeliharaan gedung yang tepat, dan mulai mengalokasikan anggaran pendidikan untuk kebutuhan pemeliharaan ini. Pembangunan tanpa pemeliharaan berarti menyia-nyaiakan proses perbaikan dan ujung-ujungnya adalah pemborosan uang. Dalam proses pemeliharaan sebaiknya diiringi dengan upaya menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk memiliki sekolah. Makmal Pendidikan melalui program Sekolah Ramah Hijau merupakan bentuk praktik melibatkan masyarakat dan warga sekolah dalam memelihara lingkungan sekolah.¹²⁵

Dengan memerhatikan dan menjalankan empat hal di atas, semoga program rehabilitasi sekolah segera tuntas sepenuhnya pada 2013 sehingga anak-anak Indonesia dapat belajar dengan nyaman dan tenang serta mampu berkompetisi dengan anak-anak dari negara lain. Sebuah penelitian menyebutkan bahwa lingkungan belajar yang nyaman menyukseskan 25 persen keberhasilan belajar anak. Oleh karena itu, lingkungan yang nyaman perlu diciptakan, perlu direncanakan.

Saat yang sama, pemerintah pun harus mulai melengkapi sarana vital lainnya, yakni perpustakaan. Perpustakaan merupakan sarana penting bagi pembangunan literasi anak menuju bangsa beradab. Untuk

125 Lihat, Zayd Sayfullah, dkk, *Sekolah Ramah Hijau: Cara Kreatif dan Murah Merawat Bumi di Sekolah*, Bogor: Makmal Pendidikan Dompot Dhuafa, 2013.



itulah, perpustakaan yang rusak mulai harus segera diperbaiki, sementara sekolah yang belum memiliki perpustakaan harus pula segera dibantu pendiriannya. []



Bagian Kedua
**Merevitalisasi
Fondasi Pendidikan**



Bab 5

Reformasi Sekolah Dasar



Sumber: Dokumen Makmal Pendidikan

Kualitas pendidikan adalah prasyarat mutlak untuk membentuk kesatuan bangsa yang maju dan beradab. Hampir tujuh dekade negara ini merdeka, namun kualitas pendidikan kita masih setia dalam menempati kelompok urutan terbawah. Jangankan untuk memperbaiki kualitas, meningkatkan akses masyarakat ke jenjang pendidikan menengah dan tinggi hingga hari ini saja masih menjadi masalah. Tantangan geografis disertai dengan sebaran ratusan juta penduduk terus-terusan dijadikan sebagai alasan.

Sebaiknya kita mesti banyak belajar dari China. Dengan statistik penduduk yang besar, justru mereka mampu memainkan pengaruh strategis di pentas global. Bila pada dekade terdahulu China sering disebut-



sebut sebagai raksasa besar yang masih tertidur, kini mereka menggeliat-geliat untuk bersiap bangun. Namun sebaliknya, Indonesia lebih tepat disebut sebagai raksasa besar yang kini sedang lumpuh. Miris.

Nasib bangsa ini salah satunya bisa diubah melalui perbaikan kualitas pendidikan. Ini butuh keseriusan serta ketepatan dalam strategi perencanaan. Untuk memulai pekerjaan ini, tahapan pertamanya adalah membenahi sekolah dasar. Akses masyarakat terhadap sekolah dasar sudah hampir mencapai angka partisipasi yang sempurna.¹²⁶ Namun tragis, di jenjang ini tingkat kompetensi gurunya justru yang paling memprihatinkan.

Senang atau tidak, pendidikan merupakan bagian dari keputusan politik. Begitulah memang realitasnya. Pemerintah sebagai pengelola negara adalah struktur yang paling menentukan dalam membuat arah, filosofi, dan sistem pendidikan nasional. Sulit dihindari bahwa visi kepemimpinan nasional akan sangat berpengaruh terhadap setiap arah kebijakan pendidikan sehingga tidaklah mungkin masyarakat bisa meminggirkan begitu saja peran serta negara dalam urusan pendidikan. Di tangan negaralah, anggaran, birokrasi, kurikulum, serta standar pendidikan itu dikelola. Ini bukan saja karena pendidikan itu menyangkut hajat hidup orang banyak, tapi jauh lebih luas dari itu pendidikan termasuk alat strategis dalam menjamin eksistensi dan kedaulatan sebuah negara. Bila ingin negara kuat, pendidikan serta sektor-sektor pembangunan lain yang bersifat jangka panjang harus menjadi prioritas.

Ungkapan “mencerdaskan kehidupan bangsa” yang termaktub dalam pembukaan konstitusi kita bukan sekadar cita-cita kemerdekaan, tapi juga janji negara terhadap semua rakyat Indonesia. Kalimat ini merupakan bentuk kesadaran abadi akan pentingnya peran negara dalam membangun jiwa dan raga segenap generasi bangsa. Pendiri bangsa kita tentu sangat memahami bahwa pendidikan adalah bagian yang tidak mungkin terpisahkan dari proses pembangunan sebuah bangsa dan republik. Bagaimanapun juga mereka sendiri merupakan hasil bentukan dari sekolah-sekolah di zamannya, pada era kolonial Belanda. Pendidikanlah yang membuat hati dan akal mereka terbuka tentang konsep Indonesia merdeka.

¹²⁶ Lihat pembahasan pada Bab 3.



Proyek pembentukan sekolah tidak dimulai sejak Indonesia merdeka. Jika kita menengok lembaran sejarah, pemerintah kolonial Belanda sejak pertengahan abad ke-19 telah memulai membangun sekolah-sekolah formal di beberapa kota di Indonesia. Dengan membangun basis-basis infrastruktur pendidikan bagi rakyat jajahan, justru Belanda berkeyakinan akan semakin bisa menguatkan investasi dan eksistensi sistem kolonialismenya. Ini membuktikan bahwa pendidikan bagaimanapun juga selalu menjadi kebutuhan. Melalui sekolah, kebutuhan akan tenaga terdidik dan terampil bisa terpenuhi. Pada zaman awal kemerdekaan, dibentuklah Panitia Penyelidik Pengajaran untuk mengubah sistem pendidikan kolonial ke dalam sistem pendidikan nasional.¹²⁷

Jika pendidikan saja telah menjadi sebuah kebutuhan pada zaman penjajahan, pada era kemerdekaan dan saat pembangunan sekarang ini pendidikan tentu semakin dibutuhkan. Pendidikan adalah kebutuhan setiap masa, dan kerja untuk pendidikan adalah kerja sepanjang zaman. Kerja ini tidak mungkin bisa berhenti pada suatu titik yang ajek. Setiap pergantian waktu memiliki tantangan, kebutuhan, serta jiwa zaman yang selalu berubah-ubah. Oleh karena itu, kerja pendidikan, dalam tiap-tiap alur dan lajunya, akan selalu bertemu dengan serangkaian permasalahan dan kesenjangan. Satu masalah terurai, masalah-masalah baru lalu datang menyusut.

Begitu pula dengan nasib pendidikan bangsa ini. Akumulasi masalah telah kadung menjadi perbukitan yang menghadang laju gerak kemajuan kerja pendidikan. Belum lagi masalah akses berkeadilan bisa dituntaskan, tuntutan perbaikan kualitas telah lama menunggu untuk minta segera dicarikan solusi.

Masalah kualitas pendidikan selalu menjadi pekerjaan rumah yang belum pernah bisa diselesaikan hingga hari ini. Pergantian kurikulum yang berulang kali terjadi sering menjadi ajang perdebatan yang tidak produktif. Akibatnya, pergantian kurikulum sukar untuk mendorong munculnya perbaikan kualitas pendidikan. Kecenderungan yang berlangsung di Indonesia pasca-gerakan Reformasi 1998 adalah mencoba menggalakkan model desentralisasi pendidikan. Agustiar Syah Nur (2001),

127 Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan kebudayaan. 1979. *Pendidikan di Indonesia dari Jaman ke Jaman*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.



memaparkan bahwa di tengah masa transisi demokrasi, gerakan otonomi pendidikan terus menguat, walaupun sayangnya belum ada keyakinan bahwa kebijakan ini akan dapat memberi dampak yang lebih signifikan terhadap perbaikan kualitas pendidikan.¹²⁸

Pemerintah bukan berarti tidak becus bekerja. Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS), bantuan siswa dan mahasiswa miskin, pengiriman ribuan guru di daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal), rehabilitasi ruang kelas SD-SMP, hingga sertifikasi guru, semua program ini merupakan contoh solusi yang telah dibuat oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) untuk mengurangi kesenjangan serta memperbaiki mutu pendidikan di negeri ini. Namun, yang perlu menjadi catatan adalah beragam solusi strategis yang telah pemerintah buat selama ini sering kali malah berbalik menjadi masalah baru di kemudian hari. Dengan kata lain, tumpukan masalah yang dihadapi hari ini sebagian besarnya masih merupakan masalah yang sama pada dekade yang lalu. Dengan demikian, kerja pendidikan kita hanya berkutat dan berputar pada masalah-masalah yang serupa, namun tawaran solusinyalah yang berbeda. Ganti menteri, ganti kebijakan, tapi masalah-masalahnya tidak pernah ganti-ganti.

Reformasi Sekolah Dasar

Agar pendidikan Indonesia bernasib lebih baik, dibutuhkan rencana strategis yang dikonsep secara sempurna. Konsep pendidikan ini adalah wajah negara dalam konteks dimensi masa depan. Bagaimanapun juga pendidikan merupakan fase bercocok tanam yang masa panennya masih perlu ditunggu hingga beberapa dekade mendatang. Jadi, mengelola pendidikan adalah sebuah kerja berbasis visi dan komitmen yang berkelanjutan.

Di jajaran negara-negara modern baru, sebut saja Finlandia, Singapura, dan Korea Selatan, mereka telah lama menempatkan sekolah dasar sebagai jenjang pendidikan paling strategis yang selalu mendapatkan perhatian utama dari pemerintah-pemerintahnya. Dalam pandangan mereka, sekolah dasar merupakan investasi masa depan negara. Prestasi tingkat internasional yang telah negara-negara tersebut

128 *Perbandingan Sistem Pendidikan 15 Negara*. Bandung: Penerbit Lubuk Agung



raih saat ini adalah hasil kerja keras sejak lebih dari dua puluh tahun yang lalu. Bukan dengan cara tiba-tiba atau instan mereka mampu menggeser dominasi negara-negara industri maju. Butuh perencanaan yang tepat, proses yang panjang dan konsistensi kebijakan untuk dapat mewujudkannya.

Keseriusan dalam mengelola sekolah dasar dengan sendirinya akan menjadi penguat keberhasilan pendidikan di jenjang berikutnya. Namun, kenyataan berbeda masih harus dirasakan oleh bangsa Indonesia hingga saat ini. Alih-alih menyatakan berhasil meningkatkan akseptabilitas pendidikan dasar melalui target Angka Partisipasi Sekolah (APS) di tingkat sekolah dasar hingga hampir 100 persen (nyaris sempurna), relevansi dan kualitas sekolahnya sendiri justru belum selesai diperbaiki.

Oleh karena itu, kita semestinya sabar untuk bisa berbangga diri. Klaim keberhasilan pada sektor pendidikan dasar barulah pada angka statistik, dan sama sekali belum pada kualitas. Marilah kita toleh kembali hasil survei internasional terdekat seperti PISA 2009, PIRLS 2011, dan TIMSS 2011.¹²⁹ Hasilnya, nyata-nyata bahwa sekolah dasar kita bukan saja berada pada ranking terendah dunia, namun juga memang masih jauh dari angka kualifikasi minimal yang telah diakui secara internasional.

Kondisi tersebut tentu akan berpengaruh negatif kepada mutu lulusan sekolah dasar. Sekolah menengah otomatis akan menerima konsekuensi akibat banyak mendapatkan masukan (*input*) siswa yang belum memenuhi standar kualitas lulusan SD. Bisa dibayangkan jika dari SD sebagai fondasi pendidikan saja sudah lemah, seterusnya tentu akan semakin sulit untuk dikembangkan kualitasnya. Padahal, sejak awal sistem pendidikan nasional ini dirancang, kurikulum pendidikan dasar mesti ditujukan untuk menyiapkan anak memiliki dasar-dasar pengetahuan, kecakapan, dan ketangkasan baik lahir batin, serta mengembangkan bakat dan kesukaannya.¹³⁰

129 Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS), Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS), serta Programme for International Student Assessment (PISA) ketiganya merupakan studi terpisah dengan metodologi yang berbeda atas sampel yang berbeda terhadap pelajar di berbagai negara termasuk Indonesia. Tujuannya untuk perbandingan (*benchmarking*) literasi (kemampuan bahasa), matematika, dan sains antarberbagai negara di dunia.

130 Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan kebudayaan. 1979. Pendidikan di Indonesia dari Jaman ke Jaman. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.



Lihatlah saja misalnya bagaimana Kurikulum 2013 yang mesti dipaksa-paksa muncul. Secara resmi Kemdikbud menyatakan bahwa Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006 telah gagal. Belum genap tujuh tahun digunakan, muatan kompetensi dalam KTSP disinyalir sulit untuk dicerna oleh peserta didik. Ditambah lagi adanya laporan banyak sekolah yang tidak sanggup untuk membuat sendiri KTSP. Konsekuensi yang kemudian dipilih adalah mengubah kembali kurikulum. Ini membuktikan bahwa solusi yang ditawarkan masih terlalu mentah. Akhirnya timbul kesan bahwa kurikulum kita seperti produk *trial and error*. Jangan-jangan ketika berganti penguasa Republik ini pada 2014 mendatang, Kurikulum 2013 akan dimentahkan lagi.

Untuk peningkatan kualitas pendidikan di jenjang sekolah dasar, selama dua periode kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, terhitung sudah beberapa kali pemerintah melaksanakan proyek besar yang bekerja sama dengan donor asing atau internasional. Setidaknya telah ada dua program yang terlaksana untuk peningkatan kualitas pendidikan dasar, yakni DBE dan MGP-BE.

DBE (Decentralized Basic Education)¹³¹ yang dimulai pada 2005, awalnya bermitra dengan lebih dari 1.000 SD/MI dan 196 SMP/MTs di 50 kabupaten/kota yang berada di tujuh provinsi, yakni Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Timur Jawa, dan Sulawesi Selatan. DBE bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan dasar di Indonesia melalui desentralisasi manajemen dan tata layanan pendidikan dasar yang lebih efektif, peningkatan kualitas pembelajaran, dan peningkatan relevansi pendidikan untuk anak-anak dan remaja.

MGP-BE (Mainstreaming Good Practices in Basic Education)¹³² bertujuan untuk membantu mempercepat pencapaian tujuan Pendidik-

131 Program Decentralized Basic Education (DBE) adalah kerja sama antara pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah Amerika Serikat (melalui USAID). Di bawah Strategic Objective Agreement (SOAG,) kerja sama ini ditandatangani oleh Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Kemendiknas) dan USAID.

132 Uni Eropa memberikan bantuan dana hibah untuk pengembangan kapasitas pendidikan dasar di Indonesia melalui Program Bantuan Kapasitas Sektor Pendidikan Dasar (Basic Education Sector Capacity Support Program in Indonesia, atau disingkat BE-SCSP). Bantuan ini dituangkan dalam Perjanjian Pembiayaan (*Financing Agreement*) antara Masyarakat Eropa dan pemerintah RI yang



an untuk Semua dan Pembangunan Milenium (MDGs) bidang pendidikan, melalui pengembangan kapasitas sub-sektor pendidikan dasar agar mampu memberikan pelayanan pendidikan dasar. MGP-BE melakukan pengembangan *good practices* pada tingkat sekolah meliputi manajemen berbasis sekolah (MBS), Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan (PAKEM), dan peran serta masyarakat (PSM). Sedangkan pada tingkat institusi kabupaten berupa praktik yang baik meliputi sistem pendataan dan perencanaan pendidikan pembiayaan pendidikan di kabupaten dan tata kelola yang baik.

Tidak bisa dimungkiri bahwa semua program tersebut, dengan biaya yang amat besar tentunya, telah memberi dampak terhadap peningkatan pemahaman tentang pengembangan sekolah dasar yang berkualitas, baik dari sisi pembelajaran, manajemen sekolah, anggaran pendidikan, serta kebijakan pemerintah daerah di bidang pendidikan. Namun jika melihat area programnya, secara kuantitatif ini belum bisa menjawab tantangan pendidikan dasar bagi semua wilayah Republik Indonesia. Hingga kini pun tingkat kompetensi guru jenjang SD masih yang terendah, dan jauh dari harapan. Selain itu, masalah terbesar yang dihadapi dalam program-program ini adalah kemampuan pemerintah daerah dalam meneruskan kesinambungan program setelah kontrak berakhir (pada 2010). Hampir semua daerah mengalami kesulitan untuk mengembangkan program ini karena terbentur oleh masalah birokrasi pendidikan yang belum visioner, serta ketersediaan dana yang minim.

Tercapainya angka 20 persen anggaran untuk bidang pendidikan pada masa pemerintahan SBY sebagai sebuah amanah konstitusional tidak serta-merta bisa menuntaskan segala permasalahan pendidikan di negeri ini. Kebijakan anggaran tadi baru sampai pada taraf meningkatkan kesempatan warga negara untuk mendapatkan akses bagi pendidikan secara luas. Padahal, sebelum disahkan, kita dulu terlalu mudah menyimpulkan bahwa indikator keberhasilan pendidikan di Indonesia terletak pada keseriusan pemerintah untuk mengalokasikan 20 persen APBN untuk anggaran pendidikan. Sesungguhnya masih banyak variabel

ditandatangani pada 3 Juni 2005 (No. Proyek: ASIE/2004/006-064), oleh Direktur Direktorat Asia Kantor Kerjasama Bantuan Eropa mewakili Komisi Masyarakat Eropa dan Direktur Jenderal Kerjasama Amerika dan Eropa, Departemen Luar Negeri mewakili pemerintah RI.



lain yang jauh lebih kompleks, namun tidak akan pernah selesai apabila penyelesaiannya hanya melalui pendekatan anggaran. Sering kali sebagian kita mudah terjebak dalam pemikiran yang keliru dalam mencari penyelesaian beberapa masalah yang menghambat peningkatan kualitas pendidikan di bangsa ini. Jangan sampai solusi yang kita buat pada hari menjadi masalah di masa depan.

Sebuah perubahan harus mulai dikerjakan sejak saat ini. Perlu ada kesadaran kolektif untuk menjadikan pendidikan sebagai prioritas strategis dalam pembangunan jangka menengah dan panjang. Salah satu gagasan besar yang ditawarkan dalam akhir dari bab ini adalah tentang bagaimana menguji keberanian kita untuk menciptakan alternatif-alternatif perubahan, di antaranya melalui perspektif mikro, yakni perubahan dari tingkat sekolah. Agar lebih mudah dipahami, sekumpulan aksi dan program ini dikumpulkan dalam sebuah ide yang disebut “Reformasi Sekolah (*School Reform*).”

Reformasi Sekolah adalah sebuah gagasan tentang pembentukan sekolah-sekolah model alternatif yang berkonsentrasi pada perubahan agar selanjutnya memiliki daya pengaruh ke sekolah-sekolah lain. Gagasan tentang Reformasi Sekolah ini didasari pada realitas bahwa pemerintah sebagai penanggung jawab utama dalam penyelenggaraan pendidikan tidak bisa bekerja sendirian. Padahal, dari lingkaran luar pemerintahan sebenarnya banyak sekali kelompok-kelompok peduli pendidikan yang memiliki kiprah dalam membuka akses bagi hadirnya pendidikan alternatif terbaik bagi masyarakat. Hanya sayangnya, kelompok-kelompok yang beragam jenisnya ini masih bergerak sendiri-sendiri tanpa adanya jaringan kerja yang mengikat. Andaikan kekuatan-kekuatan ini disatukan maka akan memunculkan sebuah gerakan bersama yang bila disinergiskan dengan kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah akan mampu menghadirkan perbaikan dalam kualitas pendidikan.

Banyak orang bekerja di sektor pendidikan, tapi tidak banyak yang bekerja untuk perbaikan pendidikan. Untuk itu, mulailah kita bekerja pula untuk perbaikan pendidikan Indonesia. Kerja untuk pendidikan, tidaklah sama dengan kerja untuk perbaikan pendidikan. Perbaikan pendidikan tidak bisa dikerjakan sendiri-sendiri. Oleh karena itu, kita semua butuh bersinergi.



Konsep Sekolah Dasar Masa Depan

Sekolah merupakan entitas pendidikan yang terbentuk atas suatu konsep. Sesederhana apa pun sekolah yang dikelola, pastilah memiliki konsep. Baik atau buruknya kualitas sebuah sekolah tentu dipengaruhi oleh konsep yang dipilih. Sekolah terbaik lahir tentu karena pilihan konsepnya juga terbaik, bukan karena faktor kebetulan ataupun faktor keberuntungan. Konsep sekolah ini berisi tentang cita-cita, tujuan, serta metodologi pengelolaan sekolah. Dari titik inilah, konsep lalu diubah menjadi sistem manajemen sekolah. Semakin manajemen sekolah ini dikelola efektif, konsep yang digagas akan semakin terlihat pula keberhasilannya.

Berdasarkan konsepnya, sekolah dasar setidaknya bisa dibagi menjadi dua kategori, yakni sekolah modern dan sekolah tradisional. Beda sekolah modern dengan sekolah tradisional salah satunya dapat tercermin dari model perencanaannya. Setiap sekolah modern membutuhkan perencanaan yang lebih strategis. Hal ini tidak bisa ditawar-tawar lagi oleh sekolah yang ingin sistemnya maju.

Pada sekolah tradisional lazimnya hanya membutuhkan perencanaan yang sederhana saja sebab model pendidikan yang diterapkan nyaris tidak terlalu membutuhkan pengembangan atau inovasi macam-macam. Semua berjalan linier, rutin, seperti sebuah siklus yang berputar tetap. Faktor yang terpenting pada sistem tradisional ini adalah ketika peserta didik masih bisa melakukan aktivitas belajar dengan baik. Fungsi kelas pada sekolah tradisional cukup sebagai sarana untuk transfer pengetahuan, yang selanjutnya diakhiri dengan pembuktian hasil belajar melalui sejumlah tes tertentu. Perencanaan tak ubahnya seperti jadwal perjalanan kereta api, biasanya kita menyebutnya dengan istilah 'program kerja tahunan'. Inilah konsep perencanaan yang diterapkan pada sekolah-sekolah tradisional.

Perencanaan yang strategis tentu penyusunannya jauh lebih kompleks. Untuk itu, sekolah-sekolah modern harus mengembangkannya dengan langkah-langkah yang sistematis, terukur, dan orientasi kerjanya bersifat jangka panjang. Di awal sekali, sebelum perencanaan tersusun, biasanya ada analisis mendalam terhadap realitas yang terjadi di internal



sekolah maupun di lingkup eksternal yang lebih luas. Setiap proses yang diselenggarakan oleh sekolah merupakan bagian dari proses yang telah direncanakan secara matang, termasuk pula aktivitas-aktivitas rutin. Semua elemen sekolah akan selalu digerakkan menuju titik-titik target yang dianggap strategis. Inilah dasar dari konsep perencanaan strategis.

Perencanaan strategis tersebut yang akan menjadi cerminan pertama bahwa sekolah memiliki keseriusan dalam mengakselerasi peningkatan kualitas layanan pendidikan berbasis sistem manajemen. Sekolah masa depan adalah sekolah yang berbasis pada pengembangan sistem manajemen mutu. Dryden dan Vos (2000) menjelaskan bahwa merancang sekolah masa depan perlu dilakukan dengan cara mengubah sistem pendidikan nasional melalui 12 langkah strategis.¹³³

Tanpa adanya perencanaan strategis, sekolah dikhawatirkan akan mengalami hambatan besar dalam melakukan beberapa pengembangan institusionalnya. Bila hal ini terjadi, dapat dibayangkan bahwa sekolah akan terus-menerus mengalami kesulitan dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikannya berdasarkan standar-standar nasional. Setiap kebijakan pengembangan baru yang diputuskan dari pemerintah senantiasa dianggap hanya merupakan beban, bukan sebagai langkah perbaikan.

Dampak terparahnya adalah sekolah akan semakin tertutup dengan setiap perubahan. Sumber daya pendidik yang ada di sekolah jadi terbiasa senang dengan zona nyaman, dengan aktivitas keseharian sekadar untuk mengajar. Tidak ada aktivitas yang dianggap menantang, segenap perubahan hanyalah rangkaian kerja yang menyusahkan. Jika dampak dan konsekuensi ini tidak segera diatasi, semakin sulit kualitas layanan pendidikan untuk ditingkatkan. Internal sekolah akan terus sulit jika diberi intervensi. Perencanaan strategis bagi banyak sekolah dasar mungkin tampak terlihat sepele, tapi sesungguhnya ia berperan penting

133 Dalam bukunya yang berjudul *The Learning Revolution*, Gordon Dryden dan Jeannette Vos (2000), menyatakan bahwa terdapat 12 langkah untuk mengubah sistem pendidikan nasional, yakni: sekolah menjadi pusat sumber daya masyarakat sepanjang hayat, tanyakan dulu pelanggan, jaminlah kepuasan pelanggan, layani semua ragam kecerdasan dan gaya belajar, gunakan teknik pengajaran terbaik di dunia, latihlah guru, jadikan setiap orang guru dan sekaligus murid, rencanakan kurikulum 4 bagian, ubah sistem penilaian, gunakan teknologi, masyarakat sebagai sumber daya, dan hak memilih untuk semua orang.



dalam mendorong kemajuan sekolah. Memang bertahap prosesnya, tapi pasti hasilnya.

Pada sebuah sekolah tradisional, perencanaan sekadar disusun berdasarkan program untuk mencapai suatu nilai akreditasi. Akreditasi sering dimitoskan sebagai cermin kemajuan sekolah. Idealnya sekolah yang terakreditasi baik maka akan baik pula kualitasnya. Namun, hal seperti inilah yang kadang membingungkan hasilnya. Akreditasi dalam beberapa kasus ternyata tidak bisa menjamin pencapaian kualitas sebuah sekolah dasar. Padahal, akreditasi sebagai alat ukur dalam terlaksananya delapan Standar Nasional Pendidikan sesungguhnya bisa menjadi parameter resmi untuk tingkat kualitas sekolah di Indonesia. Terdapat setidaknya dua kemungkinan yang menjadi penyebabnya, yakni alat ukur atau instrumen penilaian akreditasi yang belum valid, atau terjadi kesalahan dalam proses penilaian baik disengaja maupun tidak disengaja. Dalam prosesnya, peluang terjadinya kecurangan dalam penilaian akreditasi masih sangat tinggi.

Berdasarkan data yang disajikan oleh Badan Akreditasi Nasional (BAN), sekolah-sekolah dasar Indonesia sebagian besarnya telah terakreditasi “B”, atau sudah dalam kategori baik. Namun, hingga hari ini, mutu pendidikan di jenjang sekolah dasar kita masih jauh di bawah harapan. Ini bisa diartikan bahwa delapan Standar Nasional Pendidikan, yang dipandang telah komprehensif dalam memberikan gambaran wajah sebuah sekolah, belum bisa mendongkrak kualitas pendidikan kita.

Sekolah masa depan itu sendiri adalah sekolah yang dibesarkan oleh sebuah visi. Visi inilah yang dijadikan sebagai titik pertemuan semua gerak kemajuan sekolah. Tidak ada satu pun aktivitas sekolah yang tidak bertujuan untuk mencapai visi tersebut. Visi sebuah sekolah akan lebih efektif jika diberikan batasan akhir waktu pencapaian. Umumnya visi dirancang untuk 5, 10, atau 20 tahun ke depan. Bagi organisasi semacam sekolah, visi lebih baik ditetapkan untuk pencapaian 4-5 tahun ke depan.

Pembuatan visi sekolah tetap harus disesuaikan dengan kondisi sekolah, harapan masyarakat dan kebutuhan peserta didik sepanjang visi tersebut tidak bertentangan dengan kebijakan pendidikan nasional. Masing-masing sekolah memiliki keunikan yang berbeda-beda sehingga

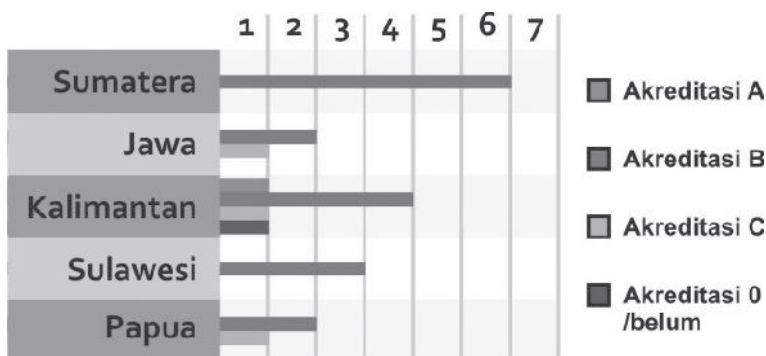
visi suatu sekolah tidak bisa disamakan dengan sekolah lain. Supaya tidak menimbulkan pembiasan makna, sebaiknya visi tersebut diberi pelengkap berupa indikator. Indikator inilah yang memberi penguatan kepada visi agar menjadi lebih hidup, lebih bekerja (*workable*), dan mampu menunjukkan arah bagi titik fokus pengembangan program sekolah. Masa depan sekolah harus direncanakan, itulah konsep dasar dari sekolah masa depan.

Pemetaan Sekolah Dasar

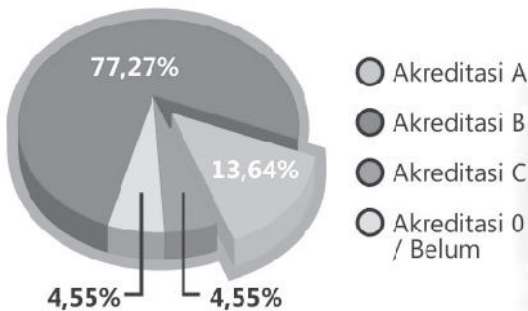
Untuk menemukan fakta-fakta empiris di seputar sekolah dasar, Makmal Pendidikan Dompot Dhuafa mengadakan survei di 21 Kota/Kabupaten di 14 provinsi. Sampel yang digunakan sebanyak 22 sekolah dasar negeri. Sebagian besar atau sekitar 77 persen dari sekolah dasar tersebut telah terakreditasi “B”, yang artinya sebagian besar telah berstatus sebagai sekolah dengan kategori baik. Survei ini berlangsung selama hampir 3 tahun, terhitung mulai dari 2010 hingga permulaan awal 2013.

Pengambilan data dilakukan dengan mengirimkan satu hingga tiga orang penyurvei (*surveyor*) yang bertugas untuk melakukan observasi dan monitoring secara intensif terhadap setiap satu sekolah dasar sampel. Sasaran observasi difokuskan kepada kelengkapan dokumen sekolah, etos kerja dan pengembangan personal (SDM), sistem dan proses pembelajaran di kelas, pengelolaan fasilitas (sarana dan prasarana), serta budaya organisasi sekolah.

Bila diklasifikasi berdasarkan pulau dan akreditasi sekolah, sebarannya bisa dilihat berdasarkan tabel di bawah ini.



Sebaran Sekolah Berdasarkan Akreditasi



Survei ini bertujuan untuk bisa mengukur tingkat performa sekolah dasar secara utuh dengan menggunakan dua perspektif, yaitu efektivitas manajemen dan kualitas pembelajaran. Tingkat performa inilah yang diharapkan dapat menunjukkan kapasitas otentik sebuah sekolah dasar. Dua perspektif ini kemudian dikembangkan menjadi enam kriteria penilaian, yaitu perencanaan strategis, kepemimpinan sekolah, budaya sekolah, pengembangan kurikulum, strategi pembelajaran, dan budaya literasi. Dalam bab ini, terlebih dahulu akan dikupas tentang efektivitas manajemen sekolah dasar dengan menggunakan tiga kriteria pertama, yakni perencanaan strategis, kepemimpinan sekolah, dan budaya sekolah.

Sengaja dalam penulisan di buku ini tidak disebutkan nama sekolah dan asal daerah dengan harapan agar khalayak pembaca tidak memiliki persepsi yang salah tentang wilayah tersebut. Sampel sekolah dasar yang diambil tidak serta-merta bisa mencerminkan kondisi pendidikan pada daerah yang dimaksud.¹³⁴ Dengan demikian, hasil yang diperoleh dari analisis data tersebut tentulah pula tidak bisa dijadikan sebagai perbandingan antara satu wilayah dengan wilayah lain. Makmal Pendidikan ingin menghimpun data dalam lingkup nasional dengan maksud agar memperoleh gambaran umum tentang realitas yang terjadi pada sekolah-sekolah dasar di Indonesia.

¹³⁴ Dalam presentasi hasil penelitian yang tersaji dalam Bab 5, 6, 7, dan 8, nama-nama sekolah ditandai dengan huruf alfabet A-V, sesuai banyaknya sekolah yang disurvei (yakni 22 sekolah).



Sifat dari pengambilan data dalam survei ini menggunakan pendekatan kualitatif yang selanjutnya diukur melalui perhitungan statistik sederhana. Ini tentu tidak akan menghasilkan pendapat atau preposisi yang bisa dijadikan sebagai generalisasi ilmiah sebagaimana penelitian berbasis kuantitatif. Namun, setidaknya hal ini bisa membantu untuk memaparkan secara kritis tentang apa yang sedang terjadi di banyak sekolah dasar. Transformasi data dari kualitatif menjadi hitungan statistik sederhana ini dilakukan menggunakan suatu instrumen pengukuran yang disusun melalui asumsi ilmiah dan kaidah-kaidah baku dalam pendidikan sehingga menghasilkan beberapa pertanyaan yang memiliki bobot yang proporsional. Untuk menguatkan analisis dari data tersebut, ditambahkan pula beberapa hasil catatan lapangan yang didapat selama survei di sekolah-sekolah sampel.

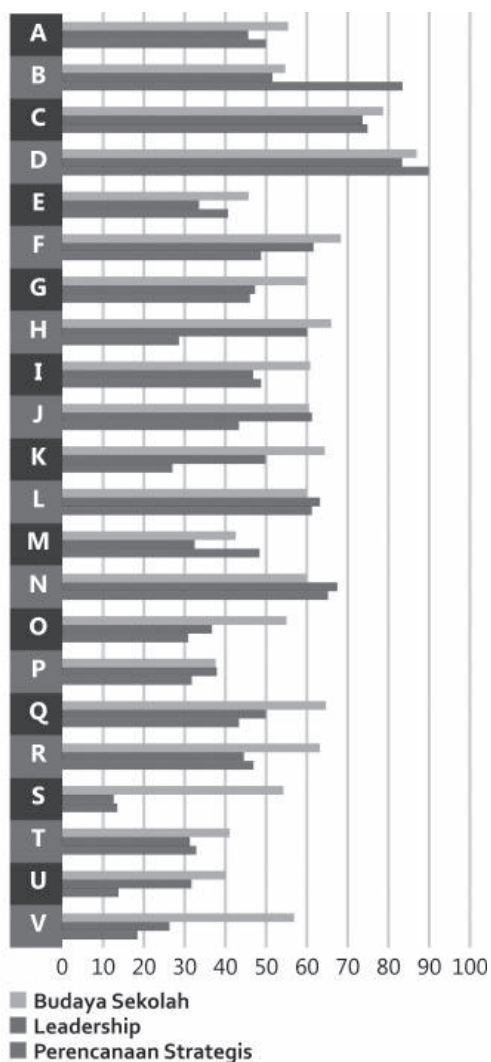
Efektivitas Manajemen Sekolah Dasar

Untuk memetakan efektivitas manajemen sekolah di jenjang sekolah dasar, Makmal Pendidikan melakukan survei atas tiga kriteria, yaitu perencanaan strategis, kepemimpinan sekolah, dan budaya sekolah. Perencanaan strategis dinilai dari tiga indikator, yaitu pengembangan kekhasan sekolah, program kerja tahunan, serta pencapaian visi dan misi. Untuk penilaian terhadap kepemimpinan sekolah ditilik dari tiga indikator, yaitu pengembangan profesional setiap SDM, peran serta komite sekolah, serta kapasitas dan kinerja kepala sekolah. Kriteria terakhir, yaitu budaya sekolah, dinilai dari nilai-nilai dan keyakinan yang dikembangkan di sekolah, faktor kedisiplinan dan penegakan aturan sekolah, serta pengelolaan kebersihan.

Berikut ini adalah rekapitulasi hasil survei terhadap efektivitas manajemen sekolah di 22 sekolah dasar. Setiap angka hasil penilaian diukur dengan menggunakan skala perhitungan 1-100.



KODE SEKO LAH	Perencanaan Strategis	Kepe-mimpinan	Budaya Sekolah
A	50	46	56
B	84	52	55
C	75	74	79
D	90	84	87
E	41	34	46
F	49	62	68
G	46	47	60
H	29	60	66
I	49	47	61
J	44	61	61
K	27	50	65
L	61	63	60
M	49	33	43
N	65	68	60
O	31	37	55
P	32	38	38
Q	43	50	65
R	47	44	63
S	14	13	55
T	33	31	41
U	14	32	40
V	19	26	57
RATA-RATA	45	48	58



Dari tabel dan grafik di atas dapat dideskripsikan bahwa berdasarkan acuan rata-rata normatif dari setiap indikator penilaian, hanya 5 dari 22 sekolah atau hanya 22,72 persen sekolah yang semua aspek manajemennya berada di atas rata-rata sekolah lain. Sebaliknya, ada 6 dari 22 sekolah atau 27,27 persen sekolah yang semua aspek manajemennya berada di bawah rata-rata sekolah lain. Sebanyak 11 dari 22 sekolah atau 50 persen sekolah dalam kondisi beberapa aspek indikatornya masih belum berada di atas ambang rata-rata. Berdasarkan deskripsi ini maka secara umum dapat disimpulkan bahwa sebagian besar sekolah yang



diteliti masih bermasalah dalam mengimplementasikan manajemen secara efektif.

Bila kita mengubah pengukuran efektivitas manajemen ini dari menggunakan acuan rata-rata normatif menjadi acuan patokan tertentu, hasilnya akan berubah drastis. Penilaian dengan menggunakan acuan norma umumnya digunakan dalam mengukur pencapaian hasil, sedangkan penggunaan acuan patokan akan memberikan hasil yang lebih tajam dan objektif dalam mengukur efektivitas sebuah penilaian yang berorientasi proses. Oleh karena itu, akan lebih tepat bila acuan patokan digunakan dalam mengukur implementasi manajemen sekolah. Dengan demikian, pencapaian hasil survei setiap sekolah dapat terpetakan berdasarkan klasifikasi yang bertingkat, dan selanjutnya performa sekolah dapat dengan mudah untuk dideskripsikan. Hasilnya bisa dilihat pada tabel di bawah ini.

Level	Kisaran Nilai	Klasifikasi	Perencanaan Strategis	Kepemimpinan	Budaya Sekolah
A	90 - 100	Sangat Efektif	1	0	0
B	75 - 89	Efektif	2	1	2
C	60 - 74	Cukup Efektif	2	6	10
D	40 - 59	Kurang Efektif	9	7	8
E	0 - 39	Tidak Efektif	8	8	2

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa hanya 2 dari 22 sekolah atau hanya 9,09 persen sekolah yang manajemen sekolahnya telah berkategori efektif. Lalu terdapat 4 dari 22 sekolah atau hanya 18,18 persen sekolah yang manajemennya berkategori cukup efektif. Selebihnya atau 81,82 persen sekolah masih berkategori manajemen sekolah yang kurang atau tidak efektif. Bahkan dari 81,82 persen sekolah tersebut, 5 sekolah atau 22,72 persen di antaranya masih berkategori sekolah dengan manajemen sekolah tidak efektif.



Perencanaan Strategis

Perencanaan strategis tidak hanya bisa dibuktikan dengan penelusuran pada dokumen-dokumen yang terkait. Dibutuhkan pengamatan lapangan atau observasi yang menyeluruh atas beberapa aspek, termasuk di dalamnya adalah proses pengambilan keputusan dalam hal manajemen sekolah. Secara umum, survei terhadap perencanaan strategis ini meliputi tiga buah aspek penting, yaitu pengembangan model kekhasan atau keunggulan sekolah, implementasi program kerja, serta tentang pengembangan visi-misi sekolah. Secara umum hasil survei terhadap pencapaian perencanaan strategis dapat dilihat pada tabel di bawah ini.



Dari tabel di atas dapat jelas terlihat bahwa masih banyak sekolah yang belum memiliki atau belum mengembangkan perencanaan strategis yang efektif. Terdapat 17 atau 77,27 persen sekolah yang kurang atau bahkan tidak efektif dalam mengembangkan perencanaannya. Sebaliknya, yakni 22,72 persen, sekolah sudah tergolong cukup hingga sangat efektif. Dari hasil ini bisa disimpulkan bahwa lebih banyak sekolah-sekolah yang diteliti menempatkan dirinya sebagai sekolah tradisional. Dalam kondisi semacam ini, jangankan untuk dapat mengejar tuntutan kualitas bertaraf internasional, untuk mencapai standar nasional saja sekolah sudah tidak mungkin sanggup.



Kelemahan atau mungkin juga kesalahan ini selanjutnya telah didefinisikan melalui survei yang salah satu bentuk instrumennya menyorot pada pengembangan model kekhasan dan keunggulan sekolah. Sekolah unggul dalam instrumen Makmal Pendidikan bukanlah sekolah hebat dengan raihan prestasi yang demikian banyak. Unggul yang dimaksud juga tidak mesti bersifat lebih tinggi secara komparatif, melainkan lebih cenderung bersifat khas. Unggul artinya sekolah memiliki kekhasan yang unik dan berbeda secara diferensial jika disejajarkan dengan sekolah lain.

Banyak sekolah yang disurvei mengaku kesulitan dalam merumuskan kekhasan yang tepat bagi sekolahnya. Seandainya pun ada, kekhasan umumnya diarahkan untuk pengembangan ekstrakurikuler, seperti bidang kesenian, keterampilan, dan olahraga. Sekolah-sekolah model tradisional umumnya memang memiliki keunggulan untuk bidang-bidang seperti ini. Namun, untuk mengembangkan kekhasan yang bersifat akademis sangat sulit untuk diimplementasikan. Sekolah tradisional umumnya masih senang berkatut pada metodologi pembelajaran yang monolog (satu arah, kurang interaktif), serta monoton (membosankan, kurang variatif, dan kurang kreatif). Akibatnya, sekolah ini kurang bisa membuka diri dengan penemuan-penemuan dan kebijakan-kebijakan baru di bidang inovasi pendidikan. Tidak heran bila pengembangan kekhasan yang bersifat akademis sukar mendapatkan tempat.

Bila merujuk pada hasil survei yang Makmal Pendidikan lakukan, tampak bahwa visi dan misi sekolah hanya teronggok kaku dalam suatu pajangan di dinding sekolah. Nyaris tidak memiliki makna, selain sekadar penghias belaka. Bahkan di beberapa sekolah yang disurvei tidak ada pajangan atau poster tentang visi-misi. Hal ini kentara dalam menjelaskan bahwa warga sekolah, dalam hal ini tentu adalah kepala sekolah dan guru-guru, belum memiliki pemahaman tentang apa itu visi dan misi. Bila pemahaman tidak dimiliki, manalah mungkin kesadaran akan urgensi visi dan misi dapat dimunculkan. Artinya, ada atau tidak adanya visi-misi sekolah, tampaknya akan sama saja pengaruhnya. Visi dan Misi telah banyak mati di sekolah, bahkan kematiannya terhitung sejak visi dan misi ini dilahirkan.



Berdasarkan observasi lapangan, ditemukan juga hasil bahwa sebagian besar, atau bahkan mungkin semua sekolah, hanya memiliki visi yang mati. Maksudnya, mereka memiliki visi yang sudah definitif namun tidak memiliki keterukuran dalam pencapaian dan belum menyatu dengan strategi pengembangan sekolah. Visi tampak hadir tidak lebih sebagai pajangan yang gagah di muka sekolah. Bahkan di setiap kelas juga telah ditempel rapi sehingga tidak ada satu pun warga sekolah yang tidak membacanya. Namun, ketika ditanyakan ihwal visi-misi sekolah, hampir jarang ada siswa atau guru yang menghafalnya. Itulah sebabnya Makmal Pendidikan menyimpulkan bahwa visi benar-benar banyak yang dibiarkan mati di sekolah.

Tak bisa dimungkiri bahwa bidan lahirnya visi-misi ini adalah pemerintah. Pemerintah tentu berharap besar bahwa sekolah akan bisa dibentuk sebagai organisasi yang modern. Namun sayangnya, pembuatan visi-misi ini sendiri kadang tidak disertai dengan sosialisasi yang sempurna. Pemahaman warga sekolah jadilah tidak utuh. Belum lagi cara pembuatannya pun sangat aneh. Banyak warga sekolah yang diwawancarai bahkan mengutarakan tidak pernah tahu siapa dan kapan visi-misi sekolahnya itu dibuat. Tiba-tiba saja ketika pihak dinas pendidikan atau Unit Pelaksana Teknis Dinas meminta laporan tentang hal ini, sekolah secara ajaib mengaku telah memiliki visi dan misi. Visi dan misi sekolah tidak hanya dilahirkan dengan tanpa adanya kajian awal yang komprehensif, diskusi atau musyawarahnya pun sama sekali juga tidak pernah dilakukan. Dari survei ini dapat disimpulkan bahwa visi misi yang ada hanyalah formalitas untuk memenuhi kelengkapan administrasi dalam birokrasi pendidikan kita.

Tentu hampir tidak ada sekolah yang tidak memiliki visi pada hari ini. Bila kita berkunjung ke sekolah, misalnya untuk sekadar mengantarkan anak ke sekolah, di beberapa sekolah akan ditemui poster, papan, atau tempelan yang berisi tentang visi dan misi sekolah. Sekolah yang tidak memiliki visi berarti belum memiliki akreditasi dari pemerintah, dan tidak akan butuh waktu lama untuk mendapatkan teguran dari pengawas.

Ada pula yang unik dalam setiap redaksi visi-misi pada sebagian besar sekolah yang disurvei. Frase “iman dan takwa” serta “ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK)” akan selalu mudah kita temui di setiap



sekolah. Dari Aceh di barat hingga Papua di timur, dari Sulawesi Utara hingga Nusa Tenggara Timur di paling selatan, dua gabungan kata tersebut telah menjadi slogan-slogan favorit. Inilah kata-kata yang biasanya senantiasa muncul dalam tulisan visi di setiap sekolah di Indonesia. Entah siapa yang mengajarkan atau siapa yang mengomandoinya, hampir semua sekolah kompak untuk menggunakannya sebagai standar baku dalam penulisan visi sekolah untuk sepanjang masa. Sisi positifnya, setidaknya ini menegaskan bahwa kita bukanlah bangsa yang sekuler, sangat religius, namun tetap ingin berkualitas, sejajar dengan kemajuan bangsa-bangsa lain.

Mereformasi Visi Sekolah Dasar

Inti dari sebuah perencanaan strategis adalah visi dan misi organisasi. Inilah cita-cita besar yang hendak dicapai oleh setiap organisasi modern. Dari visi inilah setiap organisasi akan memiliki arahan dan tujuan yang jelas. Berkumpulnya sekelompok individu dalam sebuah organisasi tentulah didorong oleh tujuan yang sama antara satu dengan yang lain. Kesamaan inilah yang membangun identitas sebuah organisasi.

Semakin jelas identitas sebuah organisasi, semakin mudah pula visi-misinya untuk dicapai. Analoginya, tidaklah mungkin penumpang dalam sebuah kendaraan transportasi massal memiliki tujuan destinasi yang saling berlawanan. Setiap anggota dalam organisasi haruslah seiring sejalan dalam kesamaan tujuan. Bagaimanapun juga sekolah merupakan sebuah organisasi sehingga cara kerjanya pun harus pula seperti mekanisme dalam organisasi.

Selain itu, visi dan misi sekolah akan membantu pencapaian mutu dan prestasi untuk perkembangan di masa depannya. Walaupun hari ini sekolah modern dengan sekolah tradisional sama-sama telah memiliki tujuan untuk mencerdaskan kehidupan anak-anak bangsa, visi sebuah sekolah modern akan lebih memiliki efektivitas yang lebih kuat. Bagi sekolah tradisional yang tidak memiliki visi yang jelas, tujuan pendidikan akan menjadi samar-samar sehingga kehilangan orientasi dalam pengembangan budaya akademik yang tepat buat peserta didik yang ada di dalamnya.



Agar pendidikan Indonesia memiliki kualitas yang sama dengan negara-negaramaju, diperlukanlompatanbesar dalam sistem persekolahan kita. Lompatan besar merupakan kumulasi dari kerja gigih kita bersama, bukan kerja-kerja instan. Bila tidak segera dilakukan, kita akan semakin jauh tertinggal dan hanya akan menjadi korban dari pergeseran kekuatan dunia. Maka, marilah kita memulai gerakan reformasi untuk sekolah-sekolah dasar kita dengan diawali dari perbaikan visi. Sudah saatnya sekolah-sekolah dasar Indonesia bertransformasi dari era tradisional menjadi sekolah-sekolah modern di era global-digital. []



“Reformasi Sekolah adalah sebuah gagasan tentang pembentukan sekolah-sekolah model alternatif yang berkonsentrasi pada perubahan agar selanjutnya memiliki daya pengaruh ke sekolah-sekolah lain. Gagasan tentang Reformasi Sekolah ini didasari pada realitas bahwa pemerintah sebagai penanggung jawab utama dalam penyelenggaraan pendidikan tidak bisa bekerja sendirian.”



Bab 6

Mengubah Paradigma Kepemimpinan Sekolah Dasar



Sumber: Dokumen Makmal Pendidikan

Sejalan dengan tuntutan masyarakat terhadap mutu pendidikan di Indonesia, dalam sedekade terakhir banyak muncul ide persekolahan modern dengan berbagai nama, seperti Sekolah Unggulan, Sekolah Terpadu, Sekolah Percontohan, Sekolah Model, Sekolah Reguler, Sekolah Kategori Mandiri, Sekolah Standar Nasional, Sekolah Rintisan Bertaraf Internasional, dan Sekolah Bertaraf Internasional. Di beberapa negara maju, gerakan semacam ini dinamakan dengan ide *Sekolah Efektif*. Ciri utama sekolah efektif, berdasarkan berbagai riset meliputi: (a) kepemimpinan instruksional yang kuat; (b) harapan yang tinggi terhadap prestasi siswa; (c) adanya lingkungan belajar yang tertib dan nyaman; (d) menekankan kepada keterampilan dasar; (e) pemantauan secara kontinu



terhadap kemajuan siswa; dan (f) tujuan sekolah terumuskan secara jelas (Davis & Thomas, 1989: 12).

Untuk mewujudkan sekolah efektif hanya mungkin didukung oleh kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan yang efektif. Fred M. Hechinger (dalam Davis & Thomas, 1989: 17) pernah menyatakan: “Saya tidak pernah melihat sekolah yang bagus dipimpin oleh kepala sekolah yang buruk, dan sekolah buruk dipimpin oleh kepala sekolah yang buruk. Saya juga menemukan sekolah yang gagal berubah menjadi sukses, sebaliknya sekolah yang sukses tiba-tiba menurun kualitasnya. Naik atau turunnya kualitas sekolah sangat tergantung kepada kualitas kepala sekolahnya.”¹³⁵

Lalu, bagaimana relevansinya dengan pendidikan nasional kita?

Kehilangan Orientasi

Misi pendidikan nasional yang paling utama bukanlah sekadar membuat semua warga negara bisa bersekolah, namun juga bertujuan untuk membangun basis-basis kelas menengah yang kuat, mandiri, dan produktif. Inilah struktur masyarakat yang telah berhasil dibentuk oleh negara-negara maju. Ciri utama kelompok strata menengah tersebut bukan semata teridentifikasi pada kekuatan finansialnya, tapi seharusnya lebih mengarah kepada keunggulan intelektual. Cara mereka bersikap dalam menghadapi dinamika keseharian dipengaruhi oleh pandangan hidup yang rasional dan modern. Merekalah yang menjadi mesin penggerak kemajuan masyarakat di segala sektor. Semakin kelas menengah ini menguat, negara pun akan semakin kuat pula.¹³⁶

Kontras dengan struktur masyarakat negara-negara maju yang berbentuk kurva belah ketupat,¹³⁷ stratifikasi sosial penduduk di Indonesia sama seperti negara-negara dunia ketiga yang lain: masyarakatnya

135 Direktorat Tenaga Kependidikan Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional, *Kepemimpinan Pendidikan Persekolahan yang Efektif*, Jakarta: Modul Pendidikan dan Pelatihan, 2007: 6.

136 Bahasan tentang kelas menengah antara lain bisa dilihat pada Jurnal *Prisma*, Vol. 31, No. 1, 2012, *Kelas Menengah Indonesia: Apa yang Baru?* Jakarta: LP3ES.

137 Kurva belah ketupat menandakan bahwa masyarakat didominasi oleh kelas menengah. Kelas atas dan kelas bawah mengerucut di dua sisi.



berbentuk kurva piramida.¹³⁸ Kelas bawah jauh lebih banyak dibandingkan kelas menengah, terlebih lagi dibandingkan kelas atas atau elit. Kemiskinan berkorelasi positif dengan kualitas pendidikan yang masih rendah. Namun pertanyaan kritisnya, apakah kemiskinan yang membuat pendidikan menjadi tidak berkualitas ataukah sebaliknya bahwa pendidikan tidak berkualitas yang membuat munculnya kemiskinan?

Korelasi antara kemiskinan dengan rendahnya mutu pendidikan memberi indikasi kuat bahwa kemiskinan Indonesia bersifat struktural. Terdapat sistem yang belum sempurna, atau ada indikasi kuat bahwa pengelolaan negara yang masih korup dan salah urus. Berdasarkan data yang dikeluarkan World Bank 2011, hanya sekitar 14 juta dari 134 juta kelas menengah Indonesia yang belanja per kapitanya 6-20 dolar AS per hari.¹³⁹ Selebihnya kelas menengah yang lain masih rentan kembali menjadi kelas bawah bila terjadi resesi atau guncangan ekonomi. Data World Bank ini bisa menjadi sinyalemen bahwa kelas menengah kita belum mandiri karena masih bergantung pada lapangan pekerjaan yang tidak terlalu membutuhkan keahlian tinggi. Sebagian besar kelas menengah kita bukan berasal dari kelompok intelektual yang berpendidikan tinggi. Mereka adalah kelas pekerja yang kebetulan tertolong akibat sedang membaiknya pertumbuhan ekonomi nasional. Akibatnya, bekal keterampilan yang terbilang masih rendah akan selalu membatasi ruang gerak mereka untuk meningkatkan taraf kehidupan ekonomi menjadi lebih tinggi.¹⁴⁰

Untuk membentuk kelas menengah yang kuat, kualitas pendidikan tentu harus menjadi prioritas yang harus dikejar oleh negara. Negara, dalam hal ini pemerintah, bagaimanapun juga harus bisa memastikan bahwa setiap warga negara, tanpa terkecuali, harus mendapatkan layanan terbaik di bidang pendidikan. Pendidikan terbaik tersebut tidak boleh hanya dinikmati oleh kalangan yang berpendapatan besar. Fungsi

138 Kurva piramida berarti menunjukkan masyarakat semakin membesar ke bawah, struktur didominasi oleh kelas bawah. Semakin ke atas semakin sedikit. Namun akses-akses publik justru banyak dinikmati oleh kelas atas sehingga terjadi kesenjangan semakin yang besar.

139 Berdasarkan ukuran World Bank, penghasilan antara 2 hingga 20 dolar AS per hari telah dinyatakan masuk kategori kelas menengah.

140 Jurnal *Prisma*, Vol. 31, No. 1, 2012, *Kelas Menengah Indonesia: Apa yang Baru?* Jakarta: LP3ES.



negara dalam hal ini adalah membantu lapisan bawah masyarakat dengan menyediakan sekolah-sekolah terbaik buat mereka.

Melalui pendidikan, pemerintah memiliki misi untuk bisa mengolah sumber daya manusia Indonesia menjadi sebuah potensi kekuatan bangsa di segala sektor. Lebih strategis dari itu, pendidikan semestinya juga bisa mengoptimalkan segenap sumber daya. Namun, pada kenyataannya, kita belum mengubah besarnya jumlah penduduk menjadi sebuah kekuatan, alih-alih justru menjadi pangsa pasar potensial bagi produk-produk asing. Ini membuktikan bahwa kita belum memiliki nilai tambah sekaligus bukti nyata betapa masih rendahnya sumber daya manusia Indonesia.

Sebagai sarana membentuk insan-insan yang paripurna, pendidikan harus menolak dengan tegas adanya diskriminasi. Pendidikan adalah hak untuk semua golongan. Untuk itu, semua sekolah di negeri ini haruslah memiliki standar dan kualitas yang sama untuk semua. Oleh karena itu, tugas terberat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) untuk negara ribuan pulau seperti Republik Indonesia adalah menghapus kesenjangan pendidikan antardaerah. Semua sekolah di wilayah NKRI wajib berkualitas adalah harga mati!

Lalu siapakah sebenarnya yang paling bertanggung jawab dalam perbaikan kualitas pendidikan? Biasanya untuk menjawab pertanyaan ini sering kali kita digiring dengan 'doktrin' bahwa semua pihak bertanggung jawab akan hal ini. Tidak salah memang sebab dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional telah tertulis pasal mengenai peran serta masyarakat terhadap bidang pendidikan. Walau begitu, bagaimanapun juga pemerintah tetap menjadi pemegang porsi terbesar dalam bertanggung jawab terhadap kualitas pendidikan. Pertanyaan berikutnya, pemerintah yang mana? Apakah pemerintah pusat, dalam hal ini Kemdikbud, ataukah pemerintah daerah? Mengapa pemerintah daerah? Karena sejak berakhirnya Orde Baru, pendidikan saat ini telah didesentralisasi.

Pasca-Reformasi 1998, gerak pendidikan kita menjadi kehilangan orientasi. Strategi perbaikan kualitas pendidikan belum dalam kesamaan visi. Panjangnya masa transisi dalam belajar berdemokrasi menghambat kemajuan pendidikan karena ketiadaan sinergi akibat kuatnya desakan otonomi daerah. Kemdikbud menyatakan bahwa sejak dihapuskannya



sistem sentralisasi, kualitas pendidikan kemudian banyak diserahkan ke pemerintah daerah, dalam hal ini dinas pendidikan setempat. Di lain pihak, pemerintah daerah sendiri justru menuding pemerintah pusatlah yang menentukan kebijakan pendidikan, sementara dinas pendidikan daerah hanyalah bersifat menunggu instruksi dari Jakarta. Saling melempar masalah tampaknya sudah menjadi strategi birokrasi kita dalam melepaskan tanggung jawab.

Akibat sikap saling melempar tanggung jawab, pendidikan kita semakin tidak jelas arah dan tujuannya lantaran masing-masing pihak merasa tidak memiliki tanggung jawab. Bila diibaratkan seperti olahraga tenis, pemain berusaha memukul agar bola masalah tidak jatuh daerah sendiri, dan berusaha mengarahkannya ke wilayah lawan main. Salah satu yang dilempar-lemparkan adalah pembinaan terhadap guru dan kepala sekolah. Lalu siapa yang bertanggung jawab untuk meningkatkan kapasitas mereka?

Sekolah dasar adalah jenjang pendidikan yang memiliki sumber daya pendidik paling memprihatinkan. Berdasarkan hasil Uji Kompetensi Guru (UKG) tahun 2012, tingkat kompetensi pedagogis dan profesional guru SD adalah terendah dibandingkan jenjang yang lain.¹⁴¹ Bila kompetensi rendah, kualitas pembelajaran pun juga rendah. Artinya, jutaan anak-anak Indonesia yang hari ini masih duduk di bangku sekolah dasar belum mendapatkan layanan pendidikan yang berkualitas.

Salah satu kompetensi guru yang jarang diperhatikan adalah kemampuan dalam mengelola manajemen sekolah. Ini penting guna mempersiapkan tenaga pendidik untuk dikembangkan menjadi pemimpin di sekolah. Akibatnya, banyak guru yang ditunjuk sebagai kepala sekolah belum bisa memainkan perannya sebagai pemimpin yang membawa kemajuan bagi sekolah yang dikelolanya. Selama ini terpilihnya kepala sekolah dasar (negeri) masih cenderung melihat pada sisi senioritas, belum pada kompetensi yang dimiliki. Padahal, banyak guru-guru muda yang sesungguhnya memiliki potensi besar untuk dijadikan sebagai seorang manajer sekolah. Namun, kultur dalam birokrasi pendidikan

141 Merujuk pada paparan Mendikbud saat jumpa pers akhir tahun 2012, Hasil Uji Kompetensi Guru SD berada para nilai rata-rata 42,05. Hal ini masih berada di bawah nilai rata-rata nasional sebesar 45,82.



kita masih terbentur pada kebiasaan lama yang cenderung menutup celah bagi golongan guru-guru muda yang lebih berkompetensi untuk memimpin guru-guru senior.

Kepemimpinan untuk Sekolah Dasar

Dalam kaidah berorganisasi, keberadaan seorang pemimpin, apa pun tipe model dan strateginya, tak bisa tidak tetap akan selalu dibutuhkan. Sebaik apa pun sistem yang dikembangkan oleh sebuah organisasi, tidak akan mampu berjalan efektif sesuai rencana bila tidak dikepalai oleh pemimpin yang berkapasitas mumpuni. Bahkan ada benarnya jika terdapat pandangan bahwa pemimpin itu sendirilah yang membentuk sebuah sistem. Betapa tidak, pada umumnya yang terjadi pada sekolah dasar negeri biasanya ambisi sekolah berarti ambisi si kepala sekolah. Sistem akan mati bila pemimpin tidak berfungsi sesuai dengan tuntutan perannya. Begitu pun juga sekolah, kepala sekolah akan memiliki banyak fungsi dan peran dalam menentukan arah kebijakan strategis dalam institusi yang dipimpinnya.

Perlu diperhatikan juga bahwa di semua sekolah-sekolah negeri, kepala sekolah sebetulnya adalah guru yang ditunjuk sebagai pemangku tugas selaku pemimpin sekolah. Bila tugasnya selesai, dan tidak ditunjuk lagi, ia harus rela untuk dikembalikan ke posisi awalnya sebagai guru biasa. Kepala sekolah di sekolah-sekolah negeri bukanlah jabatan struktural, melainkan adalah jabatan fungsional. Dalam aturan main yang sebenarnya, sebetulnya kepala sekolah tetap harus memiliki jam mengajar di kelas, walaupun hanya sedikit. Namun, kadang kala fungsi mengajar ini kurang diacuhkan oleh para kepala sekolah dengan alasan yang beragam.

Kepemimpinan sekolah tentu memiliki karakteristik yang bersifat unik, sering kali berbeda dengan model-model organisasi yang lain. Kepemimpinan kepala sekolah walaupun tetap sama tunggal, tapi banyak kewenangannya yang tidak bersifat sentralistis. Ada beberapa peran yang harus dibagi dengan struktur pendidikan yang lain. Ini bisa dipahami karena sekolah adalah entitas yang otonom tapi tidak dapat berdiri sendiri. Sekolah negeri umumnya terbentuk seperti ini. Hubungan antarstruktur tidak banyak yang bergaris komando langsung,



justru lebih banyak yang harus dikelola secara koordinatif dan bila perlu kemitraan.

Walaupun tidak berbentuk kepemimpinan yang bersifat kolegal, jabatan kepala sekolah negeri harus dikontrol secara vertikal dan horizontal. Selain harus melakukan tugas-tugas yang harus dikontrol dan dilaporkan kepada UPTD atau dinas pendidikan, kepala sekolah juga memiliki tanggung jawab secara sosial dan hukum kepada masyarakat. Kadang setiap kebijakannya boleh dikendalikan atau diuji oleh publik eksternal. Agar partisipasi dan kontrol masyarakat dapat diatur, komite sekolah diperlukan sebagai wadah fasilitasi. Komite sekolah adalah perwakilan masyarakat dalam lokal tertentu yang peduli terhadap kemajuan pendidikan. Biasanya unsur terpenting dari struktur organisasi komite sekolah ini adalah perwakilan dari orangtua atau wali siswa.

Kepemimpinan sekolah idealnya adalah sebuah model kepemimpinan yang bersifat pendekatan partisipatif. Untuk itu, peran serta masyarakat dalam pendidikan sangat dibutuhkan untuk menyempurnakan peran yang sudah ada dengan lebih terarah dan terencana dengan baik. Pendidikan tanpa dukungan dan keikutsertaan masyarakat dalam menyukseskannya akan menyebabkan pengabaian kualitas lulusan, dan hanya mengejar status atau gelar; bukan berorientasi pada hadirnya kompetensi *hard skill* dan *soft skill*.

Partisipasi masyarakat tersebut kemudian dilembagakan dalam bentuk dewan pendidikan dan komite sekolah/Madrasah. Dewan pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli terhadap pendidikan. Adapun komite sekolah/madrasah adalah lembaga mandiri yang terdiri dari unsur orangtua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan. Dewan pendidikan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan, dengan memberikan pertimbangan, arahan, dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota yang tidak mempunyai hubungan hierarkis. Sedangkan peningkatan mutu pelayanan di tingkat satuan pendidikan peran-peran tersebut menjadi tanggung jawab komite sekolah/madrasah.



Tentu saja komite sekolah ini mesti diawali dengan melakukan upaya optimalisasi organisasi orangtua siswa di sekolah. Upaya ini sangat penting lagi pada saat keadaan budaya dan gaya hidup generasi kita sudah mulai tidak jelas sekarang ini. Dengan adanya upaya ini jalinan antara satu sisi, orangtua, dan di sisi lain sekolah, bisa bersama-sama mengantisipasi dan mengarahkan serta bersama-sama meningkatkan kepedulian terhadap anak-anak di usia sekolah. Dengan demikian, pendidikan menjadi tanggung jawab bersama mulai dari keluarga, masyarakat, dan pemerintah.

Pendekatan kepemimpinan yang pernah dikembangkan untuk melakukan penataan ulang atau restrukturisasi sekolah adalah dengan menggalakkan Manajemen Berbasis Sekolah (*school-based management*). Sistem ini pertama kali dikembangkan di Amerika Serikat, yang kemudian banyak diadopsi di Indonesia sejak 2004. Menurut Parkay dan Stanford (2011), Manajemen Berbasis Sekolah atau yang kemudian lebih kita kenal dengan singkatan MBS, setidaknya terdiri atas dua komponen, yakni:

1. Kekuasaan dan keputusan strategis dibuat bersama oleh guru, kepala sekolah, pengawas, orangtua, anggota masyarakat, serta para siswa di sekolah setempat. Guru-guru akhirnya dapat terlibat langsung dalam keputusan mengenai kurikulum, buku teks, standar perilaku siswa, evaluasi guru, dan anggaran sekolah.
2. Program-program MBS harus berjalan dengan dukungan penuh dari pengawas sekolah. Pengawas tidak lagi berwenang untuk menolak atau memveto suatu keputusan sekolah ketika perubahan tersebut memang telah menjadi kesepakatan bersama. Pengawas dalam hal ini harus menghargai otonomi yang dimiliki oleh sekolah.

Kepemimpinan sekolah dasar harus menjadikan pembinaan guru menjadi prioritas paling utama yang mesti dikerjakan. Untuk itulah seorang kepala SD adalah pula pendidik yang paling terbaik di sekolah. Syarat seperti ini mutlak adanya. Tidak akan mungkin kepala sekolah dasar dapat membina guru-gurunya tanpa memiliki kompetensi di bidang pengajaran. Selama ini pembinaan guru masih banyak mengandalkan peran pengawas. Padahal, waktu kerja pengawas dibandingkan jumlah sekolah dan guru yang dibina tidak berimbang. Banyak pengawas akhirnya tidak memiliki banyak kesempatan untuk membina guru secara langsung. Belum



lagi terbentur dengan kondisi geografi wilayah Indonesia yang membuat para pengawas tidak bisa berkunjung ke sekolah yang dibinanya secara intensif. Oleh karena itu, tugas pengawas dalam membina kompetensi guru semestinya bisa banyak diganti oleh peran kepala sekolah.

Selain kompetensi yang matang, motivasi juga menjadi faktor penting yang memengaruhi etos kerja para guru di sekolah. Bila motivasi ini rendah, korbannya sudah pasti adalah peserta didik di kelas. Pembelajaran dijamin tidak akan efektif. Bila sudah seperti ini, pemimpin sekolah perlu ‘membakar’ kembali semangat para guru yang tampaknya sudah mulai melesu. Namun, bagaimana bila yang bermasalah adalah motivasi pemimpin (kepala) sekolahnya? Bila ini yang terjadi, siapa yang bertanggung jawab?

Bagaimanapun juga guru tetaplah manusia. Motivasi mengajar kadang bisa stabil, tiba-tiba bisa turun. Untuk itu stamina guru perlu dijaga. Di sini posisi kepala sekolah sangat berperan. Guru-guru perlu terus-menerus dibimbing, dibina, serta senantiasa diberi kesempatan untuk beraktualisasi diri secara produktif. Untuk bisa mengoptimalkan guru agar mampu mengajar sesuai dengan standar minimal, mereka perlu mendapatkan ruang yang cukup untuk belajar. Fasilitas belajar untuk guru inilah yang mesti diperhatikan oleh kepala sekolah.

Salah satu persoalan yang dihadapi oleh sekolah adalah masih rendahnya kesempatan guru untuk bisa belajar dan mengembangkan diri secara profesional. Akibatnya, sebagian besar guru di sekolah dasar (negeri) tidak mampu untuk mengembangkan bahan ajar serta menciptakan materi ajar yang kreatif dan variatif. Persoalan ini tidak sekadar bisa dientaskan hanya dengan serangkaian pelatihan. Proyek sertifikasi guru adalah buktinya. Belum ada korelasi positif antara diraihnya sertifikasi dengan perbaikan dalam metodologi mengajar di kelas. Pada akhirnya, kemajuan mutu guru ini hanya bisa dibangun dengan pembinaan. Lagi-lagi, pembina guru yang paling pertama adalah kepala sekolah.

Sebagai seorang manajer atau pimpinan lembaga pendidikan, kepala sekolah dasar perlu juga mempelajari konsep-konsep tentang pengambilan keputusan yang efektif untuk organisasinya. Syafaruddin dan Anzizhan (2006) menjelaskan bahwa pengambilan keputusan yang



dilakukan oleh seorang kepala sekolah diyakini akan menentukan corak perubahan organisasi di masa depan. Maka dari itu, untuk mendorong lahirnya kinerja anggota organisasi yang baik diperlukan efektivitas dalam pengambilan keputusan sehingga semakin dapat mewujudkan fungsi organisasi yang lebih baik juga di masa depan.¹⁴²

Sistem pendidikan kita pada era Reformasi (setelah 1998) telah bergeser ke arah pengembangan yang bersifat desentralisasi. Sekolah memiliki otonomi untuk mengurus kemajuannya sendiri. Pemerintah sendiri, melalui dinas pendidikan, hanyalah sebagai fasilitator dan regulator yang memastikan setiap satuan pendidikan mampu terkelola sesuai dengan standar nasional pendidikan. Pemerintah tidak boleh mengintervensi lebih jauh hingga masuk ke rumah tangga sekolah. Sekolah 'dibiarkan' bergerak sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat. Dengan tuntutan zaman seperti ini, demi terbentuknya sekolah berkualitas, jelas kita butuh manajer-manajer sekolah yang kuat dan visioner. Jadi, fungsi pemerintah dalam hal ini dituntut agar lebih serius dalam melakukan kaderisasi calon-calon pemimpin sekolah berdasarkan konsep paradigma pendidikan yang berwawasan masa depan.

Anwar dan Sagala (2004) menyebutkan bahwa kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan tentunya harus memiliki visi kependidikan dan pembelajaran. Visi inilah yang akan dikembangkan sebagai tujuan yang ingin dicapai baik oleh dirinya maupun oleh para pengikutnya, yakni semua warga sekolah yang ia pimpin. Visi tersebut hendaknya dapat menjadi acuan seluruh warga sekolah ke arah masa mendatang dan dapat memberikan motivasi dalam melakukan perubahan yang positif secara institusional.¹⁴³

Reeves, dkk. (2005) juga menegaskan bahwa salah satu segi dari kepemimpinan yang berbobot secara proses adalah kepemimpinan yang dapat menimbulkan suatu pendekatan yang lebih strategis kepada pengembangan karena tujuan pemberdayaan sekolah itu cenderung lebih berjangka panjang dan holistik. Kepala sekolah yang tidak dapat menunjukkan ciri-ciri pemimpin perubahan yang positif cenderung

142 *Sistem Pengambilan Keputusan Pendidikan*. Jakarta: Grasindo.

143 *Profesi Jabatan Kependidikan dan Guru Sebagai Upaya Menjamin Kualitas Pembelajaran*. Jakarta: Uhamka Press.



reaksioner dan tidak proaktif dalam menanggapi perubahan dan memusatkan perhatian untuk mencapai tujuan jangka pendek.

Membangun sekolah dasar berkualitas tentu bukan kerja instan. Alur yang dilalui panjang dan melewati banyak proses yang rumit. Percepatan yang bisa dilakukan untuk membentuk sekolah dasar yang bermutu adalah dengan memberikan pemimpin yang bermutu pula. Inilah kendalanya. Sekolah dasar bermutu bukan didukung oleh *input* siswa yang terbaik, tapi semestinya disebabkan oleh sistem atau proses akademis yang terjadi di sekolah tersebut. Masyarakat awam biasanya terkecoh dengan hal ini. Banyak orangtua berlomba-lomba untuk mendaftarkan anaknya ke sekolah-sekolah dasar favorit, namun sesungguhnya keunggulan yang didapat bukanlah dari sistem pengajaran gurunya, melainkan karena adanya seleksi yang ketat sehingga hanya calon-calon siswa unggulan saja yang diserap oleh sekolah tersebut.

Kompetensi Kepemimpinan Sekolah Dasar

Pertumbuhan ekonomi yang stabil kurang lebih selama satu deka-de terakhir pasca-Reformasi 1998 telah mendorong munculnya golongan kelas menengah baru. Pendapatan masyarakat (baca: Pendapatan Domestik Bruto) yang kian meningkat tersebut juga berpengaruh kepada pilihan alternatif pendidikan bagi anak-anak mereka. Bila dahulu sekolah negeri biasanya dikenal sebagai institusi pendidikan murah berkualitas sehingga sering kali menjadi rebutan publik, namun hari ini kondisi tersebut tampaknya telah bergeser. Sekolah negeri yang hingga hari ini umumnya masih menonjolkan kesan ‘mazhab’ tradisional itu, perlahan-lahan mulai ditinggalkan peminat. Pilihannya jatuh ke sekolah-sekolah swasta baru yang memiliki model kekhasan modern.

Sulit untuk dielak bahwa sekolah-sekolah partikelir jelas memiliki motif ekonomi yang cukup kuat, walaupun belum tentu ini termasuk ke dalam modus komersialisasi pendidikan. Namun, perlu juga digaribawahi bahwa ini mungkin pula adalah gerakan ‘oposisi’ terhadap sistem pendidikan yang ditawarkan oleh pemerintah. Dalihnya, sekolah-sekolah pemerintah yang lebih mengedepankan aspek akademis berbasis pengetahuan (kognitif), dianggap sudah tidak lagi selaras dengan kebutuhan zaman. Banyak sekolah-sekolah swasta alternatif menawarkan



konsep pendidikan yang mengklaim lebih efektif, holistik, serta menyenangkan bagi peserta didik.

Kecenderungan ini menarik untuk dibahas. Munculnya minat tinggi sebagian anggota masyarakat kepada sekolah-sekolah swasta alternatif, bisa jadi merupakan bentuk kekecewaan terhadap semakin rendahnya kualitas sekolah-sekolah dasar negeri. Sangat wajar bila masyarakat akhirnya memilih sekolah swasta demi mendapatkan pendidikan yang terbaik bagi putra-putri mereka. Ini juga membuktikan bahwa sekolah-sekolah dasar negeri sulit untuk berkembang dan semakin tertinggal dengan sekolah-sekolah swasta.

Bila ditelusur lebih lanjut, ditemukan kesimpulan bahwa pangkal segala perbaikan dan perubahan di sekolah pemicunya pasti adalah pemerintah. Bila pemerintah tidak bergerak, sekolah akan semakin pasif. Beberapa variasi ide dalam kaitannya dengan program pengembangan sekolah akan mentah-mentah ditolak bila tidak berasal dari pemerintah. Putusan seperti inilah yang membuat sekolah negeri semakin tertutup terhadap perubahan. Sebaliknya, sekolah-sekolah swasta alternatif sangat haus akan munculnya perubahan. Dari kenyataan ini, pemerintah daerah tampaknya harus lebih proaktif dalam terjun ke lapangan untuk secara langsung memantau dan mengarahkan sekolah-sekolah negeri agar bisa lebih mengembangkan kapasitasnya.

Kunci dari keunggulan semua sekolah dasar sebetulnya adalah kepala sekolah. Dengan demikian, kepala sekolah semestinya adalah orang yang berani, tegas, kreatif, dan memiliki wawasan yang visioner. Sekolah bagus karena memang kepala sekolahnya bagus. Begitu pun sebaliknya, bila mutu sekolahnya buruk, kebetulan saja mereka sedang mendapat giliran dipimpin oleh kepala sekolah yang kurang optimal dalam menjalankan fungsinya.

Hambatan sekolah untuk bisa memenuhi target standar nasional dalam pendidikan di antaranya juga berawal dari kelemahan fungsi kepala sekolah. Sekolah dengan akreditasi terbaik pada akhirnya sangat dipengaruhi oleh kebijakan manajemen yang dikendalikan oleh kepala sekolah yang juga terbaik. Kadang pula pencapaian akreditasi ini menjadi salah satu bahan penilaian terhadap kinerja kepala sekolah negeri.



Kepala sekolah, terutama di sekolah negeri, sesungguhnya merupakan jabatan fungsional. Ia adalah guru yang memiliki fungsi tambahan sebagai pemimpin di sekolah. Namun, kenyataan di lapangan banyak didapati kepala sekolah yang masih belum mau mengajar di kelas. Alasannya karena sibuk atau karena jumlah guru yang sudah mencukupi kuota.

Kepala sekolah bukanlah jabatan struktural sehingga seharusnya posisi ini dipilih bukan karena senioritas, melainkan lebih karena kualifikasi kompetensi yang telah ditetapkan. Sayangnya, saat yang sama, guru-guru muda yang potensial, umumnya selain minder juga akan menghadapi banyak hambatan birokrasi ketika ingin mempromosikan diri menjadi kepala sekolah negeri. Selain harus memenuhi batasan lama mengajar, dan golongan atau kepangkatan sebagai PNS, ada beberapa serangkaian tes yang harus ditempuh. Melalui mekanisme semacam ini, tidak heran bila jabatan kepala sekolah akhirnya banyak diisi oleh guru PNS yang telah senior. Berbeda dengan sekolah-sekolah swasta yang umumnya lebih mengutamakan SDM kepala sekolah berdasarkan kapasitas dan kompetensi yang dimiliki.

Banyak sekali kepala sekolah negeri yang tidak mau kembali turun menjadi guru biasa. Artinya, setelah menjadi kepala sekolah, ia akan menuntaskan pengabdiannya sebagai PNS dalam kondisi masih menjadi kepala sekolah. Sekali menjadi kepala sekolah, tetap akan menjadi kepala sekolah, hingga masa pensiun pun tiba. Hampir jarang terjadi *rolling* atau perputaran jabatan dari satu guru ke guru yang lain. Padahal, masih banyak SDM guru yang bisa tampil lebih baik bila diberi kesempatan memimpin. Faktor kinerja kurang mendapatkan penilaian yang otentik dari dinas pendidikan setempat. Akibatnya, sukar bagi daerah untuk melakukan rotasi kepemimpinan di sekolah.

Akibat dari kondisi ini, performa kepala sekolah sulit untuk mengalami peningkatan. Penyebabnya, kepala sekolah tidak mendapatkan tantangan dalam bekerja. Walaupun ada penilaian rutin yang dilakukan oleh pengawas, hasilnya bisa dipastikan akan dalam klasifikasi yang baik. Hal yang paling penting dalam penilaian ini adalah kepala sekolah tidak melakukan tindak pelanggaran yang melanggar hukum ataupun asas kesusilaan. Bila ini terpenuhi, jabatan relatif aman. Seandainya pun ada



pergantian kepala sekolah, sifatnya hanya mutasi tugas saja, dari sekolah satu ke sekolah yang lain, dan tetap menjadi kepala sekolah.

Kebiasaan semacam ini tentu akan berpengaruh kepada kualitas sebuah sekolah. Segala simpul-simpul kemajuan sekolah semuanya berpangkal pada tanggung jawab kepala sekolah. Tidak optimalnya peran-peran pengembangan edukasi yang seharusnya dilakukan oleh sekolah akhirnya disimpulkan sangat tergantung pada peran-peran kepala sekolah selaku pembuka jalurnya. Ketidakefektifan kepemimpinan seorang kepala sekolah akan mempersulit gerak langkah struktur-struktur sekolah yang lain, misalkan saja guru dan komite sekolah. Guru-guru yang bagus dalam mengelola pembelajaran akhirnya tidak terlalu signifikan dalam mengembangkan budaya akademis yang positif bagi sekolah ketika tidak ada respons dari pemimpinnya. Begitu pun dengan komite sekolah, ketika mereka memiliki usulan pengembangan dalam urusan pelayanan pendidikan bagi peserta didik, akan menjadi mentah karena kepala sekolahnya tidak kooperatif. Ketika menghadapi kepala sekolah tidak kooperatif, komite sekolah tidak akan bisa mengambil alih kuasa untuk mengendalikan kepemimpinan sekolah.

Ada banyak ragam penyebab tidak optimalnya kepemimpinan seorang kepala sekolah. Pertama, secara fisik, figur kepala sekolah sering sakit atau usianya yang sudah sepuh. Kedua, secara fungsi, kepala sekolah lebih disibukkan oleh hal-hal yang kurang strategis dan lebih banyak berkutat pada masalah pelengkapan administrasi. Ketiga, secara kompetensi, kepala sekolah tidak memiliki wawasan yang luas sehingga miskin kreativitas, serta sering bingung dalam membuat perencanaan kerja yang efektif. Keempat, secara psikologis, banyak kepala sekolah yang minder, segan, serta kurang memiliki keberanian dalam melakukan kontrol dan pendisiplinan terhadap kinerja para guru. Kelima, secara integritas, kepala sekolah tersebut belum dapat menjadi teladan yang baik bagi warga sekolah karena memiliki tabiat negatif, kurang mengindahkan norma dan asusila, atau bahkan melakukan pelanggaran hukum.

Merujuk pada sebab-sebab tidak optimalnya kepemimpinan seorang kepala sekolah tersebut, peran kepala sekolah sebagai subjek dalam birokrasi harus dikuatkan lagi. Kenyataannya yang masih terjadi



saat ini, kepala sekolahlah yang harus sibuk melayani urusan birokrasi, bukan melayani urusan kualitas sekolah.

Keterperangkapan kepala sekolah dalam birokrasi tidak serta-merta disederhanakan sebagai dampak negatif dari kebijakan birokrasi. Bagaimanapun juga bicara birokrasi berarti bicara tentang pelayanan yang terbaik. Birokrasi sesungguhnya bukan penghalang atas munculnya kualitas. Terkadang justru masalahnya ada pada kapasitas dan kompetensi kepala sekolah itu sendiri. Tidak semua kepala sekolah memiliki cara pengorganisasian kerja yang baik, di antaranya dalam hal pendelegasian atau distribusi kerja kepada para guru. Belum lagi dalam kaitannya dengan pelaporan sekolah, kepala sekolah yang rata-rata usianya sudah senior mengalami kesulitan tersendiri dalam penguasaan kompetensi di bidang teknologi informasi dan komputasi. Dampaknya sudah terbayang, kepala sekolah jadi terbelah pikirannya dalam urusan yang sesungguhnya remeh dan teknis belaka.

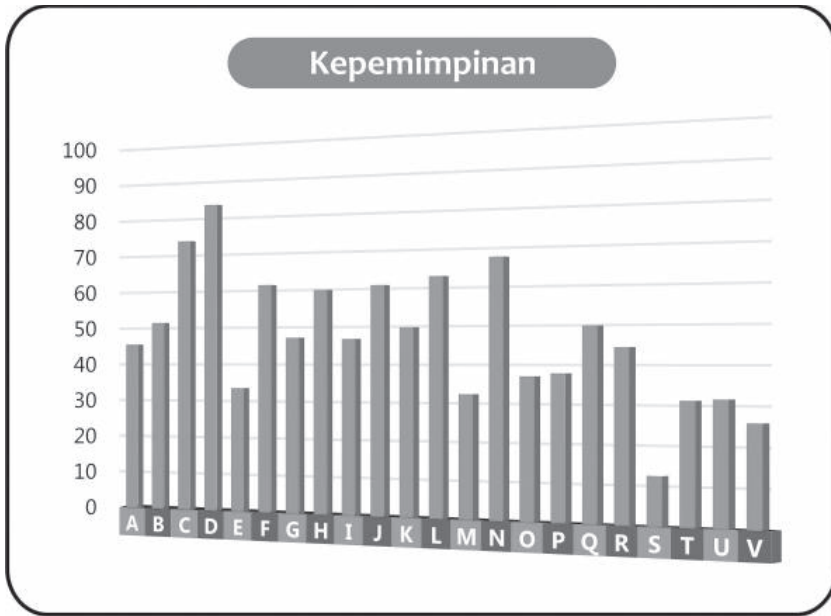
Pemetaan Efektivitas Kepemimpinan SD

Persoalan lemahnya kepemimpinan kepala sekolah dasar menjadi perhatian Makmal Pendidikan Dompot Dhuafa. Untuk melihat kondisi di lapangan, Makmal Pendidikan mengadakan survei khusus. Survei dilakukan di 21 Kota/Kabupaten di 14 provinsi. Sampel yang digunakan sebanyak 22 sekolah dasar negeri.

Survei efektivitas kepemimpinan sekolah yang berlangsung selama tiga tahun antara tahun 2010 hingga 2013 membutuhkan pengamatan lapangan atau observasi yang menyeluruh atas beberapa aspek terkait, termasuk di dalamnya berupa penelusuran terhadap pelaksanaan fungsi-fungsi dan wewenang setiap elemen sekolah yang memengaruhi performa kepemimpinan.

Secara umum, survei terhadap efektivitas kepemimpinan sekolah ini meliputi tiga buah aspek, yaitu fungsi kepemimpinan dalam pengembangan profesional SDM, efektivitas hubungan dan peran komite sekolah, serta yang terakhir adalah kapasitas dan efektivitas kinerja kepala sekolah. Secara umum, hasil survei terhadap pencapaian efektivitas kepemimpinan dapat dilihat pada tabel berikut ini.





Dari tabel di atas dapat jelas terlihat bahwa masih banyak sekolah yang belum memiliki model kepemimpinan sekolah yang kuat. Terdapat 15 atau 68,18 persen sekolah yang kurang atau bahkan tidak berhasil dalam mengembangkan kepemimpinan yang efektif. Sebaliknya, 5 atau 31,81 persen sekolah dasar yang sudah tergolong cukup dan efektif kepemimpinannya. Jadi, secara umum tampaknya tersimpulkan bahwa kebanyakan sekolah-sekolah dasar yang diteliti masih belum mampu berkembang akibat model kepemimpinan yang lemah dan bahkan tidak memiliki arah pengembangan strategis yang definitif. Dalam kondisi semacam ini, sekolah tentu berat dalam meningkatkan performanya secara progresif.

Untuk memetakan kualitas kepemimpinan sekolah dasar ini, Makmal Pendidikan berpijak pada kompetensi, tugas, dan wewenang yang seharusnya dikuasai oleh setiap kepala sekolah. Setidaknya ada empat fungsi yang harus dikerjakan sekaligus oleh seorang kepala sekolah. Keempat fungsi itu antara lain: sebagai manajer urusan tata kelola sekolah, sebagai pembimbing (*coach*) dalam urusan pengembangan SDM pendidik dan tenaga kependidikan, sebagai pengawas (*control*) dalam pelaksanaan semua alur proses yang terjadi di sekolah, dan terakhir adalah sebagai ‘begawan’ yang mampu menjadi sumber penguatan nilai-



nilai yang menjadi pembiasaan di sekolah. Bila empat fungsi itu dapat dijalankan secara berkelanjutan, sekolah pun akan mampu mengejar target pencapaian kualitas sekolah berdasarkan standar yang ditetapkan, selain juga mengoptimalisasi fungsi-fungsi layanan edukasi bagi masyarakat.

Masih dari hasil survei tersebut, Makmal Pendidikan berkesimpulan bahwa sangat sulit ditemukan kepala sekolah untuk menguasai empat fungsi itu sekaligus. Walaupun wewenang kepemimpinan sudah diperoleh, kepala sekolah kesulitan untuk mengorganisasinya secara komprehensif dan konsisten. Ini masalahnya. Terlebih di sekolah-sekolah negeri, selain harus mengurus 'dalam negeri' sekolahnya, kepala sekolah akan banyak disibukkan dengan pelbagai urusan birokrasi. Tak jarang ditemukan fakta bahwa hampir setengah dari keseluruhan jam kerja kepala sekolah banyak disibukkan dengan urusan-urusan teknis. Apalagi bila sekolah tersebut tidak memiliki tenaga administrasi atau tata usaha, kepala sekolah pulalah yang harus menggantikan peran-peran tersebut.

Urusan teknis tidak mungkin bisa ditolak sebab ini menyangkut kepentingan operasional sekolah. Mulai dari hal-hal administratif hingga urusan keuangan dana Bantuan Operasional Sekolah, kepala sekolah tentu adalah penanggung jawab tertingginya. Belum lagi bila sekolah mendapatkan bantuan atau datang program baru, urusan kepala sekolah bisa lebih banyak lagi. Korbannya adalah kualitas, semakin sempit bagi kepala sekolah untuk menjalankan fungsinya sebagai pembimbing guru dan pemegang kontrol proses layanan. Sekolah sulit untuk meningkatkan mutunya ketika kepala sekolah banyak disibukkan dengan urusan teknis. Jalan pintasnya, fungsi bimbingan guru dan supervisi diserahkan saja kepada pengawas dari UPTD atau dinas pendidikan setempat, sedangkan fungsi kontrol cukup dilimpahkan saja kepada komite sekolah.

Merevitalisasi Kepemimpinan Sekolah Dasar

Menurut Makmal Pendidikan, berdasarkan temuan di lapangan selama tiga tahun tersebut, permasalahan utama sekolah dasar adalah pada aspek kualitas yang masih rendah. Bila masalah kualitas ini dikerucutkan pada satu kunci penentu, peningkatan kapasitas SDM kepala sekolah diharapkan bisa berimbas pada perbaikan kompetensi guru. Ketika kompetensi guru ini terpenuhi, kualitas sekolah dasar akan mudah



terurai. Untuk itulah perlu segera dilakukan reformasi sekolah dasar melalui program revitalisasi yang difokuskan pada pengelola sekolah. Bila hal ini diabaikan, kebijakan apa pun yang dibuat oleh pemerintah (seperti perubahan kurikulum dan standar nasional pendidikan), hasilnya diyakini tidak akan pernah berhasil memperbaiki kualitas sekolah.

Langkah strategis yang mula-mula perlu ditempuh dalam melakukan perbaikan terhadap SDM pengelola sekolah dasar adalah dengan membangun suprastruktur kepemimpinannya terlebih dahulu. Suprastruktur yang dimaksud adalah berupa paradigma kepemimpinan yang sesuai dengan kebutuhan perubahan di masa mendatang. Dalam hal ini perlu ada rumusan baru tentang konsep dan definisi kepemimpinan sekolah dasar. Rumusan inilah yang selanjutnya akan dijadikan sebagai pijakan dalam membentuk atau memilih siapa sosok yang tepat untuk memimpin suatu sekolah dasar.

Setelah paradigma kepemimpinan baru ini terbentuk, demi menghasilkan dampak perubahan yang lebih signifikan, berikutnya perlu ada beberapa langkah yang perlu diperhatikan oleh para pemangku jabatan strategis di bidang pendidikan, baik di pusat maupun daerah. Rekomendasi Makmal Pendidikan dalam hal ini antara lain seperti berikut:

Pertama, merevitalisasi kepemimpinan di sekolah-sekolah negeri melalui peremajaan kepala sekolah.

Bagaimanapun juga kunci kualitas sekolah terletak pada posisi ini. Caranya bukan dengan menggeser kepala sekolah yang didominasi generasi tua, melainkan dengan perputaran (*rolling up*) antarguru yang telah memenuhi untuk bergilir menjadi kepala sekolah berdasarkan prestasi dan kompetensi. Selagi kepala sekolah adalah jabatan fungsional (dan bukan struktural), sebetulnya cara ini tidak akan menimbulkan risiko yang besar dalam ranah birokrasi kepegawaian daerah. Guru yang terpilih sudah semestinya adalah orang berpengalaman dan berkompentensi di bidangnya dengan dibuktikan melalui serangkaian seleksi yang ketat. Seandainya pun cara ini tidak bisa dilakukan, harus dipastikan bahwa setiap kepala sekolah harus mendapatkan bimbingan intensif tentang tugas, fungsi, wewenang yang harus dia emban.



Kedua, merevitalisasi lembaga-lembaga atau kampus-kampus penghasil calon-calon tenaga pendidik.

Perlu ada pengkajian terhadap relevansi antara kampus-kampus keguruan dengan kebutuhan pendidikan di sekolah, berdasarkan tantangan, kebutuhan, serta karakteristik setiap daerah. Begitu pun dengan guru-guru yang sudah dalam jabatan sebagai pengajar, kampus-kampus keguruan perlu diajak dalam melakukan pembinaan yang serius terhadap pengembangan profesional. Terlebih lagi kampus-kampus pendidikan yang selama ini menangani Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) dan Pendidikan Profesi Guru (PPG). Ini bersifat mutlak mengingat kualitas guru menjadi penjamin atas kualitas layanan pendidikan di sekolah. Salah satu pengembangan profesional yang perlu dijadikan sebagai bekal guru adalah kemampuan manajemen sekolah sebab para guru sejak dini perlu disiapkan untuk menjadi calon-calon pemimpin sekolah.

Ketiga, pemerintah daerah perlu melakukan stimulasi-stimulasi yang mendorong agar seluruh kepala sekolah memiliki motivasi berprestasi dalam memajukan sekolah dasar yang dipimpinnya.

Pemberian stimulasi ini bisa berupa kompetisi atau penugasan di bidang manajemen pengelolaan sekolah. Tujuannya agar setiap kepala sekolah dilatih untuk mampu berpikir kreatif dalam mengembangkan terobosan-terobosan atau inovasi baru bagi sekolahnya. Bagi yang berprestasi tentu harus diberi penghargaan oleh pihak dinas pendidikan. Untuk program ini, sesungguhnya pemerintah bisa bekerja sama dengan korporasi-korporasi yang ada. Pemerintah daerah tidak harus mengeluarkan dana APBD yang besar.

Bila kita serius untuk melakukan perbaikan sistem sekolah dasar, sudah semestinya kita harus awali dengan keseriusan dalam memperbaiki SDM pengelolanya. Sebab sistem tidak bisa dilepaskan dari subjek yang mengoperasikannya. Perbaikan ini tentu menuntut waktu, usaha, serta energi yang tidak sedikit. Agar efektif, langkah-langkah revitalisasi kepemimpinan sekolah dasar ini harus disusun dalam skema yang terencana, komprehensif, serta bisa menghimpun sinergi dengan banyak sektor dan elemen perubahan.



Patut diingat, revitalisasi di sini bukanlah proyek, melainkan sebuah gerakan. Setiap elemen yang terhimpun dalam gerakan tidak mungkin bekerja sendiri-sendiri. Pemerintah, sebagai pemilik otoritas yang tertinggi, harus banyak belajar dari berbagai institusi, akademisi, praktisi, serta pegiat pendidikan yang memiliki banyak pengalaman lapangan di bidang pengembangan inovasi sekolah dasar. Perubahan akan berlangsung efektif bila setiap pihak mau membuka diri.

Pemerintah, baik pusat dan daerah, juga harus bergerak kompak, seiring sejalan, serta satu pedoman dalam proses revitalisasi kepemimpinan ini. Perlu juga dimunculkan partisipasi dari bawah agar kepala sekolah yang menjadi sasaran perbaikan akan merasa menjadi bagian dari gerakan perubahan, bukan sebagai objek suatu program yang berbasis proyek seperti pengalaman sebelumnya. Oleh karena itu, sudah saatnya kita mengajak para kepala sekolah dasar untuk keluar dari cakrawala kepemimpinannya yang selama ini lebih banyak terkungkung dalam tempurung besar yang disebut dengan birokrasi. Birokrasi sejatinya bukan penyekat, justru bisa menjadi infrastruktur agar revitalisasi semakin menguat. []



“Selama ini terpilihnya kepala sekolah dasar (negeri) masih cenderung melihat pada sisi senioritas, belum pada kompetensi yang dimiliki. Padahal, banyak guru-guru muda yang sesungguhnya memiliki potensi besar untuk dijadikan sebagai seorang manajer sekolah. Namun, kultur dalam birokrasi pendidikan kita masih terbentur pada kebiasaan lama yang cenderung menutup celah bagi golongan guru-guru muda yang lebih berkompetensi untuk memimpin guru-guru senior.”



Bab 7

Kurikulum Khas, dan Budaya Sekolah Dasar



Sumber: Dokumen Makmal Pendidikan

Dalam sebuah pertemuan ilmiah di sebuah kampus, berkumpul beberapa praktisi, pemerhati, dan pegiat pendidikan. Mereka banyak berbicara tentang konsep pengembangan sekolah yang sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masa depan. Di tengah suasana diskusi yang hangat, seorang pemerhati pendidikan yang juga dosen berkata di forum, “Bagi saya, mudah saja untuk membuat putra-putri saya memperoleh pendidikan yang terbaik. Cukup dengan *homeschooling*, maka mereka juga bisa mendapatkan layanan pendidikan langsung dari guru-guru yang terbaik. Tapi pilihan ini tidak saya tempuh, saya masih percaya dengan sekolah. Sebab setiap sekolah pasti memiliki budaya!”



Amat menarik kalimat terakhir yang dikatakan sang dosen: setiap sekolah pasti memiliki budaya. Sebuah pilihan dan putusan yang datang dari sosok yang pasti tahu pengertian dan hakikat sekolah dan pembelajaran sesungguhnya.

Wajah sekolah adalah wajah sebuah negeri. Rupa generasi belia di masa kini adalah pertanda nasib bangsa di masa depan. Keseriusan membenahi bidang pendidikan adalah cara efektif untuk menyelamatkan jalannya biduk sebuah negara. Oleh karena itu, dari sekolahlah simpul kemajuan Indonesia itu mulai dirajut. Dengan demikian, kita tidak boleh berhenti sekejap pun untuk membuat setiap anak bangsa kita bisa bersekolah. Agar mereka, kelak, bisa bertanggung jawab untuk meneruskan kerja dan berkarya untuk kemajuan Indonesia.

Sekolah-sekolah Indonesia sudah saatnya menghasilkan lulusan yang kompeten, berkarakter, transformatif, serta memiliki daya saing internasional. Kerja keras untuk membangun sekolah berkualitas tidak bisa lagi ditunda-tunda. Reformasi sekolah Indonesia harus tetap menjadi prioritas. Tidak boleh lagi kita berada dalam ketertinggalan. Masa depan perlu dibangun dengan sebuah visi besar. Sudah saatnya kita berpikir, sebagaimana orang-orang di masa depan itu berpikir. Itulah yang disebut dengan sekolah visioner. Howard Gardner (2007), penemu teori *multiple intelligent*, pernah berkata: "Pendidikan formal yang sekarang masih mempersiapkan siswa terutama untuk dunia masa lalu. Bukannya dunia-dunia yang mungkin muncul di masa depan, yakni dunia pikiran, seperti kata (Winston) Churchill."¹⁴⁴

Sayangnya, ribuan sekolah Indonesia pada hari ini adalah sekolah-sekolah zaman modern tapi masih dengan tata kelola tradisional. Beragam inovasi pendidikan berkelas dunia yang diasupkan oleh pemerintah melalui standar nasional pendidikan ternyata sebagian besarnya masih terasa mentah di lapangan. Kurikulum nasional yang sebagiannya telah mulai berorientasi pada standar-standar internasional umumnya masih sulit untuk dicerna. Peserta didik akan muntah-muntah bila dipaksa untuk mengunyah ini. Tuntutan kualitas belum bisa dibarengi dengan kesiapan infrastruktur yang dimiliki oleh sekolah.

144 *Five Minds for The Future: Lima Jenis Pikiran yang Penting di Masa Depan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.



Akses terhadap pendidikan adalah masalah besar yang masih harus diselesaikan terlebih dahulu. Dana triliunan rupiah telah dikeluarkan oleh pemerintah agar ketersediaan dan keterjangkauan pendidikan bisa dinikmati oleh seluruh warga hingga ke pelosok tanah air. Angka partisipasi untuk bersekolah pun semakin meningkat setiap tahunnya. Kerja keras tersebut mungkin bisa kita beri apresiasi. Namun masalahnya, perbaikan tidak mungkin berhenti di titik ini. Masih ada masalah kualitas dan relevansi yang harus segera dibenahi.

Dalam perspektif perbaikan mutu pendidikan, pertama yang mesti disoroti adalah pada revitalisasi fungsi lembaga sekolah itu sendiri. Fungsi sekolah bukan sekadar mengubah masukan (*input*) menjadi keluaran (*output*) yang sesuai dengan standar produk. Alur prosesnya tidak sesederhana organisasi perusahaan. Peserta didik di sekolah tidak mungkin disamakan dengan bahan mentah yang akan diproduksi menjadi bahan jadi. Setiap organisasi sekolah harus lebih memerhatikan aspek hasil (*outcome*) berupa kompetensi terintegrasi, serta dampak (*impact*) berkelanjutan yang harus ditimbulkan dari diluluskannya peserta didik.

Untuk menjadi negara modern, sekolah-sekolah Indonesia harus berkontribusi paling terdepan dalam pembentukan kelas menengah di dalam masyarakat. Ini adalah indikator negara maju dunia. Budaya negara maju berawal dari budaya sekolah yang maju pula.

Mengusahakan Sekolah yang 'Khas'

Sekolah dan masyarakat sesungguhnya harus disatukan dalam sinergi kemitraan yang berkelanjutan. Ketika dua elemen ini terpisahkan, manalah mungkin pendidikan akan mampu digerakkan hingga tiba pada tujuannya yang paling hakiki, yakni membentuk generasi yang paripurna dan seutuhnya. Tidaklah bijak rasanya bila tujuan tersebut hanya dibebankan pada domain institusi sekolah semata. Masyarakat sebagai kumpulan dari segala bentuk pranata sosial adalah tempaan yang sesungguhnya bagi semua peserta didik. Untuk itu, yang bakal dihadapi oleh peserta didik di lingkup masyarakat harus diinternalisasi terlebih dahulu di lingkup sekolah.

Namun, pada kenyataannya, sulit untuk kita pungkiri bahwa sekolah dasar kian ke mari sering tanpa sadar telah menceraubt anak dari



beberapa akar budaya yang sebelumnya tumbuh kuat dalam masyarakat dan lingkungannya. Hal ini kami temukan tidak hanya sekolah dasar yang terletak di beberapa kota besar, namun juga pada sekolah dasar yang berada di desa dan bahkan pelosok. Kurikulum nasional belum mampu disempurnakan agar selaras dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006 yang seharusnya bisa berbicara lebih banyak tentang unsur muatan lokal, ternyata pada ujungnya cuma menjadi eksperimen yang gagal. Sifat kontekstual yang semestinya bisa melekat dengan pendidikan, menjadi bias ketika diimplementasikan di dalam kelas.

Dengan adanya kebijakan untuk penerapan kurikulum nasional, sekolah di perdesaan semakin rentan dengan godaan penyeragaman model pendidikan yang hendak dimirip-miripkan dengan sekolah di perkotaan. Muncul penilaian bahwa dengan bersekolah, tuntutan hidup bagi anak ketika kelak dewasa justru malah menjadi kompleks dan bertumpuk. Kebersahajaan hidup di desa pun mulai bergeser. Setiap anak desa yang mengenyam bangku sekolah dipandang butuh sarana untuk mobilitas hidup yang lebih tinggi, lebih modern, dan lebih terhormat. Imbasnya, dorongan untuk urbanisasi pun menguat.

Ketidakmampuan desa untuk berhadapan dengan hingar-bingar kemajuan kota salah satunya diakibatkan oleh kelemahan sistem pendidikan yang ada di desa itu sendiri. Belum lagi masih adanya anggapan masyarakat tradisional yang negatif tentang pentingnya pendidikan sebagai sebuah aset berharga bagi masa depan anak dan wilayahnya. Sering kali pembelajaran di kelas banyak yang tidak sesuai dan tidak relevan dengan apa yang ada di tengah masyarakat. Banyak sekolah di perdesaan yang belum mampu dalam menjawab tantangan serta peluang dunia kerja yang ada di daerahnya. Biasanya muncul kecenderungan bila ada seorang anak desa yang terdidik ia akan enggan untuk bekerja di desanya, dan kemudian pergi untuk mencari pekerjaan yang lebih menjanjikan ke kota.

UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah menuntut pelaksanaan otonomi daerah dan wawasan demokrasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Hal ini berpengaruh pada sistem pendidikan nasional dari sentralisasi ke desentralisasi. Desentralisasi



penyelenggaraan pendidikan ini terwujud dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Salah satu substansi yang didesentralisasikan adalah kurikulum. Kurikulum tingkat satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah dikembangkan oleh sekolah dan komite sekolah berpedoman pada standar kompetensi lulusan dan standar isi serta panduan penyusunan kurikulum yang dibuat oleh Badan Standar Nasional Pendidikan. Untuk itu, sekolah dan komite sekolah harus mempersiapkannya karena sebagian besar kebijakan yang berkaitan dengan implementasi Standar Nasional Pendidikan dilaksanakan oleh sekolah dan komite sekolah. Dengan demikian, sekolah dan komite sekolah memiliki kewenangan yang luas untuk mengembangkan dan menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan kondisi peserta didik, keadaan sekolah, potensi dan kebutuhan daerah.

Sebetulnya sejak munculnya Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) 2004 dan dilanjutkan lagi dengan Kurikulum 2006 (KTSP), semua sekolah bisa mengembangkan pola pendidikan mandiri yang selaras dengan kondisi di lingkungan sekitarnya. Paradigma pendidikan lama yang tersentralisasi ke pusat semestinya sudah tidak berlaku lagi. Namun, di lapangan ternyata masih berlaku semacam keharusan bahwa pola pendidikan di perdesaan harus disamakan dengan pendidikan ala perkotaan. Hal ini membuktikan bahwa pemahaman terhadap paradigma baru yang terdapat pada kurikulum nasional sekarang belum bisa terserap luas ke berbagai daerah. *Stakeholder* pendidikan di daerah belum sepenuhnya mampu untuk merealisasikan ide baru ini. Inilah pokok kegagalan KBK 2004 dan KTSP 2006.

Di sisi lain, sekolah kota yang umumnya berada pada hubungan sosial yang lebih terbuka dan multietnis juga mengalami kebingungan ketika mendefinisikan tentang konsep kurikulum yang berbasis masyarakat. Sekolah-sekolah di kota pun mempunyai problem pembiasaan, bahkan mungkin jauh lebih kompleks spektrum biasanya. Sekolah di kota tentunya sangat sulit untuk berkolaborasi dengan budaya masyarakat yang cenderung individualistik. Keterlibatan orangtua, terlebih masyarakat, dalam urusan sekolah semakin memudar jauh. Aktivitas sekolah lebih terkesan formalistis, yang terpenting adalah hasil belajar siswa bisa lebih maksimal. Kebermaknaan dalam pembelajaran otomatis juga akan terus



membias karena muatan materi yang dipelajari anak di kelas sekadar untuk tahu. Segala kadar ketahuan tadilah yang menjadi penentu ketercapaian pembelajaran. Siswa akhirnya jadi sangat miskin pengalaman sehingga sukar untuk mengejar target kompetensi yang diharapkan.

Pengembangan kekhasan di bidang akademis bisa dilakukan dengan berbagai alternatif cara dan model. Cara yang paling sering dilakukan adalah dengan mengundang konsultan di bidang pengembangan pendidikan tertentu yang telah memiliki lisensi nasional bahkan internasional. Pengembangan pendidikan bisa difokuskan kepada metodologi pembelajaran, standar kompetensi alternatif (di luar menurut versi pemerintah), hingga optimalisasi kecerdasan siswa. Tentu ini berbiaya mahal. Sekolah negeri hampir tidak (akan) pernah menempuh pilihan ini sebab tidak mungkin sanggup untuk membayarnya.

Definisi kekhasan seperti ini akhirnya lebih banyak diterapkan pada sekolah-sekolah swasta sebagai daya penarik minat bagi calon orangtua siswa. Pilihan sebagian orangtua pun perlahan bergeser. Bagi mereka yang memiliki dana lebih, sekolah swasta alternatif kemudian dijadikan sebagai pilihan utama. Prinsip, lebih baik mengeluarkan kocek lebih demi memberikan sekolah yang terbaik bagi anak, dibandingkan harus memasukkan anaknya ke sekolah negeri yang relatif lebih murah tapi belum tentu memiliki jaminan kualitas yang berlisensi.

Namun, sekolah negeri tidak serta-merta patah arang begitu saja. Akreditasi atau status sekolah menjadi senjata baru yang ampuh. Bila dahulu sekolah swasta yang harus bersusah payah agar memperoleh status yang bisa 'disamakan' dengan sekolah-sekolah negeri, hari ini ribuan sekolah negeri yang justru lebih bersemangat dalam mengejar impian akreditasi terbaik. Sejak akhir dekade 1990-an memang telah muncul kebijakan baru dari pemerintah kala itu agar semua institusi pendidikan harus terukur kualitasnya melalui program akreditasi. Sekolah negeri pun harus ikut. Sisi positifnya, semua sekolah, baik negeri ataupun swasta, jadi memiliki peluang yang sama. Tidak mesti sekolah negeri bisa lebih unggul dari swasta, yang terjadi terkadang sebaliknya. Namun, kedekatan birokrasi sering kali lebih menguntungkan sekolah negeri pastinya lantaran tim *assesor* yang diterjunkan umumnya adalah pengawas yang sama-sama berstatus sebagai pegawai negeri sipil. Padahal, adanya



program akreditasi merupakan momentum bagi banyak sekolah negeri untuk berusaha menaikkan pamornya. Akreditasi tinggi tentu memiliki pamor tersendiri, tidak perlu lisensi keunggulan macam-macam.

Status sebagai Sekolah Berstandar Nasional ataupun (Rintisan) Sekolah Berstandar Internasional lalu jadi incaran baru. Hadirnya Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan menjadi pemicunya. Kedua status tersebut laksana panggung kehormatan bagi sekolah-sekolah negeri yang bisa meraihnya. Bila berhasil direngkuh, sekolah akan dapat promosi secara gratis. Klaim sebagai sekolah favorit bisa menjadi pemikat baru semua calon siswa peminat. Untunglah RSBI atau SBI kemudian digagalkan oleh Mahkamah Konstitusi pada 8 Januari 2013 karena dianggap bertentangan dengan UUD 1945 yang menolak segala diskriminasi termasuk pada bidang pendidikan.

Memang tepat kiranya bila akreditasi ini bisa dianggap sebagai satuan ukur yang bisa menilai keunggulan sebuah sekolah. Namun, yang pertanyaan adalah sudah validkah atau sudah jujurkah proses akreditasi tersebut dilakukan? Terlepas dari prosesnya tersebut, semua sekolah tentu telah bekerja keras demi mendapatkan nilai akreditasi yang terbaik. Model kekhasan sebuah sekolah pun lantas dianggap cukup dengan hanya mendapatkan status akreditasi yang tinggi. Logika sederhananya, dengan akreditasi yang baik, kualitas layanan pendidikan yang diselenggarakan oleh sekolah tersebut juga telah baik. Sepakat atau tidak, secara resmi delapan Standar Nasional Pendidikan merupakan jaminan mutunya.

Muncul pertanyaan, bagaimana sesungguhnya cara agar model kekhasan itu seharusnya dibentuk? Tentu baiknya bukan hanya dengan memenuhi semua Standar Nasional Pendidikan saja. Menurut hemat Makmal Pendidikan, akreditasi sekolah bukanlah sebuah kekhasan walaupun ia memiliki beberapa nilai keunggulan. Mari kita kembali ke awal tulisan bab ini bahwa kekhasan yang tepat adalah ketika sekolah mampu menemukan ide dalam pengembangan kualitas pendidikan yang sejatinya selaras dengan akar kebutuhan dan kondisi yang ada di masyarakat. Pelayanan sekolah, terutama dalam hal kualitas pembelajarannya, harus bisa bersinergi dengan masyarakat. Idealnya, dengan partisipasi masyarakat yang semakin baik, semakin efektif pula kekhasan tersebut dalam menunjang kualitas sebuah sekolah.



Perlu dicatat oleh setiap kita bahwa kekhasan sekolah secara pedagogis mempunyai peran dominan dalam membentuk setiap kecerdasan anak. Kecerdasan berarti suatu kemampuan seorang anak untuk bisa memecahkan setiap masalah dan bisa menghasilkan produk unggul bagi diri, dan lingkungan terdekatnya. Kekhasan yang tepat adalah ketika kekhasan tersebut bisa menguatkan kembali dimensi suprastruktur yang sebelumnya telah mulai hilang di masyarakat, seperti keguyuban, *tepo seliro* atau toleransi, gotong-royong, dan nilai-nilai positif lain yang bisa dibentuk di lingkungan sekolah.

Bisa dibilang bahwa kekhasan adalah sebuah revitalisasi terhadap setiap modal sosial yang selama ini hidup di masyarakat. Bentuk kekhasan tidak perlu sebuah metodologi baku dalam pendidikan, lisensi ilmiah, ataupun bahkan akreditasi. Cukup kekhasan ini dikembangkan pada pembiasaan terhadap nilai-nilai luhur dalam setiap aktivitas yang dikelola sekolah. Kekhasan ini harus hidup dalam setiap aktivitas pembelajaran anak, baik di luar ataupun di dalam kelas. Dari sini akan muncul istilah 'pembelajaran berbasis kekhasan lokal'.

Maka hendaknya harus dibuat titik temu agar sekolah dan masyarakat mampu bergerak beriringan. Dari titik inilah sekolah akan efektif meningkatkan layanan pendidikan yang tidak hanya berkualitas, namun juga bisa menjaga nilai-nilai keunggulan lokal yang selama ini hidup di masyarakat. Bila jalinan keduanya harmonis, peserta didik yang diluluskan kelak akan sanggup memainkan perannya sebagai individu yang paripurna sekaligus sebagai warga masyarakat yang bertanggung jawab.

Kurikulum yang Khas, Mungkinkah?

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) tampaknya tengah serius untuk menggolkan perubahan kurikulum pada 2013 ini. Di tengah kritikan pedas yang dilontarkan oleh para praktisi dan pakar pendidikan, kemunculan kurikulum baru malah semakin tidak bisa ditahan-tahan lagi. Alasannya sederhana, KTSP yang telah dimulai sejak 2006 disinyalir pemerintah telah gagal. Ruh KTSP sebagai kurikulum yang mengusung penegakan otonomi pendidikan dengan keberpihakannya kepada kondisi dan kebutuhan lokal daerah hasilnya amburadul. Me-



mang tak bisa dipungkiri lagi, hampir semua satuan pendidikan benar-benar tidak sanggup untuk membuat kurikulumnya sendiri.

Agar terkesan sudah ber-KTSP, banyak sekolah beramai-ramai mengumpulkan berbagai dokumen terkait dengan administrasi dan perencanaan pembelajaran. Bagaimana pun caranya, dokumen tersebut harus berhasil dibuat hingga menjadi sebuah bundel besar. Bila ada pemeriksaan atau penilaian akreditasi, bundel dokumen itulah yang akan ditunjukkan. Sekolah kadang tidak perlu kesulitan untuk menyediakannya sehingga guru-guru tidak perlu repot-repot membuat silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Dokumen KTSP bisa didapat dengan sangat mudah, mulai dari mengunduh dari internet, menyalin dari sekolah lain, hingga membeli dengan menggunakan dana BOS (Biaya Operasional Sekolah). Bahkan di beberapa daerah ada oknum-oknum dinas pendidikan yang sangat baik hati untuk menawarkan jasa penyediaan dokumen KTSP. Ini tentu tidak gratis. Kurikulum ternyata bisa jadi bisnis komersial!

Membuat kurikulum bukan perkara ringan bagi sekolah-sekolah kita. Diperkenalkannya setiap satuan pendidikan untuk mengembangkan kurikulumnya sendiri belum bisa dimanfaatkan sebagai sebuah kesempatan untuk berinovasi, tapi justru lebih dipandang sebagai sebuah beban. Sekolah yang sebelumnya berada di zona nyaman tiba-tiba dipaksa untuk bisa lebih inovatif, serta bisa lebih bekerja keras untuk menciptakan sendiri sistem layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan daerah dan karakteristik peserta didik. Pangkal persoalannya antara lain pada faktor kompetensi guru.

Berdasarkan Uji Kompetensi Guru (UKG) yang diselenggarakan pada 2012, nilai rata-rata nasional baru sampai pada angka 42,25. Tes ini hanya dikhususkan untuk guru-guru yang telah tersertifikasi saja. Artinya, guru-guru tersertifikasi yang semestinya secara formal sudah dianggap profesional, ternyata nilai rata-ratanya masih rendah. Lantas, bagaimanakah dengan kompetensi guru-guru yang belum tersertifikasi? Secara logika, hasilnya tentu tidak akan lebih baik dari guru-guru yang sudah tersertifikasi. Bila kondisinya seperti ini, manalah mungkin para guru bisa diberikan beban tambahan sebagai seorang desainer kurikulum bagi sekolahnya?



Hanya delapan provinsi yang guru-gurunya sudah berada di atas nilai rata-rata nasional. Delapan provinsi tersebut berada di wilayah Sumatera, Jawa dan Bali. Sedangkan wilayah Kalimantan, Sulawesi, dan daerah Indonesia Timur masih tertinggal. Ini menandakan bahwa persebaran tingkat kualitas pendidikan belum merata ke semua wilayah NKRI. Padahal, kompetensi guru ini merupakan prasyarat mutlak yang harus terlebih dahulu dipenuhi agar implementasi kurikulum bisa berjalan sesuai harapan sebab bagaimanapun juga para gurulah yang menjadi eksekutor lapangannya. Dengan pertimbangan ini, mengakhiri KTSP dan menggantinya dengan Kurikulum 2013 sepintas merupakan pilihan yang logis. Sungguh kasihan para guru bila dipaksa harus mengerjakan sesuatu yang belum sesuai dengan realitas kompetensinya. Namun, ini tidak berarti hadirnya Kurikulum 2013 menjadi jawaban tuntas dari persoalan kurikulum ini.

Tata Kelola Kurikulum Kita

Kurikulum bukanlah tujuan pendidikan, melainkan harus dipahami sebagai seperangkat alat untuk mencapai tujuan pendidikan itu sendiri. Kurikulum setidaknya harus memuat tiga elemen utama, yakni elemen filosofi, muatan isi, dan metodologi. Untuk membuat ketiga elemen itu berfungsi, dibutuhkanlah suatu strategi pengembangan. Kemdikbud menyebut strategi pengembangan ini dengan istilah “tata kelola pelaksanaan kurikulum”. Secara umum, strategi pengembangan kurikulum dibagi menjadi dua, yakni strategi mikro dan strategi makro.

Strategi mikro ini terkait dengan kesiapan sekolah dalam mengimplementasikan kurikulum di kelas-kelas ajarnya. Untuk memastikan sekolah siap dengan kurikulumnya diperlukan adanya pembinaan dan pengawasan di lapangan. Pengelolaan sekolah di Indonesia sampai saat ini masih menggunakan jalur birokrasi pemerintahan, baik yang bersifat struktural maupun fungsional. Peran Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan di tingkat kecamatan bersama para pengawasnya menjadi kunci penentunya. Di level inilah yang seharusnya bisa memastikan bahwa kurikulum telah dilaksanakan di semua sekolah, baik negeri maupun swasta.



Kendala lapangan yang biasanya dihadapi dalam implementasi strategi pengembangan kurikulum tidak lepas dari faktor birokrasi tersebut. Pihak dinas pendidikan inilah yang sesungguhnya paling menentukan efektivitas kurikulum di daerahnya, bukan lagi tergantung pemerintah pusat. Tapi, yang menyedihkan, cara pengelolaan kurikulum di banyak daerah lebih mirip dengan cara mengerjakan sebuah proyek. Padahal, kurikulum merupakan salah satu perangkat pendidikan yang berfungsi strategis dalam proses transformasi generasi. Artinya, strategi pengembangan kurikulum semestinya lebih memerhatikan aspek peserta didik, dan tentu juga aspek pendidiknya. Bila pendekatan birokrasinya salah, akibatnya kurikulum hanya sering jatuh menjadi sekadar dokumen administratif.

Adapun pada strategi makro, pemerintah harus lebih serius dalam pemenuhan kebutuhan infrastruktur pendidikan. Selain menyediakan fasilitas yang lengkap di semua sekolah, SDM pendidik juga harus dipenuhi hak-hak pengembangan profesionalnya. Memastikan kualitas 2,8 juta guru tentu menjadi persoalan besar bagi Indonesia. Selain membutuhkan dana yang sangat besar, proses ini pun akan memakan waktu yang sangat panjang. Tapi memang begitulah cara kerja sistem pendidikan, ia tidak bisa dibangun dalam waktu cuma semalam. Kerja keras yang konsisten dan terukur paling cepat baru bisa dirasakan sepuluh tahun mendatang. Negara seperti Finlandia, Singapura, dan Korea Selatan saja sekurang-kurangnya membutuhkan waktu 20 tahun untuk bisa menjadikan sistem pendidikannya itu bisa menjadi yang terunggul di dunia.

Sekali lagi perlu ditekankan bahwa kegagalan KTSP 2006 sepertinya bukan disebabkan oleh faktor kelemahan dari ketiga elemen utama yang ada di dalam kurikulum. Bukan pada elemen filosofi, muatan isi, ataupun metodologinya. Menurut Makmal Pendidikan, kegagalan KTSP tersebut lebih dipengaruhi oleh kesalahan dalam pilihan strategi pengembangan yang dipakai. Tata kelola pelaksanaan kurikulum belum berjalan efektif. Bagaimanapun juga, kurikulum ini membutuhkan strategi pengembangan yang tepat karena kurikulum berfungsi sebagai pedoman atau petunjuk tentang apa yang harus dicapai dalam proses pendidikan. Bila ada niat serius untuk memperbaiki kurikulum, tentu memperbaiki dahulu strategi pengembangannya. Tidak perlu ribut-ribut dulu untuk mempersoalkan masalah elemen filosofi, muatan isi, dan metodologinya.



Ketercapaian kurikulum seharusnya harus bisa diukur dari multi-perspektif. Selama ini pencapaian efektivitas kurikulum sering kali hanya dilihat dari hasil belajar siswa, contohnya seperti Ujian Nasional. Tata kelola pelaksanaan kurikulum yang terlebih dahulu harus diperbaiki justru kurang diperhatikan. Untuk itulah, perbaikan dalam strategi mikro maupun makro mesti dijadikan sebagai prioritas paling pertama ketika Kurikulum 2013 diberlakukan. Dengan demikian, alangkah baiknya kita menghentikan dulu perdebatan Kurikulum 2013. Jauh lebih produktif bila kita bersama-sama menengok hal-hal yang masih mesti dibenahi dalam rencana tata kelola pengelolaan kurikulum ini.

Mengembangkan Budaya Sekolah

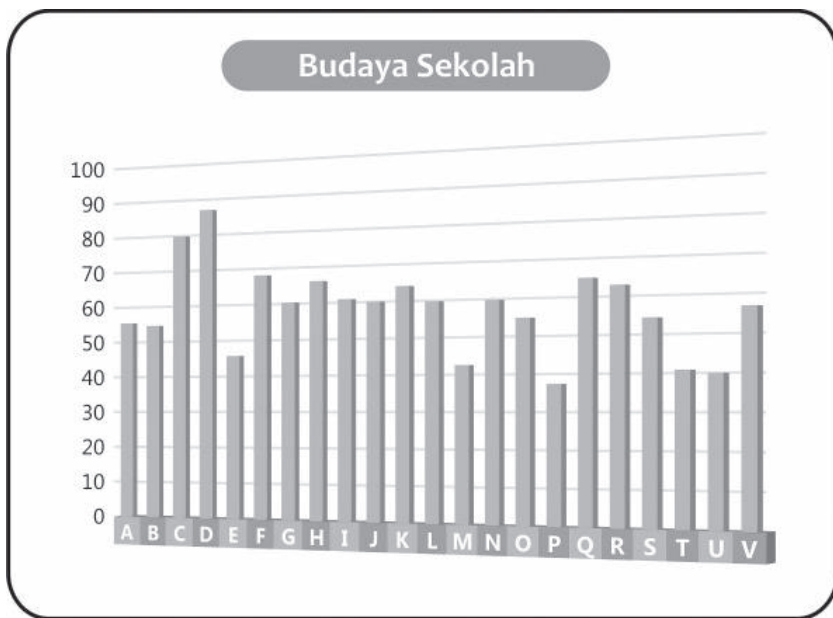
Karakter atau kepribadian anak dibentuk di fase usia sekolah dasar. Oleh karena itu, fungsi kurikulum di tingkatan pendidikan ini seharusnya dikuatkan dalam pembentukan karakter dasar anak. Bila tidak dilakukan, sangat sukar seorang anak untuk dibentuk kembali kepribadiannya pada usia remaja. Jadi, pembelajaran di sekolah dasar tidak hanya berkuat pada pemenuhan kompetensi tentang dasar-dasar pengetahuan (seperti literasi dan numerikal), namun juga pembiasaan perilaku hidup yang positif. Inilah yang kemudian disusun menjadi suatu sistem budaya sekolah.¹⁴⁵

Budaya sekolah dikembangkan berdasarkan konsep yang berisi atas nilai-nilai atau kaidah sosial yang diyakini mampu membangun sikap hidup bersama yang luhur dan mulia. Nilai-nilai inilah yang perlu dirumuskan sejak sekolah itu berdiri. Cara merumuskannya tentu harus pula disesuaikan dengan tujuan dan cita-cita yang ingin dicapai oleh sekolah. Agar nilai-nilai ini berlaku efektif, mesti ditopang pula oleh sistem aturan dan penegakan disiplin. Dua hal inilah yang dijadikan bahan survei Makmal Pendidikan dalam menemukan tingkat pencapaian budaya sekolah dasar. Yang tak kalah penting untuk disurvei adalah pengelolaan kebersihan sekolah. Survei dilakukan di 21 Kota/Kabupaten

145 Sayangnya, pendidikan bermutu berbasis karakter masih sedikit di Indonesia. Padahal, untuk membangun sekolah seperti ini, tidak membutuhkan persyaratan yang sulit. Pertama, tidak perlu fasilitas mewah. Kedua, guru yang berkualitas. Ketiga, kepemimpinan dari kepala sekolah. Lihat: <http://www.republika.co.id/berita/pendidikan/berita/10/10/13/139667-mendiknas-baru-193-sekolah-terapkan-pendidikan-berbasis-karakter>



di 14 provinsi. Sampel yang digunakan sebanyak 22 sekolah dasar negeri. Hasil survei dapat dilihat pada tabel di bawah ini.



Dari tabel di atas dapat jelas terlihat bahwa masih terdapat sekolah yang belum mampu mengembangkan budaya sekolah yang dinamis dan bermakna terhadap sistem pembelajaran di kelas. Masih Terdapat 10 atau 45,45 persen sekolah yang kurang atau belum begitu berhasil dalam membudayakan iklim sekolah dengan nilai-nilai terbaik. Setengah dari sekolah dasar yang disurvei sebetulnya juga masih belum memiliki budaya sekolah yang cukup mengakar, namun setidaknya sudah memenuhi standar minimal yang diharapkan.

Dari hasil survei ini dapatlah disimpulkan bahwa sebagian sekolah dasar yang diteliti sudah mendefinisikan beberapa nilai dan keyakinan ke dalam aktivitas keseharian sebagai akar pembentuk budaya sekolah. Bila kondisi semacam ini terus pertahankan, sekolah akan terdorong untuk memiliki performa yang matang dalam menghidupkan ruh sejati dari pendidikan, yakni membentuk manusia yang seutuhnya.

Pilihan yang bisa diambil dalam pengembangan kemitraan antara sekolah dan masyarakat di antaranya adalah dengan inisiasi model sekolah berbasis masyarakat. Sekolah Berbasis Masyarakat (*community-based*



school) adalah hasil modifikasi dan pengembangan dari konsep Pendidikan Berbasis Masyarakat (*community-based education*) dengan Manajemen Berbasis Sekolah (*community-based management*). Pendidikan Berbasis Masyarakat itu sendiri merupakan trilogi peran serta masyarakat, yaitu dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat. Pendidikan Berbasis Masyarakat merupakan salah satu dari desentralisasi pendidikan dan konsep otonomi daerah. Hal ini berarti peranan pemerintah akan dikurangi, dan memperbesar partisipasi masyarakat. Kedua hal ini harus berjalan secara simultan; inilah yang merupakan paradigma baru, yang menggantikan paradigma lama yang sentralistis.

Sekolah Berbasis Masyarakat merupakan pengelolaan sekolah dengan melibatkan partisipasi segenap masyarakat yang ada di sekitar lingkungan sekolah. Dalam hal ini suatu sekolah diberi otonomi luas untuk dapat menyelenggarakan pendidikan dan sistem pembelajaran yang sesuai dengan kondisi kebutuhan masyarakat di masa sekarang hingga masa mendatang. Materi pelajaran yang diberikan juga akan banyak dikaitkan prinsip-prinsip pembelajaran berbasis masyarakat (*community-based learning*) melalui pembelajaran yang bersifat pelayanan kepada masyarakat (*services learning*).

Disiplin dan Penegakan Nilai-Nilai di Sekolah

Penggunaan nilai (*value*) sebagai unsur dasar pembentuk budaya organisasi telah banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan atau korporasi bisnis. Kecenderungan ini sedang menjadi tren. Layanan produk dan jasa tidak hanya ditawarkan sebagai sesuatu yang bersifat komersial, namun juga memiliki nilai-nilai tertentu yang coba ditanamkan ke dalam benak konsumen. Artinya, bisnis hari ini tidak saja mengejar keuntungan materi, namun juga ingin membentuk kesetiaan konsumen agar bisa masuk ke dalam komunitas yang dilandasi nilai-nilai yang diinisiasi oleh perusahaan. Pembentuk kesatuan para konsumen bukan karena kesamaan dalam penggunaan produk, melainkan berupa selera kolektif dalam satu nilai yang sama-sama diusung. Nilai-nilai perusahaan kemudian tidak hanya berlaku di lingkup internal kerja mereka, namun juga disebarkan ke seluruh *stakeholder* terkait.



Jika korporasi bisnis saja berani secara masif menebarkan nilai-nilai yang dianutnya, sudah seharusnya sekolah sebagai institusi pendidikan harus lebih bekerja keras sebagai pusat dalam pengembangan nilai-nilai untuk masyarakat. Berdasarkan data yang ditemukan Makmal Pendidikan, setiap sekolah telah memiliki tatanan nilai tertentu yang diberlakukan sebagai sumber rujukan dalam penegakan kesadaran dan kedisiplinan. Misalkan dengan mencium tangan guru, ini berarti rasa penghormatan dari siswa terhadap guru sebagai pendidik dan juga sebagai orangtua di sekolah telah dikukuhkan sebagai bagian dari budaya sekolah. Hanya sayangnya norma-norma ini berlaku sebagai konvensi yang tidak tertulis di sekolah.

Penegakan aturan dan disiplin telah diterapkan di seluruh sekolah dengan tata cara yang berbeda. Permasalahan di beberapa sekolah utamanya justru bukan siswa, melainkan guru itu sendiri. Kurangnya keteladanan dari guru menjadi penghambat dalam proses internalisasi aturan dan prosedur. Padahal, proses ini merupakan prasarana sekolah untuk membentuk karakter siswa. Internalisasi tidak menjadi sempurna ketika tidak disertai dengan kesadaran. Gerakan disiplin dan penegakan aturan lebih dipengaruhi oleh faktor 'ketakutan' terhadap posisi guru, bukan dari bentukan sebuah kesadaran.

Bersih Hati, Bersih Sekolah

Salah satu nilai yang tampak paling bisa terlihat nyata adalah kebersihan. Bersih itu syarat mutlak dalam membangun fasilitas yang kondusif bagi sebuah sekolah. Kebersihan bukan sekadar konsep tentang sekolah bersih, namun juga cermin tentang sekolah berbudaya. Kebersihan harus menjadi nilai, bukan hanya dipandang sebagai hasil aktivitas rutin. Perubahan paradigma ini tampaknya masih menjadi problem di banyak sekolah yang disurvei. Kebersihan semestinya sudah menjadi budaya di sekolah, dan harus menjadi budaya setiap orang yang ada di sekolah, tanpa pengecualian. Bahkan tamu pun akan dipaksa langsung menjadi pelaku kebersihan ketika sedang berkunjung di sekolah tersebut. Bagaimana fakta di lapangan? Dalam pengamatan penyurvei kami, asa seperti ini hampir jarang sekali terjadi.



Lagi-lagi soal kesadaran yang belum muncul. Sekali lagi, kesadaran hanya muncul bila ditopang dengan keteladanan. Selama ini target yang ada adalah menjaga lingkungan sekolah yang bersih, bukan membudayakan sikap hidup bersih oleh semua warga sekolah. Tak banyak ditemui guru-guru yang memiliki fokus pada penegakan pembiasaan hidup bersih. Guru fungsinya utamanya untuk mengajar, sedangkan kebersihan adalah ranah penjaga sekolah. Titik paling kotor di sekolah terletak pada halaman belakang sekolah yang biasanya dijadikan sebagai tempat pembuangan sampah akhir. Semua sampah akan dibuang ke lokasi itu tanpa ada olahan akhir yang tepat, selain dimusnahkan dengan cara dibakar. Sering kali ketika tidak kunjung dibakar, sampah yang membusuk itu akan terus menggunung dan sumber penyakit pun menjadi ancaman di depan mata.

Titik kedua adalah kebersihan kamar mandi. Ini juga problem yang belum tuntas. Kesadaran menggunakan kamar mandi sebagai keperluan kolektif masih sangat kurang. Terlebih bila diperparah lagi dengan ketersediaan air bersih yang terbatas, toilet akan semakin ditinggalkan karena sudah tak layak dipakai. Akibatnya, banyak siswa (terutama laki-laki) yang lebih senang buang air kecil di belakang sekolah. Sekolah semakin tidak sehat dan tidak nyaman untuk disebut sebagai wiyata pendidikan.

Rata-rata 60 persen hingga 80 persen kebersihan areal sekolah dianggap menjadi tanggung jawab dari penjaga sekolah. Gaji penjaga sekolah sendiri sesungguhnya kurang layak dibandingkan angka UMR atau UMP. Tapi, sekolah tak mungkin melepaskan posisi penjaga sekolah ini. Ketergantungan sekolah terhadap kebutuhan penjaga menjadi sangat tinggi. Bila penjaganya rajin, sekolah akan bersih, namun bila penjaganya malas, kebersihan sekolah juga bermasalah. Repotnya lagi bila sekolah tidak sanggup membayar gaji penjaga sekolah karena kurangnya dana BOS, kondisi kebersihan sekolah semakin tidak karuan.

Areal sekolah yang tidak bisa dijaga kebersihannya oleh sang penjaga biasanya menjadi tugas piket kebersihan dari kelompok-kelompok siswa secara bergiliran. Kebijakan ini tentu positif, namun kita tidak bisa berharap akan optimal kebersihannya. Untuk itulah dibutuhkan peran guru dalam memimpin operasi kebersihan sekolah. Guru harus menjadi



tokoh teladan kebersihan. Yang tampak dalam observasi, guru ternyata lebih banyak memerankan sebagai pimpinan atau mandor, bukan sebagai pemimpin. Walaupun di beberapa sekolah, guru juga memiliki tanggung jawab atas kebersihan beberapa ruangan sekolah, sayangnya sangat sedikit contoh yang didapati. Padahal, akan lebih bermakna bila semua elemen, mulai dari kepala sekolah hingga peserta didik, bersama-sama memiliki tanggung jawab dalam membudayakan nilai-nilai kebersihan semua sudut sekolah.

Visi Sekolah Indonesia 2020

Pendidikan adalah ruang kerja yang berdimensi waktu dengan masa mendatang yang panjang. Masa depan tidak boleh ditunggu, dan bukan bagaimana nanti. Masa depan adalah apa yang kita pikirkan dan kita rencanakan pada hari ini. Perubahan pada sistem dan tata kelola pendidikan sekali lagi harus datang sebagai skenario yang telah matang dirumuskan. Inilah prasyarat menjadi bangsa pemenang di pentas globalisasi dunia yang baru, tanpa sekat, seakan semua entitas negara adalah dekat. Untuk itu, semua langkah yang kita kerjakan adalah tahapan gerak menuju sebuah visi besar. Visi inilah yang menyatukan semua titik-titik perubahan yang disebut dengan sekolah.

Semua sekolah mesti bergerak bersama kepada satu visi bersama yang hendak dicapai pada 2020, yakni mengubah ribuan sekolah Indonesia dari model-model pendidikan tradisional menjadi sekolah bermutu internasional berbasis kekuatan lokal. Etos budaya universal harus bisa bersatu dengan nilai-nilai kearifan lokal di sekolah-sekolah kita. Indonesia membutuhkan sekolah-sekolah dasar yang memiliki budaya akademis yang cocok dengan kebutuhan dunia ke depan. Visi 2020 ini mengajak semua sekolah untuk mereformasi diri dalam menghadapi perubahan dunia yang lebih kompleks dan kompetitif. Pada tahun 2020 kelak kita juga ingin melihat bahwa 202 dari 2020 sekolah terbaik dunia (pasti) akan ada di Indonesia.

Untuk mewujudkan visi di atas tentu akan banyak prasyarat yang sebelumnya harus dipenuhi. Berdasarkan survei Makmal Pendidikan, ada beberapa prasyarat utama yang perlu dijadikan sebagai indikator utama pencapaian visi sekolah Indonesia 2020. Beberapa prasyarat tersebut antara lain adalah:



1. Perlu adanya konsep yang jelas tentang distribusi tata kelola pendidikan di era otonomi pendidikan. Desentralisasi tidak boleh menjadi kemunduran pendidikan dan sekolah di Indonesia. Harus dicari titik temu antara kewenangan pemerintah pusat dalam pengelolaan pendidikan dengan kapasitas pemerintah daerah yang masih terbatas. Visi tidak mungkin terhampiri bila sinergi pusat dan daerah belum disepakati.
2. Sebagai pemilik potongan roti terbesar dalam pendidikan, birokrasi pendidikan juga perlu direformasi. Birokrasi pendidikan di level lokal harus didorong untuk bisa mengubah pendekatan yang lebih progresif. Jangan lagi hubungan sekolah dengan birokrasi lebih diarahkan pada kerja-kerja administrasi. Birokrasi pendidikan daerah, yang dalam hal ini diwakili oleh para pengawas sekolah dari dinas pendidikan setempat, harus lebih serius dalam membangun sistem dan budaya sekolah dasar yang modern, namun tetap bisa menampilkan kekhasan nilai-nilai kekhasan lokal.

Visi 2020 barangkali banyak dianggap seperti mimpi di alam khayali. Mimpi dengan visi mungkin dua frase yang sulit untuk diiris. Namun, batas mimpi dengan visi bisa dibedakan melalui kemauan untuk bekerja keras. Oleh karena itu, untuk dapat mewujudkannya, perbaikan sekolah di negeri ini butuh para pekerja keras. Ribuan kepala sekolah, beserta ratusan ribu guru dan praktisi harus dipersatukan dalam proyek besar ini, termasuk menjalankan dua prasyarat tadi. Bila dua prasyarat di atas bisa dibenahi, gerak laju pendidikan akan semakin akseleratif dalam menyikapi perubahan sosial yang terjadi di masyarakat dan dunia.

Sungguh, hanya di tangan para pekerja keraslah mimpi-mimpi pendidikan Indonesia yang lebih baik di masa depan bisa menjadi kenyataan. []



“Kekhasan adalah sebuah revitalisasi terhadap setiap modal sosial yang selama ini hidup di masyarakat. Bentuk kekhasan tidak perlu sebuah metodologi baku dalam pendidikan, lisensi ilmiah, ataupun bahkan akreditasi. Cukup kekhasan ini dikembangkan pada pembiasaan terhadap nilai-nilai luhur dalam setiap aktivitas yang dikelola sekolah. Kekhasan ini harus hidup dalam setiap aktivitas pembelajaran anak, baik di luar ataupun di dalam kelas. Dari sini akan muncul istilah ‘pembelajaran berbasis kekhasan lokal’.”



Bab 8

Agar Sekolah Dasar Tak Lagi Salah Ajar



Sumber: Dokumen Makmal Pendidikan

Sebut saja namanya Bolang. Badannya gemuk besar, berusia sekitar 10 tahun. Kesehariannya hanya bermain, benar-benar hanya bermain, tidak ada aktivitas yang lain. Ada teman atau tidak, ia akan tetap bermain sekehendak hatinya. Ketika teman-teman yang lain di pagi hari dengan riang berangkat ke sekolah, ia justru asyik dengan dunianya sendiri, bermain.

Bolang sesungguhnya tidak jauh berbeda dengan anak-anak Indonesia yang lain, hanya ia enggan untuk bersekolah. Sekolah jadi tempat yang tidak lagi asyik untuk bermain. Apalagi kalau gurunya cuma mengajak belajar saja di dalam kelas, Bolang akan kepayahan. Walaupun begitu, ia juga punya cita-cita tentang masa depannya kelak. Suatu waktu



pernah ia ditanya oleh seorang ibu kader PKK di lingkungan RT tempatnya tinggal, “Apa cita-citamu Nak?” Dengan enteng, Bolang pun menjawab, “Saya mau jadi pengamen, eh bukan, mau jadi pemulung saja.”

Dunia anak adalah dunia bermain dan penuh dengan alam khayalan. Mereka senang mengeksplorasi sesuatu yang baru dan menantang. Ruang belajar mereka tidak hanya buku, tapi juga alam sekitarnya. Belajar bagi mereka menemukan sesuatu yang tidak pernah mereka temui sebelumnya. Namun sayangnya, sekolah-sekolah dasar yang mereka temui sering kali menutup area jelajah bermain mereka. Kelas-kelas yang ada seperti penjara karena penuh aturan yang ketat. Pendekatan pembelajaran terlalu serius, dengan guru sebagai pusat edar segala aktivitas di kelas. Siswa Indonesia tidak terdidik untuk menjadi generasi mandiri, yang bisa memecahkan masalahnya sendiri.

Sekolah dasar merupakan fase pendidikan terpenting bagi kehidupan setiap generasi. Pada usia inilah dasar-dasar intelektual dan kematangan pribadi dibentuk. Setiap anak pada masa sekolah dasar ini akan ditempa menjadi logam yang keras. Bila proses pelogamannya sempurna, anak tersebut kelak akan tumbuh dan berkembang mengeras menjadi orang dewasa yang paripurna. Begitu pun sebaliknya, bila anak dididik melalui muatan dan metode yang salah di jenjang ini, untuk menyempurnakannya lagi pada usia dewasa tentu menjadi sangat sulit. Dengan pemahaman ini seharusnya sekolah dasar harus tetap menjadi fokus perhatian para pengelola, praktisi, pakar, pemegang kebijakan, dan semua *stakeholders* pendidikan.

Sayangnya, pengembangan pembelajaran sekolah dasar di negeri ini bergerak lambat, tanpa terlalu banyak inovasi. Walaupun otonomi daerah dan otonomi pendidikan sudah digulirkan, model pengembangan pembelajaran di sekolah dasar masih cenderung monoton. Hal tersebut merupakan indikator yang menunjukkan bahwa sebagian besar sekolah dasar kita belum siap menghadapi konsekuensi dari semangat desentralisasi pendidikan. Banyak sekolah dasar di Indonesia yang masih saja jalan di tempat walaupun kita sudah terlampau sering mengalami gonta-ganti kurikulum. Sebagian besar guru justru malah merasa kebalahan melayani perubahan kurikulum yang biasanya menuntut pada perbaikan total dalam konsep perencanaan pembelajaran di kelas.



Pasca-Reformasi, yang kemudian melahirkan semangat otonomi pendidikan, membuat sebagian besar kita berharap akan datangnya era baru yang lebih baik. Ketika kebijakan pendidikan, termasuk urusan pengembangan kurikulum, didesentralisasikan ke tingkat daerah bahkan hingga ke tingkat satuan pendidikan atau sekolah, dinilai akan membuat sekolah dan guru menjadi lebih berdaya untuk meningkatkan optimalisasi layanan pembelajaran yang berkualitas bagi peserta didik. Namun, pada kenyataannya, sebagian besar sekolah masih belum bisa mengembangkan kekhasannya sendiri.

Perubahan kurikulum selama ini tidak serta-merta dapat mengubah wajah pendidikan menjadi lebih baik. Dalam sepuluh tahun terakhir, setidaknya telah tiga kali kurikulum kita diubah.¹⁴⁶ Ini belum termasuk perubahan dalam prosedur, perangkat-perangkat kurikulum, berikut suplemen-suplemennya. Yang terjadi kemudian malah kebingungan, dan pihak yang paling dibingungkan tentu adalah guru. Pembelajaran tetap saja masih pakai model yang itu-itu saja. Kurikulum terdahulu saja belum tampak hasil panennya, tiba-tiba muncul kebijakan yang memunculkan kurikulum baru.

Wajah Pembelajaran di Sekolah Dasar

Salah satu masalah terbesar dalam mengembangkan sekolah dasar adalah pada belum tercapainya kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan standar proses yang ditetapkan oleh pemerintah. Cara pengajaran di banyak sekolah dasar pada hari ini masih menyerupai kegiatan belajar-mengajar pada beberapa dekade yang silam, yakni guru masih menjadi sumber belajar yang utama bagi siswa. Perubahan zaman yang sangat dahsyat dalam bidang teknologi informasi juga belum bisa diterapkan di sekolah-sekolah. Cara mengajar guru juga masih konvensional.

Perubahan paradigma pembelajaran yang sering digalakkan oleh banyak pakar pendidikan, juga belum pernah terjadi. Sekolah-sekolah dasar masih banyak menganut paradigma pengajaran lama. Hal ini mungkin wajar saja karena sebagian besar guru adalah keluaran Sekolah Pendidikan Guru (SPG) yang telah dibubarkan pada awal tahun 1990-

146 Yakni Kurikulum 2004 (Kurikulum Berbasis Kompetensi), Kurikulum 2006 (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan), dan Kurikulum 2013.



an, sedangkan paradigma pembelajaran yang dikembangkan dalam kurikulum SPG tidak sama dengan tuntutan paradigma pembelajaran yang baru. Terjadilah semacam kesenjangan kompetensi antargenerasi.

Dalam perjalanan sejarah pendidikan nasional, SPG ini mungkin institusi paling fenomenal yang lulusan-lulusannya kini mayoritas menjabat kepala sekolah-sekolah dasar negeri di Indonesia. Birokrat-birokrat karier di hampir semua dinas pendidikan daerah kemungkinan juga alumni SPG. Ketika paradigma pembelajaran baru yang banyak berasal dari Amerika Serikat masuk ke Indonesia pada awal abad ke-21, ratusan ribu guru SD, termasuk juga pengawas dan pejabat dinas, jelas tidak siap untuk mengimplementasikannya di sekolah-sekolah.

Salah satu paradigma pembelajaran baru yang banyak dikembangkan di Indonesia saat ini adalah konsep pembelajaran aktif. Konsep inilah yang belum banyak dipahami, bahkan justru banyak disalahartikan oleh para guru SD. Namun, siap atau tidak, pembelajaran aktif ini telah menjadi tuntutan yang secara yuridis ‘memaksa’ para guru untuk bisa menerapkannya. Setiap peserta didik harus diposisikan sebagai subjek, bukan lagi objek ketika berhadapan dengan guru dalam pembelajaran di kelas.

Istilah ‘pembelajaran aktif’ sebetulnya bukan barang baru untuk sekolah-sekolah dasar di Indonesia. Kita tentu masih ingat dengan istilah CBSA (Cara Belajar Siswa Aktif) yang mulai dikenalkan di akhir era 1980-an. Jadi, sesungguhnya benih-benih paradigma pembelajaran aktif, terutama di sekolah dasar, telah muncul sejak awal. Sayangnya, metodologi CBSA belum bisa dirumuskan dalam konsep yang lebih praktis untuk pelaksanaan di kelas-kelas.

Pembelajaran aktif merupakan ruh dari kegiatan belajar-mengajar yang harus dihidupkan di setiap kelas ajar pada hari ini. Pendekatan yang dipakai adalah interaksi kegiatan belajar-mengajar yang berpusat pada siswa melalui penerapan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Menurut Mel Silberman (1996), belajar membutuhkan segenap keterlibatan mental dan tindakan pelajar itu sendiri.¹⁴⁷ Lalu muncullah istilah baru yang kemudian menjadi tren di sekolah, yakni PAKEM atau PAIKEM,

147 *Active Learning: 101 Strategies to Teach Any Subject*. Jakarta: Yappendis.



singkatan dari Pembelajaran Aktif, Kreatif, Inovatif, Efektif, dan Menyenangkan. Inilah model penerapan *active learning* cara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Melalui PAIKEM, Kelas-kelas ajar harus dirancang dinamis dengan variasi metode mengajar yang mesti berganti-ganti setiap harinya. Suasana mengajar juga diharapkan penuh keceriaan dan canda karena intinya belajar itu harus benar-benar menyenangkan. *Learning is fun*, itu prinsip dasarnya.

Sayangnya, berdasarkan temuan Makmal Pendidikan Dompot Dhuafa di lapangan, tidak semua guru dapat merealisasikan ide ini. Wacana PAIKEM ini tidak mudah untuk dilaksanakan bagi guru-guru yang tidak lagi punya waktu dan tidak punya niat untuk program pengembangan diri seperti dengan cara membaca buku atau pun ikut berbagai pelatihan. Paling-paling yang muncul di kelas semenjak digalakkannya PAIKEM ini adalah yel-yel penyemangat, *games* atau permainan, dan bernyanyi-nyanyi bersama. Yang penting siswa terlihat aktif dan merasa senang hingga PAIKEM pun dianggap telah berkembang. Tapi, apakah ketika ruh PAIKEM telah bertebaran maka akan menjamin pembelajaran dapat tercapai secara efektif? Apakah hasil belajar siswa juga dapat meningkat setelah dilaksanakannya PAIKEM di kelas?

Banyak yang menganggap bahwa menyenangkan dalam pembelajaran identik dengan suasana kelas yang penuh kegembiraan para siswa disertai yel-yel, menyanyi, dan tertawa-tawa. Dalam temuan lapangan Makmal Pendidikan, anggapan ini memengaruhi perspektif guru dalam mengajar di kelas. Para guru berpikir bahwa mereka sudah mengajar sesuai tuntutan PAIKEM. Sisi menyenangkan selalu ditekankan, sedangkan sisi efektivitas yang lebih utama justru diabaikan. Padahal, menyenangkan dalam konsep PAIKEM lebih dimaksudkan sebagai proses pembelajaran yang bermakna dan mampu membangkitkan motivasi intrinsik siswa agar tertantang dalam mengejar ketuntasan kompetensi.

PAIKEM dapat didefinisikan sebagai pendekatan mengajar (*approach to teaching*) yang digunakan bersama metode tertentu dan pelbagai media pengajaran yang disertai penataan lingkungan sedemikian rupa agar proses pembelajaran menjadi aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Guru sejatinya adalah seorang pendidik kreatif yang



semestinya mampu mengaitkan materi ajar dengan suasana pembelajaran yang kontekstual. Suasana yang kontekstual akan membuat materi ajar tersebut penuh dengan kebermaknaan. Kebermaknaan inilah yang akan mendorong pembelajaran menjadi lebih efektif dan menyenangkan. Dengan demikian, para siswa merasa tertarik dan mudah menyerap pengetahuan dan keterampilan yang diajarkan. Berikut ini karakteristik dalam PAIKEM:

- a. Berpusat pada siswa (*student-centered*);
- b. Belajar yang menyenangkan (*joyfull learning*);
- c. Belajar yang berorientasi pada tercapainya kemampuan tertentu (*competency-based learning*);
- d. Belajar secara tuntas (*mastery learning*);
- e. Belajar secara berkesinambungan (*continuous learning*);
- f. Belajar sesuai dengan kekinian dan kedisinian (*contextual learning*).

Indikator paling otentik bahwa sebuah sekolah dasar telah melaksanakan pembelajaran aktif adalah adanya Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Namun, RPP yang ada di sekolah biasanya masih sebatas perlengkapan administrasi saja. Padahal, kemampuan membuat RPP merupakan hal yang harus dimiliki oleh seorang guru sebagai prasyarat utama dalam pelaksanaan PAIKEM. Sayangnya, beberapa guru yang ditemui dalam penelitian Makmal Pendidikan masih ada yang mengaku kesulitan untuk membuat RPP sendiri. Guru yang sudah membuat RPP pun masih ada yang mengadopsi dari RPP yang ada, baik itu dari internet, buku paket, buku terbitan percetakan, maupun yang berasal dari dinas. Seharusnya guru-guru mampu membuat RPP sendiri, bukan sekadar mengadopsi dari RPP yang sudah ada. Untuk menguji bahwa RPP telah memenuhi kriteria dan indikator konsep pembelajaran aktif, bisa dilihat dari tabel di bawah ini.



No.	Kriteria	Indikator
1	Indikator dan Tujuan Pembelajaran	Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar (SK-KD) dikembangkan menjadi (minimal) tiga indikator secara relevan
		Susunan kalimat indikator dan tujuan pembelajaran sesuai kaidah, dengan menggunakan kata kerja operasional yang tepat
2	Materi Pembelajaran	Materi ajar dirumuskan secara tepat dan relevan dengan tujuan pembelajaran
		Terdapat uraian tentang inti konten materi pembelajaran
3	Metode Pembelajaran	Memuat sedikitnya empat metode pembelajaran
4	Langkah-Langkah Pembelajaran	Langkah-langkah pembelajaran relevan dengan tujuan pembelajaran
		Dalam kegiatan inti, terdapat proses eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi
		Memuat alokasi penggunaan waktu secara detail
		Terdapat minimal lima pola interaksi antara guru, siswa, dan sumber belajar
		Terdapat optimalisasi terhadap minimal tiga indra siswa
		Memfasilitasi aktivitas pengembangan literasi (baca, tulis) dan komunikasi
5	Penilaian	Penilaian relevan dengan tujuan pembelajaran
		Menggunakan teknik penilaian berbasis kelas (proses) lengkap dengan rubriknya
		Memuat uraian soal berikut kunci jawabannya
6	Sumber dan Media Belajar	Menggunakan sedikitnya dua buku paket atau referensi
		Terdapat minimal satu media belajar yang aplikatif
		Menjadikan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar
		Guru dapat membuat media pembelajaran sendiri yang kreatif

Sekolah Dasar, Sekolah Literasi

Sekolah Cerdas Literasi adalah program yang dikembangkan untuk jenjang sekolah dasar dalam menunjang optimalisasi pembelajaran di kelas-kelas. Literasi adalah kemampuan terintegrasi dalam hal baca-tulis, atau bisa juga diartikan bahwa literasi adalah suatu budaya baca-tulis.



Bisa disimpulkan bahwa Sekolah Cerdas Literasi adalah model institusi sekolah yang mengembangkan budaya baca dan tulis dalam setiap aktivitas yang dilakukan.

Literasi adalah kunci segala ilmu pengetahuan. Semakin baik tingkat literasi, akan semakin baik pula tingkat daya serap peserta didik di kelas dalam mengeksplorasi ilmu pengetahuan. Anak yang memiliki kecerdasan literasi, tidak hanya memiliki kemampuan intelektual semata, namun juga memiliki integritas dan terbangun kesadaran terhadap masyarakat dan alam sekitar. Jadi, literasi menopang kemampuan kognitif sekaligus berperan dalam membentuk karakter anak.

Program Sekolah Cerdas Literasi tentunya akan terus berlanjut dan berkembang karena didukung oleh payung hukum yang jelas dan merupakan implementasi dari tujuan pendidikan nasional. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ditegaskan bahwa kurikulum tingkat sekolah dasar atau pendidikan yang sederajat menekankan pentingnya kemampuan dan kegemaran membaca dan menulis, kecakapan berhitung, serta kemampuan berkomunikasi. Bisa disimpulkan bahwa sekolah dasar mengemban peranan dalam menguatkan aspek-aspek dasar kompetensi literasi yang menjadi kunci pembuka bagi pengembangan keterampilan tingkat lanjut. Di fase inilah setiap peserta didik usia 6-7 hingga 12 tahun harus menerima layanan pendidikan terbaik yang mendorong proses pematangan secara fisik, psikologis, dan kepribadian.

Secara kelembagaan, penerapan literasi akan membentuk lingkungan belajar yang efektif dan menyenangkan. Pembiasaan belajar berbasis literasi akan semakin efektif bila diterapkan pada semua mata pelajaran mengingat literasi merupakan keterampilan yang bersifat interdisipliner. Kemampuan dan hasil belajar peserta didik juga akan semakin optimal bila budaya literasi ini dikembangkan terus-menerus. Inovasi pembelajaran berbasis literasi yang dikembangkan secara kreatif membuka peluang bagi sekolah untuk menjadi pusat belajar bagi masyarakat sekitar. Informasi pengetahuan yang bersifat aplikatif dan bermanfaat bagi masyarakat akan semakin mudah untuk diakses oleh publik secara luas. Dari titik inilah akan terdorong penguatan partisipasi masyarakat terhadap sektor pendidikan. Sekolah pun akan



mampu meningkatkan perannya sebagai katalisator perubahan sosial di masyarakat menuju kualitas hidup yang lebih baik.¹⁴⁸

Kompetensi Pendidik Sekolah Dasar

Unsur kekuatan terbesar dari seorang guru yang paling dominan pengaruhnya kepada anak-anak didiknya adalah keteladanan. Keteladanan merupakan energi positif yang paling ampuh untuk menginfiltrasi motivasi intrinsik siswa agar menjadi pribadi pembelajar dengan diselimuti oleh sekumpulan akhlak terpuji. Di banyak desa di belahan bumi Nusantara ini, banyak guru yang sesungguhnya belum memiliki kapasitas keilmuan yang mumpuni untuk bisa dipakai sebagai modal dasar pengajaran. Namun, ini bukan berarti guru-guru pelosok itu tidak becus dalam membentuk para siswanya menjadi generasi baru bangsa yang cerdas dan berkompotensi di bidang keilmuan.

Keteladanan akan menjadi mozaik-mozaik indah yang bisa menutupi minimnya kompetensi kognitif dari seorang guru. Tidak heran apabila kemudian banyak orang-orang berpengaruh di negeri ini justru berasal dari sekolah-sekolah desa yang kualifikasi guru-gurunya masih jauh di bawah standar sekolah-sekolah internasional yang berjamuran di kota-kota besar sekarang ini.

Guru yang bisa menanamkan nilai-nilai keteladanan bagi segenap peserta didiknya adalah pendidik yang memiliki kecerdasan emosional dan spiritual yang telah matang. Salah satu cara yang sangat efektif untuk meningkatkan kadar kecerdasan emosional dan spiritualnya tersebut adalah dengan melatih kepekaan diri kepada orang lain, terutama kepada murid-murid ajarnya. Kepekaan diri inilah yang mampu mendorong seorang individu guru tidak hanya memiliki rasa kepedulian, tetapi juga prasangka atau persepsi yang positif. Akan lebih 'dahsyat' lagi apabila guru mampu mengolah persepsi positif ini menjadi sebuah persepsi kreatif.

Dalam paradigma konstruksivis yang dianut oleh kurikulum pendidikan kita dewasa ini, siswa tidak lagi diposisikan sebagai objek dalam

148 Pengalaman Makmal Pendidikan Dompot Dhuafa menjalankan program Sekolah Cerdas Literasi bisa dilihat dalam Agung Pardini, dkk., *Bangunlah Jiwanya, Bangunlah Raganya: Merawat Indonesia dengan Sekolah Cerdas Literasi*, (buku 2 jilid).



pembelajaran, tetapi ditempatkan sebagai subjek pembelajaran yang aktif. Peserta didik bukan lagi dianalogikan seperti gelas kosong yang masih hampa pengetahuan dan tugas guru adalah tinggal mengisinya dengan beragam ilmu. Anak sesungguhnya telah memiliki potensi, bakat, dan pengetahuan awal yang harus terus difasilitasi oleh guru agar bisa bangkit dan semakin berkembang mekar. Guru dapat memfasilitasi peserta didiknya dengan serangkaian aktivitas pendidikan yang tidak saja variatif dalam urusan metodologi pembelajaran, tetapi juga inspiratif bagi proses pembentukan kejiwaan siswanya. Di titik inilah energi keteladanan guru sangat diperlukan dalam menstimulasi siswa agar memiliki motivasi yang kuat untuk belajar dan mengembangkan diri.

Pendidikan sesungguhnya bukan suatu mekanisme alamiah yang berjalan tanpa ada intervensi dari para pelakunya, melainkan sangat didominasi oleh kualitas interaksi timbal-balik antara stimulus dari pihak guru dan responsi dari pihak siswa. Semakin baik stimulasi yang diberikan oleh guru, secara otomatis semakin baik pula siswa untuk meresponsnya. Begitu pula sebaliknya, semakin baik respons yang direaktifkan siswa, guru juga akan semakin terpacu meningkatkan pemberian stimulusnya. Stimulus yang paling kuat adalah aktivitas peneladanan.

Sebagai contoh adalah perilaku merokok. Kasus merokok paling sering ditemui di banyak sekolah di tanah air kita. Walaupun tata tertib sekolah melarang keras siswa untuk merokok (bahkan dengan pemberian sanksi yang tegas sekalipun), tetap saja siswa (terutama siswa di sekolah menengah) akan banyak yang merokok atau kecanduan merokok dikarenakan orang dewasa di sekeliling mereka, yakni orangtua dan guru terbiasa dengan perilaku merokok. Sekolah menengah yang menerapkan aturan pembiasaan bagi guru-gurunya untuk tidak sama sekali merokok, akan relatif lebih berhasil dalam menekan perilaku merokok bagi siswa-siswanya. Ketika para siswa telah terhabitasi untuk jauh dari budaya merokok, guru pun juga semakin kuat kesadaran motivasinya untuk tidak sama sekali melakukan percobaan untuk merokok.



Kurikulum dan Kematangan Sekolah Indonesia

Ketika Kemdikbud mengusung perubahan kurikulum pada 2013 ini, banyak nada sinis mengemuka. Belum merata betul pematangan Kurikulum 2006 atau KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) di semua sekolah dilaksanakan, tiba-tiba akan muncul lagi kurikulum baru. Banyak guru merasa telah menjadi korban. Lagi-lagi mereka diposisikan sebagai objek kebijakan pemerintah yang selalu salah kaprah dalam merencanakan.

Walau sudah dilakukan uji publik, tetap saja masih banyak publik kebingungan. Mereka bertanya-tanya maksud dan tujuan kurikulum yang berubah-ubah itu. Ketika alasan serta latar belakang perubahan ini tidak dipahami benar oleh masyarakat, tentu akan muncul banyak kecurigaan. Banyak kalangan yang akhirnya sudah telanjur berpraduga bahwa ada motif lain di balik kemunculan kurikulum baru ini.

Ada pula yang berpendapat bahwa walaupun memang masih terdapat beragam kekurangan dalam implementasi KTSP, terbitnya Kurikulum 2013 ini masih terlalu prematur. Ada alasan yang menguatkan pendapat ini, yakni belum adanya evaluasi yang bersifat komprehensif terhadap pelaksanaan KTSP sejak 2006 silam. Seandainya memang ada kegagalan atau kekurangan dalam KTSP, di mana letak permasalahannya dan apa akar penyebabnya? Bila pun memang sudah dilakukan evaluasi terhadap KTSP, di manakah publik bisa mengakses data-data evaluasi tersebut agar para pakar, akademisi, dan praktisi pendidikan bisa turut membantu mencarikan solusi. Jangan sampai gambar-gembor kelemahan KTSP hanyalah asumsi tanpa disertai bukti-bukti lapangan yang kuat. Tentu saja akan lebih baik bila hasil evaluasi tersebut turut pula diuji publik.

Bisa dimengerti bila banyak suara kontra ketika kurikulum pendidikan kembali berubah. Mulai dari orangtua, praktisi, hingga pakar merasa resah. Sebagian besar publik belum paham benar apa maksud pemerintah. Was-was hingga syak wasangka pun membunyah. Jangan-jangan Kemdikbud lagi-lagi salah arah. KTSP yang awalnya dianggap cocok dengan iklim reformasi pendidikan, tiba-tiba hari ini divonis kurang kontekstual lagi dengan jiwa zaman.



Kemdikbud boleh jadi memiliki alasan yang kuat untuk membuat keputusan di balik perubahan kurikulum.¹⁴⁹ Para penggagas perubahan tersebut pastilah tidak sedang iseng-iseng dalam mengganti kurikulum. Beragam kajian teori, riset ilmiah, survei internasional, serta data lapangan telah dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam merancang Kurikulum 2013. Demikian halnya dengan para pengkritiknya. Pendapat kontra yang mereka lontarkan tentu didasari oleh argumentasi yang analitis dari pelbagai sisi ilmiah.

Agar adil, mula-mula sekali kita bisa melihat perubahan kurikulum dari dua perspektif, yakni lingkup makro dan mikro. Kaidah singkatnya, tidak boleh setiap kita tergoda untuk menggunakan penilaian kualitatif pada fenomena-fenomena mikro pendidikan untuk menggeneralisasi lingkup makro pendidikan yang lebih luas dan kompleks. Misalkan saja terdapat informasi bahwa hampir di setiap daerah masih banyak guru tidak mampu merancang kurikulum (KTSP) untuk sekolahnya sendiri. Seandainya informasi ini valid adanya, maka tidak serta-merta kita dapat langsung menyatakan bahwa KTSP di Indonesia telah gagal. Generalisasi seperti ini tentu tidaklah bijak. Keberhasilan atau kegagalan kurikulum tidak bisa dianalisis dari satu ceruk pandang yang sempit. Dibutuhkan banyak informasi lain yang lebih akurat untuk dijadikan sebagai indikator atau tolak ukur.

Begitu pun sebaliknya, analisis makro pendidikan juga tidak selalu dapat dipakai sebagai acuan pembenaran terhadap setiap fenomena pendidikan yang muncul di lingkup makro. Bila secara lingkup makro dikatakan bahwa Kurikulum 2013 ini lebih baik dari KTSP, selanjutnya tidak mudah pula untuk menyatakan jaminan bahwa semua sekolah yang menerapkan kurikulum baru akan otomatis lebih baik hasilnya. Semua butuh pembuktian yang lebih cermat karena efektivitas kurikulum membutuhkan perangkat dan penunjang. Tanpa persiapan me-

149 Menurut Mendikbud, dengan pendekatan tematik integratif pada Kurikulum 2013, para siswa tidak harus belajar mata pelajaran berbeda di setiap jam pelajaran; sebaliknya, memungkinkan siswa untuk belajar utuh tentang satu tema dalam satu hari. Misalnya, siswa SD belajar dengan tema air. Guru bisa menjelaskan jika air dapat dipakai untuk berwudhu. Air juga bisa dipakai membangkitkan generator listrik. Lalu listrik akan membuat kehidupan masyarakat sejahtera. Jadi, dengan satu tema air itu, siswa akan belajar tiga mata pelajaran sekaligus yakni IPA, Agama, dan IPS. Lihat: <http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/12/12/09/meqvb2-kurikulum-baru-siswa-sd-akan-belajar-lebih-utuh>



madai maka kurikulum baru akan kontraproduktif dengan harapan awal.

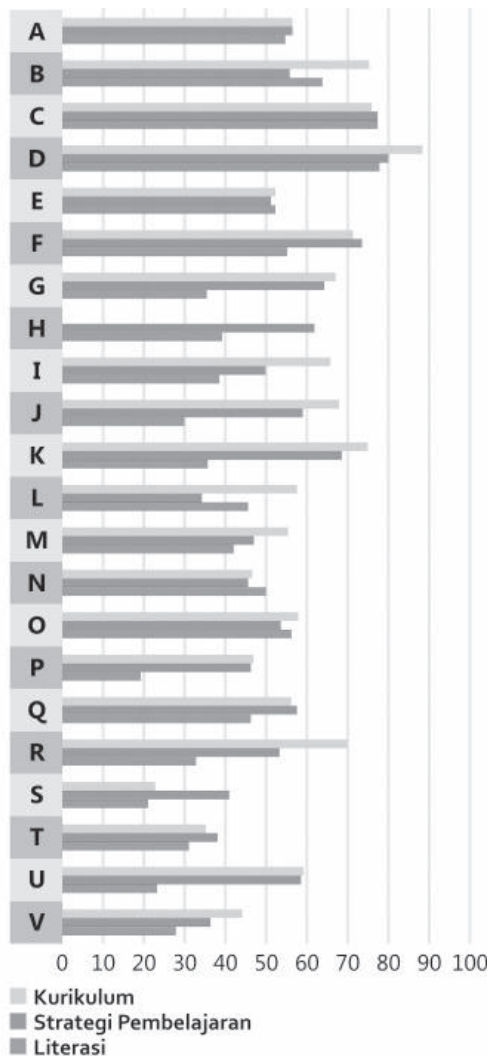
Masih terlalu dini memang untuk menyatakan bahwa perubahan kurikulum tidak akan berpengaruh terhadap mutu pendidikan nasional. Pertama, perlu dipahami bahwa kurikulum bukan satu-satunya jaminan atas keberhasilan pendidikan. Pendidikan memiliki banyak unsur dan perangkat pengembangan. Kurikulum merupakan salah satu dari sekian banyak perangkat yang mesti ada dalam pengembangan pendidikan. Tanpa ditunjang oleh elemen serta perangkat yang lain, kurikulum tidak akan berlaku efektif. Sejatinya bila kita menganggap bahwa pendidikan masih terpuruk dan belum bisa mewujudkan cita-cita dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, sudah seharusnya tidak hanya kurikulum yang dijadikan sebagai kambing hitamnya. Bisa jadi ada problem pada elemen dan perangkat pendidikan yang lain, dan bukan mustahil bila kurikulum bukan akar penyebabnya.

Pemetaan Kualitas Pembelajaran SD

Untuk mengukur kualitas pembelajaran pada jenjang sekolah dasar, Makmal Pendidikan Dompot Dhuafa melakukan survei atas tiga kriteria, yaitu pembelajaran berbasis literasi, strategi pembelajaran yang efektif, dan implementasi kurikulum. Pembelajaran literasi dinilai dari tiga indikator, yaitu budaya kronik guru, model ceruk ilmu, dan *display* ruang kelas. Untuk penilaian terhadap strategi pembelajaran yang efektif, ditilik dari tiga indikator, yaitu pelaksanaan manajemen kelas, PAIKEM, dan model pembelajaran tematik. Kriteria berikutnya, yaitu implementasi kurikulum dinilai dari penerapan penilaian otentik berbasis kelas, pembuatan silabus, dan efektivitas RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran). Survei dilakukan di 21 Kota/Kabupaten di 14 provinsi. Sampel yang digunakan sebanyak 22 sekolah dasar negeri. Hasil survei dapat dilihat pada tabel dan grafik di bawah ini.



KODE SEKO LAH	Literasi	Strategi Pembelajaran	Kurikulum
A	55	57	57
B	64	56	76
C	78	78	76
D	78	80	89
E	53	52	52
F	55	74	72
G	35	65	67
H	39	62	0
I	39	50	66
J	30	59	68
K	36	69	75
L	46	35	58
M	42	47	56
N	50	46	47
O	56	54	58
P	20	47	47
Q	47	58	57
R	33	53	70
S	21	41	23
T	31	38	36
U	23	59	60
V	28	36	44
RATA-RATA	44	55	57



Dari tabel dan grafik di atas dapat dideskripsikan bahwa berdasarkan acuan rata-rata normatif dari setiap indikator penilaian, hanya 6 dari 22 sekolah atau hanya 27,27 persen sekolah yang semua aspek kualitas pembelajarannya berada di atas rata-rata sekolah lain. Berikutnya, ada 6 dari 22 sekolah atau 22,72 persen sekolah yang semua aspek kualitas pembelajarannya berada di bawah rata-rata sekolah lain. Adapun 11 dari 22 sekolah atau 50 persen sekolah dalam kondisi beberapa aspek indikator kualitas pembelajarannya masih belum berada di atas ambang rata-rata. Berdasarkan hasil ini secara umum dapat disimpulkan bahwa



sebagian besar sekolah yang disurvei masih memiliki masalah dalam mengembangkan pembelajaran yang berkualitas sesuai dengan standar baku dalam pendidikan untuk level sekolah dasar.

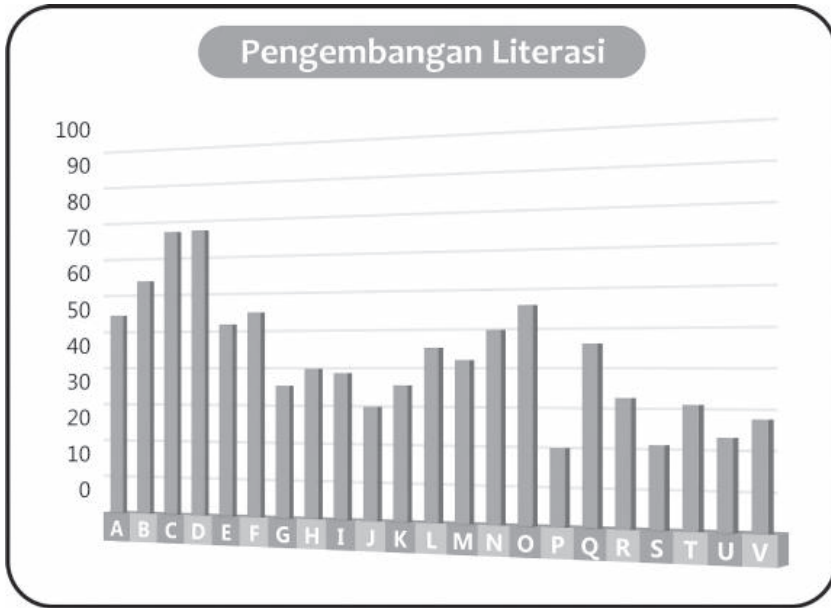
Jika pengukuran terhadap kualitas pembelajaran ini diubah dari menggunakan acuan rata-rata normatif menjadi acuan patokan tertentu, hasilnya juga akan berubah signifikan. Perubahan tersebut bisa kita lihat dari tabel di bawah ini.

Kualitas Pembelajaran

Level	Kisaran Nilai	Klasifikasi	Literasi	Strategi Pembelajaran	Kurikulum
A	90 - 100	Sangat Baik	0	0	0
B	75 - 89	Baik	2	2	4
C	60 - 74	Cukup	1	4	6
D	40 - 59	Kurang Baik	8	13	9
E	0 - 39	Sangat Kurang	11	3	3

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa hanya 2 dari 22 sekolah atau hanya 9,09 persen sekolah yang kualitas pembelajarannya telah masuk kategori baik. Namun sayangnya, tidak ada satu sekolah pun yang kualitas pembelajarannya sudah berada dalam kualifikasi sangat baik. Lalu terdapat 3 dari 22 sekolah atau hanya 13,63 persen sekolah yang pembelajarannya berkualitas cukup baik. Sedangkan selebihnya atau 77,27 persen sekolah masih berkategori kurang baik dalam mengembangkan kualitas pembelajarannya. Bahkan dari 77,27 persen sekolah tidak efektif tersebut, 8 sekolah atau 36,36 persen di antaranya masih dalam kategori kualitas pembelajaran yang sangat kurang.



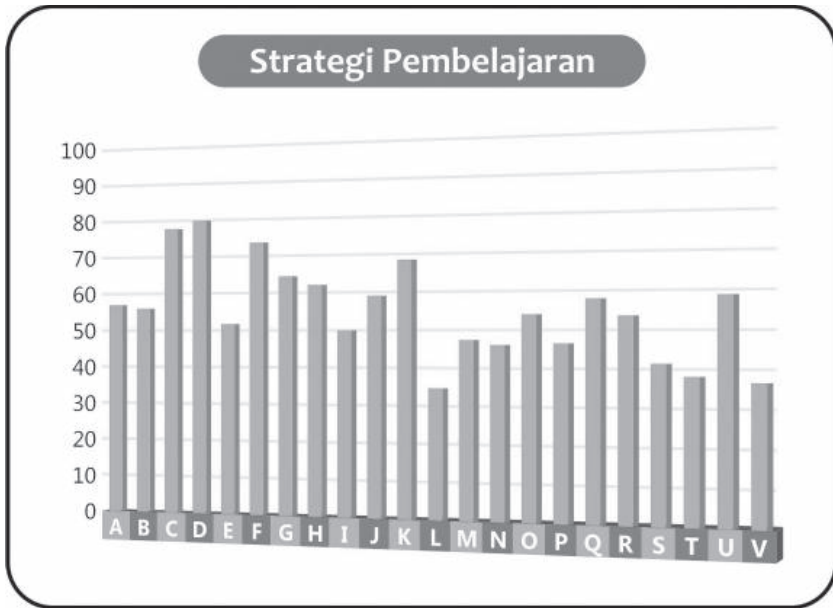


Dari tabel di atas dapat jelas terlihat bahwa masih banyak sekolah yang belum memiliki pengembangan literasi yang efektif di kelas. Terdapat 19 atau 86,36 persen sekolah yang kurang atau bahkan tidak berhasil dalam mengembangkan pembelajaran berbasis literasi. Sebaliknya, 3 atau 13,63 persen sekolah dasar yang sudah tergolong cukup dan efektif dalam mengelola literasi di dalam pelaksanaan pembelajarannya di kelas. Dengan demikian, secara umum dapat disimpulkan bahwa hampir semua sekolah-sekolah dasar yang disurvei masih belum mampu memiliki tujuan dalam mengembangkan kompetensi literasi. Dalam kondisi seperti ini, akan berat bagi sekolah untuk bisa meningkatkan performa dan hasil belajar siswa karena literasi bagaimana pun juga ruh inti dari setiap pembelajaran yang ada di tingkat sekolah dasar.

Secara personal, penerapan Sekolah Cerdas Literasi ini akan mendorong munculnya dampak keberlanjutan yang bersifat positif, antara lain warga sekolah (kepala sekolah, guru, dan siswa) akan tertantang untuk memiliki kebiasaan dan kegemaran untuk membaca dan menulis. Membaca dan menulis adalah aktivitas intelektual yang akan membantu peserta didik dalam menemukan dan menguatkan konsep dirinya masing-masing. Begitu pun dengan para guru, mereka akan semakin optimal dalam mengembangkan dan menciptakan inovasi dalam pembelajaran

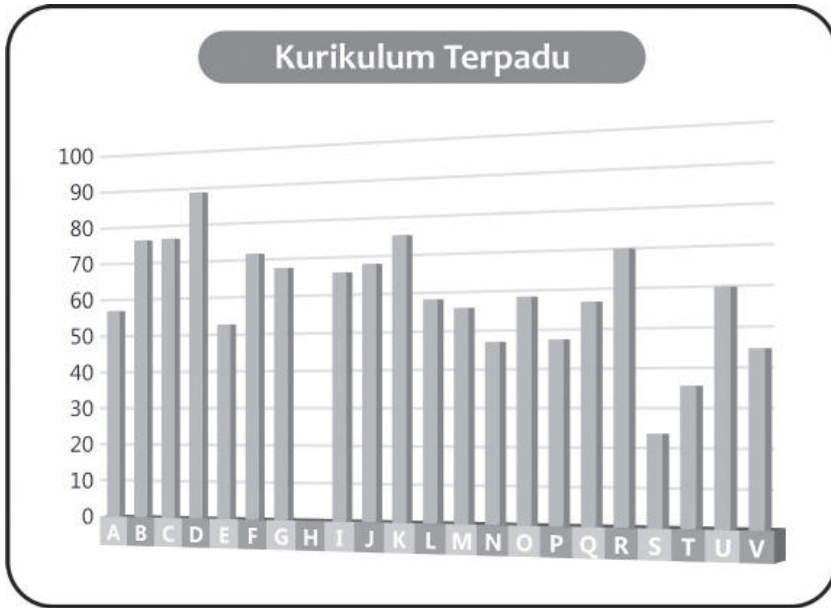


yang lebih efektif, kreatif, dan menyenangkan. Selain itu, literasi juga kunci untuk menunjang prestasi siswa, baik dalam ranah akademis maupun non-akademis.



Dalam tabel di atas jelas terlihat bahwa masih banyak sekolah yang belum menerapkan strategi pembelajaran aktif. Cara mengajar gurugurunya masih monoton dengan mengandalkan model berpusat pada guru. Terdapat 16 atau 72,72 persen sekolah yang kurang atau bahkan tidak berhasil dalam mengembangkan strategi pembelajaran yang efektif. Selebihnya, baru 6 atau 27,27 persen sekolah dasar yang sudah tergolong cukup dan efektif dalam mengembangkan strategi pembelajaran yang aktif. Dari data ini dapat tersimpulkan bahwa kebanyakan sekolah-sekolah dasar yang disurvei masih belum mampu berkembang akibat tidak mampu mengubah paradigma dalam pendekatan pembelajarannya. Sekolah jadi kurang menyenangkan bagi siswa. Pembelajaran banyak tidak efektif dalam membentuk kompetensi peserta didik. Tegasnya, sekolah belum bisa menerapkan PAIKEM.





Tabel di atas memberikan gambaran bahwa masih sebagian sekolah belum mampu mengembangkan model kurikulum sekolah yang mandiri dan terpadu. Terdapat 11 atau 50 persen sekolah yang kurang atau belum berhasil dalam mengembangkan kurikulum yang efektif. Bahkan ada satu sekolah yang tidak bisa membuat kurikulum sendiri. Di luar hal tersebut, terdapat 10 atau 45,45 persen sekolah dasar yang sudah tergolong cukup dan efektif dalam membuat kurikulum mandiri. Dari temuan ini dapat disimpulkan bahwa sebagian sekolah-sekolah dasar yang disurvei sudah mampu mengembangkan kurikulum. Namun sayangnya, masih terdapat sekolah-sekolah yang belum mampu memiliki keseriusan dalam pengembangan kurikulum. Akibat berikutnya, sekolah dasar seperti ini juga kurang mampu mengembangkan keunggulan di bidang akademis.

Alternatif Akselerasi untuk Sekolah Dasar

Kurikulum 2006, atau yang biasa kita sebut dengan KTSP, sebenarnya merupakan perwujudan kepercayaan pemerintah terhadap sekolah dan peranan publik di ranah pengembangan pendidikan. Kurikulum ini merupakan penjabaran dari skema reformasi pendidikan yang mendesak agar bisa diwujudkan ottonomi pendidikan yang selaras dengan iklim ottonomi daerah. Diharapkan ke depan tidak ada lagi kurikulum yang



bersifat sentralistis. Guru ditekankan untuk dapat melaksanakan paket kurikulum dari pusat tanpa memerhatikan kondisi dan kebutuhan di tingkat daerahnya. Artinya, keberhasilan pendidikan nasional tidak lagi hanya menjadi beban tanggung jawab pemerintah pusat saja, tetapi seluruh *stakeholder* pendidikan, baik itu pemerintah daerah, dewan pendidikan, sekolah, komite sekolah, guru, dan juga segenap masyarakat. Dari sinergi ini banyak pihak mendambakan dapat berkembangnya pola pengelolaan pendidikan yang memiliki kultur partisipatif.

Namun sayangnya, KTSP sudah tidak diberlakukan lagi. Yang dicita-citakan dalam Kurikulum 2006 dinilai masih jauh panggang dari apinya, sekolah dinilai gagal untuk membentuk kurikulumnya sendiri. Akibatnya, sekolah menjadi kehilangan kepercayaan dari pemerintah. Munculnya kurikulum 2013 bermisi untuk mencabut kewenangan otonomi sekolah dalam merancang kurikulum. Sekolah diminta berfokus saja pada pelaksanaan pembelajaran di kelas sesuai rancangan yang distandardisasi Kemdikbud tanpa perlu berpikir untuk membuat desain kurikulum. Konsep desentralisasi tidak terealisasi semulus yang diharapkan sehingga pemerintah memilih alur mundur, tidak ada kurikulum mandiri.

Jika putusan pemerintah sudah seperti itu, pengembangan kualitas pendidikan di sekolah dasar kembali berjalan terseok. Perdebatan mengenai sentralisasi versus otonomi kurikulum lagi-lagi kehilangan titik temu. Jika masing-masing pihak ingin memaksakan konsepnya sendiri, jangan berharap kita dapat mewujudkan sekolah dasar Indonesia yang kualitasnya setaraf dengan sekolah dasar di negara-negara maju.

Lantas apakah kita berdiam diri saja? Apa pula yang bisa kita lakukan?

Sebetulnya masih ada jalan tengah yang bisa kita tempuh. Ketika terjadi kisruh kurikulum seperti ini, ada pihak yang sebetulnya bisa menjadi penengah, yakni kampus keguruan. Perlu kita kembali ingat bahwa semua konsep pendidikan yang dikembangkan di setiap negara, termasuk juga Indonesia, semua bersumber dan bermula dari universitas keguruan. Pembuat kebijakan kurikulum nasional pastilah di dalamnya banyak meminta keterlibatan dari pihak akademisi kampus-kampus keguruan. Begitu pun penghasil tenaga pendidik juga adalah kampus keguruan. Pengontrol pendidikan di setiap daerah juga adalah kampus



keguruan. Jangan lupa pula bahwa yang berhak mengeluarkan sertifikat pendidik melalui PLPG dan PPG tak lain adalah kampus keguruan. Jadi, kembalikan saja semua perdebatan ke kampus-kampus keguruan.

Kampus-kampus keguruan yang hampir tersebar di seluruh kabupaten dan kota harus mengambil peran yang lebih dalam mengendalikan kualitas pendidikan di wilayahnya masing-masing. Kampus ini tidak hanya berperan untuk menghasilkan lulusan yang siap menjadi guru, tapi harus dioptimalisasi pula sebagai mitra dinas pendidikan daerah dalam peningkatan kualitas pembelajaran di setiap sekolah. Caranya mudah saja, cukup menyediakan program pascasarjana atau magister kependidikan untuk para pengawas, kepala sekolah, serta guru-guru senior atau master. Tentu perkuliahannya haruslah berkualitas, bukan abal-abal demi mengejar gelar. Cara semacam ini dipakai oleh Finlandia untuk mengontrol kualitas pendidikannya, dan hasilnya menggembirakan.

Bila setiap kampus pendidikan mampu menyediakan program magister pendidikan yang berkualitas, bahkan bila perlu juga murah, di setiap daerah akan muncul SDM tenaga kependidikan yang profesional. Bila sebagian besar pengawas, kepala sekolah, dan guru-guru senior di sekolah-sekolah dasar ini berlatar belakang pendidikan magister, akan terjadi akselerasi mutu yang dahsyat. Apa pun kurikulumnya, apa pun sistem pendidikannya, bila semua elemen pengelola pendidikannya berkualitas, tanpa perlu banyak perdebatan pun pembelajaran di setiap sekolah akan tetap berkualitas. Sesungguhnya ini yang perlu kita tekankan.

Dana miliaran bahkan triliunan rupiah yang setiap tahun digelontorkan oleh Kemdikbud untuk peningkatan kompetensi guru lewat program pelatihan bisa dikonversi menjadi subsidi untuk bantuan studi di pascasarjana kependidikan. Sekolah dasar hingga sekarang juga masih kekurangan guru yang berpendidikan sarjana. Mereka harus dibantu agar segera bisa mengejar kuliah S1 PGSD. Terlebih guru-guru sekolah dasar adalah yang paling rendah nilai uji kompetensinya. Dipastikan ini akan lebih konkret ketimbang pelatihan-pelatihan atau *workshop* yang selama ini sering dijadikan sebagai proyek untuk menghabiskan anggaran tahunan.

Beban serta tantangan pendidikan di masa depan akan semakin kompleks. Kebutuhan akan tenaga pendidik dan kependidikan yang



kompeten menjadi prasyarat mutlak yang tidak boleh diabaikan. Bila sekolah dasar ingin berubah, ubah terlebih dahulu pengelolanya. Kita sangat mendamba hadirnya tokoh-tokoh intelektual lokal di bidang pendidikan yang ahli dalam pengembangan sekolah dasar di setiap titik wilayah Indonesia. Merekalah yang akan mampu memecah segala kebekuan yang selama ini menghambat efektivitas pembelajaran di sekolah dasar. Melalui jalan penelitian, kajian ilmiah, serta inovasi dalam pembelajaran, sekolah dasar akan mampu mengoptimalisasi layanan pendidikan terbaik untuk setiap peserta didik.

Disadari bahwa sekolah dasar berkualitas merupakan eksperimen-tasi pendidikan yang bertugas untuk mengungkap jati diri setiap pembelajar menuju pribadi yang unggul dari segala aspek. Pembelajaran di tingkat sekolah dasar bagaimanapun juga tidak hanya sebuah proyek transfer pengetahuan semata, namun juga suatu proses peneladanan dan pendewasaan diri melalui penanaman nilai-nilai positif bagi peserta didik. Hasilnya, sekolah dasar tidak cukup hanya dengan melahirkan belia-belia baru yang unggul dari aspek intelektualnya, tetapi juga unggul dalam aspek mental, emosi, dan moral-spiritualnya. Inilah alasan mengapa ajaran Ki Hadjar Dewantara yang berbunyi *ing ngarso sung tulodo* menjadi sangat populer sebagai sebuah doktrin dalam sistem pendidikan di negara kita. Karakter pendidikan dasar memang harus dibangun dengan peneladanan. Itulah sebenar-benarnya pendidikan. []



“Sekolah dasar merupakan fase pendidikan terpenting bagi kehidupan setiap generasi. Pada usia inilah dasar-dasar intelektual dan kematangan pribadi dibentuk. Setiap anak pada masa sekolah dasar ini akan ditempa menjadi logam yang keras. Bila proses pelogamannya sempurna, anak tersebut kelak akan tumbuh dan berkembang mengeras menjadi orang dewasa yang paripurna.”





Penutup



Kuadran Nestapa dalam Pendidikan Kita



Sumber: Dokumen Makmal Pendidikan

Pemerhati pendidikan nasional, Darmaningtyas, mengungkapkan bahwa peserta didik dapat dibagi dalam empat kuadran. Kuadran I, peserta didik yang kaya dan pintar. Mereka dapat memilih pendidikan apa pun yang mereka inginkan. Kuadran II, peserta didik yang kaya dan tidak pintar. Mereka masih dapat meningkatkan kepintaran mereka dengan berbagai kursus tambahan dan memilih sekolah yang berkualitas dengan kekayaan yang dimiliki.

Kuadran III, peserta didik yang miskin dan pintar. Mereka masih dapat mengakses pendidikan berkualitas dengan beasiswa meskipun pilihannya mungkin terbatas. Kuadran IV, peserta didik yang miskin dan



tidak pintar. Mereka akan kesulitan mengakses pendidikan berkualitas karena keterbatasan secara kemampuan akademis dan finansial. Kuadran I sampai III masing-masing mungkin hanya diisi oleh sekitar 20 persen peserta didik, namun kuadran IV dihuni oleh 40 persen peserta didik di Indonesia.

Realitanya memang ada peserta didik yang kepintaran atau kekayaannya dalam kondisi sedang atau cukup sehingga peserta didik mungkin lebih tepat dibagi dalam sembilan kuadran. Namun, untuk menyederhanakan pembahasan, pendekatan empat kuadran di atas tampaknya cukup untuk menggambarkan kesenjangan pendidikan di Indonesia.

Mudah untuk dimengerti bahwa ada keterkaitan erat antara pendidikan dan kesejahteraan. Masyarakat yang sejahtera akan memprioritaskan pendidikan berkualitas untuk keluarga mereka sehingga kesejahteraan mereka di masa depan tetap terjaga dengan jaminan kehidupan yang layak karena tingkat pendidikan. Sebaliknya, masyarakat miskin sulit mengakses pendidikan sehingga akan tetap bodoh dan terus miskin. Ada masyarakat yang dapat memperoleh pendidikan yang lebih baik karena kekayaannya, ada pula masyarakat yang memperoleh kesejahteraan yang lebih baik karena pendidikannya.

Peserta didik yang kaya dan pintar di kuadran I hidup dalam keterjaminan. Kekayaan sekaligus kepintaran yang diwariskan biasanya lebih terjaga kontinuitasnya. Anak dokter menjadi dokter, anak dosen, pilot, insinyur, ataupun pengacara banyak yang mengikuti jejak orangtuanya. Masyarakat di kuadran ini cenderung solid, tidak mudah berpindah ke kuadran lain, namun dapat menarik masyarakat dari kuadran lain.

Dalam suatu kondisi, kurangnya perhatian misalnya, peserta didik dari kuadran I dapat berpindah ke kuadran II, namun modal finansial akan cenderung mengembalikan peserta didik kembali ke kuadran I. Dalam kondisi lain, musibah misalnya, peserta didik dari kuadran I dapat bergeser ke kuadran III, namun modal sosial dan intelektual akan cenderung membuatnya merangkak naik kembali ke kuadran I. Peserta didik dari kuadran I ini yang paling diharapkan pemerintah. Cerdas dan berprestasi namun tidak terkendala finansial. Pendidikan berkualitas



namun mahal tak menjadi soal. Kuadran I adalah kelompok masyarakat yang tidak perlu dirisaukan.

Peserta didik yang kaya dan tidak pintar di kuadran II kehidupannya banyak ditentukan dengan pilihan yang diambil. Kekayaan yang diwariskan lebih rentan hilang ketika disalahgunakan. Anak artis atau pengusaha sukses misalnya, tidak ada jaminan menjadi orang sukses. Pilihan yang cerdas di kuadran ini adalah memanfaatkan kemampuan finansial untuk 'membeli' ilmu dan kepintaran. Seleksi sekolah atau perguruan tinggi favorit membutuhkan kemampuan intelektual lebih, namun berbagai jalur mandiri yang dibuka memungkinkan mereka mengandalkan kemampuan finansial. Kalaupun tidak, masih terbuka peluang sekolah dan perguruan tinggi swasta dalam dan luar negeri yang berkualitas dan dapat diakses. Ditambah modal sosial, peserta didik dari kuadran ini sangat memungkinkan untuk bergeser ke kuadran I.

Namun, di sisi lain, pilihan yang salah dapat menjerumuskan peserta didik dari kuadran II ini ke kuadran IV. Salah pergaulan, terjerat kasus hukum, atau penyalahgunaan narkoba misalnya, dapat menghilangkan manfaat dari kemampuan finansial yang dimiliki, menjadi tidak memiliki apa-apa dan bukan siapa-siapa. Peserta didik dari kuadran II ini yang paling diharapkan program pendidikan yang berorientasi profit karena potensial menjadi konsumen bisnis pendidikan.

Peserta didik yang miskin dan pintar di kuadran III hidup dalam ketidakpastian. Potensi intelektual yang dimiliki belum tentu dapat dioptimalkan karena keterbatasan finansial. Anak dari keluarga miskin yang cerdas dan berprestasi tidak sedikit yang harus mengandalkan keberuntungan untuk perbaikan hidupnya di masa mendatang. Kesungguhan dan kerja keras, ditambah peluang dan keberuntungan dapat mengangkat peserta didik dari kuadran ini naik ke kuadran I. Tidak sedikit contoh orang sukses di negeri ini yang mulai dari bawah, dari bukan siapa-siapa.

Namun, pada suatu kondisi ketika keterbatasan finansial lebih dominan dibandingkan peluang yang dimiliki, peserta didik dari kuadran III mudah saja jatuh ke kuadran IV. Betapa banyak anak pintar dari keluarga tidak mampu yang akhirnya putus sekolah. Pendidikan sebagai peluang untuk memutus rantai kemiskinan keluarga harus terhenti



karena keterbatasan finansial. Peserta didik dari kuadran III ini yang paling diharapkan program pendidikan yang melibatkan partisipasi masyarakat. Sumber dana masyarakat yang terbatas, untuk beasiswa misalnya, membuat program yang digulirkan memilih yang berprestasi dan potensial untuk dikembangkan, bukan sekadar miskin.

Peserta didik yang miskin dan tidak pintar di kuadran IV hidup dalam ketertinggalan, rantai setan kemiskinan dan kebodohan begitu kuat mengekang mereka. Seperti halnya peserta didik di kuadran I namun dengan kondisi yang berkebalikan, warisan kemiskinan sekaligus kebodohan juga tidak mudah untuk diubah. Anak petani dan buruh miskin cenderung untuk mengikuti jejak orangtua. Ironis, namun masyarakat di kuadran ini juga cenderung solid, tidak mudah berpindah ke kuadran lain namun dapat menarik masyarakat dari kuadran lain.

Dalam kondisi tertentu, menang undian besar misalnya, peserta didik dari kuadran IV dapat naik ke kuadran II, namun jika mentalitas miskin tetap bersemayam, mereka hanya menunggu waktu untuk kembali ke kuadran IV. Dalam kondisi lain, dengan adanya program pendidikan yang intens misalnya, peserta didik dari kuadran IV mungkin saja bergeser ke kuadran III. Namun, jika pola pikirnya masih kolot dan bodoh, keterbatasan finansial akan menjadi alasan bagi mereka untuk kembali ke kuadran IV. Tidak memiliki apa-apa dan bukan siapa-siapa. Peserta didik dari kuadran IV ini yang banyak dilupakan oleh program pendidikan kendati media massa sangat tertarik untuk menyorotinya. Padahal, mereka juga bagian dari masyarakat Indonesia yang memiliki hak untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas dan penghidupan yang layak.

Salah satu strategi kunci yang dapat dilakukan perbaikan wajah pendidikan Indonesia adalah dengan menggulirkan kebijakan dan program pendidikan yang diprioritaskan untuk peserta didik di kuadran IV. Kebijakan yang adil bukan berarti sama rata, namun proporsional sesuai dengan kebutuhan dan prioritasnya. Peserta didik di kuadran I dan II tidak prioritas dibantu dengan berbagai kebijakan semacam (Rintisan) Sekolah Berstandar Internasional, dengan bantuan pendidikan justru dikucurkan untuk sekolah yang peserta didiknya dari masyarakat berada.



Peserta didik di kuadran III perlu memperoleh perhatian, namun porsinya dapat dibagi dengan geliat program kedermawanan sosial di bidang pendidikan yang mengambil sumber dari dana perusahaan dan masyarakat. Pemberian beasiswa untuk ratusan atau ribuan anak yang berprestasi dapat dibantu dengan adanya partisipasi dari perusahaan dan masyarakat, namun penanganan jutaan anak yang putus sekolah, anak terlantar, dan anak jalanan yang termasuk dalam kuadran IV, tentunya butuh keseriusan dan porsi besar di kebijakan pemerintah.

Akar permasalahan pendidikan Indonesia ada di kuadran IV ini. Oleh karena itu, mampu mengatasinya berarti menyelesaikan sebagian besar permasalahan pendidikan Indonesia. Masyarakat pendidikan yang ada di kuadran ini selama ini terpinggirkan, termarginalkan, seolah dibiarkan tetap bodoh dan tetap miskin untuk menjadi komoditas pembangunan. Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara, dipelihara dalam arti dijaga eksistensinya, bukan dirawat dan disembuhkan dari penyakit kronis kemiskinan dan kebodohan. Bahkan sekolah, infrastruktur, dan sistem yang rusak terus dipelihara sehingga pekerjaan perbaikan pendidikan tidak pernah ada habisnya.

Untuk itulah diperlukan lebih dari sekadar iktikad baik dan serangkaian rencana perbaikan untuk mengurai permasalahan ini. Kesenjangan semakin terjadi, kuadran IV semakin menganga, butuh kerja keras dan kesungguhan dalam upaya memperbaiki wajah pendidikan Indonesia.

Suatu perubahan ke arah yang lebih baik tidak seharusnya berhenti dalam tataran niat dan perencanaan saja, namun harus terus dilaksanakan dengan kesungguhan. Kesungguhan dalam merencanakan kebijakan dan program perbaikan, kesungguhan dalam mengimplementasikan agenda perbaikan, kesungguhan dalam menjaga kontinuitas upaya perbaikan dan kesungguhan untuk mengontrol capaian perubahan ke arah yang lebih baik yang sudah dilakukan. Kesungguhan ini tidak tercermin dari banyaknya rencana yang disiapkan dan anggaran yang digelontorkan. Kesungguhan akan terlihat dari kesigapan, ketekunan, dan kegigihan, mengeluarkan segala kemampuan maksimal untuk mencapai kondisi yang diharapkan serta mengatasi segala hambatan dan rintangan yang menghadang.



Segala rencana perbaikan pendidikan hanya omong kosong tanpa disertai kesungguhan, hanya akan jadi janji yang tak kunjung dibuktikan. Kesigapan dalam mengimplementasikan perbaikan memang bukan hal yang mudah—setidaknya sikap menunda pastinya lebih mudah—namun di situlah ujian sebuah komitmen perbaikan. Kelambanan dalam menyikapi berbagai permasalahan pendidikan, bukan hanya akan menumpuk masalah dan menyebabkan ketertinggalan, namun juga mengundang tanda tanya terhadap iktikad baik perbaikan. Apalagi jika penyebab keterlambatan adalah masalah koordinasi struktural dan birokrasi. Masyarakat marginal butuh perbaikan yang dapat mereka rasakan secara nyata dan cepat. Bukan janji yang menggantung, namun bukti yang mengusir ketidakpastian.

Keteguhan dan kegigihan dalam mengusung agenda perbaikan pendidikan tentunya juga tidak mudah—apalagi jika dibandingkan mengerjakan perbaikan seadanya—namun di situlah kelurusan niat dan kebulatan tekad akan dibuktikan. Mencerdaskan kehidupan bangsa adalah cita mulia yang tak pantas diupayakan dengan perbaikan yang sekadar menggugurkan kewajiban. Program perbaikan pendidikan yang baik adalah yang tuntas, baik secara proses maupun hasil, tidak setengah-setengah, apalagi kurang dari itu. Keteguhan dan kegigihan akan memberi bukti. Sebaliknya, perbaikan pendidikan tanpa disertai keteguhan dan kegigihan hanyalah bualan yang takkan kuat menghadapi berbagai tribulasi yang pasti menghadang upaya menggapai cita-cita mulia.

Mengerahkan segenap kemampuan sebagai bukti kesungguhan dalam melakukan perbaikan pendidikan juga bukan perkara mudah karena mengandung nilai perjuangan yang disertai pengorbanan dan perhatian lebih. Berusaha sekadarnya tentu lebih mudah, namun kompleksitas permasalahan pendidikan takkan terurai tanpa optimalisasi potensi dan sumber daya yang dimiliki. Ketangguhan dalam menghadapi berbagai hambatan juga tak mudah, apalagi jika dibandingkan menyerah kalah dengan berbagai pembenaran yang sudah disiapkan. Hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan berkualitas bukan perkara remeh, butuh kesabaran dan keuletan untuk mampu mewujudkannya. Sikap pesimis dan skeptis takkan membantu karena hanya mereka yang memiliki jiwa besar yang dapat menyelesaikan permasalahan besar.



Bila berbagai kebijakan dan program yang digulirkan belum menunjukkan perbaikan yang signifikan terhadap penyelesaian berbagai permasalahan pendidikan, perlu dikaji kembali sudahkah upaya yang tercurah tepat sasaran, sudahkah ada kesungguhan yang menyertai upaya perbaikan? Ketepatan strategi dan keseriusan dalam mengatasi problematika pendidikan ini bukan saja akan mempercepat dan mempertepat perbaikan, namun akan menginspirasi segenap pihak untuk bersama-sama berupaya menjadi bagian dari solusi bagi permasalahan pendidikan.

Masyarakat yang hidup dalam kebodohan dan kemiskinan butuh pembuktian komitmen pemerintah dalam membangun masyarakat, bukan sebatas rencana dan wacana. Peran serta masyarakat, baik LSM, perorangan, perusahaan, ormas, maupun media akan membesar seiring dengan besarnya kesungguhan yang ditunjukkan pemerintah dalam implementasi perbaikan pendidikan. Ketika semua pihak ini telah menjalankan peran yang optimal dalam mengusung perbaikan, tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan. Ketika itu terjadi, hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan berkualitas akan terpenuhi, dan mencerdaskan kehidupan bangsa bukan lagi jadi jargon pemanis. Perbaikan itu dimulai dari pendidikan keluarga dan dari pembelajaran di kelas. Gelombang bola salju perbaikan dimulai dari kesadaran dan peran serta masyarakat dalam membantu satu anak yang putus sekolah atau satu kelas yang rusak. Dengan demikian, visi besar pendidikan nasional akan benar-benar terwujud ketika kebijakan dan program pemerintah dilaksanakan dengan tepat penuh kesungguhan.

Tidak perlu menebar janji, karena masyarakat perlu bukti. Semoga kita menjadi komponen bangsa yang konstruktif dalam mengukir senyum di wajah pendidikan Indonesia yang kini murung. []



“Kesigapan dalam mengimplementasikan perbaikan memang bukan hal yang mudah, namun di situlah ujian sebuah komitmen perbaikan. Kelambanan dalam menyikapi berbagai permasalahan pendidikan, bukan hanya akan menumpuk masalah dan menyebabkan ketertinggalan, namun juga mengundang tanda tanya terhadap iktikad baik perbaikan.”



Sumber Acuan

- Adrianto, Aris. 2013. *Empat Tersangka Kasus Korupsi Purbalingga*. <http://www.tempo.co/read/news/2013/05/30/058484629/Empat-Tersangka-Korupsi-Pendidikan-Purbalingga> Diakses pada 17 Juni 2013
- Afifah, Riana. 2012. *Penerima Bidik Misi 2013 Ditargetkan 50.000 Mahasiswa*. <http://edukasi.kompas.com/read/2013/04/11/15142958/Penerima.Bidik.Misi.2013.Ditargetkan.50.000.Mahasiswa> Diakses pada 24 Juni 2013
- ————. 2013. *ICW: Korupsi Pendidikan Rugikan Negara Rp 138,9 M*. Kompas, 4 Januari. Jakarta
- Akuntono, Indra. 2011. *Beginitalah Nasib Pendidikan di Perbatasan*. Kompas, 25 November. Jakarta
- Akuntono, Indra. 2012. *Sekolah Masih Punya Celah Lakukan Pungutan*. Kompas, 28 Juni. Jakarta
- ————. 2012. *BOSM Bakal Pangkas Pungutan dari Sekolah*. Kompas, 24 Agustus. Jakarta
- ————. 2012. *Wajib Belajar 9 Tahun Dinilai Belum Tuntas*. Kompas, 27 Agustus. Jakarta
- ————. 2012. *Capaian Wajib Belajar 9 Tahun Bervariasi*. Kompas, 28 Agustus. Jakarta
- ————. 2012. *Biaya Mahal Picu Angka Putus Sekolah*. Kompas, 16 September. Jakarta



- Alisjahbana, Armida S. 2012. *Rasio Gini di Indonesia dalam Lima Tahun Terakhir*. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
- Al-Jazeera. 2013. *Educating Indonesia; 101 East investigates why Indonesia's education system is one of the worst in the World*. <http://www.aljazeera.com/programmes/101east/2013/02/201321965257154992.html>
- Andayani, Fitria. 2012. *Kurikulum Baru, Siswa SD akan Belajar Lebih Utuh*. <http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/12/12/09/meqvb2-kurikulum-baru-siswa-sd-akan-belajar-lebih-utuh> Diakses pada 29 Juli 2013
- Andri. 2013. *SDN 3 Sukasari Butuh Tambahan 4 RKB*. <http://www.harapanrakyat.com/banjarsari/sdn-3-sukasari-butuh-tambahan-4-rkb/> Diakses pada 8 Mei 2013
- Anwar, Qomari, Dr. H., MA. dan Dr. Syaiful Sagala, M.Pd. 2004. *Profesi Jabatan Kependidikan dan Guru Sebagai Upaya Menjamin Kualitas Pembelajaran*. Jakarta: Uhamka Press
- Aulia, Luki. 2011. *8,3 Juta Penduduk Masih Buta Aksara*. Kompas, 9 September. Jakarta
- Aulia, Luki dan Ester L. Napitupulu. 2013. *Dampak Kenaikan Anggaran Belum Terasa*. Kompas, 25 Mei. Jakarta
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana. 2010. *Modul Ajar Pengintegrasian Pengurangan Risiko Gempa untuk SD*. <http://www.bnpb.go.id/news/read/258/rss>
- Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan kebudayaan. 1979. *Pendidikan di Indonesia dari Jaman ke Jaman*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
- Badan Pusat Statistik RI. 2012. *Susenas 2003-2011; Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Provinsi Tahun 2003-2011*. Jakarta: Badan Pusat Statistik
- ————. 2012. *Susenas 2003-2011; Indeks Pembangunan Manusia Provinsi dan Nasional, 1996-2011*. Jakarta: Badan Pusat Statistik
- ————. 2012. *Susenas 2003-2011; Persentase Penduduk Buta Huruf menurut Kelompok Umur Tahun 2003-2011*. Jakarta: Badan Pusat Statistik



- —————. 2013. *Angka Partisipasi Kasar (A P K) Menurut Provinsi Tahun 2003-2011*. http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?kat=1&tabel=1&daftar=1&id_subyek=28¬ab=6 Diakses pada 4 Juni 2013
- —————. 2013. *Angka Partisipasi Sekolah (A P S) Menurut Provinsi Tahun 2003-2012*. http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?kat=1&tabel=1&daftar=1&id_subyek=28¬ab=3 Diakses pada 4 Juni 2013
- —————. 2013. *Angka Partisipasi Murni (A P M) Menurut Provinsi Tahun 2003-2011*. http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?kat=1&tabel=1&daftar=1&id_subyek=28¬ab=4 Diakses pada 4 Juni 2013
- —————. 2013. *Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Menurut Provinsi, 2007-2009 (Maret), 2010-2011, 2012 (Maret dan September)*. http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?kat=1&tabel=1&daftar=1&id_subyek=23¬ab=1 Diakses pada 4 Juni 2013
- —————. 2013. *Nusa Tenggara Timur dalam angka 2012*. <http://ntt.bps.go.id/> Diakses pada 10 Juli 2013
- —————. 2013. *Persentase Penduduk Buta Huruf menurut Kelompok Umur Tahun 2003-2012*. http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?kat=1&tabel=1&daftar=1&id_subyek=28¬ab=2 Diakses pada 4 Juni 2013
- —————. 2013. *Tabel Indikator Pendidikan 1994-2012*. http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?kat=1&tabel=1&daftar=1&id_subyek=28¬ab=1 Diakses pada 4 Juni 2013
- Cakrawala Berita. 2013. *Kasus Korupsi Dana Pendidikan Gratis Lamban*. <http://cakrawalaberita.com/metro-makassar/kasus-korupsi-dana-pendidikan-gratis-lamban> Diakses pada 17 Juni 2013
- Damanik, Caroline (ed). 2012. *Rata-rata Lama Bersekolah di Indonesia 7,6 Tahun*. <http://edukasi.kompas.com/read/2012/08/04/18080555/Rata-rata.Lama.Bersekolah.di.Indonesia.7.6.Tahun> Diakses pada 18 Juli 2013



- Digdowiseiso, Kumba. 2010. "Measuring Gini Coefficient of Education: The Indonesian Cases", *Munich Personal RePEc Archive 19865*. Munich: Munich University Library
- Dinata, Wisal Mirza, dkk. 2011. *Di Tepi Batas Ku Bangun Negeriku: Jejak Langkah Pendampingan Sekolah di Tanah Rote*. Bogor: Rumah Buku Makmal
- Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI. *Seputar APBN* <http://www.anggaran.depkeu.go.id/dja/edef-seputar-list.asp?apbn=didik> Diakses pada 23 Juni 2013
- Direktorat Tenaga Kependidikan Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional. 2007. *Kepemimpinan Pendidikan Persekolahan yang Efektif*. Jakarta: Modul Pendidikan dan Pelatihan. Bahan didapat dalam bentuk berkas lunak melalui laman <http://gurupembaharu.com/home/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=2660>
- Dryden, Gordon dan Dr. Jeannette Vos. 2000. *Revolusi Cara Belajar (The Learning Revolution)*. Bandung: Kaifa
- Endi, Severianus. 2012. *On Border, Children Prefer to Study in Malaysia*. The Jakarta Post, 22 Februari. Jakarta
- Finesso, Gregorius Magnus. 2013. *Tasripin, Bocah Sekecil Itu Menanggung Beban Keluarga*. Kompas, 17 April. Jakarta
- Gardner, Howard. 2007. *Five Minds for The Future: Lima Jenis Pikiran yang Penting di Masa Depan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Goodenough, Tom. 2013. *Is This The Most Dangerous School Run in The World?* <http://www.thesun.co.uk/sol/homepage/news/4898709/schoolchildren-face-dangerous-trip-to-class-in-indonesia.html>. Diakses pada 8 Mei 2013
- Handini, Dinna. 2013. *BOPTN Diterapkan Tahun Ini*. <http://www.dikti.go.id/?p=8037&lang=id> Diakses pada 3 Juni 2013
- Hasbullah. 2006. *Otonomi Pendidikan: Kebijakan Otonomi Daerah dan Implikasinya terhadap Penyelenggaraan Pendidikan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Husain. 2012. *Desa Terisolir, Ratusan Siswa Terancam Putus Sekolah*. Kompas, 7 Juni. Jakarta



- Irkham, Agus M. 2009. *Tiga Kepusingan Perpustakaan Daerah*. Kompas, 14 Februari. Jakarta
- Jensen, Eric. 2010. *Guru Super dan Super Teaching*. Jakarta: Indeks
- Joniansyah. 2013. *Sekolah Ambruk, 600 Murid SD Gantian Belajar*. <http://www.tempo.co/read/news/2013/01/14/214454289/Sekolah-Ambruk-600-Murid-SD-Gantian-Belajar>. Diakses pada 8 Mei 2013
- Junaedi. 2012. *Ratusan Ruang Kelas Rusak di Madiun dan Batam*” <http://regional.kompas.com/read/2012/01/19/02502392/Ratusan.Ruang.Kelas.Rusak.di.Madiun.dan.Batam> Diakses pada 6 Juni 2013
- ----- . 2012. *Bagi Siswa, Atap Bocor dan Bangku Rubuh Sudah Biasa....* <http://edukasi.kompas.com/read/2012/09/11/17493887/Bagi.Siswa.Atap.Bocor.dan.Bangku.Rubuh.Sudah.Biasa>. Diakses pada 6 Juni 2013
- ----- . 2012. *Berjalan Kaki Berkilo-kilo Meter Demi Bersekolah*. Kompas, 10 Desember. Jakarta
- Jurnal Prisma, Vol. 31, No. 1, 2012, *Kelas Menengah Indonesia: Apa yang Baru?* Jakarta: LP3ES
- Jusuf, Isa Anshar. 2013. *Tak Bayar Uang Komite, Siswa Ujian di Luar Kelas*. <http://www.tempo.co/read/news/2013/03/12/079466480/Tak-Bayar-Uang-Komite-Siswa-Ujian-di-Luar-Kelas>. Diakses pada 8 Mei 2013
- Kadir, Nurdin, dkk. 2011. *Di Tepi Batas Ku Bangun Negeriku: Jejak Langkah Pendampingan Sekolah di Tanah Bengkayang*. Bogor: Rumah Buku Makmal
- Karlimah. 2005. *Penuntasan Perbaikan Gedung Masih Dalam Prediksi*. Isu-isu Pendidikan, Nomor 6, Tahun ke 2, Juni. Jakarta
- Kasman, Thamrin. 2012. *Rehabilitasi Sekolah, Rehabilitasi Masa Depan*. <http://kemdikbud.go.id/kemdikbud/artikel-rehabilitasi-sekolah> Diunduh pada 4 Juni 2013
- Katalog BPS 3101015. 2012. *Perkembangan Beberapa Indikator Utama Sosial-Ekonomi Indonesia Agustus 2012*. Jakarta: Badan Pusat Statistik



- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2012. *Tiga Sasaran Pendidikan Menengah Universal*. <http://www.kemdiknas.go.id/kemdikbud/berita/590> Diakses pada 3 Juni 2013
- Kemi. 2012. *Tahun 2013 Kemdikbud Lanjutkan Program Rehabilitasi Sekolah*. <http://www.kemdiknas.go.id/kemdikbud/berita/961> Diakses pada 8 Mei 2013
- Keswara, Ratih. 2013. *Format TRIMS Diharapkan buat Sekolah Lebih Transparan*. <http://nasional.sindonews.com/read/2013/03/08/15/725437/format-trims-diharapkan-buat-sekolah-lebih-transparan> Diakses pada 3 Juni 2013
- Kewa Ama, Kornelis. 2011. *Mutu Rendah, Pemda NTT Tidak Terganggu*. Kompas, 25 Mei. Jakarta
- Lucas, Bill, Dr. 2008. *Senam Otak Kanan*. Bandung: Penerbit Jabal
- Macbeath, John dan Peter Mortimore (ed.). 2005. *Improving School Effectiveness: Memperbaiki Efektivitas Sekolah*. Jakarta: Grasindo
- Mainstreaming Good Practices in Basic Education (MGP-BE). 2010. *Laporan dan Hasil Lokakarya Program*. <http://www.mgp-be.kemdiknas.go.id/> Diakses pada 26 Juni 2013
- Maradona, Stevy (ed.). 2012. *PR Pemerintah di 2012, Perbaiki 131 Ribu Ruang Kelas*. <http://www.republika.co.id/berita/pendidikan/berita-pendidikan/12/01/02/lx5jo3-pr-pemerintah-di-2012-perbaiki-131-ribu-ruang-kelas> Diakses pada 6 Juni 2013
- Maruli, Aditia (ed.). 2012. *Lama Bersekolah Penduduk Indonesia Masih 7,6 Tahun*. <http://www.antaraneews.com/berita/325578/lama-bersekolah-penduduk-indonesia-masih-76-tahun> Diakses pada 4 Juni 2013
- Maryati (ed.). 2012. *3.055 Anak Suku Terasing di Mamuju Putus Sekolah*. <http://www.antaraneews.com/berita/335490/3055-anak-suku-terasing-di-mamuju-putus-sekolah> Diakses pada 4 Juni 2013
- Menkokesra. 2012. *Dana BOS Rawan Penyelewengan*. <http://www.menkokesra.go.id/content/dana-bos-rawan-penyelewengan> Diakses pada 10 Juni 2013
- Muhammad, Djibril. 2012. *Penggunaan Dana BOS Kali Ini Rawan Manipulasi*. Republika: 18 Oktober. Jakarta



- Nandika, Dodi. 2007. *Pendidikan Indonesia di Tengah Gelombang Perubahan*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia
- Napitupulu, Ester Lince. 2009. *Indonesia Hanya Terbitkan 8.000 Buku*. Kompas, 28 Januari. Jakarta
- ————. 2011. *Komitmen Bangun Sekolah Aman Masih Rendah*. <http://edukasi.kompas.com/read/2011/10/12/16560177/Komitmen.Bangun.Sekolah.Aman.Masih.Rendah> Diakses pada 6 Juni 2013
- ————. 2012. *59.000 Anak TKI di Malaysia Buta Huruf*. Kompas, 6 Agustus. Jakarta
- ————. 2012. *Anak-anak TKI Buta Huruf*. Kompas, 13 September. Jakarta
- ————. 2012. *Pendidikan Tak Merata, Kualitas Masyarakat Tertinggal*. Kompas, 13 September. Jakarta
- ————. 2012. *91 Persen Madrasah Dikelola Swasta*. Kompas, 4 Oktober. Jakarta
- Natha. 2013. *600 Ruang Belajar di Pekanbaru Rusak*. <http://www.pkupos.com/news/view/3305/page:8> Diakses pada 8 Mei 2013
- Nur, Agustiar Syah, Prof. Dr. Drs. H. Ma. 2001. *Perbandingan Sistem Pendidikan 15 Negara*. Bandung: Penerbit Lubuk Agung
- Parkay, Forrest W. dan Beverly Hardcastle Stanford. 2011. *Menjadi Seorang Guru*. Jakarta: Indeks
- Pardini, Agung, dkk. 2012. *Bangunlah Jiwanya, Bangunlah Raganya: Merawat Indonesia dengan Sekolah Cerdas Literasi Jilid 1*, Bogor: Makmal Pendidikan Dompot Dhuafa
- ————. 2012. *Bangunlah Jiwanya, Bangunlah Raganya: Merawat Indonesia dengan Sekolah Cerdas Literasi Jilid 2*, Bogor: Makmal Pendidikan Dompot Dhuafa
- Pikiran Rakyat. 2012. *Puluhan Murid SD Jangkurang Les Belajar di Luar*. 5 November. Bandung
- Pranata, Metta. 2012. *Tips Sukses dari 7 Pengusaha Putus Sekolah*. <http://finance.detik.com/read/2012/07/13/100744/1964377/479/tips-sukses-dari-7-pengusaha-putus-sekolah?991104topnews> Diakses pada 18 Juli 2013



- Purmono, Abdi. 2013. *Lebih Dua Ribu Kelas Sekolah di Malang Rusak*. <http://www.tempo.co/read/news/2013/02/13/058461024/Lebih-Dua-Ribu-Kelas-Sekolah-di-Malang-Rusak> Diakses 8 Mei 2013
- Purnama, R Ratna. 2012. *Ribuan Anak Sekolah Terlantar di Depok*. <http://www.sindonews.com/read/2012/10/30/15/684015/ribuan-anak-sekolah-terlantar-di-depok> Diakses pada 4 Juni 2013
- Purnomo, Kristianto. 2011. *Photo Story; Perjuangan untuk Pendidikan*. Kompas, 23 Mei. Jakarta
- Purwadi, Didi. *364 Sekolah Rawan Ambruk*. <http://www.republika.co.id/berita/regional/jabodetabek/11/05/03/lkm27p-sebanyak-364-sekolah-di-dki-rawan-ambruk>. Diakses pada 8 Mei 2013
- Putra, Aditya Pradana. 2011. *Ada Beberapa Sekolah yang Belum Melakukan MoU Rehabilitasi*. *Republika*, 9 November. Jakarta
- Rachman, Taufik. 2013. *1.778 Bangunan Sekolah di Purbalingga Rusak*. <http://www.republika.co.id/berita/pendidikan/education/13/02/05/mhqv15-1778-bangunan-sekolah-di-purbalingga-rusak> Diakses 8 Mei 2013
- Raka, Mang. 2013. *200 SD di Subang Dalam Kondisi Rusak*. <http://www.radar-karawang.com/2013/01/200-sd-di-subang-dalam-kondisi-rusak.html> Diakses 8 Mei 2013
- Ramadhan, Bilal. 2012. *Masih Buta Aksara, 1,9 Juta Warga di Papua*. *Republika*, 13 September. Jakarta
- Redaksi JPNN. 2011. *2.570 Siswa Terancam Putus Sekolah*. <http://jpnn.com/read/2011/12/13/111107/2.570-Siswa-Terancam-Putus-Sekolah> Diakses pada 10 Juni 2013
- ————. 2011. *DAK 2012 Boleh Dihabiskan untuk Rehab Sekolah*. <http://www.jpnn.com/read/2011/12/18/111586/DAK-2012-Boleh-Dihabiskan-untuk-Rehab-Sekolah-#> Diakses pada 8 Mei 2013
- Redaksi Kompas. 2011. *Ribuan Anak Belum Terjangkau Pendidikan*. Kompas, 23 Mei. Jakarta
- ————. 2011. *NTT Dapat Perhatian Khusus*. Kompas, 17 Juni. Jakarta
- ————. 2011. *Ketertinggalan yang Melelahkan*. Kompas, 2 Desember. Jakarta



- —————. 2012. *Siswa Miskin Tak Bisa Ambil Ijazah*. Kompas, 2 Februari. Jakarta
- —————. 2012. *Terkucil di Pulau Terpencil*. Kompas, 20 Juni. Jakarta
- —————. 2012. *80 Siswa SDN Numpang Belajar di Rumah Susun*. Kompas, 8 November. Jakarta
- Redaksi Pikiran Rakyat. 2013. *13,5 Juta Penduduk Indonesia Masih Buta Huruf*. <http://m.pikiran-rakyat.com/node/224372> Diakses pada 25 Juni 2013
- —————. 2013. *Atap Baja Ringan SDN 1 Bojongmengger Ambruk, Proyek Pengembang yang Sama Diteliti*. <http://www.pikiran-rakyat.com/node/225650> Diakses pada 6 Juni 2013
- Redaksi Radar Bogor. 2011. *SDN Batutulis 04 Ambruk, 545 Ruang Kelas Rawan Roboh*. <http://www.radar-bogor.co.id/index.php?rbi=ramadhan.detail&id=74625> Diakses pada 8 Mei 2013
- —————. 2011. *Ribuan Siswa Putus Sekolah*. Radar Bogor, 19 November. Bogor
- —————. 2011. *2.570 Siswa Terancam Putus Sekolah*. Radar Bogor, 14 Desember. Bogor
- —————. 2012. *Satu Kelas Rame-rame*. Radar Bogor, 10 Januari. Bogor
- —————. 2012. *Angka Putus Sekolah Masih Tinggi*. Radar Bogor, 31 Juli. Bogor
- Redaksi Radar Karawang. 2013. *200 SD di Subang dalam Kondisi Rusak*. <http://www.radar-karawang.com/2013/01/200-sd-di-subang-dalam-kondisi-rusak.html> Diakses pada 8 Mei 2013
- Redaksi Republika. 2011. *Ribuan Siswa Putus Sekolah*. Republika, 1 Maret. Jakarta
- —————. 2011. *Ratusan Sekolah Rusak Berat*. Republika, 7 Maret. Jakarta
- —————. 2011. *Rehabilitasi Sekolah Akan Diawasi*. Republika, 9 November. Jakarta
- —————. 2012. *Tak Hanya Cukup APBD*. Republika, 2 Januari. Jakarta



- ————. 2012. *Puluhan SD di Tangsel Rusak*. Republika, 27 Februari. Jakarta
- Redaksi Suara Merdeka. 2013. *Penerima Bantuan Siswa Miskin Ditambah*. Suara Merdeka, 31 Mei. Semarang
- Redaksi Sumut Pos. 2012. Ribuan Anak Indonesia Putus Sekolah. <http://www.hariansumutpos.com/2012/12/48679/ribuan-anak-indonesia-putus-sekolah> Diakses pada 27 Juni 2013
- Rejeki, Sri dan Luki Aulia. 2012. *Pengawasan BOS Kurang Libatkan Masyarakat*. Kompas, 10 Oktober. Jakarta
- Republik Indonesia. 2003. *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78. Jakarta: Sekretariat Negara
- Ridarineni, Neni. 2013. *Ada Diskriminasi Pembiayaan di Sekolah Umum dan Madrasah*. Republika, 6 Januari. Jakarta
- Ruslan Burhani (ed.). 2012. *Presiden: Anggaran Pendidikan 2013 Direncanakan Rp 331,8 triliun*. <http://www.antaraneews.com/berita/328083/presiden-anggaran-pendidikan-2013-direncanakan-rp3318-triliun>. Diakses pada 4 Juni 2013
- Samantha, Gloria. 2012. *Wujudkan Sekolah Aman Bencana*. <http://nationalgeographic.co.id/berita/2012/05/wujudkan-sekolah-aman-bencana> Diakses pada 6 Juni 2013
- Saputri, Dessy Suciati. 2012. *Belum Bayar Uang Sekolah, Murid Dilarang Masuk*. Republika, 2 Agustus. Jakarta
- Sayfullah, Zayd, dkk. 2013. *Sekolah Ramah Hijau: Cara Kreatif dan Murah Merawat Bumi di Sekolah*. Bogor: Makmal Pendidikan Dompot Dhuafa
- Silberman, Mel. 1996. *Active Learning: 101 Strategies to Teach Any Subject*. Jakarta: Yappendis
- Sinaga, Andree. 2012. *Income, a Perilously Widening Gap*. The Jakarta Post, 5 Juni. Jakarta
- Suryadi, Ace, dan Dasim Budimansyah. 2004. *Pendidikan Nasional Menuju Masyarakat Indonesia Baru*. Bandung: PT Genesindo



- Syafaruddin dan Anzizhan. 2006. *Sistem Pengambilan Keputusan Pendidikan*. Jakarta: Grasindo
- The World Bank. 2013. “Belanja lebih banyak atau Belanja lebih baik: Memperbaiki Pembiayaan Pendidikan di Indonesia.” *Laporan Naskah Kebijakan*. Jakarta: The World Bank
- Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. *Program Bantuan Siswa Miskin (BSM)*. <http://tnp2k.go.id/tanya-jawab/klaster-i/program-bantuan-siswa-miskin-bsm/> Diakses pada 17 Juni 2013
- Timothy, Nicolas. 2012. *4,7 Siswa SD-SMP Terancam Putus Sekolah*. <http://tribunnews.com/2012/01/17/47-juta-siswa-sd-smp-terancam-putus-sekolah> Diakses pada 10 Juni 2013
- Udiutomo, Purwo. 2011. *Carut Marut Pendidikan, Kemana Saja Pemerintah?*<http://purwoudiutomo.com/2011/08/23/carut-marut-pendidikan-kemana-saja-pemerintah/> Diakses pada 6 Mei 2013
- ————. 2011. *Kebijakan Revitalisasi Pendidikan di Beranda Indonesia, Efektifkah?* <http://purwoudiutomo.com/2011/09/13/efektivitaskebijakan-revitalisasi-pendidikan-beranda/> Diakses pada 6 Mei 2013
- ————. 2013. *Karena RSBI Hanyalah Label*. <http://purwoudiutomo.com/2013/01/29/karena-rsbi-hanyalah-label/> Diakses pada 6 Mei 2013
- ————. 2013. *Outlook Pendidikan Nasional 2013*. <http://purwoudiutomo.com/2013/01/15/outlook-pendidikan-nasional-2013/> Diakses pada 6 Mei 2013
- UNICEF Indonesia. 2012. *Kembali ke sekolah di Polman!* http://www.unicef.org/indonesia/id/reallives_18705.html Diakses pada 18 Juli 2013
- USAID. 2013. *Decentralized Basic Education (DBE)*. http://www.prioritaspendidikan.org/id/pages/view/read/decentralized_basic_education Diakses pada 26 Juni 2013
- Wahyudi, M. Zaid. 2011. *Kusutnya Pendidikan di Papua*. Kompas, 15 Juni. Jakarta



- Wedhaswary, Inggried Dwi (ed.). 2012. *2.000 Mahasiswa PTS Akan Dapat Bidik Misi*. <http://edukasi.kompas.com/read/2012/03/14/09515941/> Diakses pada 24 Juni 2013
- Winanto, Mundri. 2012. *2,3 Juta Anak Menjadi Pekerja Di bawah Umur*. Kompas, 20 Juni. Jakarta
- Winarsih, Ita Nina. 2012. *Ups... Dana BOS di Karawang Dipotong untuk Lebaran*. Republika, 7 Agustus. Jakarta
- Yuwanto, Endro . 2010. *Rawan Penyelewengan, Format Dana BOS Harus Diubah*. Republika, 7 Desember. Jakarta
- Yuwanto, Endro. 2010. *Mendiknas: Baru 193 Sekolah Terapkan Pendidikan Berbasis Karakter*. <http://www.republika.co.id/berita/pendidikan/berita/10/10/13/139667-mendiknas-baru-193-sekolah-terapkan-pendidikan-berbasis-karakter> Diakses pada 29 Juli 2013
- Zubaidah, Neneng. 2012. *Daerah Wajib Buat Standar Biaya Pendidikan*. <http://nasional.sindonews.com/read/2012/11/07/15/686456/daerah-wajib-buat-standar-biaya-pendidikan>





Apendiks



Makmal Pendidikan Criteria for School Performances

Makmal Pendidikan Criteria for School Performances (MPC4SP), yang menjadi acuan dalam penelitian yang hasilnya terangkum dalam Bagian Kedua buku ini, adalah kriteria untuk mengukur pengembangan kapasitas institusi sekolah khusus untuk jenjang sekolah dasar atau SD. Kriteria MPC4SP disusun berdasarkan kajian teoretis dan pengalaman lapangan tentang konsep pengembangan sekolah dasar yang dilakukan oleh Makmal Pendidikan Dompot Dhuafa. Kriteria tersebut juga disusun secara selaras dengan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan nasional.

Kriteria MPC4SP ini disusun dari dua perspektif pengembangan kapasitas institusi sekolah, yakni kualitas pembelajaran dan efektivitas manajemen. Dari dua perspektif ini kemudian dikembangkan menjadi enam kriteria yakni budaya sekolah, kepemimpinan organisasi, perencanaan strategis, pengembangan kurikulum, kompetensi literasi, dan strategi pembelajaran. Enam Kriteria tersebut dikembangkan lagi menjadi 18 Indikator dengan pembobotan penilaian yang proporsional menurut teori dan uji pengalaman lapangan.

Kriteria budaya sekolah menekankan pada nilai-nilai dan pembiasaan yang telah dikembangkan di sekolah. Di antara hal pokok yang diobservasi dalam kriteria ini adalah pada aspek kebersihan sekolah dan kedisiplinan. Tim penilai akan melihat secara langsung bagaimana kebersihan dan proses kedisiplinan tersebut bisa terkelola dengan baik. Cara pengelolaan kebersihan sekolah serta kedisiplinan adalah bukti penanaman nilai-nilai karakter untuk seluruh siswa dan juga warga sekolah.



Pada kriteria kepemimpinan organisasi, kinerja kepala sekolah menjadi aspek penilaian yang paling banyak disoroti dalam MPC4SP. Selain itu, disurvei juga tentang peranan dan hubungan keikutsertaan komite sekolah dalam program-program pengembangan yang dijalankan di sekolah. Pada kriteria perencanaan strategis, ditelusuri program-program kerja yang dilakukan oleh sekolah dalam mengejar visi dan misi. Bukti akhir yang bisa dipenuhi dalam mengukur efektivitas perencanaan strategis ini adalah dengan berhasil dikembangkannya model keunggulan yang dijadikan sebagai bentuk dari kekhasan sebuah sekolah.

Kriteria pembelajaran berbasis literasi, strategi pembelajaran yang efektif, dan implementasi kurikulum dikembangkan dari perspektif kualitas pembelajaran. Untuk kriteria pembelajaran literasi dinilai dari tiga indikator, yaitu budaya kronik guru, model ceruk ilmu, dan *display* ruang kelas. Ketiga hal tersebut dilihat berdasarkan kebiasaan dan pembiasaan baca-tulis yang muncul dalam proses pembelajaran di kelas.

Untuk penilaian terhadap strategi pembelajaran yang efektif, ditilik dari tiga indikator, yaitu pelaksanaan manajemen kelas, PAIKEM (Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan), dan model pembelajaran tematik. Kriteria berikutnya, yaitu implementasi kurikulum, dinilai dari penerapan penilaian otentik berbasis kelas, pembuatan silabus, serta efektivitas Rencana Pelaksanaan Pembelajaran.

Proses penilaian MPC4SP ini dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama adalah dengan melakukan pengambilan data lapangan, dan tahap kedua adalah proses perhitungan. Pada tahap pertama, pengambilan data lapangan dilakukan dengan tiga cara, yakni melakukan observasi kelas/sekolah, wawancara, serta telusur dokumen. Bila data telah terisi lengkap, secara otomatis akan segera didapat hasil pengukuran yang bisa menunjukkan tingkat performa sekolah dasar tersebut. Tim penilai (*assessor*) lapangan MPC4SP adalah personal atau lembaga yang telah mendapatkan sertifikasi dari Makmal Pendidikan. Sedangkan proses perhitungan hasil pengukuran hanya bisa dilakukan oleh Makmal Pendidikan Dompot Dhuafa. []



Kesimpulan dan Rekomendasi

Diskusi Produktif

“Menghapus Kesenjangan Pendidikan”



-
- Waktu : Senin, 20 Mei 2013 pukul 14.00 – 17.00
- Tempat : Hall Dewan Pers, Jl. Kebon Sirih No. 34 Jakarta Pusat
- Peserta : 50 orang, terdiri dari
- Tokoh dan pakar pendidikan
 - Institusi pendidikan
 - Media massa
 - NGO pendidikan
 - Guru
-

Kesimpulan dan Rekomendasi

Kesimpulan

1. Program peningkatan kualitas pendidikan yang sementara ini sudah dilakukan oleh pemerintah, secara umum patut kita apresiasi.



2. Dengan banyaknya referensi yang kita lihat, pada kenyataannya banyak terjadi kesenjangan antara visi misi kebijakan pemerintah dengan capaiannya yang masih rendah terkait peningkatan kualitas guru dan elemen pendidikan. Hal tersebut lebih mirip seperti *jigsaw* atau potongan teka-teki yang tidak jelas harus bagaimana disusun dan apa bentuknya.
3. Hal tersebut terjadi karena program yang dijalankan pemerintah bersifat mekanis dan massal, tidak bisa diterapkan di lapangan.
4. Oleh karena itu, untuk memperpendek panjang dan memperbaiki rantai birokrasi program pendidikan dari pemerintah, kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan harus melibatkan seluruh elemen masyarakat. Juga harus ada desain yang memungkinkan untuk menyisipkan semua hal terkait pendidikan, walaupun kecil, dalam keseharian.
5. Inisiatif kalangan swasta yang sudah dilakukan selama ini dalam meningkatkan kualitas pendidikan walaupun hanya seakan sekerup kecil, tapi sebenarnya itu menjadi terobosan yang sangat menginspirasi bagi pemerintah.
6. Berbagai data ditemukan di lapangan setelah bergeraknya masyarakat baik secara pribadi maupun membentuk kelompok (NGO), antara lain: belum adanya implementasi yang tuntas dari setiap kebijakan pemerintah, permasalahan guru dan berbagai elemen pendidikan lainnya, kesalahan dalam proses rekrutmen, dan kurangnya pembekalan tenaga pendidik.

Rekomendasi

1. Kerja sama antara NGO dan pemerintah untuk mendata ketimpangan yang ada, lalu mencatat apa yang sebenarnya menjadi tujuan kita bersama dalam hal pendidikan di negara yang besar ini.
2. Untuk menanggulangi kesenjangan antara perkembangan pendidikan dengan teknologi, perlu diadakannya pelatihan guru dan perangkat pendidikan terkait hal penggunaan teknologi.
3. Menyelaraskan visi pendidikan dengan visi pembangunan negara.



Profil

Makmal Pendidikan Dompot Dhuafa

Alamat : Bumi Pengembangan Insani, Jl. Raya Parung Bogor KM. 42
Ds. Jampang Kec. Kemang Kab. Bogor Jawa Barat 16310
Telp. (0251) 8610817, 8610818, 8612044 ekst. 12 Fax. (0251)
8615016

Alamat Situs : www.makmalpendidikan.net

Alamat Twitter : @MakmalDD

Facebook : Makmal Pendidikan

Kontak Kantor : ▪ Mobile : 0812 8834 3101

▪ PIN Blackberry : 2A3A5CA9

Gambaran Umum Program

Makmal Pendidikan adalah sebuah laboratorium pendidikan yang berusaha menjawab kebutuhan terhadap pengembangan mutu dan peningkatan kualitas pendidikan.

1. Laboratorium Pengembangan Mutu Pendidikan

Laboratorium Pengembangan Mutu Pendidikan (LPMP) merupakan departemen di bawah jejaring Makmal Pendidikan Dompot Dhuafa yang berfokus pada pengolahan data dan informasi pendidikan, menyelenggarakan penelitian dan pengembangan pendidikan serta menyediakan berbagai sumber belajar untuk mengembangkan mutu pendidikan. Departemen ini membawahkan dua divisi, yaitu Pusat Penelitian dan Data Pendidikan, dan Pusat Sumber Belajar.



a. Pusat Penelitian dan Data Pendidikan

Pusat Penelitian dan Data Pendidikan menyelenggarakan berbagai diskusi dan penelitian seputar dunia pendidikan serta menyediakan berbagai data dan informasi pendidikan. Selain menghasilkan media publikasi berupa Jurnal Pendidikan Dompot Dhuafa dan jurnal elektronik (*e-journal*) per semester, Kumpulan Artikel dan Karya Jurnalistik Pendidikan per caturwulan, serta Kantor Berita Pendidikan, Pusat Penelitian dan Data Pendidikan juga memfasilitasi pelatihan dan konsultasi terkait penelitian pendidikan.

b. Pusat Sumber Belajar

Pusat Sumber Belajar (PSB) didesain untuk mengelola semua sumber yang dapat digunakan dalam belajar, baik dalam bentuk cetak maupun audio visual, termasuk menginisiasi program dan gerakan yang dapat mengoptimalkan pembelajaran. PSB juga menyelenggarakan program pendidikan Klaster Mandiri, program pendampingan perpustakaan dan perpustakaan komunitas, memproduksi dan mengembangkan berbagai media pembelajaran, serta mengadakan berbagai pelatihan ke-pustakaan, literasi, dan media pembelajaran.

2. Peningkatan Kualitas Pendidikan

Peningkatan Kualitas Pendidikan merupakan departemen di bawah Jejaring Makmal Pendidikan Dompot Dhuafa yang berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan. Departemen ini membawahkan dua divisi, yaitu Pendampingan Sekolah, dan Sekolah Laboratorium.

a. Pendampingan Sekolah

Program ini diperuntukkan untuk sekolah yang berada di seluruh pelosok negeri dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas manajemen sekolah dan pembelajaran. Program ini dilaksanakan selama 1-3 tahun.

b. Sekolah Laboratorium

Program ini didesain untuk memberikan wewenang melakukan pengelolaan sekolah secara utuh dan menyeluruh. Penge-



lolaan dibuat dalam rangka mengembangkan model atau inovasi dalam lingkup manajemen sekolah dan pembelajaran pada satu satuan pendidikan atau lebih dalam jangka waktu tertentu.

Jangkauan dan Jumlah Penerima Manfaat

Penerima manfaat program pendampingan Makmal Pendidikan sejak 2010 sampai 2012 sebanyak 38 Sekolah Pendampingan, 8 Sekolah Pendampingan Pelatihan Klaster, 4 Sekolah Pendampingan Perpustakaan, 7 Sekolah Literasi Aplikatif, 2 Wilayah Perpustakaan Komunitas, dan 2 Wilayah Pendampingan Klaster Mandiri. Periode penerima manfaat untuk sekolah pendampingan yaitu sekitar 1-3 tahun, sedangkan pelatihan klaster dan pendampingan perpustakaan selama 6 bulan.

Sebaran area sekolah pendampingan menjangkau 22 provinsi yaitu Kepulauan Bangka Belitung (1 sekolah), Bengkulu (1 sekolah), DI Yogyakarta (1 sekolah), Jawa Barat (10 sekolah, 2 Wilayah Perpustakaan Komunitas), Banten (3 sekolah), Jawa Timur (8 sekolah dan 2 Wilayah Pendampingan Klaster Mandiri), Jambi (1 sekolah), Kalimantan Barat (1 sekolah), Kalimantan Selatan (3 sekolah), Kalimantan Tengah (1 sekolah), Kalimantan Timur (4 sekolah), Kepulauan Riau (1 sekolah), Lampung (1 sekolah), Maluku (1 sekolah), Nusa Tenggara Barat (1 sekolah), Nusa Tenggara Timur (1 sekolah), Papua (3 sekolah), Papua Barat (1 sekolah), Sulawesi Selatan (3 sekolah), Sulawesi Utara (1 sekolah), Sumatera Barat (9 sekolah), dan Sumatera Utara (1 sekolah).

Penerima manfaat program pelatihan guru Makmal Pendidikan sejak 2004 sampai 2012 sebanyak 12.835 orang guru yang tersebar di 22 provinsi, yaitu Aceh, Bali, Banten, Bengkulu, DI Yogyakarta, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, Maluku, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua, Papua Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. []



Profil Penulis Buku

PURWO UDIUTOMO. Sarjana Teknik Industri dari Universitas Indonesia ini pernah menjadi Manajer Program Beasudi Etos, instruktur di puluhan institusi pendidikan, guru bantu di sebuah SMA di Jakarta, manajer cabang bimbingan belajar, hingga relawan tsunami Aceh dan gempa Sumatera Barat. Bergabung di Dompot Dhuafa pada 2008 sebagai peneliti di Circle of Information & Development (CID). Berbagai penelitian yang dilakukannya sudah dipublikasikan di *Jurnal Pemikiran dan Gagasan: Zakat and Empowering IMZ* dan *Jurnal Pendidikan Dompot Dhuafa*. Sekarang menjabat Manajer Laboratorium Pengembangan Mutu Pendidikan di Makmal Pendidikan Dompot Dhuafa.

RINA FATIMAH. Mengawali karier di bidang pendidikan sebagai seorang guru di daerah Depok, Jawa Barat. Hatinya terpanggil untuk mendirikan sekolah darurat di Nanggroe Aceh Darussalam pasca-tsunami tahun 2004. Pada 2008, selepas pulang dari Aceh, ia bergabung ke Makmal Pendidikan sebagai *trainer* dengan kekhususan materi di bidang kreativitas menata ruang kelas. Sekarang menjabat sebagai Direktur Makmal Pendidikan Dompot Dhuafa.

AGUNG PARDINI. Cerita masa lalu adalah kecintaannya sejak kecil. Inilah yang mengantarnya menjadi seorang guru Sejarah di daerah Cibinong, Bogor. Menjadi *trainer* di Makmal Pendidikan sejak 2008. Sekarang menjadi Manajer Pengembangan Kualitas Pendidikan di Makmal Pendidikan Dompot Dhuafa. Tugas pokoknya bertanggung jawab mengembangkan sekolah dasar laboratorium Makmal Pendidikan Dompot Dhuafa.

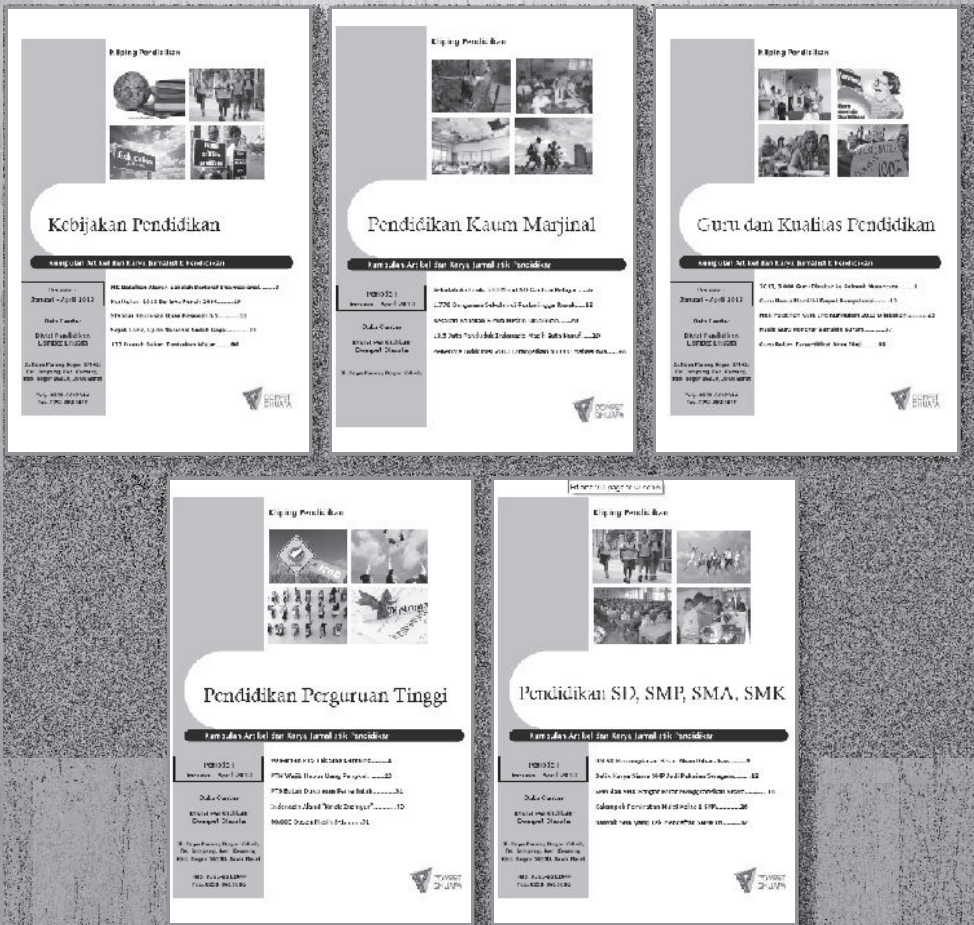


DEWI PUSPITASARI. Sarjana Ilmu Komputer dari Institut Pertanian Bogor ini bekerja sebagai staf Data Pendidikan dan mengelola situs Kantor Berita Pendidikan di Makmal Pendidikan Dompot Dhuafa, selain juga menganalisis berita-berita pendidikan di lembaga yang sama. Kantor Berita Pendidikan merupakan situs penyedia informasi dunia pendidikan yang bisa diakses dan diunduh publik secara gratis.

SELY AGUSTINA. Sarjana Teknologi Industri Pertanian dari Institut Pertanian Bogor ini pernah bekerja sebagai *technical representative* di perusahaan terigu terkemuka di tanah air. Pernah menjadi pengusaha dan pendidik sebelum akhirnya bergabung di Data Center Divisi Pendidikan Dompot Dhuafa pada Agustus 2010. Spesialisasinya adalah Manajemen Arsip, Data Internal dan Eksternal seluruh Divisi Pendidikan Dompot Dhuafa.



Butuh Kliping Berita-berita Pendidikan?



Silakan *download* Kliping Pendidikan di situs kami:
www.kantorberitapendidikan.net

Ingin Up Date Seputar Penelitian Pendidikan?



Harga: Rp. 25.000,-

**Jurnal Pendidikan Dompét Dhuafa
terbit setiap Mei dan November.**

Untuk pemesanan, silakan hubungi:
Markom Makmal Pendidikan 0812.8834.3101 (atas nama Angger)
atau e-mail ke marcomm@makmalpendidikan.net

DIBUTUHKAN SEGERA: PENELITI BIDANG PENDIDIKAN

Punya ketertarikan di bidang Pendidikan?

Punya ketertarikan di bidang riset?

Ingin mengasah potensi terkait riset?

Mari bergabung menjadi peneliti bidang pendidikan bersama
ERA MAKMAL PENDIDIKAN DOMPET DHUAFA.

:: Apa itu ERA?

ERA (*Educational Researcher Associate*) dibentuk sebagai wadah bagi para peneliti bidang pendidikan untuk berkomunikasi, berinteraksi, dan memublikasikan kegiatan, pemikiran dan temuan penelitian, serta kegiatan lainnya. ERA diharapkan mampu menghasilkan peneliti-peneliti yang mempunyai ketertarikan terhadap dunia pendidikan, berwawasan masa depan, dan berkarakter mulia. Era memunculkan ide-ide kreatif dan kegiatan-kegiatan yang akan bermanfaat untuk pengembangan pendidikan Indonesia. Ide-ide kreatif yang dimunculkan dapat berupa gagasan-gagasan maupun hasil penelitian yang terkait dengan pendidikan yang dapat dijadikan sebagai rekomendasi bagi dunia pendidikan Indonesia.

:: Siapa saja yang bisa menjadi anggota ERA?

Makmal Pendidikan Dompot Dhuafa mengajak siapa pun untuk bergabung bersama ERA untuk pendidikan Indonesia yang lebih baik. Keanggotaan ERA meliputi peneliti/calon peneliti pendidikan yang berasal dari kalangan dosen, guru, praktisi, siswa/mahasiswa, serta masyarakat umum yang mempunyai ketertarikan dalam dunia riset dan pendidikan.

:: Apa saja kegiatan ERA?

1. Pelatihan metode penelitian pendidikan;
2. Pelatihan analisis data (kualitatif dan kuantitatif);
3. Pelatihan analisis kebijakan pendidikan;
4. Pelatihan penulisan karya ilmiah;

5. Kerja sama nasional dan internasional dalam menggarap proyek-proyek penelitian pendidikan;
6. Simposium nasional penelitian pendidikan;
7. Penerbitan jurnal dan buletin pendidikan;
8. Pengelolaan situs dan/atau media-sosial ERA;
9. Statistik Centre.

:: Apa manfaat ERA?

1. Pusat penyebaran informasi tentang isu-isu aktual pendidikan;
2. Sarana efektif penyebaran dan pertukaran informasi penelitian pendidikan;
3. Sarana kerja sama kegiatan penelitian pendidikan;
4. Sarana peningkatan kemampuan meneliti;
5. Sarana peningkatan kemampuan analisis kebijakan;
6. Forum penelitian kebijakan pendidikan.

Anda tertarik untuk bergabung?

Info lebih lanjut silakan hubungi:

- Pedri Haryadi 0856133545
- Yulya Srinovita 085284922152
- E-mail: riset@makmalpendidikan.net

Buku *Besar Janji daripada Bukti* mengajak kita mencermati secara kritis kondisi pendidikan Indonesia yang di banyak titiknya masih redup. Buku ini perlu dibaca oleh pembuat kebijakan, pelaksana dan pemerhati pendidikan Indonesia!”

Marwah Daud Ibrahim, Ph.D. (Ketua Presidium ICMI; Pendiri MHMMMD Training Center)

“Ada dua hal yang menjadikan buku ini layak dirujuk oleh pelaku pendidikan, pembuat kebijakan, peneliti, dan pengamat pendidikan. Pertama, buku ini menyajikan data akurat dan lengkap dengan rujukan dari berbagai sumber. Kedua, data tersebut disertai analisis yang cermat dan memberikan inspirasi bagi pembacanya.”

Itje Chodidjah, M.A. (International Teacher Trainer and Education Consultant)

“Buku ini dapat membuka 'jendela' pikiran kita mengenai masalah dan tantangan sekolah-sekolah di Indonesia yang sebenarnya. Buku ini enak dibaca karena mengemukakan fakta tanpa menggurui.”

Totok Amin Soefijanto, Ed.D. (Peneliti, Akademisi, Deputi Rektor Universitas Paramadina Jakarta)

“Hadirnya buku *Besar Janji daripada Bukti* semoga dapat memberikan pencerahan kepada pembaca tentang sisi makro dan mikro, serta kebijakan dan praktik pendidikan di Indonesia.”

Wijaya Kusumah (Pendidik, dan Penulis *Menjadi Guru Tangguh Berhati*)



ISBN: 978-602-7807-18-1



9 786027 807181



**DOMPET
DHUAFa**
MAKMAL PENDIDIKAN

